RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN TOBA

TAHUN 2021-2026

DAFTAR ISI

Halaman Judul .
Daftar Isi .....
Daftar Tabel .....
Daftar Gambar .....
BAB I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang .....
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....
1.3 Hubungan antar Dokumen .....
1.4 Maksud dan Tujuan.....
1.5 Sistematika Penulisan .....
BAB II Gambaran Umum Daerah
2.1 Aspek Geografi dan Demografi .....
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....
2.1.2. Wilayah Rawan Bencana .....
2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah .....
2.1.4. Kondisi Demografi .....
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan EkonomiAspek Pelayanan Umum.....
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial .....
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga .....
2.3 Aspek Pelayanan Umum .....
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.....
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan .....
2.3.4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
2.4 Aspek Daya Saing .....
2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah .....
2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....
2.4.3. Iklim Berinvestasi .....
2.4.4. Sumber Daya Manusia .....
BAB III Gambaran Pengellolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan ....
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu .....
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBDKinerja Pelaksanaan APBD .....
3.1.2. Neraca Daerah .....
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan .....
3.2.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah .....
3.2.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah .....

3.2.3. Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah .....
3.3 Kerangka Pendanaan .....
3.3.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah .....
3.3.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah .....
3.3.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah .....
BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis .....
4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Toba Samosir .....
4.2 Isu Strategis .....
4.2.1 Isu Iternasional .....
4.2.2 Isu Nasional .....
4.2.3 Isu Strategis Propinsi .....
4.2.4 Penetapan Isu strategis .....
BAB V Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran .....
5.1. Visi .....
5.2. Misi .....
5.3. Tujuan dan sasaran .....
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Daerah .....
6.1 Strategi .....
6.2 Arah Kebijakan .....
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah .....
BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAB IX Penutup .....
9.1 Pedoman transisi .....
9.2 Kaidah Pelaksanaan .....

SALINAN

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Toba;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5)

22. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Tahun 2006 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor Tahun 2009 Nomor Seri E Nomor 3)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA
dan
BUPATI TOBA

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan pakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toba.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

7. Lembaga Teknis Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Toba yang berbentuk Badan, Kantor, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah.
8. Dinas adalah Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba.
10. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Toba.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2021-2026.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba.

BAB II
SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 2

RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dengan mendasarkan pada arah pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai :

a. Pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Strategis PD; dan
b. Pedoman Pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Pasal 4

RPJMD sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), merupakan dokumen perencanaan bagi Pemerintah Daerah untuk Tahun 2021-2026, yang terdiri dari:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	:	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ;
BAB IV	:	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
BAB V	:	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	:	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII	:	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.
BAB VIII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IX	:	PENUTUP

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam RKPD, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.
(2) Rencana Kerja (Renja) PD yang telah disempurnakan oleh Kepala Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD.
(3) Timbulnya nomenklatur program yang belum terakomodir dalam lampiran sebagaimana termuat dalam Pasal 4 di atas dapat dilakukan pada setiap penyusunan RKPD sepanjang untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD terhadap:
a. evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. pelaksanaan Pembangunan Daerah;
c. hasil Rencana Pembangunan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dapat dipergunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD pada saat terjadi periodisasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
(2) Rumusan Rencana Program/Kegiatan yang terdapat di dalam RKPD 2022 yang disertai dengan target indikator kinerja dan pagu indikatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 16 September 2021

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
pada tanggal 16 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUDI MURPHY O SITORUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3-118/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN TOBA,

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
PEMBINA
19750804 200502 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah/daerah dan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, serta melalui 5 (lima) pendekatan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik atas bawah (*top-down)* dan bawah atas *(bottom-up)*.

Dokumen perencanaan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi dokumen Perencanaan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan (RKP). Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Seiring dengan berakhirnya masa bhakti Bupati dan Wakil Bupati Toba pada tahun 2016 dan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Toba yang baru, dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan dan aturan pelaksanaannya, maka paska pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Pemerintah Kabupaten Toba berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026.

Perda RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 pada dasarnya merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi. Selain itu penyusunan Perda RPJMD tersebut dilakukan melalui berbagai tahapan analisis data dan informasi hasil pembangunan, perumusan permasalahan dan isu strategis, perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta penetapan indikator daerah.

Untuk selanjutnya, Perda RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2022 sampai dengan 2026.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA PROPVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3-118/2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa pembangunan Daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengamanatkan bahwa Daerah diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Oleh karenanya, penetapan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021 - 2026 sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan sebagai bagian dari pelaksanaan tahap kelima pembangunan jangka menengah pada periode RPJPD Kabupaten Toba Tahun 2006-2026 perlu dilakukan.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Oleh karenanya RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan Visi, Misi dan Agenda Kepala Daerah terpilih kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan

pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Kepala daerah Kabupaten Toba terpilih ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-359 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten Kota pada Propinsi Sumatera Utara. Surat kepetusan tersebut menetapkan Ir. Poltak Sitorus, M.Sc sebagai Bupati Toba dan Tonny M. Simanjuntak, SE sebagai Wakil Bupati Toba terhitung sejak tanggal pelantikan 24 Februari 2021.

Dokumen RPJMD nantinya disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top Down Planning. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan RPJMD yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah di tingkat kabupaten/kota sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah selanjutnya digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD

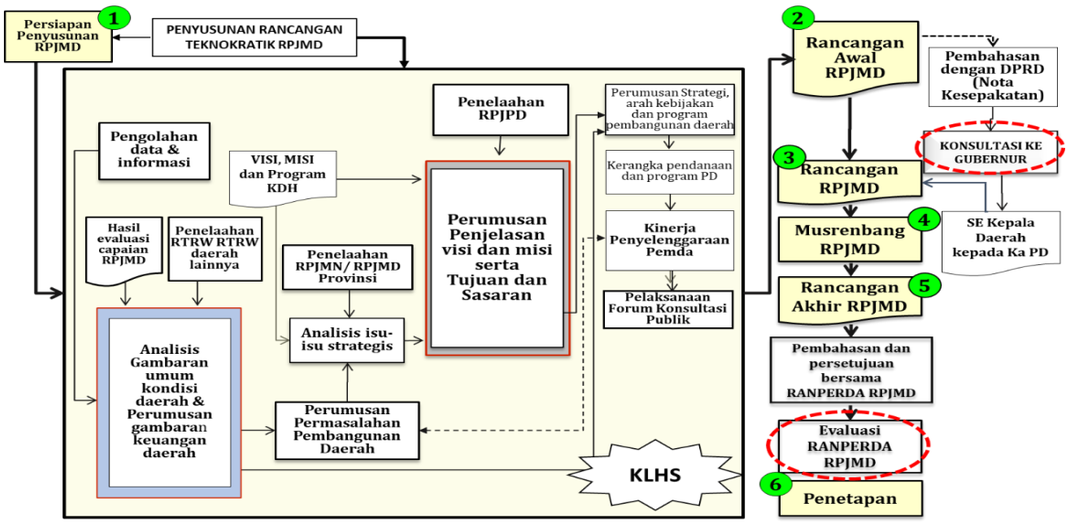

Gambar 0-1 Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26

Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);

13 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);

21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verivikasi dan validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

23 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

24 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5)

25 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor Tahun 2009 Nomor Seri E Nomor 3)

26 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);

1.3 Hubungan Antar Dokumen.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 mempunyai hubungan dan konsistensi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan pasal 5 Udang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Untuk menjaga keselarasan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, penyusunan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Toba Tahun 2006-2026 dan mengacu pada RPJMD Propinsi Sumatera Utara serta RPJM Nasional Tahun 2020- 2024 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten Toba serta dokumen lainnya yang relevan diantaranya RPJMD daerah lain yang berbatasan, RTRW Nasional, RTRW Propinsi Sumatera Utara, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, KLHS RPJMD, dan Rencana Pembangunan Sektoral lainnya.

1.3.1 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Toba dengan RPJMN Tahun 2020 - 2024.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 berpedoman kepada RPJMN, dalam perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program diselaraskan dengan prioritas pembangunan RPJMN 2020 - 2024 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Visi Pembangunan Nasional adalah **: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".**

Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi

1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia:
2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Tabel 0-1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024.

RPJMN 2019-2024	RPJMD Tahun 2021-2026
Misi 1 **Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia:**	Misi 2 Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal
	Misi4 Kesehatan yang Prima dan Terjangkau
Misi 2 **Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;**	**Misi 3** Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera
	Misi 5 Pariwisata Berkat dan Meriah
Misi 3 **Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;**	**Misi 1** Infrastruktur yang Bagus dan Merata
Misi4 **Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;**	**Misi 1** Infrastruktur yang Bagus dan Merata
Misi 5 **Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;**	**Misi 6** Membangun Iman yang terpelihara

RPJMN 2019-2024	RPJMD Tahun 2021-2026
Misi 6 **Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;**	**Misi 7** Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
Misi 7 **Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;**	**Misi 7** Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
Misi 8 **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;**	**Misi 7** Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
Misi 9 **Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.**	**Misi 7** Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

1.3.2 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Toba dengan RPJMD Propinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu **"Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat".** Dalam pencapaian Visi tersebut ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 yaitu

1) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan;
2) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik;
3) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan;
4) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan;
5) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan.

Keberhasilan dari setiap misi ditunjukkan oleh indikator kinerja sasaran dengan target terukur. Dalam rangka pencapaian visi – misi maka ditetapkan tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1) Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan, dengan sasaran : (a) Meningkatnya kerukunan antar umat beragama (b) Meningkatnya ketersediaan sandang pangan (c)Meningkatnya rumah yang layak (d) Meningkatnya kesehatan yang prima (e) Meningkatnya mata pencaharian yang menyenangkan (f) Meningkatnya keterjangkauan harga (g) Meningkatnya konektifitas infrastruktur;
2) Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik, dengan sasaran: (a) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (b) Meningkatnya politik yang beretika (c) Meningkatnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan;

3) Terwujudnya kualitas pendidikan masyarakat, dengan sasaran : Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri;
4) Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan, dengan sasaran : (a) Menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan (b) Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan;
5) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, dengan sasaran: (a) Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan (b) Meningkatnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.

Tabel 0-2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Propinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

RPJMD PROPINSI SUMUT Tahun 2019-2023	RPJMD KABUPATEN TOBA Tahun 2021-2026
Misi 1 **Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan;**	**Misi 2** Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal
	Misi 6 Membangun Iman yang terpelihara
	Misi 1 Infrastruktur yang Bagus dan Merata
	Misi 3 Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera
Misi 2 **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik;**	**Misi 7** Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
Misi 3 **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan;**	**Misi 2** Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal
Misi 4 **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan;**	**Misi 2** Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal
	Misi 6 Membangun Iman yang terpelihara
	Misi 7 Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
Misi 5 **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan.**	**Misi 1** Infrastruktur yang Bagus dan Merata
	Misi 5 Pariwisata Berkat dan Meriah

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Toba dengan RTRW Kab.Toba.

RTRW bertujuan mengoptimalkan pemanfataan Ruang Wilayah yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RTRW Kabupaten Toba menjabarkan Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang. Strategi terkait dengan pengembangan sektor unggulan, Strategi pemnatapan fungsi kawasan

lindung, strategi pemantapan infrastruktur wilayah, strategi pengembangan kawasan budaya, strategi peningkatan kawasan. RPJMD kabupaten Toba berpedoman kepada RTRW Kabupaten Toba oleh karena itu sasaran RPJMD seharusnya selaras dengan sasaran RTRW, keselarasan keduannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 0-3 Keselarasan Sasaran RPJMD Kabupaten Toba 2021-2026 dengan Sasaran RTRW Kabupaten Toba 2017-2037

NO	SASARAN RTRW	SASARAN RPJMD
1	Pemantapan fungsi dan optimalisasi pengembangan Kabupaten Toba Samosir sebagai bagian dari Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi serta Kawasan Andalan dan optimalisasi pengembangan kawasan strategis Kabupaten;	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar. • Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak • Meningkatnya kualitas konektivitas. • Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan • Meningkatnya kesempatan kerja • Meningkatnya kunjungan wisata
2	Pengembangan sektor unggulan Kabupaten Toba Samosir;	• Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan • Meningkatnya kesempatan kerja • Meningkatnya kunjungan wisata
3	Pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan;	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar.
4	Pemantapan infrastruktur wilayah dan pemerataan pelayanan sosial, ekonomi dan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang terintegrasi satu sama lain;	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar. • Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan
5	Pengembangan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar. • Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan.
6	Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.	

1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Toba dengan KLHS RPJMD Kabupaten Toba.

KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD secara kaidah perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah mencakup pertimbangan rekomendasi isu strategis, permasalahan, dan sasaran hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dengan maksud agar penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan Daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan Nasional.

Tabel 0-4
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 dengan KLHS Kabupaten Toba

ISSU STRATEGIS KLHS	MISI PEMBANGUNAN RPJMD Tahun 2021-2026
Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan	**Misi4** Kesehatan yang Prima dan Terjangkau
Peningkatan infrastruktur daerah	**Misi 1** Infrastruktur yang Bagus dan Merata
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Perluasan Kesempatan Kerja	**Misi 2** Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal
Penyediaan Sumber Air Bersih dan Sanitasi yang Layak	**Misi 1** Infrastruktur yang Bagus dan Merata
Peningkatan Ketahanan Pangan	**Misi 3** Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera
Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis daya dukung dan daya tampung	**Misi 1** Infrastruktur yang Bagus dan Merata
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Penanggulangan Bencana	**Misi 1** Infrastruktur yang Bagus dan Merata
	Misi 7 Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

1.3.5 Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Toba.

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD penjabaran dari tahap keempat RPJPD Kabupaten Toba Tahun 2006-2026 dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang daerah adalah TOBA SAMOSIR YANG MAKMUR, ADIL, DAMAI,

UNGGUL, MANDIRI DAN ASRI, dimana dalam tahap ini, sasaran pokok untuk perencanaan pembangunan periode keempat untuk perencanaan Tahun 2021 – 2026 terutama memantapkan pencapaian prioritas pembangunan daerah, terutama:

1. Pembangunan Ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dalam sumber daya alam dan sumber daya manusia.
2. Pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan yang diarahkan pada terciptanya peningkaan pendapatan perkapita dan konsumsi rumah tangga.
3. Pelayanan umum yang berkualitas, transparan dan akuntabel, efisien dan efektif.

Tabel 0-5
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Toba Tahun 2006-2026

Misi RPJMD Tahun 2021-2026	Misi RPJPD Tahun 2006-2026
Misi 1 Infrastruktur yang Bagus dan Merata	**Misi 5** Menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan
Misi 2 Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal	**Misi 2** Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah kabupaten toba samosir untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance dan kepemerintahan yang bersih (clean gocernance)
Misi 3 Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera	**Misi 3** Menggali dan memanfaatkan potensi kabupaten toba samosir untuk kesejahteraan masyarakat.
	Misi4 Mendorong investasi swasta untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk mencapai kemakmuran rakyat.
Misi4 Kesehatan yang Prima dan Terjangkau	**Misi 2** Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah kabupaten toba samosir untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance dan kepemerintahan yang bersih (clean gocernance)
Misi 5 Pariwisata Berkat dan Meriah	**Misi 3** Menggali dan memanfaatkan potensi kabupaten toba samosir untuk kesejahteraan masyarakat.
	Misi 4 Mendorong investasi swasta untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk mencapai kemakmuran rakyat.
Misi 6 Membangun Iman yang terpelihara	**Misi 1** Menciptakan kondisi kondusif dengan upaya pelaksanaan penegakan hukum yang pasti.
Misi 7 Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	**Misi 1** Menciptakan kondisi kondusif dengan upaya pelaksanaan penegakan hukum yang asti.

1.3.6 Hubungan Antara RPJMD dengan RKPD Kabupaten Toba.

RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPD juga berpedoman pada RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. RKPD berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.3.7 Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Renstra PD sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada Pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Gambaran singkat keterkaitan antara dokumen RPJMD Kabupaten Toba dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:

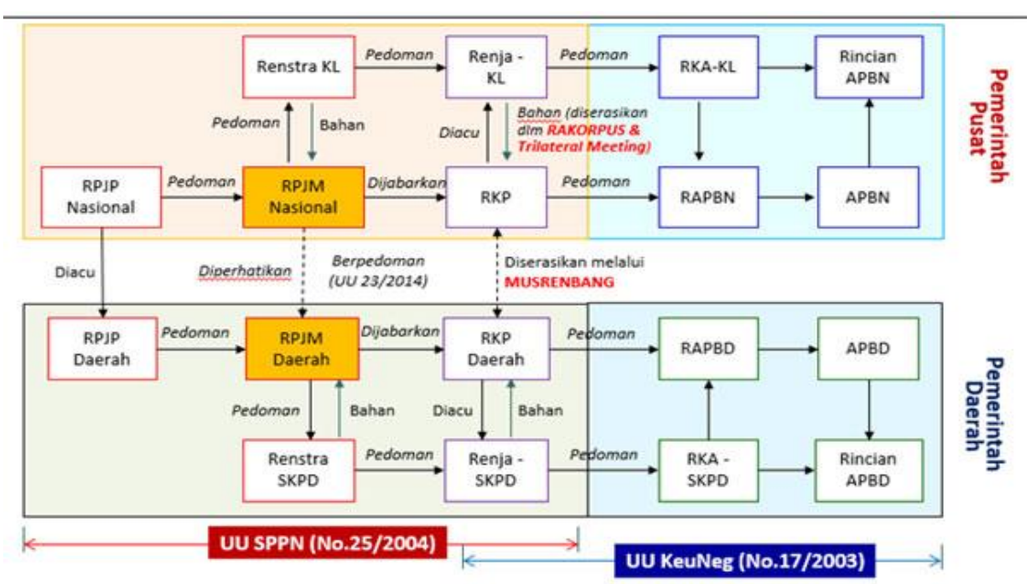

Gambar 0-2 Sistem Perencanaan Pembangunan

1.3.8 Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain RAD Sustainable Development Goals (SDG's), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan juga dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 adalah memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan yang holistik-tematik, integrative dan berbasis spasial.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah.
2. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal.
3. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten 5 (lima) tahun kedepan.
4. Merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan.
5. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta target untuk Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

1.4.3 Sistematika Penulisan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021 - 2026 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dan dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan RPJMD.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi tentang gambaran kondisi daerah pada aspek geografis dan demografis, aspek pelayanan umum, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah.

Bab III : Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini berisi tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan daerah.

Bab IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab ini berisi tentang permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Bab V : Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

Bab ini menjelaskan dan menguraikan visi dan misi pemerintah sebagai landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah pada periode tahun 2021-2026.

Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah.

Bab ini menjelaskan dan menguraikan arah kebijakan pemerintah daerah di masa mendatang berdasarkan kesesuaian antara strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, serta menyajikan penjelasan mengenai hubungan antara sasaran pokok daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan.

Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah.

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menguraikan hasil analisis terhadap kinerja daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sehingga dapat diperoleh gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah (Indikator Kinerja Utama) dan indikator

penyelenggaraan pemerintahan daerah (Indikator Kinerja Kunci) pada akhir periode masa jabatan.

Bab IX : Penutup

Bab ini menyampaikan secara singkat harapan yang hendak dicapai dari dokumen RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021 - 2026 yang telah disusun dan ditetapkan.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. 1 Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Toba Samosir dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal. Peresmian pemekaran tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 1999. Pada saat dibentuk Kabupaten Toba Samosir terdiri dari 13 kecamatan dan 4 perwakilan kecamatan, 281 desa serta 19 kelurahan dan pada tahun 2002, 4 (empat) perwakilan kecamatan ditetapkan menjadi kecamatan definitif sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2002, yaitu: Kecamatan Ajibata, Pintu Pohan Meranti, Uluan dan Ronggur Nihuta. Pada tahun yang sama yaitu tahun 2002 Kecamatan Borbor juga dibentuk berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2002.

Pada tahun 2003 Kabupaten Toba Samosir dimekarkan menjadi Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir berdasarkan undang-undang Nomor 36 Tahun 2003. Dan setelah dimekarkan Kabupaten Toba Samosir terdiri dari 10 kecamatan. Pada Tahun 2005 Kecamatan Sigumpar dibentuk dan merupakan pemekaran dari Kecamatan Silaen dengan Perda Nomor 6 Tahun 2005. Tahun 2006 terbentuk lagi 3 kecamatan baru yaitu Kecamatan Tampahan, Kecamatan Nassau dan Kecamatan Siantar Narumonda berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2006. Tahun 2008 Kecamatan Bonatua Lunasi dan Kecamatan Parmaksian terbentuk dengan perda Nomor 5 Tahun 2008, sehingga sampai saat ini Kabupaten Toba terdiri dari 16 Kecamatan yang terdiri dari 231 desa dan 13 Kelurahan. Pada tanggal 3 Maret 2020, Kabupaten Toba Samosir berganti nama menjadi Kabupaten Toba dan secara resmi disahkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Sumatra Utara.

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. **Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

   Secara geografis, Kabupaten Toba berada pada posisi 2° 03′ - 2° 40′ Lintang Utara dan 98° 56′-99^o40′ Bujur Timur, dengan luas wilayah 202.180 Ha. Kabupaten Toba, berbatasan dengan 5 (lima) kabupaten yaitu:

Utara	:	Kabupaten Simalungun
Timur	:	Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Asahan
Selatan	:	Kabupaten Tapanuli Utara
Barat	:	Kabupaten Samosir

Letak wilayah Kabupaten Toba secara administratif dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar II-1 Peta Administrasi Kabupaten Toba

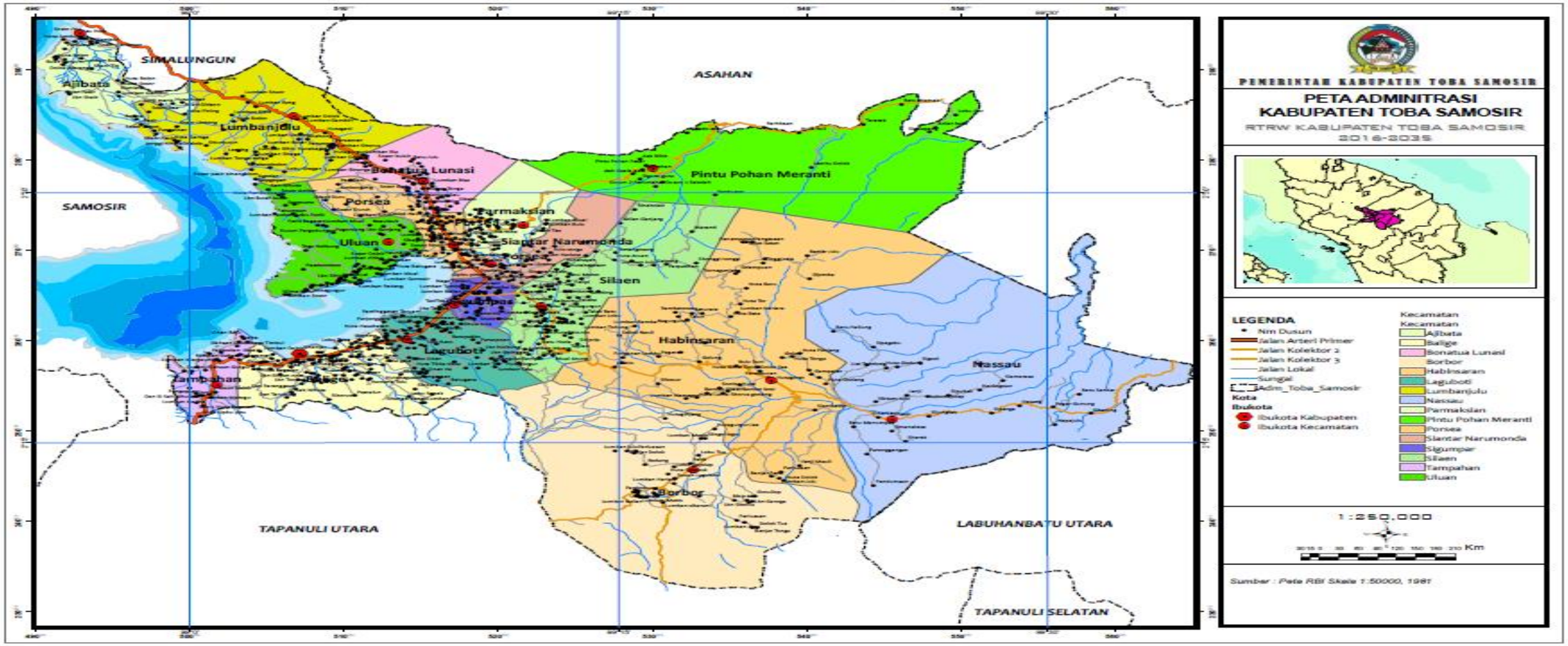

Sumber: Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang RTRW Kabupaten Toba Tahun 2017-2037

2. **Topografi**

a. Kemiringan Lahan

Kabupaten Toba terletak pada wilayah dataran tinggi, dengan ketinggian antara 800 - 2.200 meter di atas permukaan laut, dengan topografi secara umum terdiri dari daerah bergelombang dan berbukit yang diselingi oleh dataran yang relatif rata serta berbatasan langsung dengan Danau Toba. Kondisi kelerengan atau topografi wilayah Kabupaten Toba sangat variatif, yaitu datar (0–8%), berombak (8-15%), bergelombang (15-25%), curam (25-40%), dan Terjal/ bergunung (>40%), untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel II-1 Kondisi Kelerengan Lahan Kabupaten Toba

Kecamatan	Luas Lereng (Ha)				
	Datar (D)	**Berombak (BK)**	**Bergelombang (BG)**	**Curam (C)**	**Terjal (T)**
	0-8%	**8-15%**	**15-25%**	**25-40%**	**>40%**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Balige	6,125.95	2,494.74			-
Tampahan	2,287.69			472.85	-
Laguboti	5,660.21	694.65			-
Habinsaran	13,720.30	11,565.55	5,939.97	285.26	-
Borbor	368.00	15,201.63	18,577.11	3,907.23	-
Nassau	2,211.80	14,203.99	12,738.67	648.82	-
Silaen	6,084.53	459.12			-
Sigumpar	2,237.44				-
Porsea (*masih termasuk Parmaksian dan Bonatua Lunasi*)	6,614.47			512.47	-
Pintu P. Meranti	17,199.40	6,873.08	2,259.92	12,160.07	-
Siantar Narumonda	3,460.68			20.06	-
Lumban Julu	7,452.46			11,795.64	-
Uluan	5,252.68			1,036.66	-
Ajibata	2,252.07			4,826.82	-
Jumlah	**80,927.69**	**51,492.76**	**39,515.67**	**35,665.90**	-

Sumber : *Toba Dalam Angka, 2021*

Gambar II-2 Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Toba

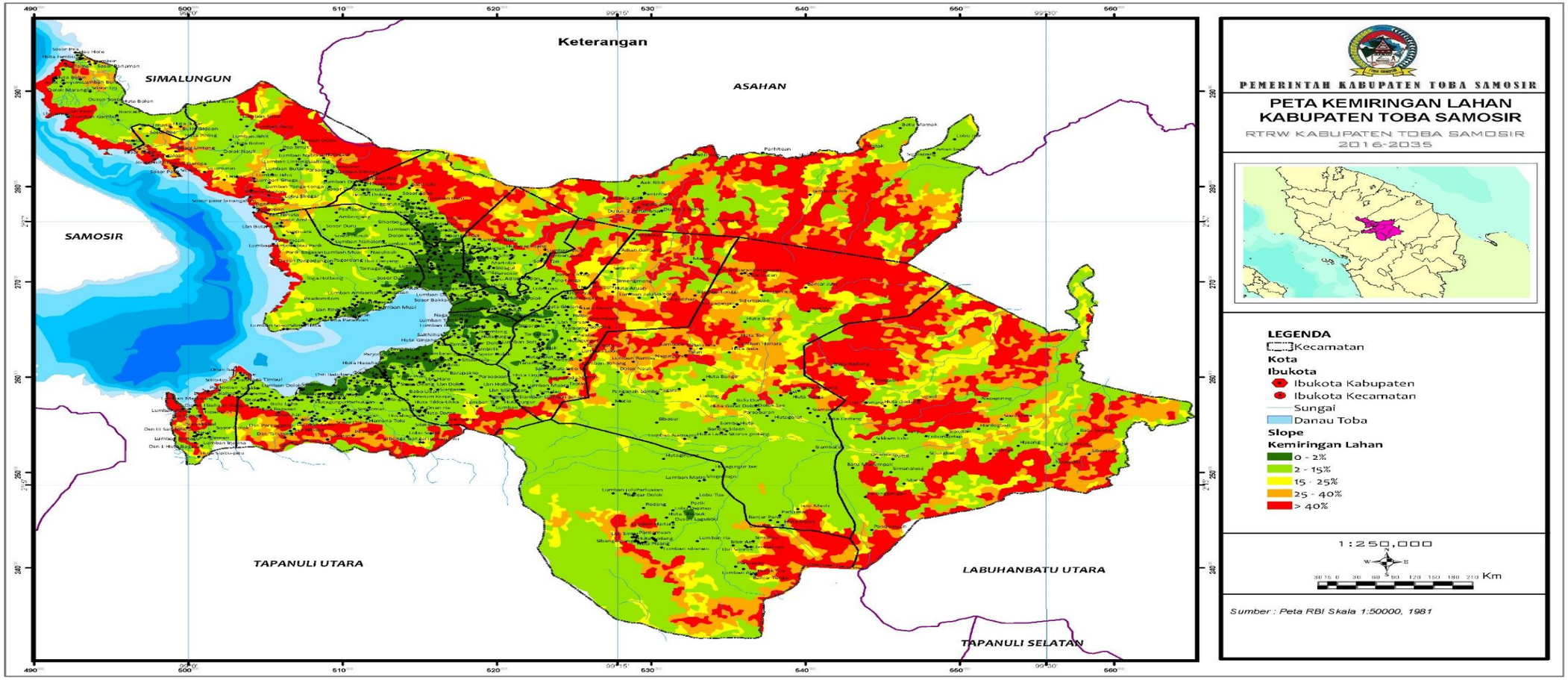

Sumber: Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang RTRW Kabupaten Toba Tahun 2017-2037

b. Ketinggian Lahan

Kabupaten Toba berada di Dataran Tinggi Bukit Barisan dengan ketinggian 900-2.200 meter diatas permukaan laut, dengan topografi secara umum terdiri dari daerah bergelombang dan berbukit yang diselingi oleh dataran yang relatif rata serta berbatasan langsung dengan Danau Toba.

3. **Geologi**

Kondisi struktur geologi di Kabupaten Toba terdiri dari 2 (dua) alluvium, 7 (tujuh) formasi, 1 (satu) kelompok dan 1 (satu) tufa. Variasi tersebut antara lain: alluvium muda, formasi bohorok, formasi gunung api, formasi kuala, formasi puetu, formasi samosir, formasi sihapas, formasi telisa dan tufa toba. Jenis tanah secara umum di Kabupaten Toba terdiri dari komposisi tanah yang didominasi tanah tufa toba, pasir bercampur tanah liat, kapur dan sebagian lainnya yang terdiri dari lapisan tanah yang relatif kurang subur untuk pertanian. Berikut ini adalah gambar struktur geologi Kabupaten Toba:

Gambar II-3 Peta Geologi Kabupaten Toba

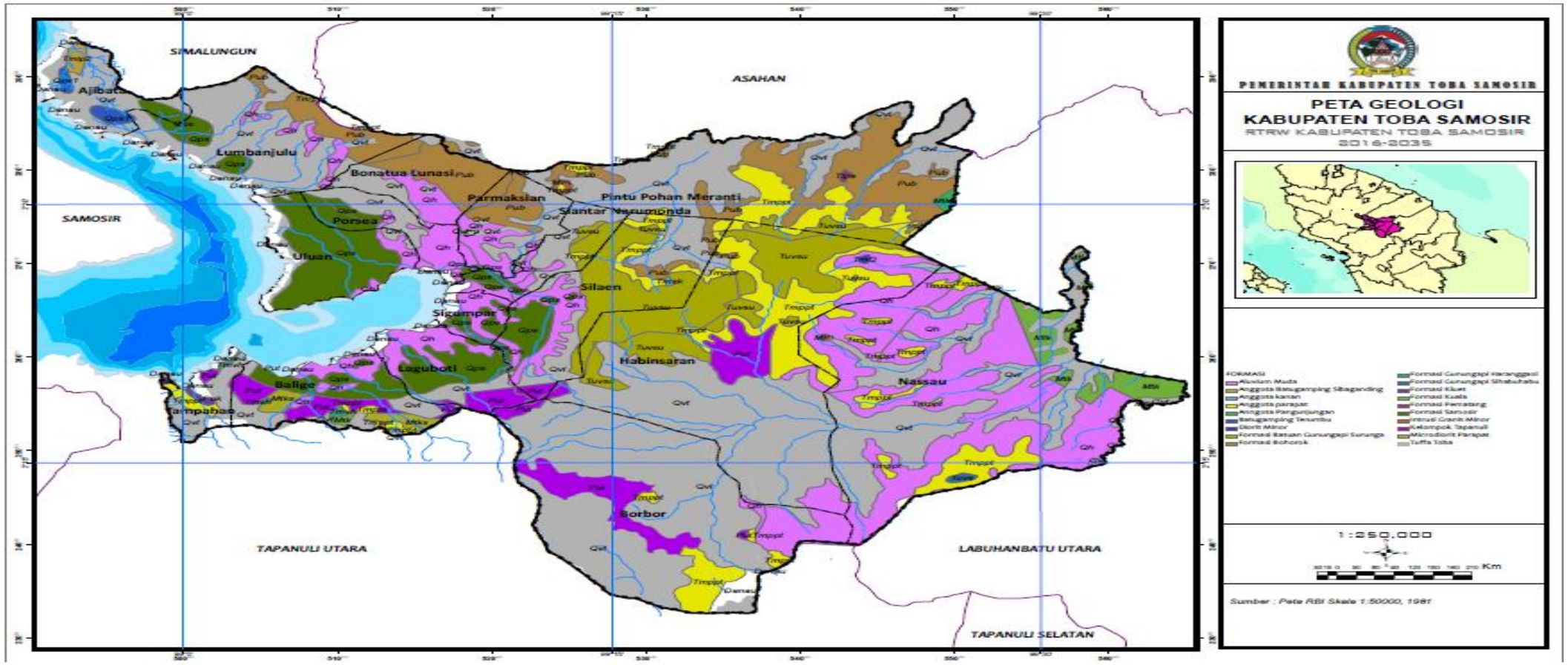

Sumber: Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang RTRW Kabupaten Toba Tahun 2017-2037.

4. Hidrologi

Kabupaten Toba merupakan wilayah yang terdiri dari pegunungan dan memiliki potensi sumber daya air dengan keberadaan air permukaan seperti Danau Toba, sungai dan mata air, yang cukup banyak tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Toba.

a. Danau

Danau Toba memiliki luas permukaan perairan sebesar 110.260 Ha, dengan luas Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba lebih kurang 369.854 Ha, yang terdiri dari 190.314 Ha daratan di pulau Sumatera (keliling luar danau), 69.280 Ha daratan pulau Samosir (di tengah danau).

b. Sungai

Sungai-sungai yang terdapat di DTA Danau Toba dan mengalirkan airnya dari DTA ini ke dalam Danau Toba terdiri dari 19 sungai yaitu: S. Sigubang, Bah Bolon, Sungai Guloan, S. Arun, S. Tomok, S. Pulau Kecil, S. Halian, S. Simare, S. Aek Bolon, S. Mandosi, S. Gopgopan, Bah Tongguran, S. Mongu, S. Kijang, S. Sinabung, S. Ringo, S. Prembakan, S. Sipultakhuda dan S. Silang. Sedangkan satu-satunya sungai yang merupakan pelepasan air dari Danau Toba menuju laut adalah Sungai Asahan yang mengalir dan bermuara di Pantai Timur Sumatera Utara. Air yang mengalir ke Sungai Asahan ini dimanfaatkan sebagai sumber daya energi listrik. Kabupaten Toba merupakan salah satu wilayah yang menjadi Daerah Tangkapan Air Danau Toba yang memliki 8 Sub DTA Danau Toba, Seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel II-2 Sub DTA di wilayah Kabupaten Toba

No.	Sub DTA	Letak Geografis	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Bolon	$2^0$49' LU $99^0$25' BT	Borbor	983,60
			Laguboti	3.550,00
			Porsea	595,60
			Siantar Narumonda	2.071,60
			Sigumpar	2.965,20
			Silaen	4.167,90
Total				**14.333,90**
2	Gopgopan	$2^0$63' LU $99^0$07' BT	Lumban Julu	5.881,90
			Porsea	418,80
			Uluan	1.350,20
Total				**7.650,90**
3	Halian	$2^0$35' LU $99^0$17' BT	Balige	10.882,90
			Laguboti	820,60
			Tampahan	299,30
Total				**12.002,80**
4	Mandosi	$2^0$57' LU $99^0$21' BT	Lumban Julu	6.054,30
			Porsea	7.811,40
			Siantar Narumonda	460,40
			Uluan	6.649,30
			-	717,80
Total				**21.693,20**

No.	Sub DTA	Letak Geografis	Kecamatan	Luas (Ha)
5	Naborsahon	$2^0$75' LU $99^0$04' BT	Ajibata	3.340,60
			Lumban Julu	14,60
Total				**3.355,20**
6	Simare	$2^0$39' LU $99^0$21' BT	Balige	381,90
			Borbor	736,40
			Laguboti	8.646,00
Total				**9.764,30**
7	Sitobu	$2^0$36' LU $99^0$04' BT	Balige	86,60
			Tampahan	3.952,90
Total				**4.039,50**
8	Tongguran	$2^0$60' LU $99^0$4' BT	Ajibata	2.241,60
			Lumban Julu	5.589,40
Total				**7.831,00**

Sumber: SIPD

c. Daerah Aliran Sungai

Kabupaten Toba meliputi 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai yaitu DAS Toba-Asahan, DAS Kualuh dan DAS Bilah yang diuraikan tabel dibawa h ini :

Tabel II-3 Nama DAS dan Sungai di Kabupaten Toba

DAS ASAHAN TOBA	DAS KUALUH	DAS BILAH
Aek Tongguran	Aek Simalapak	Aek Simampur
Aek Siponot	Aek Sibue	Aek Bilah
Aek Bolon	Aek Siattaladan	Aek rimau
Aek Mardubur	Aek Sigala-gala	
Aek Sitabo	Aek Paung	
Aek Sitobu	Aek Simanggala	
Aek Silimbat	Aek Rau	
Aek Simangatasi	Aek Sihuranjar	
Aek Siampapaga	Aek Hurangan	
Aek Siitang	Aek Gonting	
Aek Sitakkola	Aek Sipagu	
Aek Sihoruhoru	Aek Rimau	
Aek Mardugu	Aek Daodao	
Aek Galagala	Aek Simorot	
Aek Siharompur	Aek Sagar	
Aek Siarsikarsik	Aek Sibaning	
Aek Situmurun	Aek Sibaruan	
Aek Naurihon	Aek Parsoluman	
Sungai Asahan	Aek Lubuk Siursa	
Aek Salak	Aek Siantuni	
Aek Simantorop	Aek Kualu	
Aek Halian	Aek Bulu Siamun	
Aek Simare	Aek Natinggir	
Aek Serasera	Aek Sigalapang	
Aek Naborsahon	Aek Bolon	

DAS ASAHAN TOBA	DAS KUALUH	DAS BILAH
Aek Sigilang	Aek Simbakko	
Aek Sijumbang	Aek Paseruan	
Aek gopgopan	Aek Agong	
Aek Natio	Aek Ihan	
Aek Sitagilan	Aek Bulu	
Aek Lumbabi	Aek Sitagilan	
Aek Siubanuban	Aek Bantangit	
Aek Kuais	Aek Bintatar	
Aek Jambudolok	Aek Napa	
Aek Bang	Aek Maritongge	
Aek Gopgopan	Aek Andoi	
Aek Nalela	Aek Longgas	
Aek Mandosi	Aek Nabara	
Aek Bulangan	Aek Melo	
Aek Antalbung	Aek Kualuh	
Aek Baruara	Aek Kuala	
Aek Nabara	Aek Pulojaba	
	Aek Bulu Siamun	
	Aek Bontar	

Sumber : *SIPD*

Gambar II-4 Peta DAS Kabupaten Toba

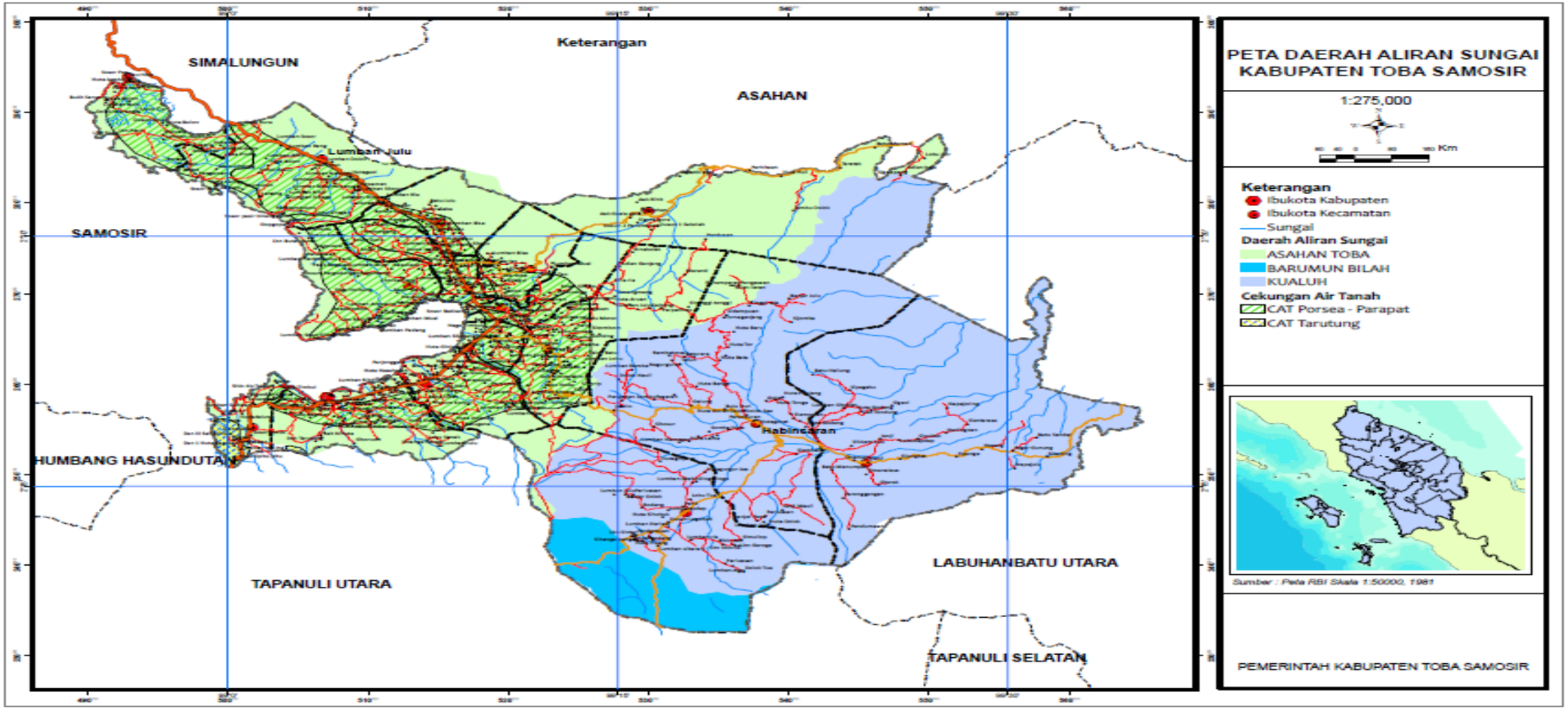

Sumber: Perda Nomor 12 Tahun 2017 RTRW Kabupaten Toba Tahun 2016-2036

d. Daerah Irigasi

Berdasarkan kondisi topografinya, di Kabupaten Toba banyak terdapat potensi pengembangan Daerah Irigasi untuk persawahan. Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Toba meliputi sebanyak 79 D.I dengan luas total areal 14.068 Ha sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status daerah irigasiDaerah irigasi yang ada di kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-4 Daerah Irigasi Kewenangan Propinsi di Kabupaten Toba

No.	Nama Daerah Irigasi	Lintas Kabupaten (Ha)	Utuh Kabupaten (Ha)
1	D.I. Hinalang	205	-
2	D.I. Meat	62	-
3	D.I. Sijambur	62	-
4	D.I. Simangatasi II	-	1.515,00
5	D.I. Aek Mandosi I	-	1.060,00

Tabel II-5
Luas dan Sebaran Daerah Irigasi di Kabupaten Toba

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)
1	D. I. Aek Jangga	400,0
2	D. I. Aek Mandosi II	905,0
3	D. I. Aek Mandosi III	724,0
4	D. I. Aek Mandosi IV	311,0
5	D. I. Aek Nabara	467,0
6	D. I. Aek Salak	151,0
7	D. I. Aek Simare	430,0
8	D. I. Bahal Pinang	400,0
9	D. I. Bendar Juda	300,0
10	D. I. Bendar Sijambe	150,0
11	D. I. Bulu Duri	350,0
12	D. I. Bulu Laga	70,0
13	D. I. Dolok Jior	285,0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)
14	D. I. Lagundi	90,0
15	D. I. Lumban Gaol	119,0
16	D. I. Lumban Huala	100,0
17	D. I. Lumban Julu	108,0
18	D. I. Lumban Lobu	176,0
19	D. I. Lumban Rang	250,0
20	D. I. Lumban Ria-Ria	148,0
21	D.I. Paindoan	141,0
22	D. I. Sianipar	100,0
23	D. I. Sibaruang	56,0
24	D. I. Sibong-bong	200,0
25	D. I. Sidulang	580,0
26	D. I. Sihail-hail	500,0
27	D.I. Silam Banua	910,0
28	D. I. Simanampang	81,0
29	D. I. Siamanampang/Simatipung	57,0
30	D. I. Simangatasi I	485,0
31	D. I. Simarintop	150,0
32	D. I. Sirandos Simanobak	600,0
33	D. I. Sisera-sera	100,0
34	D. I. Sisuhar-suhar	600,0
35	D. I. Song-Song Batu	90,0
36	D. I. Waduk Motung	100,0
37	D. I. Bendar Tabu	50,0
38	D. I. Bor-Bor	50,0
39	D. I. Gala-Gala Pangkailan	50,0
40	D. I. Lobu Hole	500,0
41	D. I. Losung Batu	50,0
42	D. I. Lumban Gala-Gala	50,0
43	D. I. Lumban Gorat	39,0
44	D. I. Sibitara	45,0
45	D. I. Sigaol	50,0
46	D. I. Aek Bolon	300,0
47	D. I. Nalela	300,0
48	D. I. Lumban Pinasa	150,0
49	D. I. Aek Bolon	75,0
50	D. I. Siantar Tonga-Tonga	75,0
51	D. I. Raut Bosi	100,0
52	D. I. Natolu Tali	55,0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)
53	D. I. Siring-Ringo	80,0
54	D. I. Sidoras	70,0
55	D. I.Bondar Sitobu	65,0
56	D. I. Parik	60,0
57	D. I. Meranti Barat	50,0
58	D. I. Sionggang	37,0
59	D. I. Sihiong	75,0
60	D. I. Atehe	45,0
61	D. I. Silamosik	40,0
62	D. I. Sibide Parpatihan	50,0
63	D. I. Situhulon	60,0
64	D. I. Simalau	55,0
65	D. I. Tali Air Harangan	50,0
66	D. I. Jonggi Manulus	43,0
67	D. I. Huta Gurgur	100,0
68	D. I. Pea-pea Hutaginjang	50,0
69	D. I. Pintu Pohan	45,0
70	D. I. Sinar Sabungan	50,0
71	D. I. Pantil	50,0
72	D. I. Sipange	35,0
73	D. I. Sidogor-Dogor	50,0
74	D. I. Hitetano	25,0
75	D. I. Lumban Pea	40,0
76	D. I. Sigodang Tua	50,0
77	D. I. Sidari	40,0
78	D. I. Sibosur	75,0
79	D. I. Sibodiala	55,0
	Jumlah	14.068,0

5. Klimatologi

Sesuai dengan letaknya yang berada di garis khatulistiwa, Kabupaten Toba tergolong ke dalam daerah beriklim tropis basah dengan suhu berkisar antara 17°C - 29°C dan rata-rata kelembaban udara 85,04 %. Karena terletak dekat garis khatulistiwa, Kabupaten Toba tergolong ke dalam daerah beriklim tropis. Sebagaimana kabupaten lainnya di Indonesia, Kabupaten Toba mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember,

diantara kedua musim itu terdapat musim pancaroba. Rata-rata tinggi curah hujan per bulan yang terjadi di Kabupaten dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-6 Rata rata Curah Hujan dan Hari Hujan Tiap Bulan Kabupaten Toba Tahun 2020

No.	Bulan	Curah Hujan (mm^3)	Hari Hujan (Hari)
1	Januari	65	3
2	Februari	30	13
3	Maret	68	4
4	April	172	5
5	Mei	106	5
6	Juni	122	5
7	Juli	161	6
8	Agustus	98	6
9	September	179	7
10	Oktober	86	7
11	Nopember	257	10
12	Desember	162	7

Sumber : Kabupaten Toba dalam angka Tahun 2021.

6. Penggunaan Lahan

a. Kawasan Budidaya

Luas wilayah Kabupaten Toba berdasarkan data statistik adalah 202.180 ha, sedangkan berdasarkan luasan dari analisis peta tutupan lahan sebesar 207.348 ha. Penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Toba berdasarkan hasil interpretasi citra landsat Kabupaten Toba Tahun 2011, dengan menggunakan analisis peta tutupan lahan, diperoleh penggunaaan lahan yang terdiri dari hutan primer, hutan sekunder, kebun campuran, perkebunan, permukiman, sawah, semak belukar, tanah terbuka , ladang/tegalan dan tubuh air. Penggunaan lahan terbesar terdiri dari penggunaan lahan hutan primer 38,66%, dan terkecil penggunaan lahan untuk tubuh air. Untuk lebih jelasnya luasan tiap jenis penggunaan lahan di Kabupaten Toba berdasarkan analisis tutupan lahan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikutsebagai berikut :

Tabel II-7
Luas Penggunaan Lahan Menggunakan Analisis Luas Tutupan Lahan di Kabupaten Toba

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Hutan Primer	80.159	38,66
2	Hutan Sekunder	12.596	6,07

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
3	Kebun Campuran	48.847	23,56
4	Perkebunan	1.476	0,71
5	Permukiman	1.578	0,76
6	Sawah	16.465	7,94
7	Semak/Belukar	13.317	6,42
8	Tanah Terbuka	2.230	1,08
9	Tegalan/Ladang	29.398	14,18
10	Tubuh Air	1.282	0,62
	Jumlah	**202.180**	**100%**

***Sumber**: Dokumen KLHS Kabupaten Toba Tahun,2021*

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Pola ruang dalam RTRW Kabupaten Toba, Kabupaten Toba dibagi menjadi 2 fungsi kawasan yaitu Kawasan lindung dan kawasan budidaya, kemudian diklarifikasi menjadi

1) Kawasan Peruntukan hutan Poduksi
   a) Kawasan Peruntukan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 10.670,73 ha meliputi Kecamatan Nassau dan Borbor.
   b) Kawasan Peruntukan hutan produksi seluar kurang lebih 11.192,85 ha. (meliputi Balige, Laguboti, Habinsaran, Silaen dan borbor)
   c) Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat di konversi seluar kurang lebih 386,76 ha yang berada di Ajibata.
2) Kawasan peruntukan pertanian
   a) Peruntukan Pertanian lahan basah seluas 20.567,47 berlokasi di Balige, Laguboti, Sigumpar, Silaen, Porsea, Lumban Julu, Uluan, parmaksian, Bonatualunasi, Pintu Pohan Meranti, Ajibata, Habinsaaran, Borbor, Tampahan, Siantar Narumonda, dan Nassau.
   b) Kawasan Peruntukan Lahan kering memiliki luas kurang lebih 61.954.01 ha tersebar di Kecamatan Balige, Laguboti, Sigumpar, Silaen, Porsea, Lumban Julu, Uluan, Parmaksian, Bonatualunasi, pintu pohan meranti, ajibata, habinsaran, borbor, tampahan, siantarnarumonda, nassau.
   c) Kawasan perkebunan memiliki luas lebih kurang 11.055,79 ha tersebar di Kecamatan Habinsaran, Nassau dan Pintu Pohan Meranti.
3) Kawasan Peruntukan perikanan
   a) Perikanan Budidaya meliputi kolam air tenang di seluruh kecamatan, kolam air deras di Kecamatan Balige, Laguboti, Habinsaran, Pintu Pohan Meranti, dan Lumban Julul; Mina Padi ada di Kecamatan Porsea, Uluan, Sigumpar, Silaen, Lumban Julu, dan Bonatualunasi serta perbenihan ada

di Kecamatan Tampahan, Balige, Laguboti, Silaen, Sigumpar, Porsea, Bonatualunasi, dan Ajibata.

b) Pengembangan kawasan perikanan tangkap memanfaatkan perairan danau , waduk, dan sungai berlokasi di Kecamatan Tampahan, Balige, Laguboti, sigumpar, Porsea, uluan, siantar narumonda, lumban julu dan ajibata.

4) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan

a) Wilayah Usaha pertambangan (WUP) radioaktif berada di Kecamatan Tampahan, Balige, Laguboti, Borbor, Sigumpar, Silaen, Siantar Narumonda, Porsea, Parmaksian, Bonatualunasi, Pintu Pohan Meranti.

5) Kawasan Peruntukan Pariwisata :

a) Kawasan peruntukan pariwisata budaya :

- Makam Sisingamangaraja XII di Balige
- Gereja dan Makam DR.I.L Nomensen di Kecamatan Sigumpar.
- Perkampungan tradisional di nagatimbul kec. Bona tua Lunasi, hutatinggi, jangga dolok lumban julu.
- Tugu D.I Panjaitan
- Rumah adat batak di Kompleks tugu D.I.Panjaitan dan desa Meat.
- Mual Sisingamangaraja XII di dolok tolong Balige, dan Partapaan SM.Raja XII di simare kec, Borbor.
- Aek Mual di Desa Sibarani sampulu Kec. Laguboti
- Perkampungan batak Talak Batu dan Desa Adat Hutagaol sihujur di Kecamatan Silaen.
- Makam Raja Namora Paut Lubis di Desa Lumban Rau Barat Kec. Habinsaran.
- Perkampungan tradisional di naga timbul Kec. Bonatualunasi Huta tinggi pardomuan nauli kecamatan Laguboti, Jangga Dolik Kecamatan Lumban julu dan.
- Gereja HKBP Kota Balige.

b) Kawasan Peruntukan Pariwisata Alam

- Kawasan wisata pantai dengan arah pengembangan potensi pantai danau toba di Lumban Silintong, Lumban Bulbul, Sibola hotang, Lumban Gaol, Janji maria, Pakkodian, Lumban Binanga, Pantai pasifik dan pantai pasir putih, pantai sigaol siregar aek nalas, pantai longbeach dan pantai lumban binanga di sigumpar.
- Panorama alam (pegunungan) dolok tolong Balige, Bukit Holong Silaen, Bukit senyum Motung ajibata, tarabunga dan gurgur tampahan.

- Air terjun siharimo pintu pohan, sampuran bonan dolok, air terjun siboruan balige.
- Mual sirambe kecamatan balige
- Ekowisata jangga dolok Kecamatan Lumban Julu, ekowisata tampahan
- Kawasan yang merupakan hasil bentukan geologi alam seperti batu manumpak kec. Nassau
- Wisata geopark kaldera danau toba meliputi taman eden 100 kecamatan lumban julu, gua liang sipege, batu basiha sibodiala, air terjun situmurun kecamatan lumba julu, sumber air panas, siregar aek nalas kecamatan uluan.
- Kawasan pengembangan wisata sibodiala dan bukti pahoda.
- Kawasan eko tourism yang meruakan cakupuan wilayah kawasan pariwisata danau toba yang berada di Ajibata.

c) Kawasan peruntukan pariwisata buatan.

- Museum TB Silalahi Center, Balige
- Kawasan agrowisata Rest House Gurgur Tampahan
- Kawasan Agrowisata sionggang tengah, Lumban Julu
- Kawasan agrowisata tornagodang , Habinsaran
- Kawasan wisata bukti gibeon, Ajibata.

C. Wilayah Rawan Bencana

1. Potensi Bencana Alam

Potensi bencana alam dalam suatu wilayah merupakan salah satu pertimbangan yang penting dalam merumuskan rencana pengembangan suatu wilayah pada masa yang akan datang. Di Kabupaten Toba kawasan-kawasan yang berpotensi atau teridentifikasi sebagai daerah rawan bencana alam perlu diketahui untuk dapat membuat suatu perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan memperhatikan keseimbangan alam. Secara umum bencana yang berpeluang besar terjadi di Kabupaten Toba adalah longsor dan gempa. Berikut ini adalah peta rawan bencana alam di Kabupaten Toba.

Gambar II-5 Peta Rawan Bencana Kabupaten Toba

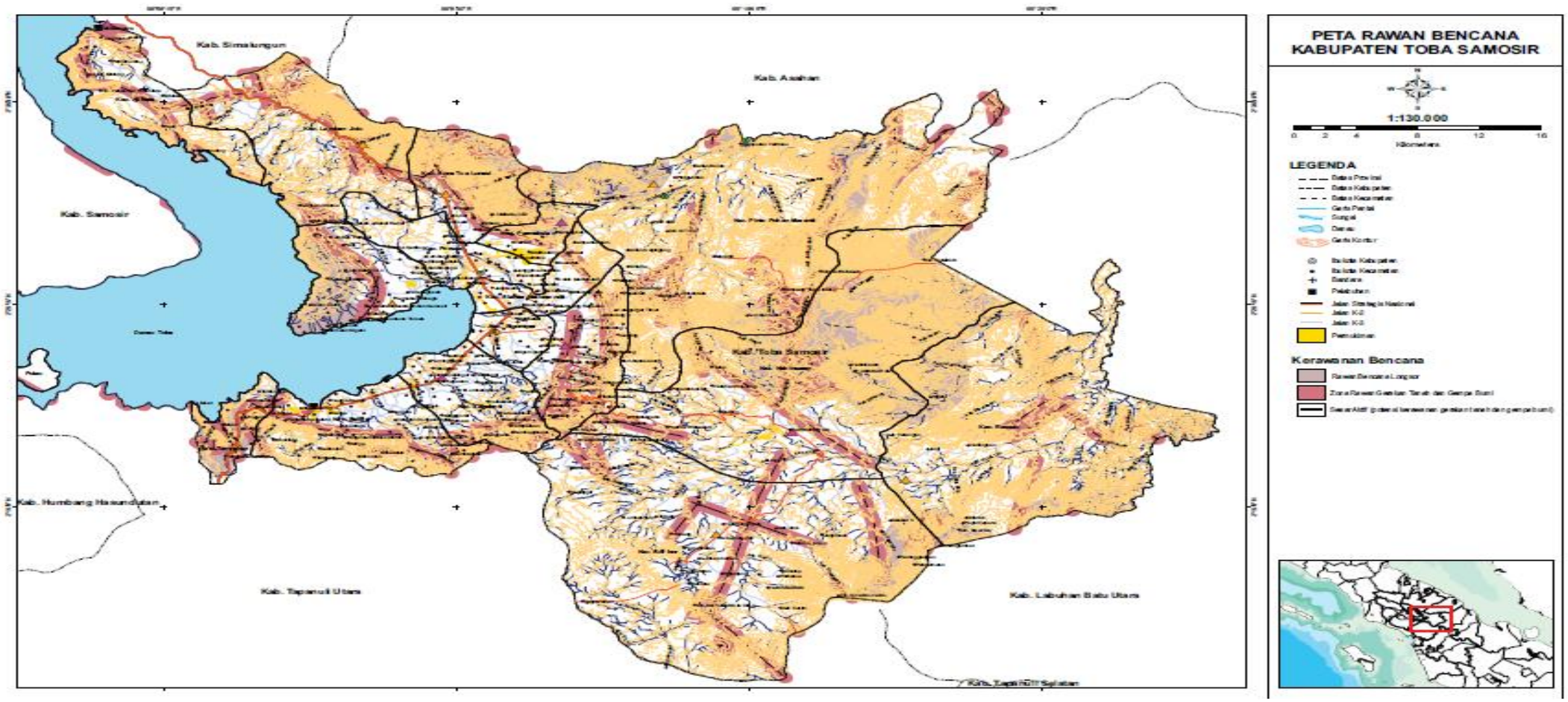

Sumber: RTRW Kabupaten Toba 2017-2037

2. Potensi Rawan Gerakan Tanah

Gerakan tanah atau tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Kabupaten Toba merupakan daerah yang terdiri dari pegunungan maupun perbukitan yang memiliki sudut kemiringan lereng yang cukup terjal dengan kondisi geologi, lahan, curah hujan, tanah, keairan yang dapat mendukung proses terjadinya bencana alam longsor. Kawasan rawan bencana longsor dapat disebabkan oleh beberapa faktor yakni :

1) Faktor kondisi alam, dengan karakteristik :
   - Kondisi lereng yang relatif cembung dengan kemiringan lahan di atas 45% untuk daerah lereng bukit/perbukitan, atau lereng gunung/pegunungan, dan lereng relatif landai dengan kemiringan sekitar 10^0 (20%) hingga 20^0 (40%).
   - Kondisi tanah/batuan penyusun umumnya merupakan lereng yang tersusun oleh tanah lempung yang mudah mengembang apabila jenuh air.
   - Curah hujan mencapai 70 mm/jam atau 100 mm/hari. Curah hujan tahunan mencapai lebih dari 2500 mm, atau kawasan rawan banjir.
   - Keairan lereng, sering muncul rembesan-rembesan air atau mata air pada lereng, terutama pada bidang kontak antara batuan kedap dengan lapisan tanah yang lebih permeable.
2) Faktor aktifitas manusia, dengan karakteristik :
   - Sistem drainase tidak memadai.
   - Dilakukan pembangunan kontruksi dengan beban yang melampaui daya dukung tanah.
   - Dilakukan pencetakan kolam yang dapat mengakibatkan merembesnya air kolam ke dalam lereng.
   - Lereng ditanami dengan pola tanam yang tidak tepat, misalnya ditanami tanaman berakar serabut, dimanfaatkan sebagai sawah/ladang dan hutan pinus.
   - Dilakukan penggalian/pemotongan lereng, misal untuk jalan atau bangunan dan penambangan, tanpa memperhatikan struktur perlapisan tanah/batuan pada lereng dan tanpa perhitungan analisis kestabilan lereng.
3) Jenis gerakan tanah (longsor), dengan karakteristik :
   - Jenis gerakan tanah yang terjadi umumnya berupa rayapan tanah yang mengakibatkan retakan dan amblesan tanah.

- Kecepatan gerakan lambat hingga menengah (kecepatannya kurang dari 2m perhari).

Kawasan-kawasan yang teridentifikasi rawan terhadap potensi gerakan tanah di Kabupaten Toba terdapat di beberapa kecamatan, yakni; Ajibata, Balige, Bonatualunasi, Borbor, habinsaran, laguboti, lumban julu, nassau, parmaksian, Pintu Pohan Meranti, Porsea, Siantarnarumonda, SIlaen, Tampahan, Uluan. Untuk lebih jelasnya mengenai potensi terhadap gerakan tanah dan kawasan rawan bencana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-8 Potensi Gerakan Tanah di Kabupaten Toba

No.	Kecamatan	Potensi Gerakan Tanah
1.	Ajibata	Menengah
2.	Balige	Menengah
3.	Bonatualunasi	Menengah
4.	Bor-Bor	Menengah-Tinggi
5.	Habinsaran	Menengah-Tinggi
6.	Laguboti	Menengah
7.	Lumbanjulu	Menengah
8.	Nassau	Menengah-Tinggi
9.	Parmaksian	Menengah
10.	Pintupohanmeranti	Menengah-Tinggi
11.	Porsea	Menengah
12.	Siantarnarumonda	Menengah
13.	Silaen	Menengah-Tinggi
14.	Tampahan	Menengah
15.	Uluan	Menengah

Sumber: Website Departemen Energi & Sumber Daya Mineral RI, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, 2020

Keterangan :

Menengah Daerah yang mempunyai potensi menengah untuk terjadi gerakan tanah. pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan.

Tinggi Daerah yang mempunyai potensi tinggi untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, sedangkan gerakan tanah lama dapat aktif kembali.

3. Potensi Bencana Gempa Bumi

Pulau Sumatera merupakan wilayah kepulauan yang memiliki indikasi adanya potensi bencana gempa bumi. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan sesar besar Sumatera atau sesar Semangko. Sesar besar Sumatera atau sesar Semangko

terbentuk akibat adanya aktivitas tektonik, terutama aktivitas pergerakan lempeng Indo Australia yang mendesak lempeng Eurasia. Arah pergerakan lempeng Indo Australia yang tidak tegak lurus, mengakibatkan terbentuknya segmen-segmen sesar geser Sumatera yang membentang sepanjang 1.900 km dari ujung utara Sumatera sampai ujung selatan. Sesar ini terbagi menjadi 9 bagian sesar aktif dan salah satunya berada di sekitar Kabupaten Tapanuli Utara. Dan Kabupaten Toba merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga potensi gempa yang terjadi pada wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dapat berpengaruh ke Kabupaten Toba.

D. Kondisi Demografi

1. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Toba pada tahun 2020 adalah 206.199 jiwa yang tersesebar di seluruh wilayah. Dengan luas wilayah daratan 2.021,8 Km², tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Toba tahun 2020 sebesar 101,99 jiwa/km². Kecamatan Balige yang merupakan ibukota kabupaten, pusat perdagangan dan pusat pemerintahan adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dan dengan tingkat kepadatan sebesar 490,23 jiwa/km². Kemudian diikuti oleh Kecamatan Porsea dengan tingkat kepadatan sebesar 387,25 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan Pintu Pohan Meranti merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan yang terkecil, yaitu hanya 26,49 jiwa/km².

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-9 Kepadatan Penduduk Kabupaten Toba Menurut Kecamatan Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	2016	2017	2018	2019	2020
			Kepadatan (Jiwa/Km2)				
1	Balige	91,05	421.04	423,58	425.61	429.8	490.23
2	Tampahan	24,45	183.27	183,38	185.28	187.1	210.27
3	Laguboti	73,90	259.51	261,08	262.37	265.0	303.07
4	Habinsaran	408,70	39.38	39,62	39.81	40.21	43.72
5	Borbor	176,65	39.98	40,22	40.42	40.83	46.98
6	Nassau	335,50	22.37	22,51	22.62	22.84	27.34
7	Silaen	172,58	73.03	73,47	73.83	74.56	81.95
8	Sigumpar	25,20	307.58	309,44	310.95	314.0	341.23
9	Porsea	37,88	369.24	371,49	373.28	376.9	387.25
10	Pintu Pohan Meranti	277,27	26.53	26,69	26.82	27.09	26.49
11	Siantar Narumonda	22,20	268.78	270,41	271.71	274.4	334.91
12	Lumban Julu	90,90	233.34	234,75	235.89	238.2	251.33
13	Uluan	109,00	93.41	93,98	94.43	95.38	109.49
14	Ajibata	72,80	76.71	77,17	77.55	78.32	88.81
15	Parmaksian	45,98	103.60	104,23	104.74	105.7	129.40
16	Bonatua Lunasi	57,74	90.96	91,51	91.96	92.88	101.91
Total		2.021,8	89.37	89,91	90.35	91.25	101.99

Sumber : Toba Dalam Angka 2021.

Dari data dapat dilihat bahwa peningkatan kepadatan penduduk hampir terjadi di semua kecamatan. Hal ini perlu diwaspadai karena dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk akan menyebabkan masalah penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, disamping juga akan berdampak pada peningkatan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.

2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Toba lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan Tahun 2020. Jumlah penduduk Kabupaten Toba yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 102.850 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 103.349 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Toba sebesar 99,52 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 perempuan juga terdapat sekitar 95,52 orang laki laki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-10 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No	Tahun	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		Jiwa	%	**Jiwa**	%	
1	2016	89.688	49.63	91.006	50.36	180.694
2	2017	90.297	49,67	91.493	50.33	181.790
3	2018	90.686	49.64	91.987	50.36	182.673
4	2019	91.724	49.71	92.769	50.28	184.493
5	2020	102.850	49.87	103.349	50.12	206.199

3. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Toba dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu : kelompok umur 0-14 tahun yang berjumlah 62.726 jiwa atau 35,12 %; kelompok umur 15-64 tahun dengan jumlah 104.672 jiwa atau 58,62 % dari jumlah keseluruhan; kelompok umur 65 tahun ke atas dengan jumlah 11.170 jiwa atau 6,25 % dari jumlah penduduk total. Terlihat bahwa untuk komposisi penduduk menurut kelompok umur yang terbesar adalah kelompok umur usia produktif. Secara lebih rinci diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel II-11 Jumlah Penduduk Laki laki menurut Kelompok Umur Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

Kelompok Umur	2016	2017	2018	2019	2020
0-4	10771	10597	10643	10 236	10635
5-9	10919	10944	10991	10853	10376
10-14	9988	10057	10100	10206	10536
15-19	9188	9 177	9217	9139	10549
20-24	5019	5 056	5078	5084	8324
25-29	5611	5 587	5611	5580	7536
30-34	5792	5 774	5799	5725	6900
35-39	5678	5 689	5714	5681	7158
40-44	5332	5 372	5395	5420	6680

Kelompok Umur	2016	2017	2018	2019	2020
45-49	4769	4 828	4849	4918	6034
50-54	4213	4 278	4296	4403	5107
55-59	4037	4 134	4152	4292	4094
60-64	3655	3 861	3878	4213	3217
65 +	12032	4 943	4963	5487	5704
Jumlah	89688	90 297	90686	91237	102850

Sumber: Toba dalam angka 2021

Tabel II-12 Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Umur Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

Kelompok Umur	2016	2017	2018	2019	2020
0-4	10447	10246	10301	9868	10123
5-9	10480	10517	10574	10472	1101
10-14	9328	9 359	9410	9474	9967
15-19	7973	7 930	7973	7863	9798
20-24	4202	4 194	4217	4164	7942
25-29	5165	5 127	5155	5096	6764
30-34	5634	5 590	5620	5492	6662
35-39	5577	5 588	5618	5584	6711
40-44	5486	5 508	5538	5554	6447
45-49	5132	5 169	5197	5237	5743
50-54	4944	5 016	5043	5144	5348
55-59	5115	5 261	5289	5496	4493
60-64	4207	4 448	4472	4915	4040
65 +	7316	7 540	7580	8116	9210
Jumlah	91006	91 493	91987	92475	103349

Sumber: Toba dalam angka 2021

E. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan hidup.

Jasa ekosistem yang dianalisis dalam penyusunan dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Toba terdiri atas 20 jasa ekosistem. Bahasan dalam Bab II ini dimulai dengan menghubungkan ekoregion dan tutupan lahan Kabupaten Toba dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan diikuti dengan penjelasan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Toba terhadap 20 jasa ekosistem tersebut.

1. Kondisi Ekoregion Kabupaten Toba

   Berdasarkan data ekoregion Sumatera Utara, maka didapatkan enam jenis ekoregion yang terdapat di Kabupatan Toba. Dari enam jenis ekoregion tersebut, jenis ekoregion terluas adalah Kerucut dan Lereng Gunung Api dengan luas mencapai 139,119,8 Ha atau sekitar 67,1 persen dari total luas Kabupaten Toba. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-13 Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Ekoregion di Kabupaten Toba

No.	Jenis Ekoregion	Luas (Ha)	Persentase (%)		
1	Kaki Gunung api	7.865,2	3,8		
2	Kerucut & Lereng Gunung api	139.119,8	67,1		
3	Lembah antar perbukitan	387,9	0,2		
4	Pegunungan Lipatan	34.339,8	16,6		
5	Perbukitan Lipatan	13.844,4	6,7		
6	Tubuh Air	11.664,4	5,6		
Total		**207.221,5**	100,0		

2. Kondisi Jasa Ekosistem Penyediaan

Jasa ekosistem penyediaan adalah barang yang dihasilkan oleh ekosistem dan dimanfaatkan secara langsung oleh manusia.

A. Jasa Penyediaan Pangan

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis- jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.

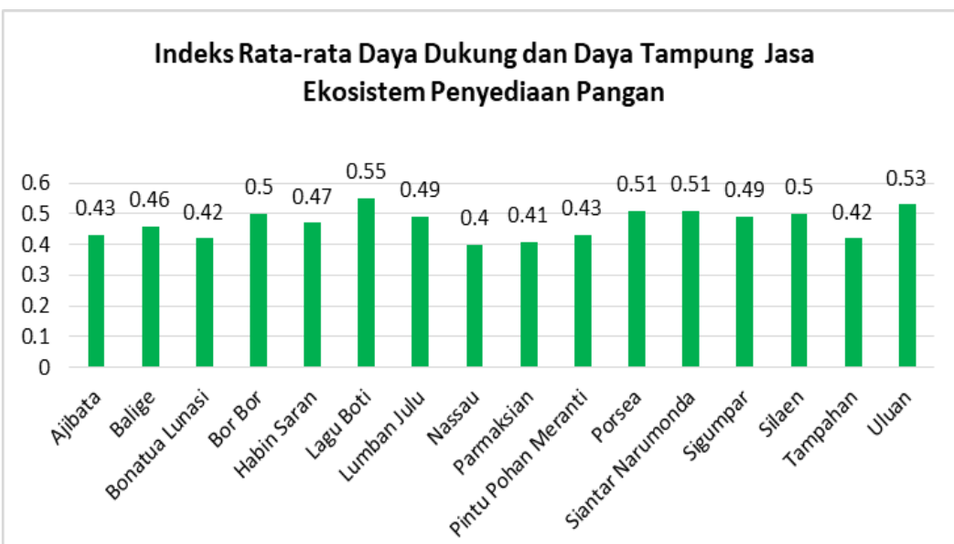

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Toba Tahun,2021

Gambar II-6 Diagram Indeks Rata-Rata Daya Dukung dan Daya Tampung Ekosistem Penyediaan Pangan di Kabupaten Toba

Berdasarkan gambar diatas maka dapat dilihat indeks rata-rata jasa ekosistem penyediaan pangan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Toba. Secara keseluruhan, indeks rata-rata jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Toba adalah 0,47. Daerah kecamatan dengan jasa ekosistem penyediaan pangan tertinggi adalah Kecamatan Laguboti mencapai 0,55 kemudian Kecamatan Uluan dengan indeks 0,53. Sedangkan kecamatan yang memiliki indeks terendah adalah Kecamatan Nassau dengan indeks 0,4. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Toba dengan indikasi jasa ekosistem penyediaan pangan kategori tinggi hingga sangat tinggi hanya sekitar 28 persen. Sedangkan wilayah Kabupaten Toba yang jasa ekosistem penyediaan pangan dengan kategori rendah mencapai 50 persen atau setengah dari luas total wilayah Kabupaten Toba.

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyediaan lahan dengan jasa ekosistem penyediaan pangan dengan kategori tinggi adalah Kecamatan Bor-bor dengan luas 8.165,3 Ha dan Kecamatan Habinsaran dengan luas sebesar 8.095,2 Ha. Sedangkan kecamatan yang kontribusinya rendah adalah Kecamatan Bona Tua Lunasi sebensar 8 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-14 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Dalam Jasa Penyediaan Pangan Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Toba

No.	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Luas (Ha)
1	Kec. Ajibata	53,7	2,7	3.699,0	2.979,6	181,6	6.916,6
2	Kec. Balige	163,8	1.721,1	221,6	3.637,4	2.729,8	8.473,6
3	Kec. Bona Tua Lunasi	3,9	4.713,8	415,5	8,0	1.110,0	6.251,2
4	Kec. Bor bor	87,4	13.505,4	14.621,9	8.165,3	1.825,6	38.205,7
5	Kec. Habinsaran	101,1	18.586,6	3.952,6	8.095,2	686,7	31.422,2
6	Kec. Laguboti	45,3	1.476,6	139,9	2.493,5	2.180,9	6.336,2
7	Kec. Lumban Julu	40,8	3.975,1	7.866,8	359,6	1.029,3	13.271,6
8	Kec. Nassau	39,3	25.698,4	2.630,7	1.102,5	307,6	29.778,6
9	Kec. Parmaksian	46,8	1.289,4	276,9	130,9	416,8	2.160,8
10	Kec. Pintu Pohan Meranti	83,6	28.613,6	5.548,4	3.196,2	751,0	38.192,8
11	Kec. Porsea	20,8	100,9	1.307,7	1.077,5	2.393,9	4.900,7
12	Kec. Siantar Narumonda	21,5	1.241,0	808,7	246,1	1.182,0	3.499,3
13	Kec. Sigumpar	10,3	53,9	126,3	753,2	1.342,9	2.286,6
14	Kec. Silaen	66,9	2.071,8	858,0	1.391,2	2.092,5	6.480,4
15	Kec. Tampahan	50,5	75,8	1.169,9	846,6	605,1	2.748,0
16	Kec. Uluan	38,1	1.126,5	1.153,9	2.798,9	1.179,8	6.297,2
Total		**873,8**	**104.252,5**	**44.797,8**	**37.281,9**	**20.015,4**	**207.221,5**

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Toba Tahun,2021

B. Jasa Penyediaan Air Bersih

Penyediaan air bersih, sebagaimana definisi operasional, adalah penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan. Jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kabupaten Toba juga ditentukan oleh ekoregion dan tutupan lahannya. Tabel 2.15 memaparkan kaitan antara ekoregion Kabupaten Toba dengan Daya Dukung dan Daya Tampung terkait dengan jasa penyediaan air bersih.

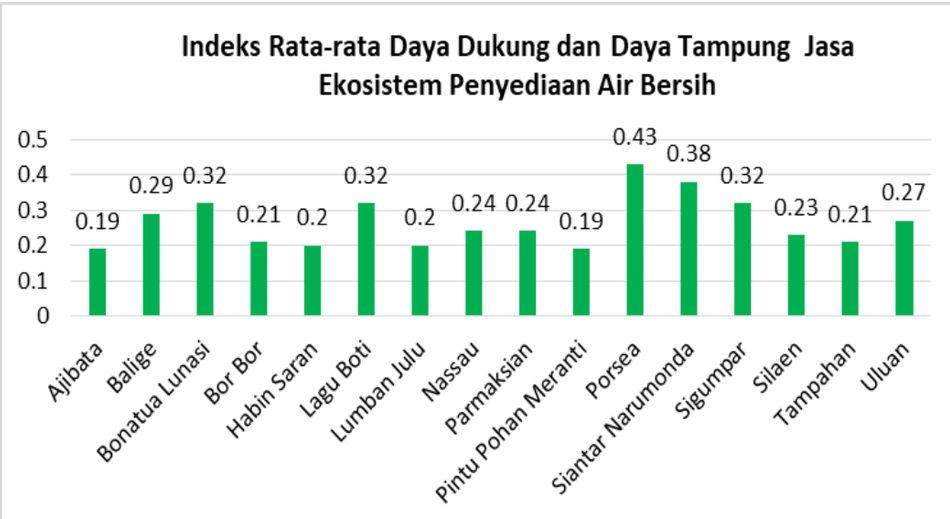

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Toba Tahun,2021

Gambar II-7 Diagram Indeks Rata- Rata Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih

Berdasarkan gambar diatas maka dapat dilihat bahwa indeks rata-rata jasa ekosistem penyediaan Air Bersih di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Toba. Secara keseluruhan, indeks rata-rata jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kabupaten Toba adalah 0,27. Daerah kecamatan dengan jasa ekosistem penyediaan Air Bersih tertinggi adalah Kecamatan Porsea mencapai 0,43 kemudian Kecamatan Siantar Narumonda dengan indeks 0,38. Sedangkan kecamatan yang memiliki indeks terendah adalah Kecamatan Ajibata dengan indeks 0,19 dan Kecamatan Pintu Pohan Meranti 0,19. Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyediaan lahan dengan jasa ekosistem penyediaan Air Bersih dengan kategori tinggi adalah Kecamatan Nassau dengan luas 17.670 Ha dan Kecamatan Habinsaran dengan luas sebesar 14.846 Ha. Sedangkan kecamatan yang kontribusinya rendah adalah Kecamatan Bona Tua Lunasi sebesar 8 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-15 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Dalam Jasa Penyediaan Air Bersih dirinci Per Kecamatan di Kabupaten **Toba**

No.	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Luas (Ha)
1	Kec. Ajibata	54	6.529		185	148	6.917
2	Kec. Balige	164	3.509	1.556	1.758	1.487	8.474
3	Kec. Bona Tua Lunasi	4	179	4.675	352	1.042	6.251
4	Kec. Bor bor	87	14.973	10.153	7.080	5.913	38.206
5	Kec. Habinsaran	101	11.447	5.028	14.846		31.422
6	Kec. Laguboti	45	2.290	1.343	1.037	1.621	6.336
7	Kec. Lumban Julu	41	8.067	3.971	968	225	13.272
8	Kec. Nassau	39	2.340	9.641	17.670	88	29.779
9	Kec. Parmaksian	47	240	1.252	310	312	2.161
10	Kec. Pintu Pohan Meranti	84	8.508	26.343	3.258	0	38.193
11	Kec. Porsea	21	2.087		709	2.084	4.901
12	Kec. Siantar Narumonda	22	574	1.177	573	1.153	3.499
13	Kec. Sigumpar	10	535		357	1.384	2.287
14	Kec. Silaen	67	1.936	2.048	1.688	741	6.480
15	Kec. Tampahan	50	1.734	73	565	325	2.748
16	Kec. Uluan	38	3.743	1.119	892	504	6.297
Total		**874**	**68.692**	**68.380**	**52.249**	**17.026**	**207.221**

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Toba Tahun,2021

C. Jasa Penyediaan Sumberdaya Genetik

Ekosistem menyediakan beragam sumber daya genetik yang melimpah dan bernilai ekonomis dan bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Sumberdaya genetik berhubungan erat dengan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, dimana keanekaragaman hayati yang tinggi akan diikuti dengan sumber daya genetik yang melimpah. Ketersediaan dan distribusi sumberdaya genetik ditentukan oleh tipe ekosistem yaitu ekoregion bentang alam dan penutup lahan khususnya areal bervegetasi. Potensi penyediaan sumberdaya genetik dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin beragam dan kompleks.

Tabel II-16 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Dalam Jasa Penyediaan Sumberdaya Genetika Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Toba

No.	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Luas (Ha)
1	Kec. Ajibata	56,4	6.529,4	181,6	148,3	0,9	6.916,6
2	Kec. Balige	329,0	3.509,4	3.147,5	1.481,9	5,8	8.473,6
3	Kec. Bona Tua Lunasi	43,0	178,8	4.987,9	1.041,4	0,1	6.251,2
4	Kec. Bor bor	95,7	14.972,8	10.065,2	3.579,1	9.492,9	38.205,7
5	Kec. Habinsaran	101,1	11.447,4	5.154,0	1.647,1	13.072,6	31.422,2
6	Kec. Laguboti	179,1	2.289,8	2.245,9	1.618,8	2,6	6.336,2
7	Kec. Lumban Julu	44,7	8.066,8	4.935,0	224,8	0,4	13.271,6
8	Kec. Nassau	39,3	2.484,7	6.484,7	11.132,7	9.637,2	29.778,6
9	Kec. Parmaksian	89,2	239,9	1.501,2	329,5	1,0	2.160,8
10	Kec. Pintu Pohan Meranti	83,6	8.507,8	27.054,1	135,7	2.411,7	38.192,8
11	Kec. Porsea	121,7	2.086,8	601,1	2.086,8	4,3	4.900,7
12	Kec. Siantar Narumonda	85,1	574,4	1.672,8	1.134,2	32,8	3.499,3

No.	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Luas (Ha)
13	Kec. Sigumpar	64,2	535,0	303,5	1.383,9		2.286,6
14	Kec. Silaen	90,5	1.936,4	3.712,7	719,3	21,6	6.480,4
15	Kec. Tampahan	53,4	1.734,1	634,4	325,4	0,6	2.748,0
16	Kec. Uluan	45,3	3.743,4	2.004,5	452,9	51,1	6.297,2
Total		**1.521,2**	**68.836,9**	**74.686,0**	**27.441,7**	**34.735,7**	**207.221,5**

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Toba Tahun,2021

3. Jasa Ekosistem Pengaturan

Jasa ekosistem pengaturan adalah manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem melalui pengaturan yang dilakukan oleh ekosistem. Siklus kehidupan dalam ekosistem menghasilkan barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan manusia.

A. Jasa Pengaturan Iklim

Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi carbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.

Tabel II-17
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Dalam Jasa Pengaturan Iklim Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Toba

No.	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Luas (Ha)
1	Kec. Ajibata	56,4	148,3	2.877,3	3.834,6		6.916,6
2	Kec. Balige	332,5	1.483,3	3.385,9	1.716,1	1.555,9	8.473,6
3	Kec. Bona Tua Lunasi	43,0	1.041,4	0,1	492,1	4.674,7	6.251,2
4	Kec. Bor bor	95,7	2.097,2	9.853,3	14.222,8	11.936,6	38.205,7
5	Kec. Habinsaran	101,1	546,8	9.583,2	4.333,2	16.857,9	31.422,2
6	Kec. Laguboti	181,7	1.618,8	2.247,2	945,6	1.342,8	6.336,2
7	Kec. Lumban Julu	44,7	224,8	359,6	8.671,3	3.971,2	13.271,6
8	Kec. Nassau	339,4	4.548,0	11.607,5	1.956,7	11.327,0	29.778,6
9	Kec. Parmaksian	89,2	311,8	111,8	395,8	1.252,2	2.160,8
10	Kec. Pintu Pohan Meranti	83,6	37,2	3.246,3	6.230,3	28.595,5	38.192,8
11	Kec. Porsea	125,0	2.080,4	971,4	1.723,9		4.900,7
12	Kec. Siantar Narumonda	117,9	1.119,9	98,6	985,4	1.177,5	3.499,3
13	Kec. Sigumpar	64,2	1.383,9	511,7	326,7		2.286,6
14	Kec. Silaen	90,5	719,3	1.376,3	2.246,2	2.048,2	6.480,4
15	Kec. Tampahan	53,4	325,4	772,4	1.524,0	72,9	2.748,0
16	Kec. Uluan	45,3	452,9	2.781,4	1.898,3	1.119,3	6.297,2
Total		**1.863,6**	**18.139,3**	**49.784,1**	**51.502,9**	**85.931,6**	**207.221,5**

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Toba Tahun,2021

B. Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Siklus hidrologi (hydrology cycle), adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (flow). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan. Jasa lingkungan yang demikian termasuk dalam jenis jasa pengaturan tata aliran air dan banjir.

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam Pengaturan Lahan dengan jasa ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir dengan kategori tinggi adalah Kecamatan Pintu Pohan Meranti dengan luas 27.054,1 Ha dan Kecamatan Bor-Bor dengan luas sebesar 15.657,2 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-18 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Dalam Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Toba

No.	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Luas (Ha)
1	Kec. Ajibata	56,4	3.660,5	3.017,2	181,6	0,9	6.916,6
2	Kec. Balige	329,0	3.772,5	1.218,7	3.149,0	4,4	8.473,6
3	Kec. Bona Tua Lunasi	43,0	379,0	841,3	4.987,9		6.251,2
4	Kec. Bor bor	1.891,4	15.205,7	5.451,2	15.657,2		38.205,7
5	Kec. Habinsaran	1.343,5	23.978,5	1.413,5	4.686,7		31.422,2
6	Kec. Laguboti	179,1	2.630,8	1.277,8	2.245,9	2,6	6.336,2
7	Kec. Lumban Julu	44,7	4.665,4	3.626,1	4.935,0	0,4	13.271,6
8	Kec. Nassau	8.378,1	18.465,3	867,8	2.066,6	0,7	29.778,6
9	Kec. Parmaksian	89,2	362,2	194,6	1.501,2	13,6	2.160,8
10	Kec. Pintu Pohan Meranti	214,9	8.219,3	2.666,5	27.054,1	38,2	38.192,8
11	Kec. Porsea	121,7	2.062,5	2.104,1	601,8	10,7	4.900,7
12	Kec. Siantar Narumonda	85,1	534,3	1.160,0	1.672,8	47,1	3.499,3
13	Kec. Sigumpar	64,2	856,2	1.062,7	303,5		2.286,6
14	Kec. Silaen	90,5	1.650,2	1.027,0	3.712,7		6.480,4
15	Kec. Tampahan	53,4	1.427,5	632,0	634,4	0,6	2.748,0
16	Kec. Uluan	45,3	3.901,7	345,8	2.004,5		6.297,2
Total		**13.029,4**	**91.771,8**	**26.906,3**	**75.394,8**	**119,2**	**207.221,5**

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Toba Tahun,2021

C. Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Dari Bencana

Ekosistem, didalamnya juga mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam. Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuk lahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan.

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam Pengaturan lahan dengan jasa ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana dengan kategori sangat tinggi adalah Kecamatan Pintu Pohan Meranti dengan luas 29.007,7 Ha dan Kecamatan Bor-Bor dengan luas sebesar 19.726,8 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-19 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Dalam Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Toba

No.	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Luas (Ha)
1	Kec. Ajibata	2,7	156,0	3.558,1	181,6	3.018,1	6.916,6
2	Kec. Balige	165,2	1.576,8	3.497,6	1.596,7	1.637,4	8.473,6
3	Kec. Bona Tua Lunasi	39,1	1.015,1	164,5	313,4	4.719,2	6.251,2
4	Kec. Bor bor	1.812,6	3.872,0	10.130,2	2.664,0	19.726,8	38.205,7
5	Kec. Habinsaran	1.333,4	13.954,7	10.033,9	686,7	5.413,4	31.422,2
6	Kec. Laguboti	133,8	1.664,1	2.289,8	905,7	1.342,8	6.336,2
7	Kec. Lumban Julu	3,9	191,8	4.580,1	963,7	7.532,1	13.271,6
8	Kec. Nassau	8.184,2	17.099,0	1.560,3	297,4	2.637,7	29.778,6
9	Kec. Parmaksian	42,4	354,2	217,6	254,1	1.292,6	2.160,8
10	Kec. Pintu Pohan Meranti	135,0	2.372,3	5.889,8	788,1	29.007,7	38.192,8
11	Kec. Porsea	100,9	2.099,7	1.776,3	605,1	318,7	4.900,7
12	Kec. Siantar Narumonda	63,5	901,0	341,5	528,1	1.665,1	3.499,3
13	Kec. Sigumpar	53,9	1.291,1	614,8	303,5	23,2	2.286,6
14	Kec. Silaen	23,6	531,5	1.613,7	1.686,1	2.625,6	6.480,4
15	Kec. Tampahan	2,9	168,3	1.353,2	561,6	661,9	2.748,0
16	Kec. Uluan	7,2	491,0	3.743,4	936,3	1.119,3	6.297,2
Total		**12.104,2**	**47.738,7**	**51.364,8**	**13.272,1**	**82.741,7**	**207.221,5**

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Toba Tahun,2021

D. Jasa Pengaturan Pemurnian Air

Manusia memerlukan air bersih untuk menopang perikehidupannya. Lingkungan hidup memiliki kemampuan untuk menyediakan jasa untuk memurnikan air sehingga air yang tercemar dapat dimurnikan untuk kemudian bisa dimanfaatkan kembali oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Ekosistem memiliki kemampuan untuk "membersihkan" pencemar melalui proses-proses kimia-fisik-biologi yang berlangsung secara alami dalam badan air. Kemampuan pemurnian air secara alami (*self purification*) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam khususnya aktivitas bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam Pengaturan lahan dengan jasa ekosistem Pengaturan Pemurnian Air dengan kategori tinggi adalah Kecamatan Nassau dengan luas 17.160,0 Ha dan Kecamatan Habinsaran dengan luas sebesar 14.159,2 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-20 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Dalam Jasa Pengaturan Pemurnian Air Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Toba

No.	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Luas (Ha)
1	Kec. Ajibata	56,4	6.529,4	181,6	149,2		6.916,6
2	Kec. Balige	329,0	3.509,4	3.147,5	1.482,7	5,0	8.473,6
3	Kec. Bona Tua Lunasi	43,0	178,8	4.987,9	1.041,5		6.251,2
4	Kec. Bor bor	87,4	14.981,1	11.501,2	5.755,9	5.880,1	38.205,7
5	Kec. Habinsaran	101,1	11.447,4	5.714,4	14.159,2		31.422,2
6	Kec. Laguboti	179,1	2.289,8	2.245,9	1.618,8	2,6	6.336,2
7	Kec. Lumban Julu	44,7	8.066,8	4.935,0	225,2		13.271,6
8	Kec. Nassau	39,3	2.340,3	10.239,0	17.160,0		29.778,6
9	Kec. Parmaksian	89,2	245,0	1.501,2	325,4		2.160,8
10	Kec. Pintu Pohan Meranti	83,6	8.507,8	27.094,4	2.506,9	0,1	38.192,8
11	Kec. Porsea	121,7	2.086,8	601,1	2.087,1	4,0	4.900,7
12	Kec. Siantar Narumonda	85,1	574,4	1.672,8	1.134,2	32,8	3.499,3
13	Kec. Sigumpar	64,2	535,0	303,5	1.383,9		2.286,6
14	Kec. Silaen	90,5	1.936,4	3.712,7	740,9		6.480,4
15	Kec. Tampahan	53,4	1.734,1	634,4	326,0		2.748,0
16	Kec. Uluan	45,3	3.743,4	2.004,5	504,1		6.297,2
Total		**1.512,9**	**68.705,9**	**80.477,1**	**50.601,0**	**5.924,7**	**207.221,5**

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Toba Tahun,2021

E. Jasa Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah

Jasa ekosistem meliputi kapasitas lokasi dalam menetralisir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Dalam kapasitas yang terbatas, ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralisir zat organik yang ada

dalam air limbah. Alam menyediakan berbagai macam mikroba (aerob) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Mikroba aerob yang disediakan ekosistem berperan dalam proses menetralisir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur, protozoa, ganggang. Dengan demikian alam memiliki daya tampung dalam jasa pengaturan pengolahan dan penguraian limbah.

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam Pengaturan lahan dengan jasa ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah dengan kategori tinggi adalah Kecamatan Bor-Bor dengan luas 7.754,6 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-21 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Dalam Jasa Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Toba

No.	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Luas (Ha)
1	Kec. Ajibata	688,6	5.894,4	184,3	149,2		6.916,6
2	Kec. Balige	206,9	5.022,2	1.756,8	344,5	1.143,2	8.473,6
3	Kec. Bona Tua Lunasi	138,2	4.719,2	352,4	244,8	796,7	6.251,2
4	Kec. Bor bor	1.663,4	26.777,7	1.976,9	7.754,6	33,1	38.205,7
5	Kec. Habinsaran	2.338,1	26.774,4	2.230,2	79,5		31.422,2
6	Kec. Laguboti	87,9	3.590,1	1.036,9	341,0	1.280,4	6.336,2
7	Kec. Lumban Julu	4.187,5	7.891,3	967,6	159,6	65,6	13.271,6
8	Kec. Nassau	1.959,8	16.925,3	10.695,0	198,4		29.778,6
9	Kec. Parmaksian	161,7	1.377,2	296,5	162,8	162,7	2.160,8
10	Kec. Pintu Pohan Meranti	2.868,1	34.359,0	841,9	123,6	0,1	38.192,8
11	Kec. Porsea	831,8	1.275,8	702,0	294,4	1.796,7	4.900,7
12	Kec. Siantar Narumonda	38,3	1.735,1	558,9	447,6	719,5	3.499,3
13	Kec. Sigumpar	10,3	535,0	357,4	344,5	1.039,4	2.286,6
14	Kec. Silaen	71,3	3.980,3	1.688,0	312,9	428,0	6.480,4
15	Kec. Tampahan	423,8	1.433,7	564,5	282,4	43,5	2.748,0
16	Kec. Uluan	1.051,3	3.849,6	892,3	209,4	294,7	6.297,2
Total		**16.726,9**	**146.140,2**	**25.101,6**	**11.449,2**	**7.803,6**	**207.221,5**

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Toba Tahun,2021

F. Jasa Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara

Kualitas udara yang baik merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh ekosistem. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor-faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada

daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi. Vegetasi yang rapat memungkinkan proses fotosintesis berlangsung secara masif. Proses fotosintesis ini menyerap karbondioksida dari udara pada satu sisi, dan melepaskan oksigen ke udara. Penyerapan karbon dioksida oleh proses fotosintesis adalah jasa alam dalam melakukan pemeliharaan kualitas udara dan pada saat bersamaan melepaskan oksigen yang diperlukan oleh makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Dengan demikian udara terpelihara kualitasnya secara berkelanjutan.

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam Pengaturan lahan dengan jasa ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara dengan kategori sangat tinggi adalah Kecamatan Pintu Pohan Meranti dengan luas 28.595,5 Ha dan Kecamatan Bor-Bor dengan luas sebesar 17.816,7 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-22 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Dalam Jasa Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Toba

No.	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Luas (Ha)
1	Kec. Ajibata	56,4	148,3	5.895,3	816,5		6.916,6
2	Kec. Balige	329,0	1.486,8	3.467,2	1.634,7	1.555,9	8.473,6
3	Kec. Bona Tua Lunasi	43,0	1.041,5	44,5	447,6	4.674,7	6.251,2
4	Kec. Bor bor	95,7	288,1	16.877,3	3.127,9	17.816,7	38.205,7
5	Kec. Habinsaran	101,1	321,7	11.003,1	3.138,4	16.857,9	31.422,2
6	Kec. Laguboti	179,1	1.621,4	2.247,2	945,6	1.342,8	6.336,2
7	Kec. Lumban Julu	44,7	224,8	3.920,5	5.110,4	3.971,2	13.271,6
8	Kec. Nassau	39,3	2.993,9	13.121,8	2.296,6	11.327,0	29.778,6
9	Kec. Parmaksian	89,2	311,8	138,7	374,1	1.247,1	2.160,8
10	Kec. Pintu Pohan Meranti	83,6		5.838,8	3.675,0	28.595,5	38.192,8
11	Kec. Porsea	121,7	2.083,7	1.283,1	1.412,2		4.900,7
12	Kec. Siantar Narumonda	85,1	1.152,7	571,9	512,1	1.177,5	3.499,3
13	Kec. Sigumpar	64,2	1.383,9	535,0	303,5		2.286,6
14	Kec. Silaen	90,5	740,9	1.932,1	1.668,8	2.048,2	6.480,4
15	Kec. Tampahan	53,4	325,4	1.361,4	934,9	72,9	2.748,0
16	Kec. Uluan	45,3	504,1	2.730,3	1.898,3	1.119,3	6.297,2
Total		**1.521,2**	**14.629,0**	**70.968,3**	**28.296,5**	**91.806,6**	**207.221,5**

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Toba Tahun,2021

G. Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami (Pollination)

Penyerbukan alami (pollination) adalah proses penyerbukan (berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik) yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antar bunga yang berbeda tetapi dalam satu tanaman atau di antara bunga pada klon tanaman yang sama. Ekosistem menyediakan jasa pengaturan penyerbukan alami khususnya lewat tersedianya habitat spesies yang dapat pembantu proses penyerbukan alami. Habitat alami seperti hutan dan areal bervegetasi umumnya menyediakan media spesies pengatur penyerbukan yang lebih melimpah.

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam Pengaturan lahan dengan jasa ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami dengan kategori sangat tinggi adalah Kecamatan Pintu Pohan Meranti dengan luas 34.263,4 Ha dan Kecamatan Bor-Bor dengan luas sebesar 28.209,6 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-23 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Dalam Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Toba

No.	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Luas (Ha)
1	Kec. Ajibata	2,7	53,7	149,2	3.058,8	3.652,1	6.916,6
2	Kec. Balige	165,2	168,8	1.482,7	4.977,4	1.679,6	8.473,6
3	Kec. Bona Tua Lunasi	39,1	3,9	1.041,5	313,3	4.853,5	6.251,2
4	Kec. Bor bor		87,4	8,4	9.900,3	28.209,6	38.205,7
5	Kec. Habinsaran		101,1		10.041,7	21.279,4	31.422,2
6	Kec. Laguboti	133,8	47,9	1.618,8	3.150,3	1.385,4	6.336,2
7	Kec. Lumban Julu	3,9	40,8	225,2	1.323,3	11.678,4	13.271,6
8	Kec. Nassau		39,3	0,7	12.686,8	17.051,8	29.778,6
9	Kec. Parmaksian	42,4	46,8	325,4	352,3	1.393,9	2.160,8
10	Kec. Pintu Pohan Meranti		83,6	38,0	3.807,8	34.263,4	38.192,8
11	Kec. Porsea	100,9	24,8	2.087,1	1.565,5	1.122,4	4.900,7
12	Kec. Siantar Narumonda	63,5	54,3	1.134,2	579,7	1.667,5	3.499,3
13	Kec. Sigumpar	53,9	10,3	1.383,9	815,2	23,2	2.286,6
14	Kec. Silaen	23,6	66,9	740,9	3.019,1	2.629,9	6.480,4
15	Kec. Tampahan	2,9	50,5	326,0	1.333,9	1.034,6	2.748,0
16	Kec. Uluan	7,2	38,1	504,1	3.615,5	2.132,4	6.297,2
Total		**639,1**	**918,2**	**11.066,0**	**60.540,9**	**134.057,2**	**207.221,5**

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Toba Tahun,2021

H. Jasa Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit

Pengendalian hama adalah pengaturan makhluk-makhluk atau organisme pengganggu yang disebut hama karena dianggap mengganggu kesehatan manusia, ekologi, atau ekonomi. Hama dan penyakit merupakan ancaman biotis yang dapat mengurangi hasil dan bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Ekosistem secara alami menyediakan sistem pengendalian hama dan penyakit melalui keberadaan habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit. Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam Pengaturan lahan dengan jasa ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit dengan kategori tinggi adalah Kecamatan Nassau dengan luas 22.385,0 Ha dan Kecamatan Habinsaran dengan luas sebesar 14.415,9 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-24 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Dalam Jasa Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Toba

No.	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Luas (Ha)
1	Kec. Ajibata	56,4	5.895,3	964,8			6.916,6
2	Kec. Balige	329,1	3.470,7	3.507,5	1.166,4		8.473,6
3	Kec. Bona Tua Lunasi	43,0	44,5	5.160,5	1.003,3		6.251,2

No.	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Luas (Ha)
4	Kec. Bor bor	87,4	13.396,7	12.869,2	4.081,2	7.771,2	38.205,7
5	Kec. Habinsaran	101,1	9.214,4	7.690,7	14.415,9		31.422,2
6	Kec. Laguboti	179,1	2.249,8	2.532,1	1.375,1		6.336,2
7	Kec. Lumban Julu	44,7	3.920,5	9.155,5	150,9		13.271,6
8	Kec. Nassau	39,3	1.550,2	5.416,2	22.385,0	387,9	29.778,6
9	Kec. Parmaksian	102,8	125,0	1.657,3	275,7		2.160,8
10	Kec. Pintu Pohan Meranti	93,4	5.751,4	29.969,9	2.292,5	85,6	38.192,8
11	Kec. Porsea	128,7	1.279,4	1.522,8	1.969,8		4.900,7
12	Kec. Siantar Narumonda	99,3	590,5	2.058,9	750,6		3.499,3
13	Kec. Sigumpar	64,2	535,0	648,0	1.039,4		2.286,6
14	Kec. Silaen	90,5	1.932,1	4.008,2	449,6		6.480,4
15	Kec. Tampahan	53,4	1.361,4	1.289,6	43,5		2.748,0
16	Kec. Uluan	45,3	2.730,3	3.086,2	435,4		6.297,2
Total		**1.557,7**	**54.047,3**	**91.537,4**	**51.834,5**	**8.244,6**	**207.221,5**

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Toba Tahun,2021

4. Jasa Ekosistem Budaya (Kultural)

   Jasa ekosistem kultural adalah jasa yang dihasilkan oleh lingkungan hidup yang dapat mendukung manusia dalam menopang kehidupan sosial dan budaya. Ianya berupa jasa non- material melalui pengayaan budaya, perkembangan kognitif, refleksi, rekreasi dan estetika. Lingkungan hidup memiliki daya dukung bagi manusia dalam memanfaatkan jasa ekosistem bagi tujuan sosial budaya tersebut, dan pada saat yang bersamaan juga menyerap limbah dari kegiatan sosial dan budaya tersebut. Jasa ekosistem kultural ini memberikan daya dukung dan sekaligus juga daya tampung.

   A. Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

      Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Jasa yang disediakan oleh ekosistem yang demikian termasuk dalam jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup.

      Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam Budaya lahan dengan jasa ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup dengan kategori sangat tinggi adalah Kecamatan Bor-Bor dengan luas 7.871,1 Ha dan Kecamatan Porsea dengan luas sebesar 2.183,8 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-25 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Dalam Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Toba

No.	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Luas (Ha)
1	Kec. Ajibata	3.653,0	181,6	2.877,3	99,6	105,1	6.916,6
2	Kec. Balige	1.680,3	1.591,7	3.385,8	232,5	1.583,2	8.473,6
3	Kec. Bona Tua Lunasi	4.853,5	313,3		34,2	1.050,3	6.251,2
4	Kec. Bor bor	15.422,8	1.348,6	9.073,6	4.489,5	7.871,1	38.205,7
5	Kec. Habinsaran	7.646,4	686,7	8.214,5	14.699,8	174,8	31.422,2
6	Kec. Laguboti	1.385,4	903,1	2.247,2	45,3	1.755,2	6.336,2
7	Kec. Lumban Julu	11.678,8	963,7	359,6	114,7	154,8	13.271,6
8	Kec. Nassau	3.428,4	297,4	3.149,0	21.765,2	1.138,5	29.778,6
9	Kec. Parmaksian	1.393,9	267,7	98,2	50,2	350,8	2.160,8
10	Kec. Pintu Pohan Meranti	31.782,3	760,8	3.074,8	2.485,4	89,4	38.192,8
11	Kec. Porsea	1.122,8	608,1	964,4	21,6	2.183,8	4.900,7
12	Kec. Siantar Narumonda	1.667,5	509,6	84,3	261,9	975,9	3.499,3
13	Kec. Sigumpar	23,2	303,5	511,7	113,3	1.334,8	2.286,6
14	Kec. Silaen	2.629,9	1.664,5	1.354,7	343,3	488,1	6.480,4
15	Kec. Tampahan	1.035,3	561,6	772,4	258,0	120,8	2.748,0
16	Kec. Uluan	2.132,4	885,2	2.730,3	89,3	460,1	6.297,2
Total		**91.536,0**	**11.847,1**	**38.897,8**	**45.104,0**	**19.836,7**	**207.221,5**

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Toba Tahun,2021

B. Jasa Budaya Rekreasi dan Ecotourism

Ekosistem menyediakan fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata. Berbagai macam bentuk bentang alam dan keunikan flora dan fauna serta keanekaragaman hayati yang terdapat dalam ekosistem memberi ciri dan keindahan bagi para wisatawan. Dari sisi ekonomi, akan diperoleh banyak keuntungan bahkan menjadi sumber devisa negara yang besar. Variasi bentang alam dan tutupan lahan berpengaruh besar terhadap nilai jasa budaya rekreasi dan ekoturisme. Bentang alam yang berlembang dan berbukit dengan tutupan lahan yang baik vegetasinya memberikan keindahan alam yang unik, dan tentunya memiliki daya dukung rekreasi dan ekoturisme yang tinggi pula.

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam Budaya lahan dengan jasa ekosistem Budaya Rekreasi dan Ekotourism dengan kategori sangat tinggi adalah Kecamatan Silaen dengan luas 1.664,5 Ha dan Kecamatan Balige dengan luas sebesar 1.597,6 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-26 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Dalam Jasa Budaya Rekreasi dan Ekotourism Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Toba

No.	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Luas (Ha)
1	Kec. Ajibata		45,9	3.757,2	2.930,9	182,5	6.916,6
2	Kec. Balige		68,7	563,7	6.243,6	1.597,6	8.473,6
3	Kec. Bona Tua Lunasi		30,2	432,5	5.475,3	313,3	6.251,2
4	Kec. Bor bor	5.500,9	1.954,6	12.907,4	16.494,2	1.348,6	38.205,7
5	Kec. Habinsaran	14.904,3	294,2	3.646,4	11.890,5	686,7	31.422,2
6	Kec. Laguboti			517,4	4.913,2	905,7	6.336,2

No.	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Luas (Ha)
7	Kec. Lumban Julu		73,9	7.796,4	4.437,2	964,1	13.271,6
8	Kec. Nassau	24.982,6	374,4	1.658,6	2.464,9	298,1	29.778,6
9	Kec. Parmaksian		3,4	329,9	1.559,8	267,7	2.160,8
10	Kec. Pintu Pohan Meranti	2.336,5	176,5	5.451,0	29.439,8	789,0	38.192,8
11	Kec. Porsea		0,9	1.509,5	2.777,9	612,5	4.900,7
12	Kec. Siantar Narumonda		240,4	746,4	1.970,0	542,4	3.499,3
13	Kec. Sigumpar		103,0	318,6	1.561,4	303,5	2.286,6
14	Kec. Silaen		254,7	663,5	3.897,8	1.664,5	6.480,4
15	Kec. Tampahan		207,5	1.039,0	939,2	562,2	2.748,0
16	Kec. Uluan			1.229,7	4.182,4	885,2	6.297,2
Total		**47.724,3**	**3.88,3**	**42.567,2**	**101.178,2**	**11.923,5**	**207.221,5**

C. Jasa Ekosistem Budaya Estetika (Alam)

Ekosistem bentang alam seperti laut, pegunungan, lembah, pantai dan lain sebagainya telah memberikan nuansa keindahan alam dan nilai-nilai estetika yang mengagumkan dan memiliki nilai jual. Paduan bentang alam dan bentang budaya semakin memperkuat nilai keindahan dan estetika yang telah diberikan oleh ekosistem. Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam Budaya lahan dengan jasa ekosistem Budaya Estetika dengan kategori sangat tinggi adalah Kecamatan Silaen dengan luas 1.664,5 Ha dan Kecamatan Balige dengan luas sebesar 1.597,6 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-27 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Dalam Jasa Budaya Estetika Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Toba

No.	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Luas (Ha)
1	Kec. Ajibata		45,9	3.757,2	2.930,9	182,5	6.916,6
2	Kec. Balige		97,0	535,5	6.243,6	1.597,6	8.473,6
3	Kec. Bona Tua Lunasi		236,6	226,0	5.475,3	313,3	6.251,2
4	Kec. Bor bor	5.517,5	1.938,1	12.874,3	16.527,3	1.348,6	38.205,7
5	Kec. Habinsaran	14.983,8	214,7	3.646,4	11.890,5	686,7	31.422,2
6	Kec. Laguboti		97,3	420,0	4.913,2	905,7	6.336,2
7	Kec. Lumban Julu		159,2	7.711,1	4.437,2	964,1	13.271,6
8	Kec. Nassau	25.278,3	78,6	1.658,6	2.464,9	298,1	29.778,6
9	Kec. Parmaksian		115,4	216,8	1.560,9	267,7	2.160,8
10	Kec. Pintu Pohan Meranti	2.336,5	176,5	5.451,0	29.439,6	789,1	38.192,8
11	Kec. Porsea		177,9	1.332,4	2.777,9	612,5	4.900,7
12	Kec. Siantar Narumonda		304,3	682,5	1.970,0	542,4	3.499,3
13	Kec. Sigumpar		103,0	318,6	1.561,4	303,5	2.286,6
14	Kec. Silaen		254,7	663,5	3.897,8	1.664,5	6.480,4
15	Kec. Tampahan		207,5	1.039,0	939,2	562,2	2.748,0
16	Kec. Uluan		89,6	1.140,1	4.182,4	885,2	6.297,2
Total		**48.116,1**	**4.296,5**	**4.296,5**	**101.212,2**	**11.923,6**	**207.221,5**

5. Jasa Ekosistem Pendukung

Jasa Ekosistem Pendukung adalah jasa ekosistem yang diperlukan untuk menghasilkan jasa ekosistem lainnya. Ada empat jenis jasa ekosistem dalam kelompok jasa ekosistem pendukung ini yaitu jasa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan, jasa siklus hara, jasa produksi primer dan jasa biodiversitas. Empat jenis jasa ini mendukung dalam menghasilkan jasa-jasa ekosistem dari tiga kelompok diatas.

A. Jasa Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan

Salah satu jenis jasa ekosistem pendukung adalah pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan. Tanah dan kesuburannya merupakan modal penting bagi manusia dalam mengembangkan pertanian, dan menopang kehidupan lainnya, seperti untuk membangun pemukiman, mengembangkan kegiatan wisata dan lainnya. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam utama yang ada di planet bumi serta merupakan kunci kerberhasilan makhluk hidup.

Tanah adalah lapisan tipis kulit bumi dan terletak paling luar. Tanah merupakan hasil pelapukan atau erosi batuan induk (anorganik) yang bercampur dengan bahan organik. Tanah mengandung partikel batuan atau mineral, bahan organik (senyawa organik dan organisme) air dan udara. Mineral merupakan unsur utama tanah yang terbentuk dari padatan anorganik dan mempunyai komposisi homogen. Ekosistem memberikan jasa pendukung berupa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan yang bervariasi antar lokasi. Lokasi yang memiliki jenis batuan cepat lapuk, dengan kondisi curah hujan dan penyinaran matahari yang tinggi akibat bentuk permukaan bumi serta didukung oleh keberadaan organisme dalam tanah dan tumbuhan penutup tanah. Jasa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan ini mendukungan jasa penyediaan pangan, jasa serat, energi dan jasa sumberdaya genetik untuk dapat berkembang karena tersedianya media tanah yang subur bagi tumbuhnya tanaman yang menghasilkan pangan, menghasilkan serat dan energi, serta berkembangnya sumberdaya genetik. Tanah yang subur juga diperlukan dalam menopang tumbuhnya tanaman, sehingga terjadi fotosintesa dalam menyerap carbondioksida yang mencemari udara serta melepaskan oksigen, sehingga kuaitas udara terpelihara. Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam Pendukung lahan dengan jasa ekosistem Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan dengan kategori tinggi adalah Kecamatan Nassau dengan luas 22.826,5 Ha

dan Kecamatan Habinsaran dengan luas sebesar 17.387,0 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-28
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Dalam Jasa Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Toba

No.	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Luas (Ha)
1	Kec. Ajibata	57,3	3.025,6	3.017,2	816,5		6.916,6
2	Kec. Balige	334,8	4.867,6	1.636,5	1.634,7		8.473,6
3	Kec. Bona Tua Lunasi	43,0	1.041,5	4.719,2	447,6		6.251,2
4	Kec. Bor bor	95,7	7.978,6	15.374,0	6.986,2	7.771,2	38.205,7
5	Kec. Habinsaran	101,1	7.801,0	6.133,1	17.387,0		31.422,2
6	Kec. Laguboti	181,7	3.866,0	1.342,8	945,6		6.336,2
7	Kec. Lumban Julu	45,1	584,3	7.531,7	5.110,4		13.271,6
8	Kec. Nassau	40,0	681,7	5.842,5	22.826,5	387,9	29.778,6
9	Kec. Parmaksian	89,2	423,6	1.279,0	369,0		2.160,8
10	Kec. Pintu Pohan Meranti	111,8	3.066,5	29.009,9	5.919,0	85,6	38.192,8
11	Kec. Porsea	126,0	3.051,1	311,4	1.412,2		4.900,7
12	Kec. Siantar Narumonda	117,9	1.218,6	1.650,8	512,1		3.499,3
13	Kec. Sigumpar	64,2	1.895,7	23,2	303,5		2.286,6
14	Kec. Silaen	90,5	2.095,6	2.625,6	1.668,8		6.480,4
15	Kec. Tampahan	54,0	1.097,7	661,3	934,9		2.748,0
16	Kec. Uluan	45,3	3.234,3	1.119,3	1.898,3		6.297,2
Total		**1.597,6**	**45.929,5**	**82.277,6**	**69.172,2**	**8.244,6**	**207.221,5**

B. Jasa Pendukung Siklus Hara (Nutrient Cycle)

Siklus hara dalam suatu ekosistem merupakan proses yang terintegrasi dari pergerakan/pemindahan energi dan hara didalam ekosistem itu sendiri dan juga interaksinya dengan atmosfir, biosfir, geosfir dan hidrosfir. Energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan siklus hara ini didapatkan dari proses yang terjadi pada biosfir yaitu proses fotosisntesis. Ekosistem secara alamiah memberikan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari dalam tanah melalui serapan haranya dan kemudian diakumulasi dalam jaringan tumbuhan dan kembali lagi ke tanah baik lansung atau tidak lansung sebagai bahan organik. Proses dari serapan hara, akumulasi hara pada tubuh tumbuhan dan kembali ke tanah melalui siklus yang bervarisi sesuai dengan kondisi tumbuhan, iklim dan jenis tanahnya sendiri sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan tingkat produksi pertanian yang tinggi. Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam Pendukung lahan dengan jasa ekosistem Pendukung Siklus Hara dengan kategori sangat tinggi adalah Kecamatan Bor-Bor dengan luas 7.672,6 Ha dan Kecamatan Porsea dengan luas sebesar 1.796,7 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-29 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Dalam Jasa Pendukung Siklus Hara Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Toba

No.	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Luas (Ha)
1	Kec. Ajibata	53,7	6.713,7	0,9	148,3		6.916,6
2	Kec. Balige	163,8	6.822,1	29,1	315,4	1.143,2	8.473,6
3	Kec. Bona Tua Lunasi	3,9	5.205,8	206,4	38,2	796,8	6.251,2
4	Kec. Bor bor	87,4	26.194,2	4.152,9	98,5	7.672,6	38.205,7
5	Kec. Habinsaran	101,1	16.840,1	14.480,9			31.422,2
6	Kec. Laguboti	45,3	4.669,5	97,3	243,7	1.280,4	6.336,2
7	Kec. Lumban Julu	40,8	13.005,6	85,7	73,9	65,6	13.271,6
8	Kec. Nassau	39,3	9.585,4	19.766,0	300,1	87,8	29.778,6
9	Kec. Parmaksian	46,8	1.788,6	125,6	37,2	162,7	2.160,8
10	Kec. Pintu Pohan Meranti	83,6	35.602,2	2.421,3	48,5	37,2	38.192,8
11	Kec. Porsea	20,8	2.788,9	184,4	109,9	1.796,7	4.900,7
12	Kec. Siantar Narumonda	21,5	2.310,7	78,2	369,3	719,5	3.499,3
13	Kec. Sigumpar	10,3	892,4		344,5	1.039,4	2.286,6
14	Kec. Silaen	66,9	5.672,6		291,3	449,6	6.480,4
15	Kec. Tampahan	50,5	2.371,5	0,6	281,8	43,5	2.748,0
16	Kec. Uluan	38,1	5.755,0	89,6	68,6	345,8	6.297,2
Total		**873,8**	**146.218,4**	**41.719,2**	**2.769,2**	**15.640,9**	**207.221,5**

C. Jasa Pendukung Produksi Primer

Ekosistem memberikan jasa produksi primer berupa produksi oksigen dan penyediaan habitat spesies. Produksi oksigen memberikan dukungan bagi seluruh kehidupan makhluk. Tanpa adanya oksigen maka tidak akan ada kehidupan. Ekosistem memberikan jasa penghasil oksigen sekaligus mengurangi kadar karbondioksida dan populasi udara di bumi. Keberadaan vegetasi seperti hutan yang menyerap karbondioksida untuk pembutan makanan (fotosintesis). Hasil dari fotosintesis adalah oksigen. Inilah gas yang diperlukan makhluk hidup di bumi untuk beraktivitas dan memungkinkan tumbuhnya banyak habitat spesies. Jasa produksi oksigen bervariasi antar lokasi dan berhubungan erat dengan keberadaan vegetasi dan hutan. Keadaan vegetasi hutan ditentukan pula oleh bentangan lahan atau ekoregionnya

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam Pendukung lahan dengan jasa ekosistem Pendukung Produksi Primer dengan kategori tinggi adalah Kecamatan Pintu Pohan Meranti dengan luas 28.719,1 Ha dan Kecamatan Nassau dengan luas sebesar 18.652,8 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-30 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Dalam Jasa Pendukung Produksi Primer Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Toba

No.	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Luas (Ha)
1	Kec. Ajibata	56,4	6.529,4	329,9	0,9		6.916,6
2	Kec. Balige	329,0	3.509,4	3.073,4	1.561,8		8.473,6
3	Kec. Bona Tua Lunasi	43,0	178,8	1.354,7	4.674,7	0,1	6.251,2
4	Kec. Bor bor	95,7	16.696,8	1.436,8	14.096,3	5.880,1	38.205,7
5	Kec. Habinsaran	101,1	12.475,2	980,9	17.865,0		31.422,2
6	Kec. Laguboti	179,1	2.289,8	2.521,9	1.345,5		6.336,2
7	Kec. Lumban Julu	44,7	8.066,8	1.188,5	3.971,6		13.271,6
8	Kec. Nassau	39,3	10.512,7	573,8	18.652,8		29.778,6
9	Kec. Parmaksian	89,2	239,9	569,9	1.261,7		2.160,8
10	Kec. Pintu Pohan Meranti	83,6	8.548,1	841,9	28.719,1	0,1	38.192,8
11	Kec. Porsea	121,7	2.086,8	2.680,9	11,3		4.900,7
12	Kec. Siantar Narumonda	85,1	574,4	1.615,3	1.224,6		3.499,3
13	Kec. Sigumpar	64,2	535,0	1.687,4			2.286,6
14	Kec. Silaen	90,5	1.936,4	2.383,7	2.048,2	21,6	6.480,4
15	Kec. Tampahan	53,4	1.734,1	887,0	73,5		2.748,0
16	Kec. Uluan	45,3	3.743,4	1.338,1	1.119,3	51,1	6.297,2
Total		**1.521,2**	**79.657,0**	**23.464,0**	**96.626,2**	**5.953,1**	**207.221,5**

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Toba Tahun,2021

D. Jasa Pendukung Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah).

Jasa ekosistem pendukung lainnya adalah Biodiversitas atau perlindungan plasma nutfah. Ekosistem memberikan jasa keanekaragaman hayati (biodiversity) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragaman Kabupaten Toba spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembang biakan flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan.

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam Pendukung lahan dengan jasa ekosistem Pendukung Biodiversitas dengan kategori sangat tinggi adalah Kecamatan Pintu Pohan Meranti dengan luas 26.341,2 Ha dan Kecamatan Bor-Bor dengan luas sebesar 14.308,7 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-31 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Dalam Jasa Pendukung Biodiversitas Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Toba

No.	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Luas (Ha)
1	Kec. Ajibata	56,4	3.660,5	3.017,2	181,6	0,9	6.916,6
2	Kec. Balige	357,2	4.882,4	80,6	1.591,6	1.561,8	8.473,6
3	Kec. Bona Tua Lunasi	249,4	969,2	44,5	313,4	4.674,7	6.251,2
4	Kec. Bor bor	1.908,0	13.873,7	5.418,2	2.697,1	14.308,7	38.205,7
5	Kec. Habinsaran	1.423,0	23.899,0	1.413,5	686,7	3.999,9	31.422,2
6	Kec. Laguboti	276,5	3.811,2		903,1	1.345,5	6.336,2
7	Kec. Lumban Julu	130,0	4.645,7	3.560,5	963,7	3.971,6	13.271,6
8	Kec. Nassau	8.488,1	18.355,4	867,8	297,4	1.769,9	29.778,6
9	Kec. Parmaksian	201,2	411,9	27,9	259,2	1.260,7	2.160,8
10	Kec. Pintu Pohan Meranti	214,9	8.182,2	2.666,5	788,1	26.341,2	38.192,8
11	Kec. Porsea	298,8	3.678,1	311,4	601,1	11,3	4.900,7
12	Kec. Siantar Narumonda	149,0	1.157,1	473,3	495,3	1.224,6	3.499,3
13	Kec. Sigumpar	64,2	1.895,7	23,2	303,5		2.286,6
14	Kec. Silaen	90,5	2.078,2	577,4	1.686,1	2.048,2	6.480,4
15	Kec. Tampahan	53,4	1.471,0	588,5	561,6	73,5	2.748,0
16	Kec. Uluan	134,9	4.106,7		936,3	1.119,3	6.297,2
Total		**14.095,4**	**97.078,1**	**19.070,4**	**13.265,8**	**63.711,7**	**207.221,5**

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Toba Tahun,2021

1. 2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja makro kegiatan ekonomi di suatu wilayah. PDRB suatu wilayah menggambarkan struktur ekonomi daerah peranan sector sektor ekonomi dan pergeserannya yang didasarkan pada PDRB atas dasar harga berlaku. Disamping itu PDRB menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi baik secara total maupun per sektor dengan membandingkan PDRB tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya menggunakan atas dasar harga Konstan tahun 2010. PDRB Kabupaten Toba atas dasar harga berlaku tahun 2020 sebesar 7.845.42 milyar rupiah. Berdasarkan atas dasar harga konstan 2010 PDRB Kabupaten Toba tahun 2020 sebesar 5.488.92 milyar rupiah atau mengalami kontraksi menjadi 0,27 persen. Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang memberi peranan atau kontribusi yang terbesar terhadap PDRB tahun 2020. Tahun 2020 sektor ini memberi andil terhadap PDRB sebesar 31,28 persen. Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang menunjukkan trend peningkatan dalam pembentukan PDRB tahun 2020. Hal ini dapat dilihat dari peranannya tahun 2019 sebesar 30,84 persen.

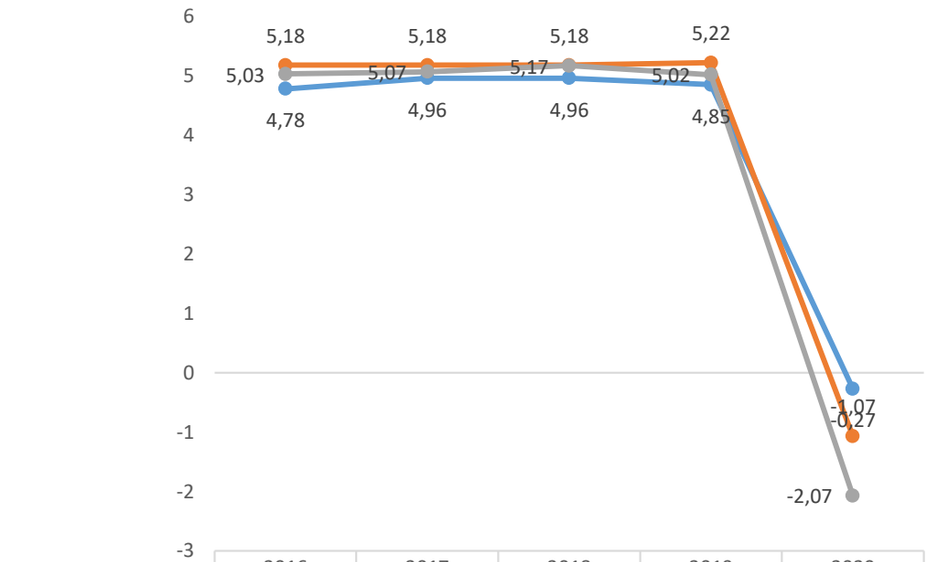

	2016	2017	2018	2019	2020
Toba	4,78	4,96	4,96	4,85	-0,27
Sumatera Utara	5,18	5,18	5,18	5,22	-1,07
Indonesia	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07

Gambar II-8 Perbandigan Laju Pertumbuhaan PDRB ADHK Kabupaten Toba dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Laju pertumbuhaan PDRB ADHK Kabupaten Toba mengalami kenaikan pada periode 2016-2018, laju pertumbuhaan lebih rendah dari laju pertumbuhaan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Pada tahun 2019 kabupaten Toba mengalami penurunan pertumbuhaan sebesar 0,11 dibandingkan tahun 2018, PDRB nasional juga mengalami penurunan pertumbuhan pada tahun 2019. Pada masa pandemi Covid 19 pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Toba mengalami penurunan laju pertumbuhaan sampai pada angka -0,27 lebih rendah dari penurunan pertumbuhaan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Perbandingan PDRB Kabupaten Toba dengan PDRB Kabupaten-Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara pada periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-32
Perbandingan PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Toba dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional (Milyar Rupiah) Periode 2016-2020

NO	Kabupaten - Kota	2016		2017		2018		2019		2020	
		ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB
1	N i a s	2966,28	2966,28	2325,01	3233,75	2440,16	24636473	2563,03	26687703	2609,14	28065239
2	Mandailing Natal	10661,04	10661,04	8416,5	11712,55	8904,14	28451718	9376,46	30281979	9288,65	30692109
3	Tapanuli Selatan	10964,77	10964,77	8748,18	11983,06	9201,96	45961324	9683,66	49417535	9721,77	51668052
4	Tapanuli Tengah	7849,65	7849,65	6348,44	8555,48	6678,25	24934361	7024,15	26433899	6970,58	26477888
5	Tapanuli Utara	6300,29	6300,29	5280,69	6765,69	5510,19	24332249	5764,94	26140945	5851,4	27246495
6	Toba	6135,37	6135,37	5001,43	6656,29	5249,25	39204402	5503,76	41779457	5488,92	42524221
7	Labuhanbatu	26505,24	26505,24	21048,17	29030,57	22112,34	64345055	23232,71	68012800	23252,75	69085836
8	A s a h a n	29206,69	29206,69	23525,35	32023,19	24844,87	47854663	26245,24	51302635	26299,57	52640072
9	Simalungun	30186,08	30186,08	24715,67	32860,29	25996,21	41038393	27348,7	43848908	27625,7	45247609
10	D a i r i	7433,62	7433,62	5968,81	8044,63	6267,82	30228407	6569,81	32241619	6508,05	32639340
11	K a r o	16728,42	16728,42	13145,85	18060,75	13744,17	46917382	14376,28	49497030	14261,47	49703135
12	Deli Serdang	85152,02	85152,02	64991,87	93193,89	68341	46882094	71878,69	49794458	70596,83	49296987
13	L a n g k a t	33949,47	33949,47	26822,6	37023,33	28170,08	38504178	29597,77	40810325	29343,26	41225072
14	Nias Selatan	5194,79	5194,79	3826,62	5684,36	4018,74	19694732	4221,04	21448686	4246,83	22213405
15	Humbang Hasundutan	4776,17	4776,17	3756,66	5124,65	3946,12	29325411	4141,1	31291803	4135,6	31930248
16	Pakpak Bharat	918,5	918,5	760,55	996,48	805,01	22589017	852,3	24077148	850,79	24379166
17	Samosir	3442,98	3442,98	2776,85	3751,36	2931,7	32469661	3098,74	35143764	3080,43	35852360
18	Serdang Bedagai	22113,82	22113,82	17516,43	24094,59	18421,38	42294269	19393,39	45359548	19308,46	46299373
19	Batu Bara	27574,27	27574,27	22034,26	29962,41	22998,6	77415555	23998,59	81748911	23923,64	83283485
20	Padang Lawas Utara	9077,62	9077,62	7378,98	9902,55	7791,05	40154176	8228,45	42607913	8322,51	43938950
21	Padang Lawas	8807,42	8807,42	7110,25	9694,19	7534,3	38458403	7959,31	40435311	8053,5	41856145
22	Labuhanbatu Selatan	21004,17	21004,17	16907,59	23196,31	17797,95	75465242	18750,16	80040545	18899,31	81779044
23	Labuhanbatu Utara	19374,23	19374,23	15602,05	21161,68	16413,33	63032129	17259,19	67007345	17306,59	68715325
24	Nias Utara	2777,63	2777,63	2134,49	3008,01	2228,75	23724681	2332,44	25484234	2369,36	26729365
25	Nias Barat	1415,85	1415,85	1126,19	1548,74	1179,91	20490439	1236,73	22115147	1257,28	23324661
26	S i b o l g a	4262,85	4262,85	3224,58	4644,67	3393,91	57994856	3570,33	63126737	3521,72	63850127
27	Tanjungbalai	6722,59	6722,59	5174,85	7424,96	5473,63	47175954	5790,37	51086050	5763,21	51865982

NO	Kabupaten - Kota	2016		2017		2018		2019		2020	
		ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB
28	Pematangsiantar	11579,29	11579,29	8750,15	12443,86	9170,19	51979135	9611,74	54572353	9430,04	54140600
29	Tebing Tinggi	4727,48	4727,48	3575,51	5123,22	3760,5	33906282	3954,03	36034837	3926,39	36418803
30	M e d a n	186049,04	186049,04	139739,34	204299,85	148007,14	98263688	156780,58	105918236	153669,83	105532865
31	B i n j a i	9077,47	9077,47	7309,57	9857,85	7708,59	39304878	8133,54	42300163	7984,46	42137418
32	Padangsidimpuan	4913,28	4913,28	3830,32	5372,88	4038,93	26765890	4261,32	28730165	4230,41	28860372
33	Gunungsitoli	4034,2	4034,2	3049,12	4504,05	3232,97	35486672	3428,45	38714256	3441,65	40174402

Sumber : Toba dalam angka , Tahun 2021

a) PDRB Menurut Lapangan Usaha.

1. PDRB Kabupaten Toba

PDRB Kabupaten Toba atas dasar harga berlaku tahun 2020 sebesar 7.845.421,2 juta rupiah. Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan merupakan sector yang memberi peranan atau kontribusi yang terbesar terhadap PDRB tahun 2020, Tahun 2020 sektor ini memberi andil terhadap PDRB sebesar 31,28 persen. Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang menunjukkan trend peningkatan dalam pembentukan PDRB tahun 2020. Hal ini dapat dilihat dari peranannya tahun 2019 sebesar 30,84 persen, dijelaskan pada gambar berikut :

Tabel II-33 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku 2010 (juta rupiah)

PDRB Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 (milyar Rupiah)									
	2016		2017		2018		2019		2020	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33,56	2 055,32	32,49	2155,56	31,72	2271,33	30,84	2 367,09	31,28	2454,21
B. Pertambangan dan Penggalian	0,28	17,32	0,28	18,36	0,27	19,55	0,27	20,62	0,27	21,06
C. Industri Pengolahan	11,23	687,93	11,63	771,56	11,38	815,10	10,87	834,33	10,71	839,89
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	3,67	0,06	4,13	0,06	4,53	0,06	4,97	0,06	5,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	2,94	0,05	3,10	0,05	3,24	0,04	3,36	0,04	3,37
F. Konstruksi	12,48	763,96	12,88	854,61	13,49	965,92	13,90	1 066,60	13,43	1054,00
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,71	1 023,40	16,91	1122,04	17,42	1247,43	18,13	1391,41	18,13	1421,99
H. Transportasi dan Pergudangan	3,15	192,99	3,20	212,11	3,18	227,75	3,20	245,90	3,08	241,88
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,84	174,16	2,82	187,24	2,81	200,96	2,81	215,35	2,74	214,71
J. Informasi dan Komunikasi	1,03	63,20	1,05	69,37	1,06	75,91	1,11	84,82	1,18	92,21
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,59	97,24	1,60	106,46	1,62	116,19	1,57	120,12	1,56	122,74
L. Real Estate	2,75	168,49	2,78	184,57	2,86	204,92	2,89	221,45	2,97	232,69
M,N. Jasa Perusahaan	0,85	52,07	0,87	57,74	0,88	62,69	0,91	69,51	0,93	72,66
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,93	607,90	9,89	656,14	9,68	693,17	9,82	753,44	9,90	776,62
P. Jasa Pendidikan	2,49	152,23	2,50	166,16	2,52	180,48	2,55	196,09	2,63	206,21
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	51,98	0,84	56,03	0,86	61,33	0,89	68,12	0,94	73,89
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,15	9,12	0,15	10,07	0,15	11,08	0,16	12,21	0,16	12,21
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	6123,91	100,00	6635,27	100,0	7161,59	100,00	7675,39	100,00	7845,42

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba,2021*

Tabel II-34 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (juta rupiah)

PDRB Lapangan Usaha	Nilai dan kontribusi sector dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan 2010 ((Milyar Rupiah)									
	2016		2017		2018		2019		2020	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,62	1 620,97	3,45	1 676,83	2,95	1 726,23	2,83	1 775,01	0,41	1 782,37
B. Pertambangan dan Penggalian	4,47	14,01	6,20	14,88	5,97	15,76	4,35	16,45	-0,86	16,31
C. Industri Pengolahan	0,08	524,58	5,20	551,87	1,98	562,79	2,68	577,90	-0,11	577,27
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,49	4,07	5,87	4,31	4,96	4,53	4,84	4,74	2,06	4,84
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,22	2,46	2,29	2,52	3,35	2,60	3,22	2,69	-0,47	2,67
F. Konstruksi	7,97	606,84	7,46	652,11	7,97	704,10	7,92	759,84	-4,25	727,52
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,72	765,89	5,43	807,49	7,41	867,34	6,47	923,50	-0,11	922,48
H. Transportasi dan Pergudangan	7,22	141,00	6,37	149,97	5,75	158,60	5,53	167,37	-4,64	159,61
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,01	139,93	5,11	147,09	5,32	154,91	6,85	165,53	-0,81	164,20
J. Informasi dan Komunikasi	7,26	62,12	7,58	66,83	7,64	71,94	8,14	77,79	8,37	84,30
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	7,86	81,84	6,25	86,96	6,44	92,55	1,66	94,09	2,28	96,24
L. Real Estate	5,14	133,39	6,97	142,69	6,83	152,44	4,72	159,63	2,15	163,07
M,N. Jasa Perusahaan	4,84	38,99	6,34	41,46	6,56	44,18	4,21	46,04	-0,70	45,72
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,04	454,01	2,91	467,22	5,25	491,76	6,70	524,72	-0,02	524,64
P. Jasa Pendidikan	6,60	132,18	6,72	141,06	5,32	148,58	4,39	155,10	4,72	162,43
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,18	38,52	5,11	40,49	5,66	42,78	4,56	44,73	4,62	46,80
R,S,T,U. Jasa lainnya	5,37	7,18	6,44	7,64	6,70	8,16	5,65	8,62	-1,90	8,45
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**4,76**	**4 767,98**	**4,90**	**5 001,43**	**4,96**	**5 249,25**	**4,85**	**5 503,76**	**-0,27**	**5 488,92**

Sumber : PDRB Kab. Toba Tahun 2021

Berdasarkan atas dasar harga konstan 2010 PDRB Kabupaten Toba tahun 2020 sebesar 5.488.918,0 juta rupiah mengalami kontraksi menjadi -0,27 persen.

b) PDRB Menurut Pengeluaran.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan System of National Accounts (SNA) yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Kondisi perekonomian Kabupaten Toba terus membaik dari tahun ke tahun. Akan tetapi di tahun 2020, adanya pandemi Covid-19 yang melandai dunia, termasuk Indonesia, kondisi perekonomian Kabupaten Toba mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari nilai PDRB

Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 pada tahun 2020 yang mengalami penurunan meskipun nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku mengalami kenaikan.

Tabel II-35 Distribusi dan PDRB ADHB menurut Pengeluaran Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

PDRB Menurut Pengeluaran	Distribusi dan PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)									
	2016		2017		2018		2019*		2020**	
	%	Rp (milyard)	%	Rp (milyard)	%	Rp (milyard)	%	Rp (milyard)	%	Rp (milyard)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	54,90	3362,11	54,96	3646,54	55.03	3952,58	55.54	4262.74	54.65	4287.30
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,61	95,58	1,62	107,65	1.65	118,08	1.68	128.85	1.67	131.03
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15,41	943,52	15,35	1018,63	15.43	1100,45	14.94	1146.64	14.50	1620.30
Pembentukan Modal Tetap Bruto	21,95	1344,02	21,88	1452,13	21.85	1557,65	21.17	1624.75	20.65	109.05
Perubahan Inventori	1,35	82,73	1,29	85,74	1.28	91,63	1.25	95.94	1.39	3164.40
ekspor	43,34	2653,92	42,72	2834,74	43.10	3086,65	41.51	3185.83	40.33	2603.91
impor	38,55	2360,96	37,83	2510,16	38.34	2745,46	36.08	2769.37	33.19	2603.91
PDRB	100,00	6123,91	100,00	6635,27	100.00	7161,59	100	7675.39	100.00	7845.42

Sumber : Buku PDRB menurut lapangan usaha 2016-2020.

Berdasarkan Tabel diatas , selama periode tahun 2016 – 2020, PDRB Kabupaten Toba ADHB mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Nilai PDRB ADHB tahun 2016 yakni sebesar 6.123,91 miliar rupiah, mengalami peningkatan menjadi sebesar 7.845,42 miliar rupiah pada tahun 2020. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Dari tujuh komponen pembentuk PDRB dari sisi pengeluaran, pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mempunyai nilai yan g paling besar, yaitu 4.287,30 miliar rupiah pada tahun 2020. Komponen lain yang mempunyai nilai besar adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan nilai sebesar 1.620,30 miliar rupiah, yang sebagian besarnya berbentuk bangunan.

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). Nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Toba pada periode 2016 - 2020 dapat dilihat dari table berikut :

Tabel II-36 Laju dan PDRB ADHK menurut Pengeluaran Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

PDRB Menurut Pengeluaran	Laju dan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran 2010-2019 (Juta Rupiah)									
	2016		2017		2018		2019*		2020**	
	%	Rp (milyard)	%	Rp (milyard)	%	Rp (milyard)	%	Rp (milyar)	%	Rp (milyar)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,98	2494,93	4,65	2610,94	5.05	2744,37	5.25	2884,35	-1.24	2850.75
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,67	82,56	3,96	85,84	3.91	89,16	9.90	97,67	-.0.84	97.19
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,55	794,23	2,38	813,12	2.37	832,21	1.36	833,72	-0.23	841.79
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,34	969,51	3,47	1003,16	3.86	1040,46	5.20	1104,07	-1.63	1078.16
Perubahan Inventori	3,24	66,28	1,18	67,06	1.54	68,09	3.01	70,14	9.71	76.94
ekspor	4,84	2170,51	3,97	2256,75	6.81	2410,48	2.04	2465,78	-6.25	2305.87
impor	1,04	1810,03	1,40	1835,42	5.45	1935,51	0.77	1950,46	-9.67	1761.79
PDRB	**4,76**	**4767,98**	**4,90**	**5001,43**	**4.96**	**5249,25**	**4.85**	**5505,26**	**-0.27**	**5488.92**

Sumber : Buku PDRB menurut lapangan usaha 2016-2020.

PDRB pengeluaran ADHK 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Sama halnya dengan PDRB ADHB, nilai PDRB ADHK 2010 juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Akan tetapi, PDRB Kabupaten Toba ADHK 2010 mengalami penurunan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, khususnya Kabupaten Toba. PDRB Kabupaten Toba meningkat dari 4.767,98 miliar rupiah pada tahun 2016 menjadi 5.488,92 miliar rupiah pada tahun 2020 meskipun nilai ini turun dari tahun 2019 yakni 5.503,76 miliar rupiah.

1.2.1.2 Laju Inflasi.

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini terkait erat dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah dan mampu memengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi. Inflasi Kabupaten Toba sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Sibolga. Pada periode tahun 2016-2020, laju inflasi di Kota Sibolga Tahun 2016 sebesar 7.39 % 2017 sebesar 3.08 %, pada Tahun 2018 sebesar 2.86 % pada Tahun 2019 sebesar 2.58 % dan Tahun 2020 sebesar 2.42 %

1.2.1.3 PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Toba dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel II-37 PDRB per kapita Toba Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2016-2020 (Ribu Rupiah)

Tahun	ADH Berlaku		ADH Konstan	
	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
2016	33.891.04	8,32	26.387.07	4,18
2017	36.499.65	7,70	27.512.12	4,26
2018	39.204.40	7,41	28.735.79	4,45
2019*	41.779.46	6.57	29.958.64	4.26
2020**	42.524.22	1.78	29.751.36	-0.69

Sumber : Buku PDRB menurut lapangan usaha 2016-2020.

PDRB per kapita Toba atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 sebesar 33,89 juta rupiah dan terus meningkat menjadi 42,52 juta rupiah pada tahun 2020. Apabila dilihat menurut harga berlaku, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Sementara itu, jika dilihat dari penghitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka pada periode 2016-2020 terjadi peningkatan yang relatif stabil. Namun, pada tahun 2020, PDRB per kapita Toba menurut harga konstan 2010 mengalami kontraksi dari pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu dari 4,26 persen pada tahun 2019, menjadi -0,69 persen pada tahun 2020.

Perbandingan PDRB ADH dan PDRB ADHB Kabupaten Toba dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional pada periode 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-38 Perbandingan PDRB Per Kapita ADHK dan ADHB Kabupaten Toba dengan Provinsi dan nasiona, 2016-2020

Kabupaten - Kota	2016		2017		2018		2019		2020	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
N i a s	21667962,89	16173863,08	23503139,30	16898379,34	24636473	17083166	26687703	17883381	28065239	18121165
Mandailing Natal	24491077,08	18224392,31	26649410,55	19149942,92	28451718	20077434	30281979	20962972	30692109	20594402
Tapanuli Selatan	39599860,01	30028958,77	43013713,82	31401969,50	45961324	32830961	49417535	34347618	51668052	34305396
Tapanuli Tengah	21992877,34	16900836,01	23523118,68	17454368,87	24934361	18040975	26433899	18648165	26477888	18203889
Tapanuli Utara	21312628,59	17151461,02	22718451,43	17731975,77	24332249	18374589	26140945	19102543	27246495	19267812
Toba	33954467,90	26393269,60	36615274,04	27535657,44	39204402	28735785	41779457	29958640	42524221	29751362
Labuhanbatu	56332871,79	42604783,14	60658159,21	43979259,20	64345055	45453757	68012800	47012834	69085836	46357519
A s a h a n	40981266,68	31293960,55	44555987,74	32732373,10	47854663	34298167	51302635	35962477	52640072	35780457
Simalungun	35326467,10	27512314,33	38243965,00	28764975,24	41038393	30098897	43848908	31510550	45247609	31692547
D a i r i	26490917,86	20271732,74	28539613,07	21175176,62	30228407	22131904	32241619	23108409	32639340	22796800
K a r o	42179797,30	31505119,61	44792748,98	32603230,05	46917382	33548969	49497030	34568496	49703135	33795196
Deli Serdang	41086202,19	29837900,25	44071079,20	30734437,46	46882094	31703566	49794458	32735982	49296987	31596560
L a n g k a t	33244425,69	25003534,61	36004090,78	26085037,98	38504178	27206663	40810325	28410907	41225072	27996619
Nias Selatan	16686383,01	11763472,56	18080302,09	12183709,28	19694732	12669144	21448686	13194782	22213405	13167661
Humbang Hasundutan	25828988,59	19348073,78	27449464,04	20136242,78	29325411	20936544	31291803	21773933	31930248	21564757
Pakpak Bharat	19798591,51	15474460,42	21119501,92	16119206,71	22589017	16729545	24077148	17416969	24379166	17122646
Samosir	27655311,47	21171504,34	29987135,52	22197192,88	32469661	23301473	35143764	24556542	35852360	24310851
Serdang Bedagai	36198406,35	27264694,46	39310886,99	28578473,62	42294269	29972081	45359548	31462549	46299373	31255000
Batu Bara	68086625,70	52272754,35	73241432,70	53873805,41	77415555	55687755	81748911	57620640	83283485	56947093

Kabupaten - Kota	2016		2017		2018		2019		2020	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
Padang Lawas Utara	35210924,50	27119753,19	37667328,69	28068885,58	40154176	29095952	42607913	30172575	43938950	29999338
Padang Lawas	33388751,50	25498070,39	35931148,30	26353881,12	38458403	27346229	40435311	28300859	41856145	28097476
Labuhanbatu Selatan	65559964,02	50216524,00	70974722,85	51732841,88	75465242	53459816	80040545	55313132	81779044	54809358
Labuhanbatu Utara	54654596,64	41874816,84	59161909,93	43618783,14	63032129	45475598	67007345	47439334	68715325	47207991
Nias Utara	20573074,57	15138638,09	22103089,73	15684401,30	23724681	16267983	25484234	16905750	26729365	17070303
Nias Barat	16600241,44	12597770,98	18050353,03	13125660,67	20490439	14448585	22115147	15053785	23324661	15253611
S i b o l g a	49117363,95	35293313,19	53331855,64	37025798,10	57994856	38868882	63126737	40745042	63850127	40114803
Tanjungbalai	39758871,09	29006558,13	43373414,04	30229196,27	47175954	31584351	51086050	33045713	51865982	32559561
Pematangsiantar	46409051,57	33589800,87	49475993,05	34790380,00	51979135	36174303	54572353	37646294	54140600	36677062
Tebing Tinggi	29750906,29	21401550,46	31883399,04	22251504,28	33906282	23130037	36034837	24050958	36418803	23638732
M e d a n	83452215,39	59236740,66	90903967,67	62173471,60	98263688	65369991	105918236	68766610	105532865	66958442
B i n j a i	33883689,67	25888496,16	36385764,17	26978848,74	39304878	28144644	42300163	29405726	42137418	28587180
Padangsidimpuan	23076048,36	17081174,31	24872966,22	17731903,34	26765890	18451718	28730165	19210086	28860372	18845141
Gunungsitoli	29298499,80	20889511,75	32337866,95	21891891,66	35486672	22940736	38714256	24071793	40174402	23937570
Sumatera Utara	44392000	32885	48004000	34184	51427000	35570	54909000	37048	55176000	36301
Indonesia	47937700	36468,6	51891200	37851,4	55992100	39340,6	59060100	40843,2	56938700	39556,6

Sumber : Buku PDRB menurut lapangan usaha 2016-2020.

1.2.1.4 Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Koefisien Gini *(Gini Ratio)* adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gini-nya makin mendekati satu (1). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-39 Patokan Nilai Koefisien Gini

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
< 0,4	tingkat ketimpangan rendah
0,4 - 0,5	tingkat ketimpangan sedang
> 0,5	tingkat ketimpangan tinggi

Sumber: Kajian Ekonomi Regional BPS Sumatera Utara

Untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh pada suatu daerah dapat digunakan Indeks Gini atau Gini Ratio. Semakin gini ratio mendekati angka 0 berarti ketimpangan pendapatan semakin rendah/kecil. Gini Ratio Kabupaten Toba mengalami penurunan pada Tahun 2017 berada pada angka 0.2922 dari Tahun 2016 dengan angka 0.3077 namun pada Tahun 2018 mengalami peningkatan mencapai angka 0.3279. untuk tahun 2019 turun menjadi 0.275 dan tahun 2020 Gini ratio mengalami kenaikan dengan angka 0.290.

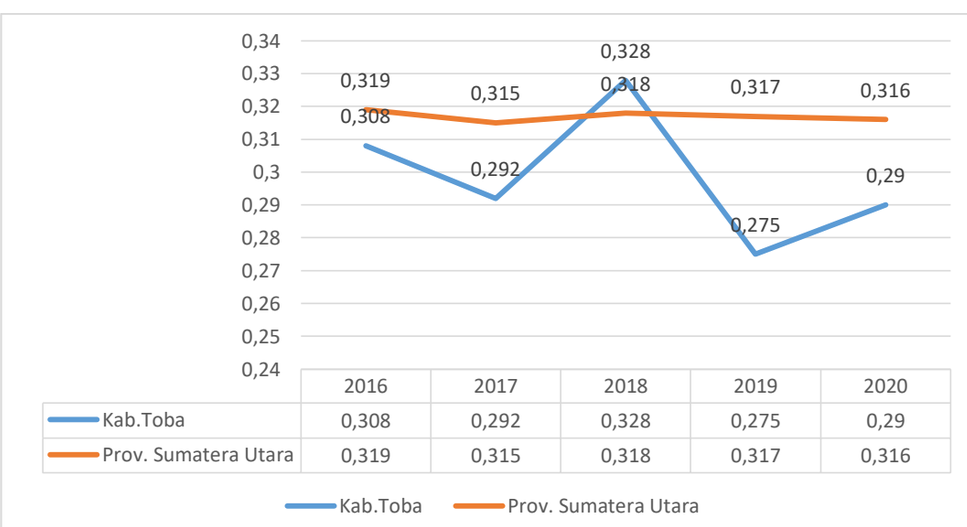

Gambar II-9 Perkembangan angka Gini Ratio Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

1.2.1.5 Kemiskinan

Penduduk dikategorikan menjadi penduduk miskin jika pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan kunci yang dihitung melalui konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Toba menunjukkan garis kemiskinan pada tahun 2018 di Kabupaten Toba Rp. 352.860,00 artinya setiap penduduk Kabupaten Toba dengan nilai pengeluaran di bawah Rp. 352.860,00,- selama sebulan termasuk dalam kategori penduduk miskin, Tahun 2019 Garis Kemiskinan menjadi Rp. 373.020, dinilai mengalami peningkatan garis kemiskinan dimana nilai pengeluaran dibawah 373.020 selama sebulan termasuk dalam kategori miskin. Pada tahun 2020 garis kemiskinan Kabupaten Toba mengalami peningkatan menjadi Rp. 404.864 yang artinya pengeluaran dibawah Rp. 404.864 selama sebulan termasuk dalam kategori miskin.

Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Toba sebesar 16.050 jiwa, mengalami dari Tahun 2019 penduduk miskin sebanyak 15.780 jiwa sementara tingkat kemiskinan juga mengalami peningkatan dari Tahun 2019 sebesar 8.60 % menjadi 8.71 % pada Tahun 2020, Lebih lengkap ditunjukkan dengan gambar berikut:

Tabel II-40 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	18.2	18.49	15.82	15.78	16.05
Tingkat Kemiskinan	%	10.08	10.19	8.67	8.6	8.71
P1 (Indeks Kedalaman)	%	1.2	1.82	1.25	1.21	1.00
P2 (Indeks Keparahan)	%	0.24	0.49	0.31	0.26	0.18
Garis Kemiskinan	Rp.	326,501.00	345,591.00	352,860.00	373,020	404,864

Sumber : Toba dalam angka , 2021

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Toba tetap dilakukan sepanjang waktu melalui berbagai kegiatan prioritas. Selain perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, rumah layak huni), pemberian bantuan, pemberian beasiswa bagi masyarakat tidak mampu, pemberdayaan masyarakat melalui berbagai jenis pelatihan yang mengikutsertakan masyarakat juga tetap dilakukan.

Kemiskinan yang diukur dari parameter garis kemiskinan (rupaih/kapita/bulan) sehingga diproleh jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dari seluruh populasi penduduk. Data kemiskinan Kabupaten Toba dan Kabupaten-kota di Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-41 Perbandingan Kemiskinan Kab. Toba dengan Prov. Sumatera Utara dan Nasional

Kabupaten -Kota	2016			2017			2018			2019			2020		
	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/ bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/ bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/ bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/ bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/ bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
Nias	330 111	24,11	17,64	346 374	24,9	18,11	353 141	22,6	16,37	361 698	22,1	15,94	405 355	23,12	16,6
Mandailing Natal	304 669	47,67	10,98	319 777	48,3	11,02	336 820	42,4	9,58	356 058	40,64	9,11	400 721	41,31	9,18
Tapanuli Selatan	326 321	30,84	11,15	340 065	29,5	10,6	343 407	25,6	9,16	364 798	24,22	8,6	397 363	23,96	8,47
Tapanuli Tengah	353 753	51,77	14,58	367 687	53,1	14,66	369 471	48,5	13,17	376 474	46,99	12,53	406 646	47,19	12,38
Tapanuli Utara	325 606	33,2	11,25	344 644	33,8	11,35	357 464	29,2	9,75	377 948	28,57	9,48	406 813	28,41	9,37
Toba	326 501	18,2	10,08	345 591	18,5	10,19	352 860	15,8	8,67	373 020	15,78	8,6	404 864	16,05	8,71
Labuhanbatu	333 144	41,94	8,95	352 622	42,4	8,89	368 357	41,7	8,61	389 402	41,52	8,44	425 035	42,17	8,44
Asahan	292 030	84,35	11,86	305 868	83,7	11,67	315 420	74,1	10,25	330 460	70,53	9,68	351 314	66,32	9,04
Simalungun	315 947	92,19	10,81	331 860	91,4	10,65	342 477	80,3	9,31	359 540	76,33	8,81	387 549	73,64	8,46
Dairi	293 666	24,94	8,9	310 836	25	8,87	325 176	23,2	8,2	341 511	21,86	7,7	380 275	22,93	8,04
Karo	400 261	38,74	9,81	423 663	40	9,97	437 702	35,4	8,67	460 870	34,08	8,23	500 921	36,57	8,7
Deli Serdang	347 030	100,09	4,86	363 371	97,1	4,62	381 173	88,5	4,13	390 440	84,94	3,89	413 202	86,26	3,88
Langkat	348 205	115,79	11,36	364 517	114	11,15	382 536	105	10,2	392 050	103,08	9,91	412 422	101,87	9,73
Nias Selatan	238 119	57,75	18,6	249 225	58	18,48	261 104	52,7	16,65	279 468	52,51	16,45	312 453	53,88	16,74
Humbang Hasundutan	301 663	18,04	9,78	313 545	18,4	9,85	329 189	16,9	9	336 500	16,6	8,75	374 768	17,92	9,36
Pakpak Bharat	248835	4,95	10,72	256781	4,95	10,53	283258	4,66	9,74	287654	4,52	9,27	311584	4,59	9,28
Samosir	271619	18,01	14,4	287857	18,4	14,72	299640	16,8	13,38	315825	15,79	12,52	341843	15,8	12,48
Serdang Bedagai	336478	58,17	9,53	350892	56,9	9,3	361623	50,5	8,22	382283	48,69	7,9	416991	49,18	7,97
Batu Bara	347533	49,42	12,24	363741	50,9	12,48	381651	51,8	12,57	408417	50,46	12,14	452393	49,78	11,88
Padang Lawas Utara	278290	27,88	10,87	291036	28	10,7	321076	26,8	10,06	342885	26,06	9,6	380379	26,79	9,7
Padang Lawas	268922	22,8	8,69	281464	24,4	9,1	310569	23	8,41	332350	23,17	8,28	367932	23,87	8,37
Labuhanbatu Selatan	330874	36,62	11,49	346305	37,8	11,63	355517	33,1	10	368205	30,17	8,94	404819	28,63	8,34
Labuhanbatu Utara	361017	38,81	10,97	378024	40,2	11,28	395696	36,4	10,12	422063	34,76	9,57	471678	34,86	9,53
Nias Utara	370371	41,66	30,92	381696	39,5	29,06	383552	36,3	26,56	390564	34,42	24,99	429836	34,75	25,07
Nias Barat	352570	24,16	28,36	361397	23,3	27,23	386431	23	26,72	393450	22,08	25,51	433249	22,33	25,69
Sibolga	391681	11,54	13,3	413454	11,9	13,69	415478	10,8	12,38	425236	10,82	12,36	453786	10,49	11,95
Tanjungbalai	345900	24,42	14,49	374442	24,7	14,46	397647	25,3	14,64	421671	24,54	14,04	444125	23,54	13,33
Pematangsiantar	429365	24,88	9,99	464794	25,4	10,1	474084	22	8,7	502726	21,99	8,63	536486	21,23	8,27
Tebing Tinggi	383650	18,52	11,7	415307	19,1	11,9	426469	16,6	10,27	460533	16,3	9,94	493227	16,32	9,85
Medan	460685	206,87	9,3	491496	204	9,11	518420	186	8,25	532055	183,79	8,08	553796	183,54	8,01
Binjai	343078	17,8	6,67	371387	18,2	6,75	380792	16,1	5,88	403798	15,61	5,66	433746	15,91	5,71
Padangsidimpuan	326579	17,65	8,32	348074	17,8	8,25	363468	16,8	7,69	382884	16,06	7,26	417455	16,56	7,4
Gunungsitoli	304727	32,17	23,43	318585	30,1	21,66	327303	25,9	18,44	339671	23,06	16,23	370967	23,54	16,41
Sumatera Utara	388156	1 455,95	10,35	411345	1454	10,22	435970	1325	9,22	466122	1 282,04	8,83	502904	1 283,29	8,75
Indonesia	350420	17278,68	13,96	400995	10275,55	13,47	425770	10131,28	6,89	458380	9857,75	6,56	475477	12038,5	7,88

Sumber : Badan Pusat statistic, 2021

1.2.1.6 Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pembangunan Ekonomi Inklusif adalah suatu usaha dalam pembangunan untuk menyediakan suatu kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk menaikan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan dalam kelompok dan wilayah (sumber: inklusif.bappenas.go.id).

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif adalah alat ukur untuk mengukur tingkat inklusivitas pembangunan di Indonesia pada level nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Indeks ini mengukur inklusivitas pembangunan dari tigas aspek yaitu:

1) Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhaan Ekonomi dan Kesempatan Kerja).
2) Ketimpangan dan Kemiskinan (Ketimpangan dan Kemiskinan)
3) Akses dan Kesempatan (Kapabilitas Manusia, Infrastruktur Dasar dan Keuangan Inklusif)

Data Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif untuk daerah Kabupaten Toba pada periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-42 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kab. Toba 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	5,53	5,55	5,62	5,87	5,8

Sumber : Kementerian PPN.

1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia di Toba terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Toba mencapai 75.16. Angka ini meningkat sebesar 0,24 poin atau tumbuh sebesar 0,59 persen dibandingkan tahun 2019. Bayi yang lahir di Toba pada tahun 2020 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70.08 tahun, lebih lama 0,15 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak yang pada tahun 2020 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,45 tahun, lebih lama 0,17 tahun dibandingkan dengan tahun 2019. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 10,52 tahun, lebih lama 0,16 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, masyarakat Toba memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp. 12.154 (ribu rupiah) per tahun, menurun 221 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Secara umum, pembangunan manusia Toba terus mengalami kemajuan selama periode 2016 hingga 2020. IPM Toba meningkat dari 73.61 pada tahun 2016 menjadi 75.16 pada tahun 2020. Selama periode tersebut, IPM Toba rata-rata tumbuh sebesar 0,51 persen per tahun. Kabupaten Toba menduduki peringkat ke 7 diantara 33 kabupaten/kota yang lain setelah Kota Medan Kota Pematang Siantar, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi dan Kota Padang Sidempuan.

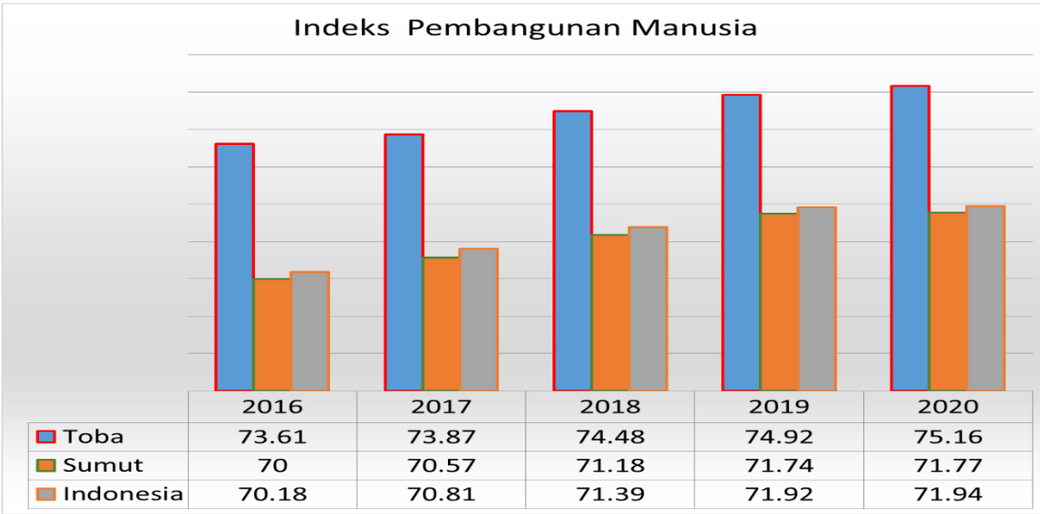

Sumber : Toba dalam angka , 2021

Gambar II-10 Pertumbuhan IPM Kabupaten Toba. Tahun 2016-2020

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. sementara itu, indeks pembentuk IPM Kabupaten Toba yaitu Usia Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, rata rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita dapat diuaraikan sebagai berikut:

Tabel II-43 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Toba menurut Komponen Tahun 2016-2020

Komponen	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup saat lahir	Tahun	69.25	69.36	69.59	69.93	70.08
Harapan lama sekolah	Tahun	13.19	13.25	13.26	13.28	13.45
Rata Rata Lama sekolah	Tahun	10.09	10.10	10.34	10.36	10.52
Pengeluaran perkapita	Rp (ribu)	11.687	11.846	12.095	12.375	12,154
IPM		**73.61**	**73.87**	**74.48**	**74.92**	**75.16**
Pertumbuhan IPM	%	**0.27**	**0.37**	**0.83**	**0.59**	**0.31**

Sumber : Toba dalam angka , 2021

1.2.2.2 Angka Melek Huruf

Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf atau tingkat buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Kemampuan membaca dan menulis akan mendorong meningkatnya peran aktif penduduk dalam proses pembangunan Secara persentase, penduduk usia 10 tahun ke

atas yang belum dapat membaca dan menulis di Kabupaten Toba dapat dikatakan rendah. Menurut hasil Susenas 2019, persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melek huruf sebanyak 99,34 persen dan buta huruf 0,66 persen.

Tabel II-44 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Melek Huruf	99.42	99.42	99.45	99.20	99.59	99.80

Sumber : Statistik Kesejahteraan Kab.Toba, 2021

1.2.2.3 Angka Partisipasi

Angka Partisipasi Sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah dibedakan menjadi dua yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM mengukur proporsi anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu sedangkan APK menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nilai APK dan APM Kabupaten Toba selengkapnya tercantum pada Tabel berikut :

Tabel II-45 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Partisipasi Murni (%)					
	a) SD	91.45	91.18	83.89	91.78	98.90
	b) SMP/MTs	75.36	75.44	70.32	74.48	89.95
	c) SLTA/SMK	86.76	82.67	82.62	82.07	82.04
2.	Angka Partisipasi Kasar (%)					
	a) SD	107.52	106.9	97.65	103.4	106.97
	b) SMP/MTs	97.49	99.67	99.08	100.46	107.01
	c) SLTA/SMK	109.93	108.13	102.66	106.52	98.51

Sumber : Toba dalam angka , 2021

1.2.2.4 Angka Kelulusan

Angka Kelulusan di Kabupaten Toba mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh capaian prestasi siswa secara akademik sesuai dengan standar kelulusan yang telah ditentukan, sistem pendidikan yang diterapkan, kurikulum yang diberlakukan dan kualitas pendidik yang baik dalam mengantarkan siswa mengikuti ujian. Upaya untuk memperbaiki hal ini adalah adanya pengawasan kepada seluruh siswa menjelang, saat dan pasca ujian, dan adanya kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam proses pendidikan, hingga pelaksanaan ujian kelulusan berlangsung.

Tabel II-46 Angka Kelulusan di Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Kelulusan	99.80	99.95	99.98	99.99	99.99

Sumber : Toba dalam angka , 2021

1.2.2.5 Angka Harapan Lama Sekolah.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) diartikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel II-47 Angka Harapan Sekolah di Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Harapan lama sekolah	13.19	13.25	13.26	13.28	13.45

Sumber : Toba dalam angka , 2021

Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Toba dan Kabupaten Kota di provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-48 Perbandingan Angka harapan Sekolah Kab.Toba dengan Prov. Sumatera Utara dan Nasional

Kabupaten - Kota	2016		2017		2018		2019		2020	
	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah
N i a s	12,09	4,92	12,12	4,93	12,13	4,94	12,39	5,15	12,57	5,36
Mandailing Natal	12,78	7,89	12,99	8	13,15	8,11	13,17	8,36	13,32	8,62
Tapanuli Selatan	13,07	8,35	13,08	8,67	13,1	8,7	13,12	8,97	13,24	9,28
Tapanuli Tengah	12,45	8,03	12,65	8,28	12,66	8,29	12,79	8,48	13,06	8,62
Tapanuli Utara	13,61	9,32	13,65	9,46	13,66	9,65	13,68	9,71	13,69	9,85
Toba	13,19	10,09	13,25	10,1	13,26	10,34	13,28	10,36	13,45	10,52
Labuhanbatu	12,58	8,78	12,59	9,01	12,6	9,04	12,67	9,23	12,73	9,24
A s a h a n	12,52	8,33	12,53	8,46	12,56	8,47	12,59	8,49	12,6	8,79
Simalungun	12,7	8,86	12,71	8,95	12,75	9,18	12,77	9,36	12,78	9,6
D a i r i	12,84	8,7	13,06	8,9	13,07	9,15	13,09	9,34	13,1	9,58
K a r o	12,65	9,51	12,71	9,54	12,73	9,55	12,75	9,62	12,76	9,79
Deli Serdang	12,69	9,68	12,9	9,7	13,32	9,92	13,34	10,08	13,35	10,09
L a n g k a t	12,71	8,18	12,72	8,51	12,75	8,52	12,81	8,64	13,05	8,65
Nias Selatan	11,97	4,65	11,98	4,95	12,2	5,2	12,22	5,53	12,23	5,85
Humbang Hasundutan	13,21	8,91	13,24	9,1	13,25	9,28	13,27	9,53	13,28	9,54
Pakpak Bharat	13,81	8,46	13,82	8,47	13,83	8,48	13,85	8,73	13,86	9,03
Samosir	13,42	8,94	13,43	8,95	13,44	9,14	13,46	9,15	13,47	9,43
Serdang Bedagai	12,54	8,34	12,55	8,35	12,57	8,51	12,59	8,53	12,6	8,54
Batu Bara	12,34	7,75	12,49	7,83	12,52	7,84	12,62	8,02	12,63	8,06
Padang Lawas Utara	12,3	8,92	12,41	8,93	12,42	9,06	12,47	9,1	12,87	9,37
Padang Lawas	12,92	8,41	12,99	8,43	13	8,67	13,02	8,69	13,03	9,01
Labuhanbatu Selatan	12,94	8,69	12,95	8,7	12,97	8,71	12,99	8,74	13	8,75
Labuhanbatu Utara	12,54	8,33	12,79	8,34	12,8	8,35	12,82	8,36	13,04	8,4

Kabupaten - Kota	2016		2017		2018		2019		2020	
	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah
Nias Utara	12,41	6,07	12,57	6,08	12,58	6,09	12,78	6,25	13,03	6,58
Nias Barat	12,6	5,77	12,61	5,78	12,66	6	12,71	6,14	12,94	6,49
S i b o l g a	13,11	9,86	13,12	9,87	13,13	9,91	13,15	10,18	13,16	10,4
Tanjungbalai	12,41	9,13	12,44	9,14	12,47	9,24	12,49	9,26	12,5	9,44
Pematangsiantar	14	10,75	14,01	11,06	14,02	11,08	14,21	11,15	14,45	11,16
Tebing Tinggi	12,65	10,07	12,66	10,09	12,68	10,24	12,71	10,28	12,72	10,31
M e d a n	14,06	11,18	14,45	11,25	14,72	11,37	14,73	11,38	14,74	11,39
B i n j a i	13,57	10,28	13,58	10,58	13,59	10,75	13,61	10,77	13,62	10,93
Padangsidimpuan	14,49	10,48	14,5	10,56	14,51	10,63	14,53	10,7	14,54	11
Gunungsitoli	13,66	8,2	13,69	8,4	13,71	8,41	13,73	8,58	13,74	8,61
Sumatera Utara	13	9,12	13,1	9,25	13,14	9,34	13,15	9,45	13,23	9,54
Indonesia	12,72	7,95	12,85	8,1	12,91	8,17	12,95	8,34	12,98	8,48

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

1.2.2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) digolongkan sebagai: (i) angkatan kerja, bila mereka bekerja atau mencari pekerjaan dan secara ekonomis berpotensi menghasilkan output atau pendapatan,dan (ii) bukan angkatan kerja, bila mereka bersekolah, mengurus rumahtangga, dan lainnya. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berarti semakin besar keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam pasar kerja. Persentase penduduk usia kerja di Toba yang bekerja adalah sebesar 81.21 %, di mana laki-laki sebesar 86.10 % dan perempuan sebesar 75.80 %. TPAK Toba berdasarkan hasil Sakernas 2020 adalah sebesar 81.21. TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK perempuan, hal ini berarti bahwa penduduk laki-laki lebih besar terlibat dalam pasar kerja. Dari total penduduk usia kerja (15 Tahun ke atas), sekitar 81.21 persen penduduk Kabupaten Toba termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka penduduk laki laki sebanyak 1,19 % dan Penduduk perempuan sebesar 2.57 % sehingga tingkat pengangguran terbuka secara umum sebesar 2.42 %.

Tabel II-49 Perkembangan TPAK dan TPT
Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	TPAK	80.28		84.30	79.89	82.03	81.21
2.	TPT	3.47		2.18	2.15	1.26	2.5

Sumber : SIPD. 2019

Perbandingan Nilai TPAK dan TPT Kabupaten Toba dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-50 Perbandingan TPAK dan TPT kab. Toba dengan Prov. Sumatera Utara dan Nasional

Kabupaten-Kota	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT
N i a s	85,72	0,92			81,44	1,19	81,41	1,62	84,69	1,09	81,16	3,49
Mandailing Natal	73,09	5,78			76,44	5,75	73,59	4,43	71,16	6,37	65,94	6,5
Tapanuli Selatan	76,87	5,91			78,73	5,8	76,8	5,28	75,22	4,17	78,54	4,42
Tapanuli Tengah	75,94	4,98			68,34	7,39	75,43	6,38	71,49	7,26	70,91	7,54
Tapanuli Utara	83,57	2,56			84,93	1,89	83,8	1,42	81,78	1,33	82,18	2,94
Toba	80,28	3,47			80,3	2,18	79,89	2,15	82,03	1,26	81,21	2,5
Labuhanbatu	59,95	11,39			56,15	7,09	67,94	6,98	62,39	5,7	64,91	6,05
A s a h a n	61,16	5,82			64	5,95	67,63	5,26	64,94	6,86	59,62	7,24
Simalungun	70,23	5,75			69,43	5,62	73,28	5,1	71,4	4,39	71,83	4,58
D a i r i	86,45	1,26			86,7	1,42	88,5	1,69	86,97	1,58	70,22	1,75
K a r o	85,25	2,23			78,07	1,34	84,1	1,5	83,73	1,09	83,93	1,83
Deli Serdang	61,23	6,38			65,53	6,16	70,37	7,06	68,65	5,74	67,23	9,5
L a n g k a t	64,51	8,02			67,73	3,57	71,33	4,67	68,82	5,3	69,92	7,02
Nias Selatan	78,88	0,4			79,8	1,28	79,03	3,77	72,22	2,25	77,14	4,15
Humbang Hasundutan	87,1	1,22			87,74	0,31	91,17	0,34	88,55	0,33	87,13	0,84
Pakpak Bharat	87,76	2,88			90,53	0,49	92,8	0,43	87,97	0,19	88,95	1,93
Samosir	88,38	1,28			88,87	1,28	82,78	1,35	81,58	1,25	52,17	1,2
Serdang Bedagai	63,05	7,18			67	5,98	68,28	5,1	70,7	4,37	69,82	5,54
Batu Bara	57,72	6,32			66,07	5	69,47	5,39	64,89	6,69	69,1	6,48

Kabupaten-Kota	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT
Padang Lawas Utara	77,6	5,01			78,19	3,21	78,91	3,15	77,92	3,21	66,04	3,11
Padang Lawas	71,87	5,95			70,21	4,24	71,78	4,1	76,1	4,24	76,93	4,11
Labuhanbatu Selatan	67,73	4,15			66,27	5,68	68,39	4,79	65,49	4,8	60,94	4,9
Labuhanbatu Utara	66,94	8,75			62,91	6,35	69,66	5,67	66,69	5,84	68,08	6,82
Nias Utara	79,13	4,02			73,65	2,67	79,69	2,4	75,44	3,07	73,71	4,54
Nias Barat	85,3	2,96			83,91	1,23	90,79	1,23	81,93	1,63	51,83	1,71
S i b o l g a	70,04	10,25			71,45	9,29	74,36	8,61	70,92	7,4	70,38	8
Tanjungbalai	64,83	10,06			70,46	5,5	70,23	5,58	64,83	6,82	65,84	6,97
Pematangsiantar	68,63	9,47			67,12	8,8	66,29	12,14	71,11	11,09	70,45	11,5
Tebing Tinggi	62,81	10,46			63,35	9,73	68,61	7,23	66,72	8,6	69,27	9,98
M e d a n	60,28	11			64,35	9,46	65,99	8,25	64,89	8,53	63,62	10,74
B i n j a i	65,44	10			62,03	5,95	66,78	7,4	66,89	6,14	65,14	8,67
Padangsidimpuan	68,27	6,96			70,86	3,78	72,59	5,18	72,9	4,34	73,24	7,45
Gunungsitoli	66,5	10			70,58	6	68,07	5,92	71,42	5,59	62,82	5,94
Sumatera Utara	67,28	6,71			68,88	5,6	71,82	5,56	70,19	5,41	68,67	6,91
Indonesia	65,76	6,18			66,67	5,5	67,27	5,34	67,49	5,28	67,77	7,07

1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis atas kinerja Seni Budaya dan Olahraga dilakukan terhadap indikator kebudayaan dan pemuda dan olahraga:

A. Seni Budaya

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab.

Pelaksanaan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Toba untuk mengangkat keseniaan tradisional, upacara adat yang berkembang di masyarakat. Salah satu bentuk budaya yang dikembangkan adalah benda peninggalan sejarah, di wilayah Kabupaten Toba terdapat beberapa peninggalan sejarah yang bernilai historis tinggi. Salah satu museum yang mengumpulkan benda benda bersejarah adalah Musemum TB. Silalahi Center. Di bawah ini disampaikan data tentang sanggar seni budaya, grup tari tradisional dan grup musik tradisional sebagaimana tarmuat dalam tabel berikut:

Tabel II-51 Perkembangan Sanggar Seni Budaya, Grup Tari Tradisional dan Grup Musik Tradisional Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR		TAHUN			
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1.	Jumlah even seni	24	24	27	30	19
2.	Jumlah Group Kesenian	30	30	30	30	30
3.	Jumlah Group Kesenian aktif	30	30	30	30	30
4.	Jumlah rintisan desa budaya	--	--	--	35	35
5.	Jumlah Cagar budaya	423	423	423	423	423
6.	Jumlah Warisan dan cagar budaya yang dipelihara	5	5	5	5	10

Sumber: SIPD

B. Olah Raga

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Toba Tahun 2016-2020 hanya 1 organisasi dengan jumlah klub olahraga di tahun 2016-2020 sebanyak 10 klub , data ini menunjukkan bahwa belum bertambahnya minat masyarakat terhadap olah raga serta dukungan komitmen pemerintah untuk peningkatan prestasi olah raga masyarakat melalui pembinaan dan pengembangan klub olah raga yang ada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada table berikut.

Tabel II-52

Tabel II-53 Jumlah Klub Olah Raga Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR		TAHUN			
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1.	Jumlah Organisasi Olah Raga	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Klub Olah Raga	8	8	10	10	10
3.	Jumlah Gedung Olah raga	1	1	1	1	1

1. 3 Aspek Pelayanan Umum

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari Perangkat Daerah Kabupaten Toba.

1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing output pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Toba telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelola potensi yang ada pada urusan pendidikan mulai dari Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendididkan Non Formal (PNF), Pembinaan Sekolah Dasar (SD), Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pengembangan Budaya Baca dan Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.

Pada urusan Pendidikan, terdapat beberapa indikator meliputi Angka Partisipasi Kasar (APK) , Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Nilai APK untuk SMP melebihi dari 100% hal ini disebabkan karena jumlah murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu mencakup anak berusia diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan bersangkutan. Sebagai contoh banyak anak anak usia 15 tahun atau juga anak anak yang berusia 12 tahun tetapi telah masuk SMP. Adapun capaian kinerja APK untuk SD/Mi mengalami kondisi Penurunan dimana Tahun 2016 107.52, Tahun 2017 106.9 dan terus mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 97.65 %,walaupun pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018 menjadi 103.4

Capaian APM SD/Mi mengalami penurunan dari Tahun 2016 adalah 91.45%, Tahun 2017 menjadi 91.18 %, Tahun 2018 menjadi 83.89 dan Tahun 2019 mencapai 91.78 %. Sedangkan APM SMP juga mengalami penurunan Tahun 2015 dengan angka 79.98 % mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 75.36, Tahun 2017 menjadi 75.44 dan Tahun 2018 menurun kembali menajadi 70.32, pada Tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 74.48 %.

Capaian Angka Harapan Lama Sekolah perkembangannya cukup bervariatif, Tahun 2016 berada pada angka 13.19 Tahun, Tahun 2017 berada pada angka 13.25, kemudian pada tahun 2018 berada pada angka 13.05 dan tahun 2019 berada pada angka 13.28 Tahun.

Angka Putus sekolah menunjukkan trend positif, dimana selalu mengalami penurunan di setiap tahunnya walapun di jenjang SMP pada Tahun 2018 mengalami kenaikan angka dari tahun 2017 sebanyak 0.47 % dan Tahun 2018 menjadi 0.94 % namun pada Tahun 2019 angka putus sekolah SD dan SMP tidak ada (0), pada Tahun 2020 angka putus sekolah 0.01 %

Tabel II-54 Kondisi Pendidikan Kabupaten Toba Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	APK PAUD		64.17	64.00	67.30	48.10	67.47
2.	APM :						
	SD	%	91.45	91.18	83.89	91.78	98.10
	SMP	%	75.36	75.44	70.32	74.48	89.95
3.	APK:						
	SD	%	107.52	106.9	97.65	103.4	106.97
	SMP	%	97.49	99.67	99.08	100.46	107.01
4.	Angka Harapan Lama Sekolah	%	13,19	13,25	13.05	13.28	13.45
5.	Standar Kompetensi Pendidik:						
	Guru yang memiliki kualifikasi S1/D4	Orang	2162	2201	2230	2259	2288
	Guru yang telah bersertifikat pendidik	Orang	1272	1354	1370	1482	1423
6.	Angka Rata Rata lama sekolah	%	10,09	10,10	10.34	10.36	10.52
7.	Angka Kelulusan						
	Sekolah Dasar (SD)	%	99.52	99.59	99.33	99.99	99.99
	Sekolah Menengah Pertama	%	99.45	99.53	99.06	99.99	99.99
8.	Angka Putus Sekolah						
	Sekolah Dasar (SD)	%	0.48	0.41	0.67	0	0.7
	Sekolah Menengah Pertama	%	0.55	0.47	0.94	0	0.01

Kinerja pendidikan berdasarkan indikator Sustainble Development Goals (SDG"s) disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II-55 Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pendidikan.

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan 4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.					
Target 4.1	Pada Tahun 2030 menjamin bahwa anak perempuan dan anak laki laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.					
	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.					
	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	26	31	53	92	97
	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	13.3%	27.7%	51.1%	65.2%	73.3%
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	107.52	106.9	97.65	103.4	106.97

	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	97.49	99.67	99.08	100.46	107.01
Target 4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.					
	Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.					
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	64.17	64.00	67.30	48.10	67.47
Target 4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.					
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat;	91.45	91.18	83.89	91.78	98.10
	(2) SMP/MTs/ sederajat;	75.36	75.44	70.32	74.48	89.95
	(3) SMA/SMK/ MA/sederajat;					
Target 4.6	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/ MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.					
	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	99.95	100	100	100	100
	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15- 24 tahun dan umur 15-59 tahun.	99.42	99.50	99.80	99.85	99.99
Target 4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.					
	a. listrik	80	81	85	87	89
	b. internet untuk tujuan pengajaran,	12	28	30	34	34
	c. computer untuk tujuan pengajaran,	12	28	30	34	34
	d. infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas,	0	0	0	0	0
	e. air minum layak,	55	55	62	67	67
	f. fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	54	54	54	67	67
	g. fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	41	41	45	51	82

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar yang dilaksanakan urusan Pendidikan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Untuk penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, dan penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan tahun 2016-2021 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel II-56 SPM Pendidikan Dasar Tingkat Kabupaten 2016-2018

No	Indikator Pencapaian	Capaian		
		2016	2017	2018
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki maksimal 3 km untuk SD dan MI dan 6 km untuk SMP dan MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	92	95	100
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD dan MI tidak melebihi dari 32 orang, dan untuk SMP dan MTs tidak melebihi dari 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan serta papan tulis.	80	95	100
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	60	60	70
4	Di setiap SD & MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya; dan di setiap SMP & MTs tersedia ruang kepala sekolah (KS) yang terpisah dari ruang guru.	80	95	100
5	Disetiap SD & MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik, dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan; dan untuk daerah khusus 4orang guru di setiap satuan pendidikan.	80	90	90
6	Di setiap SMP & MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.	80	95	100
7	Di setiap SD & MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	92	95	92
8	Disetiap SMP & MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik; untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.	80	90	97
9	Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik,masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggirs dan Pkn.	92	95	98
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	80	82	85
11	Di setiap Kabupaten/Kota semua Kepala SMP dan MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	80	95	100

No	Indikator Pencapaian	Capaian		
		2016	2017	2018
12	Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	80	82	80
13	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.	80	95	100
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan Selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	80	95	100
15	Setiap SD dan MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya (disertifikasi) oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.	92	95	100
16	Setiap SMP & MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya(disertifikasi) oleh pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	80	82	100
17	Setiap SD & MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster IPA.	82	80	80
18	Setiap SD & MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 judul buku referensi, dan setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 judul buku referensi	82	80	80
19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam perminggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pelaksanaan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.	65	65	67
20	Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : Kelas I-II : 18 jam per minggu, Kelas III : 24 jam per minggu, Kelas IV-VI : 27 jam per minggu, Kelas VII-IX : 27 jam per minggu.	92	95	100
21	Setiap satuan pendidikan menerapkan Kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	88	90	100
22	Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.	92	95	100
23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.	88	90	100
24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	90	95	100
25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil evaluasi peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan prestasi belajar peserta didik.	88	90	100
26	Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kemenag pada setiap akhir semester	92	95	100
27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Definisi Operasional	92	95	100

Tabel II-57 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2019

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran (orang)		Capaian (Siswa)		Realisasi (%)		Target SDGS (%)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	8162	8126	3909	5483	47,89	48,1	100	100
Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	33682	41430	26048	40049	77,34	96,67	100	100
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	40925	53865	492	566	1,20	1,05	100	100

Indeks Pendidikan dibentuk dari komponen angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua komponen merupakan gambaran dari capaian pengembangan pendidikan dan gambaran potensi yang dimiliki untuk pengembangan selanjutanya, Indeks Pendidikan Kabupaten Toba dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-58 Indeks Pendidikan

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pendidikan	0,703	0,705	0,713	0,714	0,724

1.3.1.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari meningkatnya usia harapan hidup. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Toba mengalami peningkatan. UHH meningkat disebabkan oleh rendahnya angka kematian.

Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas, posyandu, polindes, pusling roda dua dan lain-lain merupakan sarana dalam meningkatkan dan menunjang kualitas hidup masyarakat yang dapat mendorong keberhasilan peningkatan kualitas kesehatan periode 2016 s/d 2020 mengalami peningkatan ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup dari tahun 2016 dari 69,25 tahun menjadi 70.08 tahun untuk tahun 2020.

Capaian SPM Kesehatan sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Teknis pemenuhan pelayanan dasra pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan, dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel II-59 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Toba Tahun 2016-2018

No	INDIKATOR	CAPAIAN		
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	2016	2017	2018
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta	98	92.17	66.31
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN			
	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan defenitif di satu wilayah kerja	73	83.68	65.27
3	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN			
	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayan kerja pada kurun waktu tertentu	94	89.12	86.07
4	PELAYANAN NIFAS			
	Jumlah Ibu Nifas yang memperoleh 3 x pelayanan nifas sesuai standar	95	94.58	78.49
5	CAKUPAN NEONATUS			
	Jumlah Neonatus dengan komplikasi yang di tangani	100	76.51	29.61
6	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR			
	Jumlah baru lahir usia 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan baru lahir sesuai dengan standar	100	93.36	90.20
7	CAKUPAN DESA UCI			
	Jumlah Desa / Kelurahan UCI	91	92.62	95.49
8	PELAYANAN KESEHATAN BALITA			
	Jumlah balita 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	83	80.12	86.26
9	PELAYANAN KESEHATAN BALITA			
	Jumlah anak usia 6 - 24 tahun keluarga miskin yang mendapat makanan pendamping ASI			
10	PELAYANAN KESEHATAN BALITA			
	Jumlah Balita Gizi buruk mendapat perawatan di saranan pelayanan Kesehatan (Anak)	100	100.00	100.00
11	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR			
	Jumlah murid SD yang mendapatkan pelayanan kesehatan di satuan pendidikan dasar	99	100.00	87.31
12	PELAYANAN KB			
	Jumlah PUS yang menggunakan Kontrasepsi	80	76.66	79.61
13	KASUS AFP			
	Jumlah Kasus AFP Non Polio yang ditemukan	0	0.00	-
14	KASUS PNEUMONIA			
	Jumlah Pneumonia yang ditangani (anak)	31	14.29	8.01
15	Kasus TB BTA Positif			
	Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati	71		72.60
16	PENDERITA DBD YANG DITANGANI			
	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai sop di wilayah tertentu	100	100.00	100.00
17	PENDERITA DIARE YANG DITANGANI			
	Jumlah penderita Diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan	48	39.75	69.55
18	PELAYANAN KESEHATAN DASAR PASIEN MASYARAKAT MISKIN			
	Jumlah Kunjungan Pasien Miskin di Sarana Kesehatan Strata 1			234.28
19	Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin			
	Jumlah kunjungan pasien miskin disarana Kesehatan Strata 2 dan strata 3			28.05
20	Pelayanan Gawat Darurat Level 1			
	Pelayanan Gawat Darurat Level 1	100	100.00	100.00

No	INDIKATOR	CAPAIAN		
21	Kelurahan mengalami KLB			
	Jumlah KLB di kelurahan yang ditangani < 24 jam di wilayah tertentu	100	0.00	0.00
22	Desa Siaga Aktif			
	Jumlah Desa Siaga yang aktif	100	100.00	100.00

Capaian SPM Kesehatan sesuai Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Teknis pemenuhan pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan, dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel II-60 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Toba Tahun 2019-2020

No	INDIKATOR SPM	Jumlah Sasaran		Realisasi		Target SPM		Perentase capaian daerah terhadap SPM	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil								
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	4.455	4.371	3.609	3.550	100	100	81,01	81,22
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin								
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	4.253	4.137	3.485	3.349	100	100	81,94	80,95
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir								
	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	4.050	3.974	3.472	3.351	100	100	85,73	84,32
4	Pelayanan kesehatan balita								
	Jumlah Balita usia 12-59 bulan mendapakan pelayanan sesuai standar	20.104	15.113	16.404	15.017	100	100	81,60	99,36
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar								
	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	10.138	4.225	6.670	4.222	100	100	65,79	99,93
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif								

No	INDIKATOR SPM	Jumlah Sasaran		Realisasi		Target SPM		Perentase capaian daerah terhadap SPM	
	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	99.685	99.685	25.483	23.888	100	100	25,56	23,96
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut								
	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	30.341	19.714	18.648	13.047	100	100	61,46	66,18
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi								
	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	21.109	34.494	20.197	19.120	100	100	95,68	55,43
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus								
	Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2.370	2.592	2.370	1.270	100	100	100,00	49,00
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat								
	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	335	343	290	343	100	100	86,57	100,00
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis								
	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	459	504	459	248	100	100	100,00	49,21
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).								
	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	7.373	38	6.110	38	100	100	82,87	100,00

Dari 12 target indikator dijelaskan yang mencapai target ada 3 indikator yang mencapai target 100 persen, 8 indikator capaiannya <100 % >50% dan 1 indikator yang capaiannya sangat rendah dengan capaian 25.56 % yaitu indikator pelayanan kesehatan pada usia produktf.

Tabel II-61 Capaian Derajat kesehatan Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No	Indikator	satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,25	69,36	69,59	69,93	70.08
2	Jumlah kematian Ibu	Jiwa	3	5	4	7	4
3	Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	23	21	34	28	19

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Angka harapan hidup cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Tahun 2016 mencapai 69,36 tahun, dan pada tahun 2020 menunjukkan angka 70.08 Tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini menunjukkan peningkatan derajat hidup masyarakat. Kondisi angka harapan hidup tersebut diatas tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menjamin dan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dasar melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Jumlah Kematian Ibu tidak dapat mencapai target yang ditetapkan, bahkan mengalami kenaikan dibanding capaian tahun 2016. Jumlah kematian ibu meningkat dibanding tahun 2016, jika tahun 2016 jumlah kematian ibu ada 5, namun di tahun 2020 jumlah kematian ibu sebanyak 4 (empat) orang. Jumlah Kematian bayi pada Tahun 2016 sebanyak 23 jiwa, Tahun 2017 sebanyak 21 jiwa, pada tahun 2018 meningkat lebih banyak yaitu 34 jiwa dan tahun 2019 menjadi 28 jiwa, Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 19 kasus. Kasus kematian bayi dari tahun 2015 hingga 2019 mengalami fluktuatif.

Untuk meningkatkan indikator tersebut, selain dengan meningkatkan kapasitas dan pelayanan di fasilitas kesehatan rujukan, akan dilaksanakan peningkatan kuaitas upaya kesehatan. Ibu hamil harus diberikan informasi tentang kesehatan kehamilan dan harus ada peningkatan kesadaran ibu hamil untuk selalu memonitor sendiri kesehatan maupun kandungannya.

Pencapaian indikator SPM, SDGs dan Kinerja OPD masih perlu perbaikan, diantaranya adanya kendala masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan yang memiliki kompetensi terutama di wilayah pedesaan dan warga miskin. Strategi yang dapat digunakan untuk mengantisipasinya adalah peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi kesehatan masyarakat.

Target RPJMD adalah menyediakan dan menjamin seluruh masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan bermutu/berkualitas sehingga ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir, balita dapat menerim pelayanan sesuai standart, anak sekolah, remaja, usia produktif dan lansia mendapat skrining kesehatan sesuai standart, para penderita penyakit menular maupun tidak menular juga mendapatkan layanan kesehatan sesuai standart. Akses pelayanan kesehatan disini termasuk jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat.

Pada tahun 2020 di Indonesia telah terjadi bencana nasional non alam yaitu wabah COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia virus penyebab COVID-19 ini dapat menyebar dari orang ke orang. Pandemi Covid-19 ini menyebabkan tekanan yang berat pada sistem kesehatan sebagai upaya penyembuhan, pencegahan penyebaran, dan pencegahan kematian. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah dengan merujuk pada arahan pemerintah pusat untuk mencegah penyebaran secara luas di daerah Kabupaten Toba diantaranya kebijakan belajar di rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah, menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak sosial, menghindari kerumunan, pemakaian masker, himbauan perilaku hidup bersih dan sehat diantaranya rajin cuci tangan, rajin berolah raga, perbanyak makan sayur dan buah.

Indeks Kesehatan menggambarkan jumlah kematian Ibu dan Kematian Bayi dalam jangka waktu satu tahun. Indeks Derajat Kesehatan bernilai 1 artinya tidak ada kematian pada periode waktu tersebut dan jika Indeks Derajat Kesehatan bernilai minus artinya angka kematian Ibu dan Bayi melebihi angka kematian maksimum pada periode 2016-2020. Indeks Derajat Kesehatan Kabupaten Toba pada periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-62 Indeks Kesehatan

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kesehatan	0,366	0,366	0,073	0,146	0,439

1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indeks Infrastrukur merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan sarana dan prasarana, perumahaan dan permukiman serta pembanguna pada bidang perhubungan. Indeks Infrastruktur memiliki tiga komponen indek penyusunan yaitu Indeks Sarana Prasarana, Indeks Perumahaan dan permukiman serta Indeks Konektivitas.

Indeks Sarana dan Prasarana merupakan hasil kalkulasi terhapat kondisi jalan, layanan irigasai, ketersediaan tenaga konstruksi, pelaksanaan proyek tanpa kecelakaan, kepatuhaan terhadapa IMB, akses terhadap air minum dan akses pengolahaan limbah domestik.

Indeks Perumahaan dan Permukiman memiliki komponen penyusun: Penanganan kawasan kumum, Kelayakan rumah tinggal dan Layanan Prasaranan, Saranan dan Utilitas Umum (PSU) perumahaan.

Indeks Konektivitas adalah hasil kalkulasi terhadapa konektivitas angkutan penumpang, konektivitas ASDP dan Kinerja lalulintas. Indeks Infrastruktur pada periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-63 Indeks Infrastruktur

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Infrastruktur	0,3758	0,3885	0,4082	0,42332	0,5893
2	Indeks Sarana dan Prasarana	0,2210	0,2336	0,2534	0,2684	0,3379
3	Indeks Perumahaan dan Permukiman	-	-	-	-	0,0966
4	Indeks Konektivitas	0,1548	0,1548	0,1548	0,1548	0,1548

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba

a. Jalan dan jembatan

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah angka perbandingan antara panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, terhadap panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Mutu jalan di suatu daerah berpengaruh terhadap berbagai kegiatan penduduk, khususnya kegiatan perdagangan dan upaya untuk melakukan integrasi antar wilayah terbelakang dengan pasar yang lebih besar. Di Kabupaten Toba pada Tahun 2019 panjang jalan mencapai 1.006.49 Km yang terbagi atas jalan Negara 60.89, Jalan Propinsi sepanjang 199.50 Km dan Jalan Kabupaten sepanjang 746.10 Km. Berdasarkan kondisi jalan di Kabupaten Toba tahun 2020 sekitar 31,35 persen merupakan jalan dengan kondisi baik, sekitar 10,09 persen dalam keadaan sedang, dan 58,56 persen rusak berat. Menurut kecamatan Kecamatan Habinsaran merupakan kecamatan yang memiliki jalan terpanjang sekitar 15,40 persen dan Kecamatan Ajibata merupakan kecamatan yang memiliki terpendek sekitar 11,40 persen dari total kabupaten. Perkembangan infrastruktur jalan di Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-64 Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik Kabupaten Toba Tahun 2016-2020 (Km)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Baik	219.12	235.99	251.32	249.1	233.9
Sedang	72.26	69.24	22.13	40.4	75.3
Rusak	104.52	63.16	103.67	0	94.7
Rusak berat	350.20	377.71	368.98	456.6	342.2
Total Panjang jalan	746.10	746.10	746.10	746.10	746.10
Rasio Panjang jalan dalam kondisi baik.	39.05	40.91	36.65	38.80	41.44

Tabel II-65 Perkembangan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

Tahun	Panjang Jalan (Km)			Jumlah
	Negara	Provinsi	Kabupaten	
2016	60.89	199.50	746.10	1.006.49
2017	61.38	199.50	746.10	1.006.98
2018	61.38	199.50	746.10	1.006.98
2019	61.38	199.50	746.10	1.006.98
2020	61.38	199.50	746.10	1.006.98

Sumber: SIPD

Tabel II-66 Panjang Jalan Kabupaten Toba Berdasarkan Jenis Permukaan Tahun 2016 -2020

Jenis Permukaan	Panjang Jalan (Km)				
	2016	2017	2018	2019	2020
a. Aspal	186.32	474.38	507.60	282.60	400.60
b. Rigid/beton				6.90	3.20
b. Kerikil	105.05	127.16	130.57	347.50	219.10
c. Tanah	454.73	144.56	107.94	109.10	123.20

Sumber: SIPD

Tabel II-67 Kondisi Jembatan Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR	SAT.	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Baik	unit	231	246	255	260	260
2.	Sedang	unit	31	30	29	23	23
3.	Rusak Ringan	unit	37	23	17	30	30
4.	Rusak Berat	unit	16	16	14	1	1

b. Irigasi

Jaringan irigasi Kabupaten Toba terdiri dari jaringan irigasi dibawah kewenangan pusat, propinsi dan kabupaten sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status daerah irigasi, Luas daerah irigasi Kabupaten Toba 14.068 Ha (79 D.I), dan D.I utuh kabupaten seluas 2.575 ha (D.I Aek mandosi 1.060 ha dan D.I Simangatasi 1.515 ha). Aspek pelayanan umum Bidang irigasi Kabupaten Toba dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel II-68 Kondisi Jaringan Irigasi
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Panjang				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kondisi Saluran Primer						
	- Baik	m'	89.541	90.894	93.673	95.553	81.741
	- Sedang	m'	26.887	27.324	27.581	27.88	24.699
	- Rusak	m'	117.73	115.32	112.75	110.57	103.769
2	Kondisi Saluran Sekunder						
	- Baik	m'	50.844	65.604	73.245	77.603	64.837
	- Sedang	m'	11.908	12.238	13.156	14.475	11.316.80
	- Rusak	m'	169.35	154.37	145.86	140.17	134.938

c. Gedung Kantor

Sejak Kabupaten Toba dibentuk hingga saat ini, pembangunan sarana dan prasarana kantor pemerintah sudah cukup banyak yang dibangun meskipun belum semua SKPD yang memiliki kantor sendiri. Adapun bangunan yang digunakan oleh sebagian masih memanfaatkan/ menggunakan bangunan masyarakat dengan sistem sewa. Kondisi bangunan perkantoran pemerintah di Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49

Kondisi Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Toba 2020

NO.	NAMA BANGUNAN	KECAMATAN	KONDISI			STATUS BANGUNAN
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	
001	Kantor Kepala Desa	Tampahan	√			Sewa
002	Kantor Kepala Desa	Tampahan			√	Sewa
003	Kantor Departemen Pertanian	Tampahan	√			Milik Pemda
004	Kantor Camat Tampahan	Tampahan	√			Milik Pemda
005	Kantor Kepala Desa	Tampahan	√			Milik Pemda
006	Kantor Kepala Desa	Tampahan	√			Milik Pemda
007	Poslantas	Tampahan	√			Milik Pemda
008	Datesemen Polisi Militer (PM)	Balige	√			Milik Pemda
009	Kejaksaan Negeri Balige	Balige	√			Milik Pemda
010	Pengadilan Negeri Balige	Balige	√			Milik Pemda
011	Dinas Perhubungan ,	Balige	√			Milik Pemda
012	Komunikasi, dan Informatika					
013	Kantor Pelayanan	Balige	√			Milik Pemda
014	Perbendaharaan Negara (KPPN)					
015	Kantor Kelurahan Pardede Onan	Balige	√			Milik Pemda
016	Kantor Kepala Desa	Balige	√			Milik Pemda
017	Inspektorat Kabupaten	Balige	√			Milik Pemda
018	Kementrian Agama Tobasa	Balige	√			Milik Pemda
019	Badan Lingkungan Huidup Dan	Balige	√			Milik Pemda
020	Pertambangan					
021	Kantor Polisi Sektor Balige	Balige	√			Milik Pemda
022	Kantor UPTD, Pertanian,	Balige	√			Milik Pemprovsu
023	perikanan dan peternakan					
024	Lembaga Konsultasi	Balige	√			Milik Pemda
025	Kesejahtraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial					
026	PT. PLN Persero	Balige	√			Milik Pemerintah Pusat
027	Kantor Komando Distrik Militer	Balige	√			Milik Pemda
028	Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal	Balige	√			Milik Pemda

NO.	NAMA BANGUNAN	KECAMATAN	KONDISI			STATUS BANGUNAN
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	
029	Kantor Telkom	Balige	√			Milik Pemerintah Pusat
030	MESS Pemprovsu	Balige	√			Milik Milik Pemprovsu
031	Kantor Camat	Balige	√			Milik Pemda
032	Dinas Pasar , Kebersihan dan Pertamanan	Balige	√			Milik Pemda
033						
034	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Balige	√			Milik Pemda
035	Kantor Kepala Desa	Balige			√	Sewa
036	Rumah Tahanan	Balige	√			Milik Pemda
037	Kantor Dinas Kesehatan	Balige	√			Milik Pemda
038	Dinas Kebudayaan/ Parawisata	Balige	√			Milik Pemda
039	Kantor Pos	Balige	√			Milik Pemerintah Pusat
040	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (UPT PSDA Asahan)	Balige	√			Milik Pemprovsu
041	Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Balige	√			Milik Pemda
042	UPT. Dinas Pendidikan Nasional Balige	Balige	√			Milik Pemprovsu
043	Kantor Kepala Desa	Balige		√		Milik Pemda
044	Kantor Kepala Desa	Balige		√		Milik Pemda
045	Kantor Kepala Desa	Balige	√			Milik Pemda
046	Kantor Kepala Desa	Balige		√		Milik Pemda
047	Kantor Bupati Toba	Balige	√			Milik Pemda
048	Kantor DPRD Toba	Balige	√			Milik Pemda
049	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Balige	√			Milik Pemda
050	Rumas Dinas Bupati Toba	Balige	√			Milik Pemda
051	Rumah Dinas Wakil Bupati Toba	Balige	√			Milik Pemda
052	Rumah Dinas Ketua DPRD	Balige	√			Milik Pemda
053	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	Balige	√			Milik Pemda
054	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan	Balige	√			Milik Pemda
055	Dinas Pendidikan	Balige	√			Milik Pemda
056	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Balige	√			Milik Pemda
057	Dinas Tata Ruang Dan Permukiman	Balige	√			Milik Pemda
058	Dinas Pekerjaan Umum	Balige	√			Milik Pemda
059	Badan Kepegawaian Daerah	Balige	√			Milik Pemda
060	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Koperasi	Balige	√			Milik Pemda
061	Dinas Pertanian	Balige	√			Milik Pemda
062	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Balige	√			Milik Pemda
063	Kantor Samsat	Balige	√			Milik Pemda
064	Kantor BPS	Balige	√			Milik Pemda
065	Kantor Badan Pertahanan	Balige	√			Milik Pemda
066	Kantor Kelurahan Napitupulu Bagasan	Balige	√			Milik Pemda
067	Dermaga Balige	Balige	√			Milik Pemda
068	Kantor Kepala Desa Lumban Silintong	Balige		√		Sewa
069	Kantor Kepala Desa Parsuratan	Balige		√		Milik Pemda
070	Asrama Tentara Simbisa	Balige	√			Milik Pemda
071	Gedung Arsip Kab.Toba	Balige	√			Milik Pemda
072	Gedung Kantor Kominfo	Balige	√			Milik Pemda
073	Gedung Kantor KPU	Balige	√			Milik Pemda
074	Rumah Dinas Wakil DPRD	Balige	√			Milik Pemda

NO.	NAMA BANGUNAN	KECAMATAN	KONDISI			STATUS BANGUNAN
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	
075	Kantor Kepala Desa, LKMD, Karang Taruna, PKK	Laguboti		√		Milik Pemda
076	Kantor PLN	Laguboti	√			Sewa
077	Kantor UPTD Dinas Pendidikan	Laguboti	√			Milik Pemprovsu
078	Kantor Komando Distrik Militer-0210	Laguboti	√			Milik Pemda
079	BKPM (Balai Kemitraan Perpolisian Masyarakat)	Laguboti	√			Milik Pemda
080	Kantor Camat	Laguboti	√			Milik Pemda
081	Kantor pos	Laguboti	√			Milik Pemerintah Pusat
082	Kantor Kepala Desa	Laguboti	√			Milik Pemda
083	Kantor Kepala Desa	Laguboti	√			Milik Pemda
084	Kantor Kepala Desa	Laguboti	√			Milik Pemda
085	Gudang Pertanian	Laguboti	√			Milik Pemda
086	Kantor UPTD Balai Benih Tanaman Pangan	Laguboti	√			Milik Pemda
087	Dan Hortikultura					
088	Kantor Kelurahan Pasar Laguboti	Laguboti	√			Milik Pemda
089	Kantor Kepala Desa Haunatas I	Laguboti	√			Milik Pemda
090	Kantor Kelurahan	Sigumpar		√		Milik Pemda
091	Kantor Kepal Desa	Sigumpar	√			Sewa
092	Kantor Kepala Desa	Sigumpar		√		Milik Pemda
093	Kantor Kepala desa Narumonda V	Siantar Narumonda		√		Milik Pemda
094	Kantor UPTD Dinas Pendidikan	Siantar Narumonda	√			Milik Pemprov
095	Kantor Kepala Desa Narumonda III	Siantar Narumonda		√		Milik Pemda
096	Kantor Camat	Siantar Narumonda		√		Milik Pemda
097	Kantor Kepala Desa	Siantar Narumonda		√		Sewa
098	Kantor kepala desa	Siantar Narumonda		√		Milik Pemda
099	Kantor Kepala Desa	Siantar Narumonda		√		Milik Pemda
100	Kantor Kepala Desa	Siantar Narumonda	√			Milik Pemda
101	Polsek	Porsea	√			Milik Pemda
102	Kantor PDAM TIRTANADI	Porsea		√		Sewa
103	Kantor Pos	Porsea	√			Milik Pemerintah Pusat
104	Kantor Kelurahan	Porsea		√		Milik Pemda
105	Kantor Kepala Desa	Porsea			√	Milik Pemda
106	Kantor Kepala Desa	Porsea		√		Milik Pemda
107	Kantor Kepala Desa	Porsea		√		Milik Pemda
108	Kantor Kepala Desa	Porsea	√			Milik Pemda
109	Kantor Urusan Agama	Porsea	√			Milik Pemda
110	Kantor Kepala Desa	Porsea	√			Milik Pemda
111	Kantor Kepala Desa	Porsea		√		Milik Pemda
112	Kantor Kepala Desa	Porsea	√			Milik Pemda
113	Kantor Kepala Desa	Porsea	√			Milik Pemda
114	Polres Tobasa	Porsea	√			Milik Pemda
115	Kantor Kejaksaan	Porsea	√			Milik Pemda
116	UPT. Dinas Pendidikan	Porsea	√			Milik Pemprov
117	Kantor Kepala Desa	Uluan	√			Milik Pemda
118	Kantor Camat	Uluan	√			Milik Pemda
119	Balai Penyuluhan KB	Uluan	√			Milik Pemda
120	Kantor Kepala Desa	Uluan			√	Milik Pemda
121	Kantor Kepala Desa	Uluan			√	Milik Pemda
122	Kantor Kepala Desa Parik	Uluan			√	Milik Pemda
123	Perumahan SD N 173683	Uluan			√	Milik Pemda

NO.	NAMA BANGUNAN	KECAMATAN	KONDISI			STATUS BANGUNAN
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	
124	Kantor LKMD	Uluan		√		Milik Pemda
125	Kantor Kepala Desa	Uluan		√		Milik Pemda
126	Kantor Kepala Desa	Bonatualunasi	√			Milik Masyarakat
127	Kantor Kepala Desa	Bonatualunasi	√			Milik Masyarakat
128	Kantor Camat	Bonatualunasi	√			Milik Pemda
129	Kantor Kepala Desa	Bonatualunasi	√			
130	Kantor Kepala Desa	Bonatualunasi	√			Milik Pemda
131	Kantor UPTD (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung)	Lumban Julu			√	Milik Pemda
132	Kantor kepala desa	Lumban Julu	√			Milik Pemda
133	Kantor kepala desa	Lumban Julu	√			Milik Pemda
134	Kantor kepala desa	Lumban Julu		√		Milik Pemda
135	Kantor Camat	Lumban Julu	√			Milik Pemda
136	Kantor Urusan Agama	Lumban Julu	√			Milik Pemda
137	Kantor pos	Lumban Julu	√			Milik Pemda
138	Kantor komando distrik militer 02/10/Taput	Lumban Julu	√			Milik Pemda
139	Polsek	Lumban Julu	√			Milik Pemda
140	Kantor kepala desa	Lumban julu		√		Milik Pemda
141	Kantor Camat Ajibata	Ajibata	√			Milik Pemda
142	Kantor dinas kebersihan dan pertanahan	Ajibata	√			Milik Pemda
143	Pos pengamanan	Ajibata	√			Milik Pemda
144	Kantor polisi	Ajibata	√			Milik Pemda
145	CU	Ajibata	√			Milik Pemda
146	Kantor PKK	Ajibata	√			Milik Pemda
147	Kantor LKMD	Ajibata		√		Milik Pemda
148	UPT. Dinas pendidkan	Ajibata	√			Milik Pemda
149	Kantor perusahaan air tirtanadi	Ajibata	√			Milik Pemda
150	Kantor kelurahan parsaoran	Ajibata	√			Milik Pemda
151	Kantor kepala desa	Ajibata	√			Milik Pemda
152	Kantor kepala desa	Ajibata	√			Milik Pemda
153	Kantor kepala desa	Ajibata		√		Milik Pemda
154	Kantor kepala desa	Ajibata	√			Milik Pemda
155	Polsek	Habinsaran	√			Milik Pemda
156	Kantor lurah parsoburan tengah	Habinsaran	√			Milik Pemda
157	Kantor camat Habinsaran	Habinsaran	√			Milik Pemda
158	Kantor koramil	Habinsaran	√			Milik Pemda
159	UPT Dinas Pendidikan	Habinsaran		√		Milik Pemda
160	Kementrian agama RI (kantor urusan agama)	Habinsaran	√			Milik Pemda
161	Kantor kepala desa	Habinsaran		√		Milik Pemda
162	Lembaga ketahana n masyarakat desa	Habinsaran		√		Milik Pemda
163	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Habinsaran		√		Milik Pemda
164	Kantor kepala desa	Habinsaran	√			Sewa
165	Kantor karang taruna	Habinsaran	√			Sewa
166	Lembaga ketahan masyarakat desa	Habinsaran	√			Sewa
167	Kantor PKK	habinsaran	√			Sewa
168	Upt dinas kehutanan dan perkebunan	habinsaran	√			Milik Pemda
169	Kantor kepala desa	habinsaran	√			Milik Pemda
170	Kantor kepala desa	habinsaran	√			Milik Pemda
171	Kantor kepala desa	habinsaran		√		Milik Pemda
172	Kantor kepala desa	habinsaran		√		Milik Pemda
173	Kantor kepala desa	habinsaran		√		Milik Pemda

1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator kinerja yang digunakan dalam bidang perumahan diantaranya rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi, dan rumah layak huni. Indikator-indikator selain rumah layak huni diukur berdasarkan jumlah pengguna. Indikator rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Toba pada tahun 2015 adalah sebesar 47.04 %, pada tahun 2019 angka sementara yang telah ada mencapai 45.47 %. Untuk indikator rumah tangga pengguna listrik mencapai 95 % pada 2019. Untuk indikator rumah tangga bersanitasi pada tahun 2015 angka yang tercatat sebesar 76.37 %, pada tahun 2015 angka sementara menunjukkan kenaikan pada Tahun 2019 menjadi 85.44%. Indikator rumah layak huni dihitung berdasarkan jumlah rumah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan dikali 100% sehingga didapatkan angka sebesar 89.52% pada tahun 2015, pada tahun 2019 untuk angka sementara mengalami kenaikan menjadi 97.89%. Indikator urusan perumahan Kabupaten Toba tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-69 Kondisi Perumahan dan kawasan pemukiman Kab. Toba Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian				
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1.	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	76.84	78.00	77.21	85.44	89.61
2.	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sumber air Minum Layak.	51.49	60.88	68.91	57.74	92.73
3.	Persentase Rumah Layak Huni	89,52	95.11	96,79	97.89	97.89
4.	Persentase RT kumuh	6.75	5.85	5.71	5.48	5.48

Air yang bersih merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kebutuhan manusia. Kebutuhan akan air bersih terutama untuk keperluan air minum. Sampai tahun 2017 baru lima kecamatan di Kabupaten Toba yang menikmati air bersih yang dikelola oleh PDAM Tirtanadi Cabang Toba yang tersebar di 51 desa/kelurahan dengan jumlah pelanggan sebanyak 6.081. Kelima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Balige, Laguboti , Porsea, Pintu , Ajibata dan Parmaksian Di Kecamatan Balige terlayani pada 15 desa/kelurahan dari 35 desa/kelurahan yang ada, dengan jumlah pelanggan sebanyak 3.102 pelanggan. Kecamatan Laguboti ada 11 desa/kelurahan dengan pelanggan 807 pelanggan, di Kecamatan Porsea ada 15 desa/kelurahan dengan jumlah pelanggan sebanyak 1.600 pelanggan, di Kecamatan Ajibata ada 3 desa/kelurahan dengan jumlah pelanggan 481 pelanggan dan di Kecamatan Parmaksian ada 7 desa dengan jumlah 91 pelanggan. Pada tahun 2017 produksi air bersih yang disalurkan sebanyak 1.428.771 m3,

naik sebesar 5,69 persen dibanding tahun 2016, dengan nilai air bersih yang dihasilkan sebesar Rp. 4.064.052,- Berdasarkan kategori pelanggan dari 6.081 pelanggan, pelanggan rumah tempat tinggal merupakan pelanggan terbesar yaitu sebanyak 4.891 pelanggan. Pelanggan terbesar berikutnya adalah toko dan industri dan instansi pemerintah masing - masing sebanyak 967 dan 92 pelanggan.

Tabel II-70 Persentase rumah tangga menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Toba 2016-2020

No.	Sumber Air Minum	Persentase (%)				
		2016	**2017**	**2018**	2019	**2020**
1.	Air isi ulang	8.01	10.14	7.52	**7.01**	--
2.	Ledeng meteran	10.02	14.15	12.89	**11.38**	18.64
3.	Sumur bor/Pompa	27.23	28.65	32.87	**45.62**	47.51
4.	Sumur terlindungi	14.26	11.82	9.72	**9.67**	23.76
5.	Sumur tak terlindungi	2.91	4.29	1.81	**2.02**	2.61
6.	Mata air terlindungi	25.16	18.11	30.04	**20.19**	7.48
7.	Mata air tak terlindungi	7.81	7.51	2.13	**1.78**	7.48
8.	Air permukaan	3.30	4.72	2.04	**1.44**	
9.	Air hujan		0.12	0.17	**0.88**	
10.	Lainnya (sungai,hujan)	0.00	14.98	0.00	0.00	7.48

Sumber : Kabupaten Toba dalam angka

1.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dilakukan dengan meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat. Penegakan Perda dan Perbup dilaksanakan dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat untuk mentaati undang-undang serta untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah operasi yang bersifat pembinaan (non yustisi) dan Operasi Yustisi (diselesaikan secara hukum). Penegakan Perda dan Perbub untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib dan sadar hukum di masyarakat sehingga hal ini akan mendukung pelaksanaan pembangunan. Adapun kondisi peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan dapat dilihat di bawah ini. Pencapaian upaya yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-71 Capaian Peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pelanggaran Perda yang ditegakkan.	39	40	30	28	40
2	Jumlah Pelanggaran	44	44	31	28	40
3.	Tingkat Penyelesaian Pelangaran K3	100	100	100	100	100
4.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah wilayah kebakaran (WMK)	60	60	20	20	20
5.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	0,883	0,907	0,965	0,997	0,997

Sumber:SIPD. 2020

Tabel II-72 Persentase Perda yang Ditegakan

	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	88,63%	90,90%	96,77	100	100

Tabel II-73 Jumlah Kegiatan politik, jumlah Partai Politik, Ormas, LSM dan OKP Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik daerah yang dilaksanakan	4	4	4	4	4
2	Jumlah Partai Politik	8	8	8	8	8
3.	Jumlah partai ormas	68	68	68	85	85
4.	Jumlah LSM	158	158	158	--	--
5.	Jumlah OKP	24	24	24	1	1

Sumber:SIPD. 2019

1.3.1.6 Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui program perlindungan sosial dan program pemberdayaan sosial. Program perlindungan sosial dilaksanakan melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial serta pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS. Pemberdayaan social dilaksanakan dengan memberikan bimbingan sosial, motivasi, dan bimbingan usaha disertai dengan pemberian modal usaha untuk penumbuhan dan pengembangan pada kelompok usaha bersama (KUBE) atau bentuk pemberdayaan lainnya. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dilakukan melalui peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Orsos, PSM, Karang Taruna, dunia usaha serta potensi lainnya sehingga mampu menjadi mitra pemerintah dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Toba. Berdasarkan pemutakhiran data PMKS berjumlah 21.718 jiwa, rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel II-74 Capaian Indikator Bidang Sosial Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1	Peserta PMKS yang memperoleh bantuan sosial	3,57	10,64	16,18	37,80	69,67
	Jumlah PMKS yang menerima bantuan	2861	8485	12763	8163	15130
	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	80131	79750	78886	21594	21718
2	Presentase PMKS yang tertangani	3,57	10,64	16,10	37,80	69,67
	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	2861	8485	12703	8163	15130
	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	80131	79750	78886	21594	21718
3	Presentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	3,57	10,64	16,10	37,80	69,67
	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	2861	8485	12703	8163	15130
	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	80131	79750	78886	21594	21718
5	Presentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	50,00	100,00	116,00	100,00	100,00
	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	40	88	116	56	384
	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	80	88	100	56	384
6	Presentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	45,45	100,00	116,00	100,00	100,00
	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yangdievakuasi dwngan menggunakan **Sarana prasarana tanggap darura**t lengkap dalam 1 tahun	40	88	116	56	384
	Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala	88	88	100	56	384
7	Presentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	85,71	66,67	97,73	96,43	61,12
	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	6	4	43	54	250

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1(satu) tahun	7	6	44	56	409

Sumber:SIPD. 2020

Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme potensi sumber kesejahteraan sosial melalui pengembangan alternatifalternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial serta penetapan standardisasi dan legislasi pelayanan sosial. Yang dimaksud dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM kesos masyarakat serta berbagai pelaku usaha kesejahteraan sosial baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Penanganan dan pelayanan kesejahteraan sosial bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, namun juga dunia usaha dan masyarakat sekitar, sehingga dengan program ini diharapkan mampu mendorong partisipasi dan rasa kesetiakawanan sosial di masyarakat. Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Karang Taruna, PSM, Orsos, dan Forum-forum sosial lainnya perlu terus dikembangkan, sehingga mampu menjadi mitra dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial. Jumlah PSKD dari tahun 2016 sampai 2020 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II-75 Tingkat Keaktifan PSKS di Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No	PSKD	Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tagana	15	15	15	19	19
2	Pendamping PKH	22	32	31	31	31
3	TKSK	16	16	16	16	16

Sumber:SIPD. 2020

1.3.2 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1.3.2.1 Tenaga Kerja

Salah satu tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi seluruh rakyat Indonesia serta memberikan peluang usaha bagi masyarakat. Pembangunan dibidang ketenagakerjaan adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional, dimana sasaran utamanya adalah memperluas dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Masalah pokok ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Persentase penduduk usia kerja di Toba yang bekerja adalah sebesar 81.21 %, di mana laki-laki sebesar 86.10 % dan perempuan sebesar 75.80 %. TPAK Toba berdasarkan hasil Sakernas 2020 adalah sebesar 81.21. TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK perempuan, hal ini berarti bahwa penduduk laki-laki lebih besar terlibat dalam pasar kerja. Dari total penduduk usia kerja (15 Tahun ke atas), sekitar 81.21 persen penduduk Kabupaten Toba termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka penduduk laki laki sebanyak 1,19 % dan Penduduk perempuan sebesar 2.57 % sehingga tingkat pengangguran terbuka secara umum sebesar 2.42 %. TPAK Toba berdasarkan hasil Sakernas 2020 adalah sebesar 81.21. TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK perempuan, hal ini berarti bahwa penduduk laki-laki lebih besar terlibat dalam pasar kerja. Dampak pandemi Covid-19 pada sektor tenaga kerja antara lain penurunan produktivitas perusahaan, dan turunnya daya beli masyarakat/ permintaan pasar. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pencari kerja, pemerintah melaksanakan berbagai macam kegiatan pelatihan. Pelatihan ketrampilan tersebut ada yang berbasis pada kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan kewirausahaan.

Tabel II-76 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2016-2020

No	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	49	50	80.83	82.03	81.21
2.	Tingkat pengangguran Terbuka	4.5	3.5	2.06	1.26	2.5
3.	Persentase jumlah angkatan kerja perempuan	55,00	55.00	60	60	75.80
4.	Jumlah angkatan kerja yang memperoleh pelatihan keterampilan bekerja dalam :	40	40	60	60	60
	- Dunia Usaha	20	20	0	0	0
	- Berwiraswasta (usaha sendiri)	20	20	60	60	60
5	Jumlah angkatan kerja yang memperoleh pelatihan keterampilan	100	100	50	60	60
6	Jumlah Pencari kerja yang bekerja	285	350	305	558	558
7.	Jumlah Angkatan Kerja 15 Tahun	94546	96638	97045	100735	104719

Sumber : SIPD. 2020

Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang menurun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Berkurangnya jam kerja adalah dampak Covid-19 yang paling banyak dirasakan penduduk usia kerja, sebanyak 13.523 orang atau sebesar 10,49 persen. Sedangkan jumlah penganggur karena dampak Covid-19 sebanyak 1.036 orang atau sekitar 39,65 persen terhadap total penganggur (2.613 orang) di Kabupaten Toba. Secara umum, pada semua kategori tersebut, jumlah laki-laki yang terdampak lebih banyak dibandingkan perempuan.

1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan pengarusutamaan gender, Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dan perlindungan anak melalui lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Hal ini dapat meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan dan meminimalisir tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Kasus KDRT meliputi kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dari keberhasilan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sepanjang tahun 2015 terdapat kasus 14 kasus kekerasan yang ditangani, Tahun 2016 sekitar 17 kasus, Tahun 2017 sekitar 12 kasus, tahun 2018 menurun menjadi 3 kasus, dan tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 13 kasus. Jumlah tersebut diperoleh dari laporan korban melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak (P2TP2A), maupun melalui Jejaring Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA). Jumlah perempuan dan anak menurut jenis layanan yang diberikan melalui jejaring Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA) seperti tertera di Tabel berikut :

Tabel II-77 Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kejadian KDRT	17	12	3	13	11
2.	Jumlah kejadian tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak	12	5	11	8	18
3.	Indeks Pembangunan Gender	97.40	97.40	97.93	98.14	97.96

Dari tabel di atas maka secara umum angka kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan cenderung semakin meningkat dan kasus kekerasan di dalam rumah tangga tetap. Kondisi ini disebabkan kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh anak yang baik dan benar. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh peran dan fungsi keluarga yang semakin menurun dan komunikasi di dalam keluarga kurang baik.

Pada periode ini ditargetkan untuk meningkatkan penemuan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penemuan kasus akan ditindaklanjuti dengan konseling. Di samping itu akan dilaksanakan upaya untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan meningkatkan kualitas keluarga.

Permasalahan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah, semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak serta kekerasan dalam rumah tangga, dan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak masih perlu partisipasi dan dukungan dari masyarakat. Target yang ingin dicapai Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak. Upaya untuk mencapai target tersebut dilakukan dengan strategi meningkatkan perlindungan sosial dengan kebijakan peningkatan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak.

Pemerintah Kabupaten Toba terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sektor pembangunan. Hal ini disebabkan aspek psikososio-kultural yang masih menganggap derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Keadaan tersebut mempengaruhi keterlibatan perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan dan memperoleh segala bentuk pelayanan dasar. Pembangunan dan pemberdayaan perempuan dan anak juga sangat berdampak pada derajat kesehatan dan tingkat kesejahteraan keluarga.

Tabel II-78 Partisipasi Kerja Perempuan Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Partisipasi angkatan kerja perempuan	73.20	74.32	75.35	78.21	75.80
Jumlah kursi yang diduduki perempuan di DPRD	2	2	2	1	1

1.3.2.3 Pangan

Pembangunan bidang urusan pangan dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan berpedoman pada Permen/ Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi. Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pangan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat rentan/miskin. Penyelenggaraan pangan yang dilakukan oleh Kabupaten Toba untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bagi secara merata dan berkelanjutan sesuai dengan regulasi kebijakan pangan nasional.

Peningkatan pengembangan pangan yang perlu ditingkatkan adalah pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) bersifat fluktuatif yaitu tahun 2015 sebesar 79.20 , Tahun 2016 sebesar 79.25, Tahun 2017 sebesar 88.50, Tahun 2018 sebesar 88.60 dan Tahun 2019 menjadi 88.40. Hal ini dikarenakan konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Toba masih tinggi dalam konsumsi karbohidrat terutama tingkat konsumsi beras dan tepung terigu, dan masih rendah dalam konsumsi umbi-umbian, protein hewani, sayur–sayuran serta buah–buahan. Indikator capaian urusan wajib ketahanan pangan Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-79 Capaian Urusan Pangan
Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan Pangan Utama	18.378.70	255.792	283.288	305.607	10114.92
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	4.219.76 197.27	4431 207	3.240,3 112	6138 147,72	3050 73.80
3	Pencapaian Skor PPH	79.25	88.50	88.60	88.40	80.44
4	Indeks Ketahanan Pangan	76.70	76.78	76,89	82,61	80,80

Penyuluhan merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan dan menurunkan angka kemiskinan. Capaian kinerja penyuluhan pertanian Tahun 2016 - 2020 disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel II-80 Capaian kinerja penyuluhan pertanian Tahun 2016 – 2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kelompok Tani	800	846	846	920	920
	Kelas Pemula	800	846	168	550	550
	Kelas Lanjut			678	370	370
2	Jumlah Keanggotaa dalam kelompok Tani	20.000	20.304	21.250	23.000	23.000

1.3.2.4 Pertanahan

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan bidang pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi a.) penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten, b). penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah, c). penetapan subyek dan

obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten, d). penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten dan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten, e). penerbitan izin membuka tanah dan f). Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah**.**

Pembangunan urusan pertanahan Kabupaten Toba ditunjukkan dengan indikator Lahan Pemda Bersertifikat, Jumlah konflik pertanahan milik Pemda.

Tabel II-81 Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jumlah aset lahan dan bangunan milik pemda yang bersertifikat	22,05	22,05	25.77	21.45	26,03
2	Persentase jumlah kasus konflik lahan yang dapat diselesaikan	80	80	91	91.66	66,66
3	Persentase jumlah masyarakat pemilik lahan yang bersertifikat	8,5	8,5	--	--	
4	Jumlah permasalahan pertanahan (kasus)	10	22	24	24	16
5	Jumlah Lahan bersertifikat (ha)	454.201	1.022.719	1.330.831	1.599.118	1.952.659
6	Jumlah Lahan yang seharusnya bersertifikat (ha)	8.658.999	8.204.798	7.182.079	7.453.484	5.500.825

1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Kabupaten Toba memiliki kekayaan sumber daya alam yang memerlukan pemeliharaan lingkungan agar tetap bersih dan berkesinambungan. Lingkungan hidup merupakan tujuan Sustanable Development Goals (SDGs) sebagai tempat kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya terdapat air, tanah dan udara yang harus bersih dan berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran sehingga tidak berpengaruh buruk pada kesehatan dan aktivitas masyarakat. Salah satu upaya untuk menjaga lingkungan hidup tersebut adalah melalui pengelolan sampah. Presentase/rasio pelayanan sampah diperoleh dari prakiraan volume timbunan sampah dibagi dengan kapasitas pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba. Indikator urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-82 Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Volume Sampah (M^3)	26.381,32	26.908,950	27.447,296	28546,066	28.718,066
Persentase penanganan sampah	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditindaklanjuti.	80	80	90	80	60
Jumlah kendaraan pengangkut sampah	11	16	17	26	31
IKLHD	NA	NA	NA	70,15	NA
IKA	NA	NA	NA	80	NA
IKU	NA	NA	NA	71,48	NA
Tutupan Lahan	NA	NA	NA	61,76	NA

1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Setiap penduduk yang berusia diatas 17 tahun atau telah menikah wajib memiliki KTP hal ini untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Untuk meningkatkan akurasi data, pada tahun 2013 dilakukan perekaman data kependudukan dengan program eKTP. Hal ini untuk mencegah terjadinya kepemilikan KTP ganda dan pengadministrasian yang lebih akurat penduduk yag telah meninggal dunia. Jumlah kelahiran yang terdaftar pada Kantor Catatan Sipil tahun 2020 sebanyak 8.266 kelahiran mengalami penurunan sekitar 18,14 persen dibanding tahun 2019. Sementara jumlah perkawinan yang terdaftar pada Kantor Catatan Sipil tahun 2020 sebanyak 1.703 perkawinan dan jumlah perceraian yang terdaftar pada Kantor Catatan Sipil tahun 2020 sebanyak 15.

Dinamika pelayanan kependudukan di Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-83 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	68.75	73.95	84.61	90.74	96.27
	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	113210	114559	124120	130749	139310
	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	164668	154920	146695	144099	144710
2	Rasio bayi berakte kelahiran	68.00	71.99	78.99	96.63	57.23
	Jumlah bayi berakte kelahiran	5459	4923	6903	7881	4731
	Jumlah bayi	8028	6838	8739	8156	8266
3	Rasio pasangan berakte nikah	25.00	35.00	42.00	47.00	52.00
	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	22697	29793	34529.46	39157	43510.48
	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	90786	85124	82213	83312	83674

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	0.69	0.74	0.85	0.91	0.96
	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	113210	114559	124120	130749	139310
	Jumlah penduduk wajib KTP	164668	154920	146695	144099	144710
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	47	52	53	53	54
	jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	6497	6797	7851	5267	4490
	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	8330	8714	10066	6753	5757
7	persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	0	0	0	0	0
	Jumlah anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	0	0	0	0	0
	Jumlah anak usia 01-7 tahun	25010	23966	27876	29841	29591
8	Kepemilikan akte kelahiran	0.72	0.76	0.76	0.82	0.86
	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	48267	49821	52142	58224	61748
	Jumlah anak usia 0-18 tahun	67189	65679	68379	70671	71800
9	persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	0	0	0	0	0
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	0	0	0	0	0
	Jumlah OPD	44	44	44	44	44

1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang salah satunya dilakukan melalui penyaluran Dana Desa oleh pemerintah pusat kepada Desa telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah desa dituntut lebih profesional dalam melaksanakan pembangunan karena pemerintah desa sendiri yang merencanakan, melaksanakan dan mempertanggung jawabkannya. Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. Selain dana desa sumber pendapatan desa yang diperoleh dari pos bantuan keuangan kepada Desa menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seperti terlihat pada Tabel berikut ini. Beberapa capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II-84 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1	Dana Desa	136.530.337.000	173.463.727.000	154.311.189.000	176.101.238.000	177.074.832.000
2.	ADD	57.080.570.000	57.517.000.000	54.819.868.000	56.340.135.000	56.440.146.795
3.	Bagi Hasil Pajak			3.763.131.603	2.949.194.865	2.500.000.000
3.	SILTAP	28.528.440.000	28.528.440.000	28.528.440.000	128,611,920	61.240.806.684
4	Persentase PKK aktif (%)	85	89	100	10	100
5.	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100
6.	Jumlah desa tertinggal	--	195	167	120	77
7.	Jumlah BUMDES terbentuk	3	26	72	72	75

1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Peningkatan partisipasi PUS dalam program KB akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan. Selain itu keikutsertaan keluarga Pra Sejahtera dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan belajar berusaha memperoleh tambahan penghasilan melalui ekonomi produktif. Jumlah pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Toba tahun 2020 sebesar 24.937 pasangan. Dari jumlah tersebut terdapat 2.374 akseptor baru, dan berdasarkan jenis akseptor aktif yang digunakan terdapat 2.699 akseptor IUD, 3.627 akseptor MO, 4.492 akseptor implant, 4.028 akseptor suntik, 3.730 akseptor pil, dan 1.881 akseptor kondom. Perkembangan capaian indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-85 Capaian Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2020

No	Indikator	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga (TFR)	3,7	3,6	3,5	3,4	3,61
2	Rasio akseptor KB	13,1	12,48	13,2	14,1	15,15
4	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	16,3	15,3	14,3	13,3	12,3
5	Cakupan penyedia alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	30	35	40	45	50
7	Cakupan penyedia alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	30	35	40	45	50
8	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan	0	70	70	75	80
9	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	100	100	100	100	100
10	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dengan strata berkembang	75	100	100	100	100

No	Indikator	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
11	Persentase Kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja	75	75	87,5	88	90
12	Persentase PIK R aktif dalam pelayanan informasi dan konseling	50	50	50	50	50
13	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	55,6	56	57	58	59
14	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	61	61	63	64	65

Sumber: SIPD, 2020

Upaya peningkatan ketahanan keluarga juga dilakukan melalui kader bina keluarga seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Komunikasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR).

Tabel II-86 Kelompok Kegiatan KB Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kelompok UPPKS	Kelompok	64	67	65	53	18
2	Jumlah Anggota UPPKS	Orang	1075	806	840	589	363
4	Kelompok BKB	Kelompok	245	245	245	245	218
5	Kelompok BKR	Kelompok	244	244	241	241	206
7	Kelompok BKL	Kelompok	228	228	232	228	202
8	PIK KRR	Kelompok	27	29	33	33	19

Tabel II-87 Capaian Indikator SDG's Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian				
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.						
1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	1,6	1,7	1,71	1,72	1,73
2	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	75,93	76,19	76,46	76,73	77
3	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.					
4	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	80	79	78	77	76
5	Total Fertility Rate (TFR).	3,7	3,6	3,5	3,4	3,61
6	Unmeet Need KB (kebutuhan KB yang tidak terpenuhi)	16,3	15,3	14,3	13,3	12,3

Indek Ketahanan Keluarga merupakan indeks yang memiliki beberapa aspek penyusun yaitu:

1) Rasio Akseptor.
2) Indeks Pembangunan Gender.
3) PDRB Perkapita ADH Berlaku.

Nilai Indeks Ketahan Keluarga Kabupaten Toba periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-88 Indeks Ketahanan Keluarga Kab. Toba 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Ketahanan Keluarga	0,8847	0,8915	0,9304	0,9711	0,9711

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Toba

1.3.2.9 Perhubungan

Jumlah kunjungan kapal penumpang dan barang pada angkutan danau di Kabupaten Toba tahun 2020 dari 3 dermaga yang terdapat di Kecamatan Balige, Kecamatan Porsea dan Kecamatan Ajibata masing masing 7.809 kunjungan kapal, 167.342 penumpang dan 3.066.500 ton barang. Dermaga Ajibata merupakan dermaga yang paling sibuk. Jumlah kunjungan kapal penumpang dan barang di dermaga tersebut tahun 2020 masing-masing 5.596 kunjungan kapal, 131.655 penumpang, dan 2.071.600 ton barang. Jumlah perahu/kapal yang terdapat di Kabupaten Toba pada tahun 2020 sebanyak 380 yang terdiri dari 256 perahu tanpa motor, 80 perahu motor tempel, dan 44 kapal motor. Perahu/kapal terbanyak terdapat di Kecamatan Balige yaitu sebanyak 81 perahu dengan 29 perahu tanpa motor, 43 perahu motor tempel, dan 9 kapal motor.

Tabel II-89 Jumlah Kunjungan Kapal, Penumpang dan Barang Pada Danau Menurut Dermaga di Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

	Dermaga	Kapal (Buah/Unit)	Penumpang (Orang)	Barang (Ton)
1.	Balige	2.914	35485	991100
2.	Porsea	19	202	3800
3.	Ajibata	5596	131655	2071600
	2020	5823	176.570	3.091.900
	2019	10.286	290.808	3.501.140
	2018	19.812	640.010	4.019.790
	2017	5 779	192 522	4 599,36
	2016	8.587	223.598	4.182

Sumber : SIPD. 2020

Tabel II-90 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah UJI KIR Angkutan Umum					
	a. Mobil Penumpang Umum	636	198	0	262	181
	b. Mobil Bus	223	56	0	83	95
	c. Mobil Angkutan Barang					
	- JBI : 0.3000 KG	315	164	10	325	583
	- JBI : 3000 - 5600 KG	497	85	0	100	210
	- JBI : 5600 - 7000 KG	697	25	0	310	246
	- JBI : 7000 - 7500 KG	139	179	0	183	285
	- JBI : 10.000 - 21.000 KG	40	23	0	25	40
2	Persentase Cakupan Pemasangan Rambu Lalu Lintas terhadap total titik yang membutuhkan rambu lalu lintas	6,5	0	0,02		
3	Dermaga Kewenangan Kabupaten					
	- Baik	0	5	5	2	2
	- Sedang	4	0	0	0	0
	- Rusak	1	0	0	0	0
	- Rusak Berat	-	7	7	9	5

1.3.2.10 Komunikasi dan informatika.

Urusan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Toba meliputi sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik dan Aplikasi Informatika. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penggunaan dan penguasaan teknologi komunikasi dan informatika, maka pemerintah sebagai regulator maupun aktor dalam pembangunan perlu mengatur dan mengendalikan khususnya tersedianyan infrastruktur menara telekomunikasi sebagai pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai kinerja bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Toba tahun 2016-2020 dapat dilhat pada tabel berikut ini :

Tabel II-91 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan informatika Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah wilayah yang tidak tersentuh sinyal	42	42	42	41	42
2	Jumlah Menara penyedia kecamatan	85	90	95	96	96
3	Indeks SPBE	NA	NA	1.43	1.43	
4	Jumlah website Perangkat Daerah yang memiliki sub domain resmi.	1	1	1	1	
5.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Telepon/HP (%)	51.50	79.33	84.99	89.99	90.92
6.	Proporsi Rumah tangga dengan akses internet (%)	19.80	26.70	36.17	43.37	50.42

1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada tahun 2020 jumlah koperasi di Kabupaten Toba sebanyak 446 koperasi terdiri dari koperasi unit desa (KUD) sebanyak 25 koperasi dan non KUD 421 koperasi. Jumlah anggota koperasi yang tercatat tahun 2020 sebanyak 20.362 anggota dimana 5.460 merupakan anggota KUD dan 14.902 anggota non KUD.

Dari 446 jumlah koperasi yang ada sebanyak 283 merupakan koperasi serba usaha dengan jumlah anggota sebesar 7.006 jenis koperasi terbanyak kedua adalah koperasi unit desa dengan 24 koperasi anggota sebanyak 5.460 orang.

Menurut tingkat keberhasilannya dari 25 KUD dan 421 Non KUD yang ada hanya ada 11 KUD dengan tingkat keberhasilan sangat baik yaitu 2 di Kecamatan Balige, 3 di Kecamatan Laguboti, 1 di Kecamatan Habinsaran 1, 1 di Kecamatan Silaen,1 di Kecamatan Sigumpar, di Kecamatan Porsea 2, dan 1 di Kecamatan Uluan. Perkembangan perkoperasian dan Usaha Mikro Kecil Menenga dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel II-92 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi	436	436	436	436	446
2.	Jumlah Anggota koperasi	12.261	18909	19282	18.909	20.362
3.	Jumlah Wirausaha UMKM :					
	- Usaha Mikro	7.336	1608	1878	1.878	1.878
	- Jumlah Usaha Kecil	538	Kewenangan propinsi	194		
	- Jumlah Usaha Menengah	27	27	27	27	27
4.	Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan di Tingkat Regional dan Tingkat Nasional	5	5	5	5	5
5.	Jumlah peredaran barang kadaluarsa yang diawasi	121	240	240	243	243
6.	Jumlah pasar tradisional yang dibangun/direhabilitasi	8	6	9	14	14
8.	Jumlah Industri Kecil	814	866	975	987	987
9.	Jumlah Industri Menengah	12	12	12	12	12

1.3.2.12 Penanaman modal

Pencapaian kinerja urusan penanaman modal diantaranya diukur dari indikator prosentase peningkatan minat investasi daerah, prosentase peningkatan realisasi investasi daerah, serta prosentase penyelesaian perijinan dan non perijinan. Untuk perkembangan penanaman modal di Kabupaten Toba dari tahun 2016 sampai 2020 untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut:

Tabel II-93 Pelayanan Perizinan Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1	Jumlah perizinan yang diterbitkan	2158	1659	1178	2522	2522
2	jumlah pengajuan perizinan	2158	1659	1178	2522	2522

NO.	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
3	jumlah pengajuan perizinan yang tidak memenuhi syarat	0	0	0	0	0
4	jumlah aduan yang terselesaikan	-	15	8	11	11
5	jumlah aduan yang masuk	-	15	8	11	11
6	nilai investasi :					
	PMA (juta)	406.953	-	-		
	PMDN (juta)	103,032	80,223	109.947	3.649.777	3.649.777
7.	Jumlah Investor					
	PMA	1	0	0	0	0
	PMDN	322	256	342	411	411

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan peningkatan kinerja sebagai berikut:

a. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
b. Perbaikan kinerja promosi investasi atas berbagai potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Toba.
c. Daya saing harga faktor produksi berupa tanah dan tenaga kerja
d. Kekayaan dan keragaman potensi dan peluang investasi yang dimiliki.
e. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan bagi para penanam modal yang akan merelisasikan investasinya.
f. Meningkatnya kualitas pengendalian investasi melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan investasi;
g. Kondisi sosial politik yang relatif stabil

1.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda merupakan aset pembangunan terutama di bidang SDM, sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan. Peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Program dan kegiatan kepemudaan serta keolahragaan diupayakan dapat meningkatkan dinamika kegiatan kepemudaan dan olah raga yang dilakukan oleh masyarakat. Dari sisi pembangunan, Kepemudaan di Kabupaten Toba terdapat banyak wadah organisasi yang bisa dimanfaatkan oleh para pemuda. Organisasi tersebut sifatnya beragam, mulai dari organisasi kepemudaan yang bersifat nasionalis misalnya, KNPI, Pemuda Pancasila, Karang Taruna, AMPI, dll. Semua organisasi tersebut tentunya harus mendapat pembinaan yang berkelanjutan karena potensi bisa dimanfaatkan dalam proses pebangunan, capaian Kinerja urusan Kepemudaan dan Olah raga diuraikan sebagai berikut:

Tabel II-94 Jumlah Organisasi pemuda, klub dan kegiatan pemuda dan olah raga Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Organisasi Pemuda	14	15	15	15	15
2	Organisasi Olah Raga	1	1	1	1	1

3	Klub Olah raga	8	10	10	10	10
4	Kegiatan Pemuda	4	2	2	1	1
5.	Kegiatan Olah raga	12	5	3	3	3

Hingga saat ini jumlah cabang olah raga (cabor) yang dibina di Kabupaten Toba sebanyak 8 cabang olahraga.

Tabel II-95 Jumlah Cabang Olah raga Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah cabang olah raga yang dibina	8	8	8	8	8
2	Jumlah cabang olah raga yang berprestasi	0	2	2	2	2
3	Jumlah cabang olah raga yang berprestasi	0	0	0	0	1

1.3.2.14 Statistik.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik disebutkan bahwa data statistik yang handal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan. Selain itu data statistik juga sangat bermanfaat bagi sektor lain misal ilmu pengetahuan, penelitian dan perkembangan dunia usaha. Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan statistik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik menyebutkan, berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistic terdiri atas: (1) statistik dasar; (2) statistik sektoral dan; (3) statistik khusus. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok intansi yang bersangkutan. Sedangkan statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelanggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau

unsur masyarakat lainnya. Pemerintah Kabupaten Toba setiap tahun secara rutin telah menyusun data publikasi yang berupa Kabupaten Toba Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Penyediaan data statistik lainnya untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah. Selain publikasi oleh BPS, data statistik yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan, evaluasi penyelenggaraan pembangunan dan pengambilan keputusan disediakan oleh Bappeda sebagai instansi yang memiliki tugas pokok perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan. Untuk kebutuhan perencanaan Bappeda memiliki data profil pembangunan Kabupaten. Selain itu juga masing-masing Perangkat Daerah yang mengampu urusan-urusan strategis seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan data profil masing - masing urusan yaitu profil pendidikan dan profil kesehatan.

Tabel II-96 Capaian kinerja urusan statistik Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.	60	60	60	70	78
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistic dalam menyusun Evaluasi pembangunan daerah.	60	60	60	70	78

1.3.2.15 Persandian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa persandian merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayananan Dasar dan fungsi persandian adalah sebagai pengaman informasi. Pelaksanaan persandian bertujuan untuk mengamankan informasi, namun sarana dan prasarana persandian yang diperlukan belum mencukupi.

Capaian kinerja urusan persandian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-97 Capaian kinerja urusan statistik Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi/ keamanan informasi dalam komunkasi Perangkat Daerah	Belum ada	Belum ada	2	2	

Permasalahan dalam pengelolaan Komunikasi Sandi Daerah yaitu belum optimalnya pengamanan jaringan informasi baik jenis informasi maupun konten informasi dan pengamanan pada fasilitas vital/ruang publik/instalasi penting di

lingkup Kabupaten Toba. Upaya kedepan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan persandian adalah dengan meningkatkan pengamanan jaringan informasi baik jenis informasi maupun konten informasi dan peningkatan pengamanan jaringan komunikasi pada fasilitas vital/ruang publik/instalasi penting di lingkup Kabupaten Toba melalui tercapainya pengelolaan persandian dengan indikator penilaian Jumlah jenis informasi yang diamankan sesuai dengan peraturan dan jumlah ruang yang sudah diamankan.

1.3.2.16 Kebudayaan

Pelaksanaan urusan kebudayaan di Kabupaten Toba difokuskan untuk mengangkat kesenian tradisonal, upacara-upacara adat yang berkembang di masyarakat. Berbagai upacara adat juga dilestarikan keberadaannya. Cagar budaya merupakan warisan budaya suatu bangsa, dengan menjaga dan melestarikannya kita bisa menjaga sejarah bangsa. Pelestarian cagar budaya merupakan sebuah usaha dinamis yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan nilai serta keberadaan cagar budaya melalui cara pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan terhadap cagar budaya tersebut.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Toba ditunjukkan dengan indikator Persentase budaya lokal yang dilestarikan, Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dan Cakupan cagar budaya yang dilestarikan.

Salah satu indikator pengelolaan produk budaya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel II-98 Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok seni budaya/sanggar budaya yang terbina	14	16	30	30	19
2	Jumlah gedung kesenian/sanggar	1	1	1	1	1
3	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	63	63	65	70	75
4	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	24	27	30	35	19
5.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	5	5	5	5	5

Sumber: SIPD

1.3.2.17 Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan menuju masyarakat cerdas,kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan

diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (reading habit society) menuju masyarakat belajar (learning society) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah.

Peningkatan minta baca masyarakat dapat dilihat salah satunya dengan meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat keperpustakan. Seperti terlihat dalam table dibawah ini:

Tabel II-99 Capaian Kinerja Pelayanan Perpustakaan Kabupaten Toba 2017-2020

NO	INDIKATOR	TAHUN			
		2017	**2018**	**2019**	**2020**
1.	Jumlah Kunjungan Perpustakaan	15.057	18.218	17.081	2881
2.	Jumlah populasi yang harus dilayani	194.108	166.817	172.632	182649
3.	Jumlah Koleksi buku	2008	5.684	7.159	6851
3.	jumlah buku	5.312	13.406	18.029	17401
4.	jumlah target buku	5000	8000	10.600	1900
5.	Jumlah Perpustakaan	282	284	285	220

Sumber: SIPD

Jumlah Pengunjung perpustakaan mengalami fluktuatif, pada tahun 2017 pengunjung sebanyak 15.057 pengunjung, Tahun 2018 jumlah pengunjung sebanyak 18.218 orang , dan tahun 2019 sebanyak 17.081 pengunjung, dan tahun 2020 mengalami penurunan drastis sebanyak 2881 pengunjung. Pandemi Covid 19 mengakibatkan kunjungan perpustakaan mengalami penurunan, akibat tidak adanya tatap muka pada saat pembelajaran.

Faktor pendukung yang berperan penting untuk meningkatkan minat baca yaitu tersedianya jumlah buku perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Jumlah setiap tahunnya menunjukkan peningkatan meskipun terjadi penambahan dan pengurangan jumlah buku dan koleksi bahan pustaka yang dikarenakan beberapa sebab, meliputi pengadaan bahan pustaka, buku rusak dan hibah dari masyarakat. Secara rinci jumlah buku perpustakaan adalah sebagai berikut :

Tabel II-100 Jumlah Buku Perpustakaan Kabupaten Toba 2017-2020

NO	**JUDUL/KELOMPOK**	**TAHUN**			
		2017	2018	2019	2020
1	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	4969	12290	12790	11627
2	Buku Refrensi	264	264	264	342
3	Buku Keagamaan	79	307	307	461
4	Buku Hukum	0	200	200	194
5	Buku Geografi	0	345	345	424
6	Buku Cerita Rakyat	0	0	4123	4123

7	Buku Fiksi	0	0	0	191
8	Buku Muatan Lokal	0	0	0	39

Sumber: SIPD

Pustakawan yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan pada tahun 2019 ada 2 orang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sedangkan tenaga teknis ada 7 orang, serta penilai bersertifikat belum ada. Seluruh tenaga tersebut tidak hanya melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan pada perpustakaan daerah tetapi juga melaksanakan pembinaan terhadap perpustakaan-perpustakaan di wilayah Kabupaten Toba.

Tabel II-101 Pembinaan pengelolaan Perpustakaan Kabupaten Toba 2017-2020

NO	Judul/kelompok	TAHUN			
		2017	**2018**	**2019**	**2020**
1.	Jumlah Pustakawan	0	1	2	3
	Jumlah Tenaga Teknis	0	7	7	7
	Jumlan Penilai bersertifikat	0	0	0	0

Sumber: SIPD

1.3.2.18 Kearsipan

Pengelolaan kearsipan daerah mencakup kegiatan pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip pada unit kerja dan desa. Untuk dapat menerapkan pengelolaan arsip yang handal dan sesuai dengan kaidah kearsipan perlu diadakan kegiatan pembinaan kearsipan dan penyelamatan serta pelestarian dokumen/arsip.

Pencapaian kegiatan pembinaan kearsipan pada unit kerja dan desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Keberhasilan pengelolaan arsip daerah tidak terlepas dari kesadaran masing masing unit kerja dan desa tentang pentingnya arsip. Pencapaian kegiatan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan semakin bertambahnya khasanah arsip yang tersimpan di lembaga kearsipan daerah. Capaian Pengelolaan Kearsipan dapat dilihat dari peningkatan unit kerja yang sudah menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan:

Tabel II-102 Pembinaan pengelolaan Kearsipan Kabupaten Toba 2017-2020

NO	Judul/kelompok	**TAHUN**			
		2017	**2018**	**2019**	**2020**
1.	Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	--	--	43	43
2.	Jumlah perangkat daerah	44	44	44	44
3.	Jumlah desa/kelurahan yang mengeloa arsip secara baku				0
4.	Jumlah Desa/kelurahan	231	231	231	244
5.	Jumlah Tenaga arsiparis	0	0	0	0

NO	Judul/kelompok	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
6.	Jumlah Tenaga Pengelola kearsipan	0	0	0	0

Sumber: SIPD

1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1.3.3.1 Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian yang mampu memberikan kontribusi terhadap kemakmuran daerah, sehingga pembangunan sektor pariwisata bertujuan untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mendorong meningkatnya pendapatan daerah (PAD), meningkatnya pendapatan masyarakat, memperluas penciptaan kesempatan kerja seperti perhotelan, restoran, dan agen perjalanan. Tingkat keberhasilan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Toba dapat dilihat dari perkembangan tingkat kunjungan wisatawannya.

Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal adalah ukuran utama keberhasilan konsep KSPN. Hal tersebut bisa dicapai melalui keterlibatan dan peran aktif masyarakat lokal dalam segala bisnis sektor Pariwisata. Peningkatan kapasitas masyarakat lokal harus mendapat perhatian khusus mulai sejak penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah dan keberpihakan kepada masyarakat lokal melalui regulasi. Sehingga diharapkan masyarakat tidak tertinggal sebagai penonton dan objek melainkan terlibat aktif sebagai pelaku bisnis sektor - sektor Pariwisata dan tetap menjadi tuan tanah di negeri sendiri. Sebagai daerah yang berada di sekitar Danau Toba, Kabupaten Toba menjadi salah satu tujuan wisata di Provinsi Sumatera Utara.

Didukung oleh sumber daya alam dan keindahan Danau Toba sektor pariwisata merupakan sektor potensial yang dapat menjadi andalan di Kabupaten Toba dimasa mendatang. Perencanaan pengembangan pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana yang baik akan menjadikan Kabupaten Toba sebagai tempat pariwisata yang indah.

Perkembangan jumlah wisatawan tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II-103 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan wisatawan asing	12.121	12.121	1.424	1.611	267
2	Kunjungan wisatawan nusantara	102.766	729.445	644.261	801.006	217462
	Jumlah	114.594	741.566	645.503	802.677	217729

	Pertumbuhan (%)	0.97	0.25	-0.14	0.19	
3.	Target PAD	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.1000.000
	Realisasi PAD	39.000.000	42.700.000	25.200.000	48.200.000	18.000.000
	% PAD	35.45	38.82	22.91	43.82	0.16
4.	Lama kunjungan wisata	3	3	3	3	3

Sumber: SIPD

Pada Tabel di atas menunjukan bahwa kunjungan wisata ke obyek wisata beretribusi pada tahun 2019 sebanyak 801.006 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis dengan angka 217.462. Pada awal tahun 2020, terjadi pandemi COVID-19, dampak pandemi ini terasa di sektor pariwisata di Kabupaten Toba. Dampak pandemi COVID-19 di sektor pariwisata yaitu tutupnya obyek wisata, penurunan kunjungan wisatawan dan penurunan okupasi hotel dan homestay. Pendapatan Asli Daerah dari retribusi wisata pada tahun 2020 ini tentunya akan turun drastis dibandingkan realisasi tahun 2019.

Upaya peningkatan kunjungan wisata didukung dengan peningkatan promosi berbasis IT dan efektivitas atraksi wisata, peningkatan sarana prasarana obyek wisata dalam kondisi baik dan peningkatan pengelolaan daya tarik wisata, pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM serta peningkatan pembinaan usaha jasa pariwisata. Pencapaian target peningkatan kunjungan wisatawan dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi maka strategi yang harus ditempuh. Yaitu dengan meningkatkan sarana prasarana pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata, penyiapan SDM pelaku wisata dan jasa usaha pariwisata, dan pengefektifan pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata. Mengacu pada hal tersebut, kebijakan yang diambil adalah meningkatkan sarana prasarana pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata, penyiapan SDM pelaku wisata dan jasa usaha pariwisata, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata.

Kabupaten Toba memiliki berbagai potensi alam, budaya dan sejarah yang dapat digali serta dilestarikan dan dijadikan sebagai aset dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata. Potensi tersebut sangat berhubungan dengan daya tarik dan nilai objek wisata yang tersebar di beberapa kecamatan yang terdiri atas objek wisata rohani, wisata alam atau rekreasi, sejarah atau budaya serta objek wisata hutan atau kebun. Kawasan wisata di Kabupaten Toba dapa dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-104 Kawasan Wisata Kabupaten Toba Tahun

No	Nama Objek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi Wisata
1.	Tugu D.I. Panjaitan	Wisata Sejarah	Kecamatan Balige
2	Museum T.B Silalahi Center	Wisata Sejarah	Kecamatan Balige
3	Museum Batak	Wisata Budaya	Kecamatan Balige
4	Pantai Lumban silintong	Wisata air	Kecamatan Balige
5	Mual Sirambe	Wisata Air	Kecamatan Balige
6	Kolam Renang Pagar Batu	Wisata Air	Kecamatan Balige

No	Nama Objek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi Wisata
7	Rest House Gurgur	Wisata Alam/Rekreasi	Kecamatan Tampahan
8	Bukit Dolok Tolong	Wisata Alam/Rekreasi	Kecamatan Tampahan
9	Pantai Tarabunga	Wisata Air	Kecamatan Tampahan
10	Pantai Lintong Ni Huta	Wisata Air	Kecamatan Tampahan
11	Pantai Meat	Wisata Air dan Alam	Kecamatan Tampahan
12	Pantai Pasifik	Wisata Air	Kecamatan Porsea
13	Pantai Siregar Aek Na las	Wisata Air	Kecamatan Uluan
14	Rumah Adat Lumban Nabolon	Wisata Budaya	Kecamatan Uluan
15	Agrowisata Lumban julu	Wisata Alam	Kecamatan L. Julu
16	Taman Eden 100	Wisata Alam	Kecamatan L. Julu
17	Jangga Dolok	Wisata Budaya	Kecamatan L. Julu
18	Kawasan makam DR. I L Nomenssen	Wisata sejarah	Kecamatan Sigumpar
19	Bukit senyum Motung	Wisata Alam	Kecamatan Ajibata
20	Pantai Ajibata	Wisata Air	Kecamatan Ajibata
21	Makam Raja Sisingamangaraja XII	Wisata Sejarah	Kecamatan Balige
22	Pasar Tradisional Balige	Wis ata Budaya	Kecamatan Balige
23	Gereja Tua HKBP	Wisata Rohani	Kecamatan Balige dan Kecamatan Sigumpar
24	Pantai Lumban Binanga	Wisata Air	Kecamatan Laguboti
25	Pantai Pasifik	Wisata Air	Kecamatan Porsea
26	Pantai Sigaol	Wisata Air	Kecamatan Uluan
27	Pantai Lumban Bulbul	Wisata air	Kecamatan Balige
28	Pantai Lumban Gaol	Wisata air	Kecamatan balige

Sumber: SIPD

Upaya peningkatan kunjungan wisata didukung dengan peningkatan promosi berbasis IT dan efektivitas atraksi wisata, peningkatan sarana prasarana obyek wisata dalam kondisi baik dan peningkatan pengelolaan daya tarik wisata, pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM serta peningkatan pembinaan usaha jasa pariwisata. Pencapaian target peningkatan kunjungan wisatawan dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi maka strategi yang harus ditempuh. Yaitu dengan meningkatkan sarana prasarana pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata, penyiapan SDM pelaku wisata dan jasa usaha pariwisata, dan pengefektifan pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata. Mengacu pada hal tersebut, kebijakan yang diambil adalah meningkatkan sarana prasarana pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata, penyiapan SDM pelaku wisata dan jasa usaha pariwisata, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata.

1.3.3.2 Pertanian

Sebagian besar penduduk Kabupaten Toba menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari luasnya hamparan pertanian khususnya lahan persawahan. Pertanian menjadi sektor andalan bagi Kabupaten Toba dalam menggerakan perekonomian daerah. Tahun 2020 sektor ini memberi kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Toba yaitu sekitar 31.28 persen

terhadap total PDRB, dengan rincian subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 24,61 persen, Kehutanan dan Penebangan Kayu 4,64 persen dan Perikanan 2,03 persen.

Tahun 2020, nilai PDRB ADHB lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 2.454,21 miliar rupiah, sedangkan nilai PDRB ADHK 2010 mencapai 1.782,37 miliar rupiah. Lapangan usaha ini memberi kontribusi terhadap pembentukan PDRB total sebesar 31,28 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 30,84 persen. Pertumbuhan pada lapangan usaha Pertanian, Kehutunan dan Perikanan mengalami perlambatan selama lima 5 (lima) tahun terakhir. Lapangan usaha ini mencatat pertumbuhan sebesar 3,62 persen pada tahun 2016, dan terus mengalami perlambatan hingga menjadi 0,41 persen pada tahun 2020.

Perkembangan indikator pertanian selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-105 Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	34.93	34.99	31.72	30.85	31.28
4	Produktivitas Padi (Kw/ha)	57.30	63.70	62.69	61.69	61.29
5	Produktivitas Jagung (Kw/ha)	63.74	59.32	56.64	53.29	60.02
6	Produksi Padi (ton)	146.005	161.555	151.584	143.664	133428.30
7	Produksi Jagung (ton)	21.972	33.524	58.842.02	42.004.4	40312.80

Sumber: SIPD

Tanaman perkebunan umumnya merupakan usaha yang dikelola secara swadaya oleh rakyat. Tanaman perkebunan yang dikelola oleh perusahaan perkebunan masih relatif kecil. Kopi merupakan komoditi andalan tanaman perkebunan rakyat yang mempunyai prospek yang baik. Dilihat dari luas tanam tanaman kopi merupakan tanaman perkebunan rakyat dengan luas tanam terluas dibanding dengan tanaman perkebunan lainnya. Luas tanaman kopi tahun 2019 sebesar 5.544,15 Ha. Tidak seperti tanaman perkebunan rakyat lainnya tanaman kopi tersebar di seluruh kecamatan. Kecamatan Habinsaran merupakan daerah yang mempunyai areal tanaman kopi terluas yakni 1.211,04 Ha dengan produksi 1.278,75 ton tahun 2019 dan Kecamatan Ajibata merupakan daerah kecamatan yang mempunyai areal tanaman kopi terluas kedua di Kabupaten Toba dengan luas areal 538,0 Ha dan produksi sebesar 368,11 ton. Kecamatan Sigumpar merupakan kecamatan yang memiliki luas tanaman kopi paling sedikit di Kabupaten Toba yaitu 187,90 Ha dengan produksi sebesar 96,15 ton.

Tabel II-106 Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenisnya di Kabupaten Toba Tahun 2016 – 2020

No	Komoditi	Produksi (Ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Karet	561,15	832,71	1.057,55	1062	1070.12
2	Kemenyan	57,41	59,989	70,7	70.80	73.92
3	Kopi	338,45	2.741,13	3.246,89	3822.56	4168.34
5	Kelapa	15,12	51,73	34,24	39.04	39.99
8	Kemiri	103,58	354,03	357,94	338.78	499.65
10	Kelapa Sawit	8.186,77	11.466,10	16.251,40	16.364.5	16.275
11	Coklat	39,77	34,70	48,28	51.59	51.63
13	Aren	44,47	109,50	96,43	98.87	96.26
14	Andaliman	-	-	14,00	12.90	45.00
16	Pinang	-	0,42	4,45	4.46	5.49
17	Nilam	45,31	95,46	145,35	146	147.82

Sumber: SIPD 2020

Tabel II-107 Luas Lahan Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenisnya di Kabupaten Toba Tahun 2016 – 2020

No	Komoditi	Luas Areal				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Karet	528,13	1.104,00	1.311,00	1.377	1344.50
2	Kemenyan	390,56	423,14	488	488.53	444.00
3	Kopi	3.558,83	4.576,36	4.614,46	5.544.15	5792.48
4	Cengkeh	-	26,55	-		
5	Kelapa	39,63	138,51	146,11	146.11	
7	Kulit Manis	19,55	19,12	-		150.35
8	Kemiri	179,36	318,74	534,00	573.50	576.18
10	Kelapa Sawit	717,43	2,70	2.699,35	2.708	2699
11	Coklat	180,95	317,14	292,90	38.62	366.39
12	Jahe	-	132,01	-		
13	Aren	247,82	283,76	561,00	560.5	561
14	Andaliman	-	-	60,00	66.02	133
16	Pinang	-	15,50	15,70	15.7	17.20
17	Nilam	-	320,00	151,00	151.03	158.00

Sumber: SIPD

Usaha peternakan umumnya juga dikelola dan diusahakan oleh masyarakat sebagai usaha rumah tangga. Ternak dapat dikelompokkan menjadi ternak besar dan ternak kecil dan unggas. Ternak besar terdiri dari sapi kerbau dan kuda. Ternak kecil meliputi kambing domba dan babi. Sedangkan ternak unggas meliputi ayam dan itik. Pada tahun 2019 jumlah populasi ternak besar seperti sapi berjumlah 1.457 ekor , kerbau 6.186 ekor dan kuda 0 ekor. Populasi ternak kecil seperti kambing mengalami peningkatan. Jumlah kambing tahun 2019 sebanyak 1.029 ekor, sementara jumlah domba 20 ekor dan babi 35.244 ekor.

Tabel II-108 Populasi Ternak Besar, Kecil dan Unggas Menurut Jenis Ternak/Unggas di Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

Jenis Ternak	Tahun (Ekor)				
	2016	2017	2018	2019	2020
A. Ternak Besar					
Sapi	2 143	1745	1.787	1467	1409
Kerbau	10 063	7445	7.675	6186	5135
B. Ternak Kecil					
Kambing	1209	1413	978	1029	984
Domba	--	24	0	20	34
Babi	37 964	42688	44.184	35.244	7685
C. Unggas Kecil					
Ayam	388.541	407.100	413.464	173.559	137852
Itik	365 667	381.061	404.871	121.558	256795
D. Produksi daging (ton)					
Sapi	43.16	82.01	94.66	88.48	73.579
Kerbau	75.3	160.45	173.64	214.40	117.931
Ayam	44.1	48.50	48.70	51.73	60.23
babi	207.6	635.69	640.33	498.09	313.86

Sumber:SIPD. 2020

Indeks Produktivitas Pertanian adalah gambaran produktivitas sektor pertanian dan peternakan yang diukur dari produksi pertanian dan peternakan. Komoditi pertanian yang diukur produksinya adalah Jagung dan Padi dan dari sektor peternakan yang diukur adalah produksi daging Sapi, Kerbau, Ayam dan Babi. Indeks pertanian Kabupaten Toba pada periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-109 Indeks Pertanian

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Produktivitas Pertanian	9,70	11,53	11,08	12,91	11,85

Sumber : data diolah, 2021

Jika Indeks pertanian bernilai 1 artinya semua komoditi pertanian dan peternakan yang menjadi komponen perhitungan Indeks Pertanian bernilai minimum berdasarkan data produksi dari tahun 2016-2020.

1.3.3.3 Perdagangan

Perdagangan adalah kegiatan yang melakukan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) barang-barang baru maupun bekas meliputi perdagangan besar dan eceran. Jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk mendirikan perusahaan/usaha dan meneruskan ijin usaha/perpanjangan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tahun 2019 berjumlah 719 SIUP terdiri dari 632 SIUP untuk usaha kecil, dan 87 SIUP untuk usaha menengah/ besar. Tahun 2019 jumlah perusahaan/usaha berbadan hukum yang melakukan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berjumlah 583 perusahaan/usaha. Dari 583 perusahaan/usaha yang melakukan TDP 87 diantaranya berbadan hukum PT, 262 CV, 4 Koperasi, 174 usaha perorangan dan 56 badan usaha lainnya. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, Kecamatan Balige merupakan kecamatan yang paling banyak memiliki

Usaha berbadan hukum yaitu sebanyak 22 badan hukum dan Kecamatan Nassau , Kecamatan Sigumpar dan Kecamatan Uluan merupakan kecamatan paling sedikit terdapat usaha berbadan hokum masing-masing 1 usaha. Sementara di Kecamatan Tampahan, Kecamatan Habinsaran, Kecamatan Borbor dan Kecamatan Bonatua Lunasi tidak terdapat usaha PT. Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa. Pasar berfungsi sebagai tempat bagi masyarakat dalam memasarkan hasil-hasil pertanian perkebunan dan lain-lain. Jumlah pedagang yang terdapat di Kabupaten Toba tahun 2019 sebanyak 3.323 pedagang yang terdiri dari pedagang kecil sebanyak 2.783 , pedangang menengah sebanyak 456, dan pedagang besar sebanyak 84 pedagang.

Tabel II-110 Data Capaian Urusan Perdagangan Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	**Penerbitan SIUP**	**291**	**318**	**256**	**356**	**719**
	Usaha Kecil	276	292	238	323	632
	Usaha Menengah	15	26	18	33	87
2	**Jumlah TDP Menurut Usaha**	**298**	**309**	**240**	**386**	**583**
	- Perusahaan Terbatas	24	49	46	55	87
	- CV	145	144	90	165	262
	- Firma	--	--	--	--	--
	- Koperasi	3	4	5	7	4
	- Perorangan	126	109	97	148	174
	- Badan Usaha Lainna		3	2	11	56
3.	**Jumlah Pedagang**					
	- Pedagang kecil	2775	2775	3094	3182	2783
	- Pedagang besar	--	--	6	1	84
	- Pedagang menengah	358	258	395	424	456
4.	Kontribusi Peredagangan besar dan eceran (%)	15.35	15.95	16.71	17.41	17.54

Sumber: SIPD

Setelah diterbitkannya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ELektronik, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan, maka semua perijinan berusaha harus melalui sistem OSS. Disamping itu semua perijinan berusaha tidak lagi diklasifikasikan berdasarkan SIUP Mikro, Kecil, Menengah dan Besar, tetapi didasarkan pada modal yang ada yaitu modal dibawah 50 juta masuk criteria Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan diatas 50 juta masuk Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Dampak pandemi COVID-19 di sektor perdagangan antara lain penurunan aktivitas perdagangan . Penurunan aktivitas perdagangan di pasar akibat terlihat dari penurunan penjualan untuk komoditas bahan pokok, penurunan omset pedagang pasar.

Pada hari pasaran pedagang cukup banyak pedagang yang tetap berjualan dengan durasi yang lebih pendek. Penurunan pendapatan juga disebabkan karena jumlah pembeli yang berbelanja di Pasar Daerah juga mengalami penurunan .

1.3.3.4 Perindustrian

Jumlah usaha industri kecil di Kabupaten Toba tahun 2019 sebanyak 1.017 usaha dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 1.850 orang. Dari jumlah usaha tersebut industri sandang dan kulit merupakan industri kecil dengan jumlah usaha terbanyak yaitu : 604 usaha (59,39 persen) dengan tenaga kerja sebanyak 940 orang. Berdasarkan kecamatan industri sandang dan kulit terbanyak berada di Kecamatan Uluan dengan 35 usaha dengan 275 tenaga kerja dan Tampahan dengan 26 usaha dengan 50 tenaga kerja. Industri Pangan menempati urutan kedua terbanyak setelah industri sandang dan kulit 131 usaha dan 308 tenaga kerja. Industri ini paling banyak terdapat di Kecamatan Balige dengan 26 usaha yang menyerap 50 orang tenaga kerja serta Kecamatan Borbor dengan 10 usaha dan 12 tenaga kerja.

Dampak pandemi COVID-19 di sektor industri adalah penurunan omset pelaku industri kecil & menengah (IKM), Penurunan omset pelaku IKM disebabkan oleh:

a. kesulitan bahan baku;

b. menurunnya permintaan pasar;

c. berkurangnya jalur distribusi.

1.3.3.5 Kelautan dan Perikanan

Perkembangan luas lahan usaha perikanan darat khususnya yang dilakukan di kolan selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi meningkat. Fluktusi luas lahan perikanan ini diikuti dengan fluktuasi produksi perikanan. Keberhasilan pelaksanaan urusan perikanan dicapai melalui pembinaan kelompok perikanan, pemberian benih ikan dan pemberian bantuan pakan ikan. Usaha perikanan pada umumnya juga dikelola sebagai usaha rumah tangga baik sebagai kegiatan budidaya maupun kegiatan penangkapan ikan. Budidaya perikanan dilakukan di kolam sawah jaring apung kolam air deras dan pembenihan sedangkan usaha penangkapan dilakukan di danau sungai dan rawa. Pada tahun 2019 jumlah rumah tangga perikanan dengan budidaya secara kolam, jarring apung dan sawah masing masing sebanyak 323 rumah tangga, 445 rumah tangga dan 2.229 rumah tangga.

Produksi perikanan jarring apung Kabupaten Toba pada tahun 2019 sebesar 629,71 ton dan produksi hasil budidaya secara keseluruhan sebesar 1.481,89 ton. Perkembangan capaian urusan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-111 Jumlah Rumah Tangga Budi Daya Ikan dan Penangkapan Ikan di Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

Kegiatan	Jumlah Rumah Tangga				
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Budi Daya Ikan					
1. Kolam	544	293	316	323	323
2. Sawah	1.697	2.353	2438	2229	2229
3. Jaring Apung	632	261	232	445	445
4. Kolam Air Deras	15	--	-	544	293
5. Pembenihan	128	--	5		0
B. Penangkapan Ikan					
1. Danau Toba	2.212	--	870	892	0
2. Sungai	178	--	-	0	0
3. Rawa	102	--	-	0	0

Sumber : *SIPD. 2020*

Tabel II-112 Capaian Kinerja perikanan di Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No	Kegiatan	Jumlah Rumah Tangga				
		2016	2017	2018	2019	2020
I	Produksi Ikan Budidaya (ton)	485.017	1.443.60	1.456.73	1.481.89	1.506.29
	Produksi Ikan Tangkap (ton)	936.45	480.079	1.066.19	1.091.34	579.65
	Total Produksi	485.953,45	481.522,60	2.522,92	2.573,23	2.85.94
	Target (ton)	10.422.4	1.443.7	1443.7	2.056.	2.117.69
	Persentase (%)	100	100	100	100	98.50
II	Konsumsi Ikan	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
III	Cakupan Binaan kelompok nelayan (%)	20.83	35	49.16	45.83	22.76
	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan	25	42	59	55	28
	Jumlah Kelompok	120	120	120	121	123

Sumber : *SIPD. 2020*

1.3.4 Fokus Urusan Fungsi Penunjang

1.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah dilaksanakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan amanat ke dua undang-undang tersebut pemerintah kabupaten wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (lima tahun) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk kegiatan tahunan serta penjabarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mekanisme perencanaan pembangunan daerah telah dilakukan secara partisipatif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah . Demikian pula, dalam proses menyusun dokumen perencanaan yang bersifat sektoral, antara lain perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, kepariwisataan, tata ruang wilayah, prasarana wilayah dan sumberdaya alam serta kesetaraan gender, melibatkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan, agar dokumen perencanaan tersebut menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat serta perubahan lingkungan strategis.

Tabel II-113 Jenis Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Toba Tahun 2016 – 2020

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Program RKPD	180	180	180	178	181
2.	Jumlah Program RPJMD	182	182	182	182	182
3.	penjabaran Progam RPJMD dalam RKPD (%)	100	100	100	100	99.50
5.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke APBD (%)	80	82	85	91	92
5.	Tersedianya Dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
6.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
7.	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
8.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tidak ada	Tidak ada	ada	ada	ada

Sumber: SIPD

1.3.4.2 Keuangan

Realisasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pada 2015 Pemerintah Kabupaten Toba memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), namun mulai 2016 sampai dengan 2019 telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan melalui tertib pengelolaan pendapatan, tertib pengelolaan belanja dan tertib pengelolaan asset daerah.

Realisasi penerimaan daerah pada tahun 2019 tercatat sebesar 1.075 triliun rupiah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum 548.690 milyar rupiah , sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu 0 milyar rupiah , Dana Alokasi Khusus 172.432 milyar rupiah

dan sisanya terbagi dalam 6 pos lainnya. Sementara Realisasi pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Toba dalam tahun 2019 tercatat sebesar 1,061 triliun rupiah yang terdiri dari pos Belanja Tidak Langsung 612.403 milyar rupiah dan pos Belanja Langsung sebesar 442.623 milyar rupiah. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Toba tahun 2019 sebesar 11.320 juta rupiah lebih tinggi dari rencana rencana penerimaan PBB tahun 2019 sebesar 8.957 juta rupiah (126,39). Berdasarkan kecamatan dari 16 (enam belas) kecamatan, terdapat 6 (delapan) kecamatan yang penerimaan PBB nya diatas 100 persen yaitu Kecamtan Laguboti, Kecamatan Sigumpar, Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Parmaksian, Kecamatan Lumban Julu dan Kecamatan Ajibata. Sedangkan kecamatan lainnya penerimaan PBB berada dibawah 100 persen diantaranya Kecamatan Balige, Kecamatan Tampahan, Kecamatan Silaen, Kecamatan Porsea, Kecamatan Pintu Pohan Meranti dan Kecamatan Uluan. Sementara tidak terdapat kecamatan yang realisasi penerimaan PBB tepat 100 persen seperti di tahun sebelumnya.

Realisasi pendapatan selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan belanja terealisasi sebesar rata-rata 94,07% dari rencana anggaran yang telah ditetapkan pada APBD. Berikut ini capaian peningkatan realisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset tahun 2016-2020.

Tabel II-114 Realisasi capaian urusan keuangan Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase Realisasi Pendapatan**	**97,79**	**99,86**	**96,55**	**99,81**	**101,06**
	Jumlah Realisasi Pendapatan	979.614.336.729,00	1.143.385.638.313,00	994.826.109.404,20	1.075.193.000.279,06	1.006.299.214.620,28
	Jumlah Target Pendapatan	1.001.804.259.980,00	1.144.993.009.515,00	1.030.372.785.709,00	1.077.212.404.000,00	995.712.384.095,24
2	**Persentase Realisasi Belanja**	**91,50**	**90,83**	**93,34**	**94,13**	
	Jumlah Realiasasi Belanja	1.010.631.910.908	1.100.661.584.284	1.055.027.173.780.20	1.061.078.773.908,41	
	Jumlah anggaran Belanja	1.104.563.982.054	1.211.735.140.610	1.130.357.955.601.97	1.127.206.844.231.00	1.049.082.750.982,86
3	Opini BPK Terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	**% SILPA terhadap APBD**	**9,76**	**5,92**	**9,68**	**3,93**	**5,09**
	Jumlah SILPA	107.759.722.074,62	71.742.315.863,84	109.466.369.892,97	44.265.305.516,97	53.370.346.867,00
	Total APBD	1.104.563.982.054,62	1.211.735.140.610,84	1.130.357.955.601,97	1.127.206.844.231,00	1.049.082.730.782,86
7	Penetapan APBD	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu

Sumber : data diolah, 2021

Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam APBD tahun ini sekurang-kurangnya 20% dari total APBD. Anggaran belanja fungsi pendidikan sudah mencakup belanja modal, belanja barang, belanja pegawai,

bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja hibah. Pengaturan alokasi anggaran fungsi pendidikan tertuang dalam PMK No 84/PMK.07/2009, dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (4) yang berbunyi: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. data Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020 di atas dapat dilihat bahwa persentase belanja urusan pendidikan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam peraturan menteri keuangan bahwa alokasi belanja urusan kesehatan minimal 10% dalam APBD. Persentase belanja urusan kesehatan belum memenuhi pada tahun 2016-2017, persentase mengalami fluktuatif.

Tabel II-115 Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase belanja pendidikan (20%)	25,26	25,26	25,26	25,73	36,19
	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	340.014.259.671,00	285.991.281.977,84	285.581.792.274,97	294.517.810.680,79	293.118.238.133,00
	Total APBD	1.211.735.140.610,84	1.211.735.140.610,84	1.130.357.955.601.97	1.127.206.844.231.00	1.049.082.730.782,86
2	Persentase belanja kesehatan (10%)	9,27	9,17	11,15	11,53	13,59
	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	102.367.225.674	111.110.223.610	126.090.629.373	129.989.501.173	142.607.647.071
	Total APBD	1.104.563.982.055	1.211.735.140.611	1.130.357.955.602	1.127.206.844.231,00	1.049.082.730.782,86

Sumber : data diolah, 2021

1.3.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan

Keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan data yang masuk dari dinas, kantor, badan dan instansi jumlah PNS/CPNS di Kabupaten Toba tahun 2019 berjumlah 4323 orang. Dari jumlah tersebut 34,99 persen merupakan pegawai laki-laki dan 65.01 persen pegawai perempuan. Distribusi PNS/CPNS jika dirinci berdasarkan golongan, sebagian besar merupakan

golongan III sebesar 54.94 persen, Golongan IV sebesar 25,52 persen, golongan II sebesar 19.08 persen, Golongan I sebesar 0.46 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, 19,45 persen merupakan PNS/CPNS tamatan SLTA, tamatan diploma I, II sebanyak 5,13 persen, diploma III sebanyak 19,10 persen, dan tamatan sarjana sebanyak 55,65 persen. Persentase PNS/CPNS yang tamat SMA masih sangat kecil sekali di Kabupaten Toba. Hal ini perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam menjalankan pemerintahan daerah. Sementara pegawai yang tamat SD dan SLTP masing-masing sebesar 0,11 persen dan 0,53 persen.

Tabel II-116 Capaian Indikator Kinerja Bidang Kepegawaian di Kabupaten Toba Tahun 2016–2020

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,27	0,29	0,36	0,41	0,00
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	0,27	0,30	0,31	0,32	0,32
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	656	589	587	582	571
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	3405	2823	2776	2840	2591
7	Rasio Pegawai Pendidikan tertinggi dan Menengah dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1,81	2,06	2,14	2,12	2,78
8	Rasio Pegawai Fungsional Menengah dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04

Sumber : data diolah, 2021

Hasil analisis kebutuhan jabatan dan analisis beban kerja pegawai selama 5 tahun terakhir juga menurun. Hal ini disebabkan di satu sisi angka kebutuhan yang cenderung meningkat akibat perubahan dan pengembangan struktur kelembagaan perangkat daerah, pada sisi yang lain ketersediaan PNS makin berkurang. Pengurangan personil terjadi secara kontiniu melalui pensiun, mutasi keluar dan meninggal dunia. Sedangkan penambahan personil hanya melalui pengadaan CPNS yang sangat dibatasi oleh kuota formasi Pemerintah dan mutasi masuk yang tidak menunjukkan penambahan yang signifikan.

1.3.4.4 Pengawasan

Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Toba sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah yang ada. Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui pemeriksaan, evaluasi dan reviu. Berdasar data tabel dapat diketahui tren adanya temuan pemeriksaan cenderung mengalami

fluktuasi baik itu pada pemeriksaan reguler untuk OPD, kasus, dan desa. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal sebagai bagian dari fungsi pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah belum optimal. Untuk rata-rata jumlah temuan pemeriksaan terbanyak ada pada pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemeriksaan reguler karena jumlah obyek pemeriksaan yang paling banyak yaitu desa dan OPD. Pemerintah Kabupaten Toba dalam upaya pendampingan terhadap pemerintah desa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Tabel II-117 Capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	**Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi**	**85,11**	**80,80**	**85,83**	**35,81**	
	- Inspektorat Kabupaten	78,11	82,56	75,92	47,09	13,98
	- Inspektorat Provinsi	80,00	75,00	100,00	0,00	--
	- BPK	97,22	84,85	81,58	60,34	--
	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti					
	- Inspektorat Kabupaten	414	426	514	283	13
	- Inspektorat Provinsi	28	3	6	0	--
	- BPK	35	28	31	35	--
	Jumlah Total Rekomendasi Temuan					
	- Inspektorat Kabupaten	530	516	677	601	93
	- Inspektorat Provinsi	35	4	6	7	--
	- BPK	36	33	38	58	--
2.	**Persentase Pelanggaran Pegawai**					
	- Jumlah ASN yang dikenakan Sanksi	7	1	12	10	5
	- Jumlah Total ASN	4835	4185	4120	4158	3876
3.	**Maturitas SPIP**	2	2	2	3	3
4.	**Peningkatan Kapabilitas APIP**	1	1	2	2	2
5.	**Peningkatan Efektifitas (LPPD)**	2,74	2,76	2,88	2,88	2,88
6.	**Peningkatan Akuntabilitas (SAKIP)**	C	CC	C	C	CC

Sumber : data diolah, 2021

1. 4 Aspek Daya Saing

1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya, baik yang berdekatan, domestik ataupun internasional. Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, iklim berinvestasi, sumber daya manusia, dan fasilitas wilayah atau infrastruktur. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk mengetahui aspek daya saing daerah terdiri dari:

1. Pengeluaran Konsumsi rumah tanggga per kapita (Angka Konsumsi RT per kapita)

   Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. Berdasarkan Hukum Engel/Engel Law bahwa semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk bahan makanan sebesar 57.29 persen, angka tersebut lebih tinggi dari Pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk bahan non makanan yaitu sebesar 40. 71 persen. Adapun komposisi tingkat pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan untuk Tahun 2016-2020 dijelaskan dalam table berikut :

Tabel II-118 Rata rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan Di Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

Kelompok Komoditas	Pengeluaran (Rp/Kapita/bulan				
	2016	2017	2018	2019	2020
MAKANAN	**578.218**	**588.728**	**523.781**	**648.287**	**679.294**
- Padi Padian	98.370	87.919	86.784	86.287	
- umbi umbian	3.313	3.595	4.250	3.790	
- Ikan/udang/cumi/kerang	74.430	84.984	85.940	88.904	
- Daging	27.379	26.817	31.519	29.494	
- Telur dan susu	36.404	39.384	40.130	41.441	
- Sayuran – sayuran	43.430	37.384	43.228	37.689	
- Kacang kacangan	6.661	8.095	7.466	7.955	
- Buah buahan	20.156	31.148	31.708	38.944	
- Minyak dan kelapa	14.147	14.239	15.091	13.107	
- Bahan minuman	19.801	20.374	19.232	19.024	
- Bumbu bumbuan	11.052	9.458	11.678	11.803	
- Konsumsi lainnya	4.650	5.972	5.332	5.048	
- Makanan dan minuman jadi	133.216	139.500	159.891	179.009	
- Rokok dan tembakau	85.208	79.859	81.531	85.379	

Kelompok Komoditas	Pengeluaran (Rp/Kapita/bulan				
	2016	2017	2018	2019	2020
BUKAN MAKANAN	**348.434**	**370.278**	**508.948**	**444.401**	**487.695**
- Perumahan dan fasilitas rumah tangga	141.878	147.699	195.685	170.662	
- Aneka barang dan jasa	111.061	121.230	155.499	154.731	
- Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	27.690	28.455	32.409	39.185	
- Barang tahan lama	32.871	32.832	64.912	30.718	
- Pajak, pungutan dan asuransi	21.343	28.342	36.243	31.876	
- Keperluan pesta dan upacara/kenduri	13.590	11.720	24.201	17.229	
JUMLAH	**926.652**	**959.006**	**1.132.729**	**1 092 688**	**1.166.990**

sumber : data diolah, 2021

Dari Tabel di atas dapat digambarkan bahwa Selain pertambahan pendapatan/ pengeluaran, persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk bukan makanan juga dapat menggambarkan keadaan kesejahteraan masyarakat suatu daerah, di mana semakin tinggi persentase pengeluaran untuk bukan makanan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Rata-rata pengeluaran/kapita/bulan penduduk Kabupaten Toba adalah Rp1.092.688, yakni Rp.648.287 untuk makanan (59,33 persen) dan Rp. 444.401 untuk bukan makanan (40,67 persen). Nilai di atas menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Toba tiap bulannya masih didominasi untuk makanan.

Tabel II-119Angka Konsumsi RT per kapita
Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Total Pengeluaran RT	926.652	959.006	1.132.729	1092688	1.166.990
2.	Jumlah RT	44.248	44.516	44.732	44.732	51.400
3.	Rasio	20,94	21,54	25,32	24,43	22.70

Sumber : data diolah, 2021

2. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase Konsumsi RT untuk non pangan).

   Persentase pengeluaran makanan adalah sebesar 58,20 persen sedangkan untuk pengeluaran bukan makanan adalah sebesar 41,80 persen.Angka tersebut tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi bahan makanan. Adapun komposisi tingkat pengeluaran perkapita sebulan menurut kelompok bukan makanan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel II-120 Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Kelompok Bukan Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Total Pengeluaran non pangan	348.434	370.278	508.948	444.401	487.695
2.	Total Pengeluaran RT	926.652	959.006	1.132.729	1.092.688	1.166.990
3.	Rasio	0,38	0,39	0,45	0,41	0,42

Sumber : data diolah, 2021

1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah angka perbandingan antara panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, terhadap panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Mutu jalan di suatu daerah berpengaruh terhadap berbagai kegiatan penduduk, khususnya kegiatan perdagangan dan upaya untuk melakukan integrasi antar wilayah terbelakang dengan pasar yang lebih besar. Di Kabupaten Toba pada Tahun 2020 panjang jalan mencapai 1.006.49 Km yang terbagi atas jalan Negara 60.89, Jalan Propinsi sepanjang 199.50 Km dan Jalan Kabupaten sepanjang 746.10 Km.

Berdasarkan kondisi jalan di Kabupaten Toba tahun 2020 sekitar 31,35 persen merupakan jalan dengan kondisi baik, sekitar 10,09 persen dalam keadaan sedang, dan 58,56 persen rusak berat. Menurut kecamatan Kecamatan Habinsaran merupakan kecamatan yang memiliki jalan terpanjang sekitar 15,40 persen dan Kecamatan Ajibata merupakan kecamatan yang memiliki terpendek sekitar 11,40 persen dari total kabupaten. Perkembangan infrastruktur jalan di Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-121 Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik Kabupaten Toba Tahun 2016-2020 (Km)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Baik	219.12	235.99	251.32	249.1	233.9
Sedang	72.26	69.24	22.13	40.4	75.3
Rusak	104.52	63.16	103.67	0	94.7
Rusak berat	350.20	377.71	368.98	456.6	342.2
Total Panjang jalan	746.10	746.10	746.10	746.10	746.10
Rasio Panjang jalan dalam kondisi baik.	39.05	40.91	36.65	38.80	41.44

Sumber : data diolah, 2021

2. Jumlah kunjungan kapal penumpang dan barang pada angkutan danau di Kabupaten Toba tahun 2020 dari 3 dermaga yang terdapat di Kecamatan Balige, Kecamatan Porsea dan Kecamatan Ajibata masing masing 7.809

kunjungan kapal, 167.342 penumpang dan 3.066.500 ton barang. Dermaga Ajibata merupakan dermaga yang paling sibuk. Jumlah kunjungan kapal penumpang dan barang di dermaga tersebut tahun 2020 masing-masing 5.596 kunjungan kapal, 131.655 penumpang, dan 2.071.600 ton barang. Jumlah perahu/kapal yang terdapat di Kabupaten Toba pada tahun 2020 sebanyak 380 yang terdiri dari 256 perahu tanpa motor, 80 perahu motor tempel, dan 44 kapal motor. Perahu/kapal terbanyak terdapat di Kecamatan Balige yaitu sebanyak 81 perahu dengan 29 perahu tanpa motor, 43 perahu motor tempel, dan 9 kapal motor.

Tabel II-122 Jumlah Kunjungan Kapal, Penumpang dan Barang Pada Danau Menurut Dermaga di Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

	Dermaga	Kapal (Buah/Unit)	Penumpang (Orang)	Barang (Ton)
1.	Balige	2.914	35485	991100
2.	Porsea	19	202	3800
3.	Ajibata	5596	131655	2071600
	2020	5823	176.570	3.091.900
	2019	10.286	290.808	3.501.140
	2018	19.812	640.010	4.019.790
	2017	5 779	192 522	4 599,36
	2016	8.587	223.598	4.182

Sumber : SIPD. 2020

Posisi dana simpanan masyarakat (giro simpanan berjangka dan tabungan) pada bank umum & BPR di Kabupaten Toba keadaan Desember 2020 sebesar 2.914.659 miliar rupiah. Dari dana yang terkumpul sebanyak 369.415 juta rupiah merupakan dana yang berasal dari giro tabungan, berjangka 693.506 juta rupiah dan tabungan 1.851.738 juta rupiah.

Berikut ini disajikan indikator kinerja focus pada fasilitas wilayah / infrastruktur sebagai berikut :

Tabel II-123 Perkembangan Sarana Perekonomian Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hotel	18	17	25	29	29
2	Pasar	12	12		12	12
3	Bank					
	- Bank Pemerintah	12	14	14	14	14
	- Bank Daerah	1	1	1	1	1
	- BPR	7	7	7	7	7
4	Restoran	106	148	165	69	71

Sumber: SIPD,2020

1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah penciptaan iklimm kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain angka kriminalitas yang dilihat dari jumlah kejadian kejahatan dan jumlah demonstrasi.

a. Angka kriminalitas.

Jika dilihat dari kejadian kejahatan dari tahun 2016 hingga 2020 cenderung meningkat tiap tahunnya. Dengan meningkatnya kejahatan tersebut akan dapat mempengaruhi iklim investasi, dimana orang akan berpikir ulang untuk menanamkan sahamnya apabila tingkat keamanannya kurang.

Kejadian kejahatan tersebut dapat disebabkan karena faktor ekonomi dimana tingkat kemiskinan terlalu tinggi, faktor lingkungan pergaulan dan belum baiknya disiplin masyarakat dalam mematuhi hukum/peraturan perundang-undangan serta dengan adanya dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbendung menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat. tantangan kedepan yang dihadapi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban adalah meningkatnya gangguan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, serta tindakan kriminal, kekerasan secara kualitas maupun kuantitas maupun tak terlepas pula munculnya berbagai isu dan teror yang dapat meresahkan masyarakat sebagai akibat kemajuan teknologi yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tabel II-124 Jumlah kejadian kejahatan di Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No	Jenis kriminal	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tindak kriminal	555	266	372	389	531
2	Jumlah penduduk	180.694	181.790	182.673	184.493	206.199
	Angka kriminal	30,71	14,63	20,36	21,08	25,75

Sumber : SIPD

Peristiwa kejahatan / pelanggaran yang paling banyak dilaporkan dan ditangani adalah kejadian penganiayaan, kemudian pencurian, kasus narkoba, kasus penipuan.

b. Jumlah demonstrasi.

Demonstrasi ("demo") atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk

rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Dalam kurun waktu 2016-2020jumlah kejadian demonstrasi di Kabupaten Toba cenderung menurun, Tahun 2015 jumlah demonstrasi 28 kejadian, Tahun 2016 ada 7 kejadian, Tahun 2017 ada 5 kejadian dan Tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak ada kejadian demonstrasi. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi adanya demonstrasi adalah dengan meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk melakukan deteksi dini terjadinya konflik dan mengaktifkan tim penanganan konflik sosial.

1.4.4 Fokus Sumber daya manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumberdaya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Pembangunan SDM di Kabupaten Toba diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan daerah. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah.

1. Tingkat Ketergantungan.

   Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumber daya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumber daya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Pembangunan Sumber Daya manusia di Kabupaten Toba diarahkan untuk menyiapkan SDM unggul, terampil, inovatif, kompetitif dan disiplin dalam rangka meningkatkan lajut pembangunan daerah. Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan karena di dalam kelompok angkatan kerja terdapat kelompok penduduk yang bertindak sebagai pelaku ekonomi. Semakin besar jumlah tenaga kerja di dalam suatu daerah, semakin besar penawaran tenaga kerjanya. Apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) maka akan terjadi pengangguran. Disamping itu, semakin besar jumlah

tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif, sebagai dampaknya maka nilai rasio ketergantungan akan cenderung menurun. Rasio ketergantungan atau angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Toba tahun 2016 mencapai angka 45.69 %, ini berarti bahwa setiap 100 orang penduduk yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 50 orang penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Pada tahun 2020 rasio ketergantungan ini mengalami kenaikan menjadi 56.79 yang berarti setiap 100 orang penduduk produktif harus menanggung kurang lebih 60 orang penduduk belum produktif dan tidak produktif.

Tabel II-125 Rasio ketergantungan Tahun 2016-2020 Kabupaten Toba

No	uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk usia <15 Tahun	30.255	30.122	30.285	29.814	31.547
2	Jumlah Penduduk usia > 64 Tahun	11.326	11.567	11.591	12.034	5.704
3	Jumah penduduk usia tidak produktif	41.581	41.689	41.876	41.848	37.251
4	Jumlah Penduduk usia 15-64	91.006	91.493	91.987	92.475	65.599
5	Rasio ketergantungan	45,69	45,57	45,52	45,25	56,79

Sumber : data diolah, 2021

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam rangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan multiplier effect yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk mengetahui gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dibutuhkan analisis realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, meliputi: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selain itu juga dilakukan analisis terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Kapasitas keuangan daerah harus diketahui, agar daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan, sehingga belanja pembangunan dapat dilakukan secara optimal, efektif dan efisien.

Analisis proyeksi pendapatan daerah untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Analisis kinerja keuangan Kabupaten Toba periode tahun 2021-2026 didasarkan pada data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Toba dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba. Gambaran keuangan daerah dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah dilaksanakan selama tahun 2016-2020 dan proyeksi kedepan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis terhadap kinerja keuangan periode sebelumnya merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Toba dalam memproyeksikan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang, khususnya dalam memproyeksikan target kinerja keuangan periode mendatang. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya, dapat diketahui berapa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang dapat dijadikan ukuran dalam penentuan target keuangan daerah. Ruang lingkup analisis kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja

pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD menjelaskan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah. Sedangkan neraca daerah menjelaskan tentang perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas, dan analisis rasio aktivitas.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1. 1 Kinerja Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target pendapatan daerah merupakan capaian yang harus diperoleh, sedangkan realisasi merupakan capaian pada akhir tahun anggaran. Kapasitas kemampuan keuangan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan pembiayaan.

Secara umum Pendapatan selalu mengalami fluktuatif. Hal ini disebabkan Dana Perimbangan dari Tahun 2016-2020 mengalami mengalami fluktuafi, dengan rata rata pertumbuhan 0.67 %, Pendapatan Asli Daerah tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2016-2021 rata rata pertumbuhannya 0.23 %. sedangkan lain lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan dengan rata rata pertumbuhan sekitar 18.56 %, dijelaskan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya mengalami pertumbuhan hampir 7.23 %, dan Dana desa dengan rata rata pertumbuhan 6.73 %. Secara rinci perkembangan pendapatan daerah tercantum pada diagram 3.1 dan tabel 3.1 berikut:

Gambar III-1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2016 – 2020 (Milyar Rupiah)

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah juga berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini disebabkan kemandirian dalam APBD sangat

terkait dengan pendapatan asli daerah. Semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, bukan sumber pendapatan dari bantuan, maka daerah semakin leluasa mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan kepentingan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2016-2020 didominasi dana perimbangan dari Pemerintah. Kontribusi dana perimbangan atas Pendapatan daerah Tahun 2016 sebesar 74.83 % mengalami penurunan setiap tahun dengan kondisi tahun 2020 menjadi 65.52 %, secara rinci dalam diagram berikut:

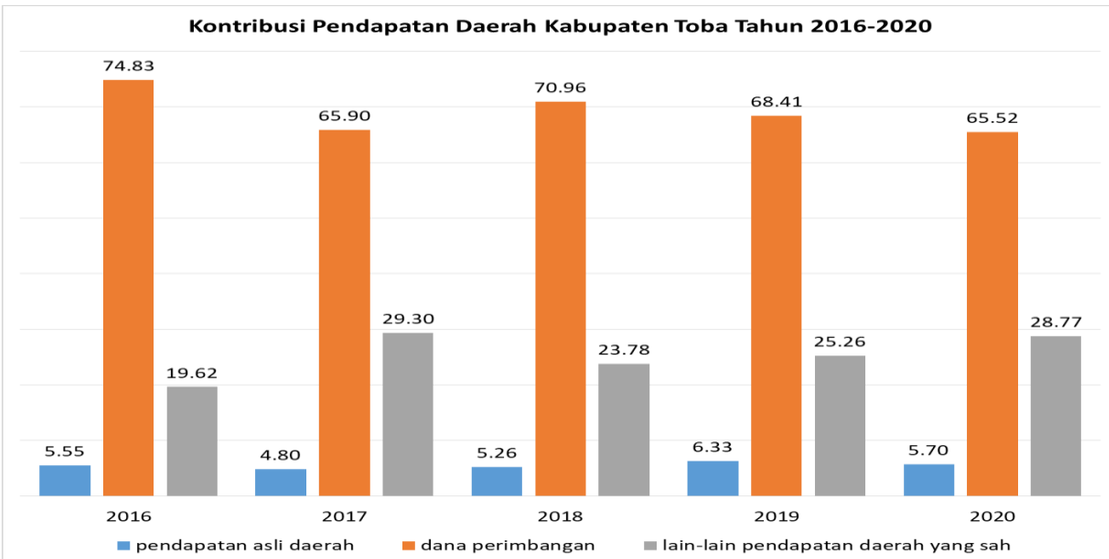

Gambar III-2 Perkembangan Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2016 – 2020.

Dalam hal pengelolaan daerah Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal sangat penting, karena hal tersebut menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Melihat gambar diatas, disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba tingkat kemandiriannya masih rendah atau tingkat ketergantungan terhadap pihak luar/sumber dana eksternal masih sangat besar.

Beberapa factor penyebab permasalahan dalam realisasi Pendapatan Daerah selama Tahun 2016-2020 adalah :

1. Belum optimalnya realisasi pajak dan retribusi daerah.
2. Sumber pendapatan yang perlu ditingkatkan, sedangkan kebutuhan Belanja Daerah yang terus menerus naik.
3. Tingkat kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi yang belum maksimal.

Pendapatan daerah mencakup pendapatan daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Perkembangan pendapatan daerah mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel III-1 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2016 – 2020

NO.	URAIAN	REALISASI					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Pendapatan Daerah**	**979,614,336,729.22**	**1,143,385,638,313.73**	**994,826,109,404.20**	**1,075,193,000,279.06**	**1,006,299,214,620.28**	**4.15**
1.1	Pendapatan Asli Daerah	54,391,304,393.22	54,840,823,646.03	52,298,960,803.40	68,046,526,605.06	57,403,162,933.28	0.23
1.1.1	Pajak Daerah	18,892,595,117.21	22,399,659,062.28	21,277,615,761.26	24,560,512,536.23	22,095,458,949.54	4.64
1.1.2	Retribusi Daerah	18,738,720,915.09	7,092,289,593.15	5,710,908,428.77	13,897,170,705.84	12,427,241,098.22	-15.25
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,762,790,131.00	4,817,211,743.00	7,670,863,808.00	7,619,329,178.00	6,050,089,714.00	0.38
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11,997,198,229.92	20,531,663,247.60	17,639,572,805.37	21,969,514,184.99	16,830,373,171.52	17.75
1.2	**Dana Perimbangan**	**733,019,250,936.00**	**753,482,194,833.00**	**705,931,665,689.00**	**735,587,572,963.00**	**659,358,632,653.00**	**0.67**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23,524,850,436.00	17,149,585,982.00	18,857,853,436.00	14,464,688,399.00	17,569,435,717.00	-6.75
1.2.2	Dana Alokasi Umum	537,940,690,000.00	528,490,802,000.00	528,490,802,000.00	548,690,496,000.00	519,088,428,000.00	-0.44
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	171,553,710,500.00	207,841,806,851.00	158,583,010,253.00	172,432,388,564.00	122,700,768,936.00	5.18
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**192,203,781,400.00**	**335,062,619,834.70**	**236,595,482,911.80**	**271,558,900,711.00**	**289,537,419,034.00**	**18.56**
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	15,000,000,000.00	30,327,415,690.80	36,999,122,398.00	39588830000	0.33
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	55,071,524,400.00	71,146,366,412.00	31,021,432,821.00	48,065,422,313.00	35,739,631,034.00	7.23
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0	75,684,856,022.70	17,000,000,000.00	10,393,118,000.00	37,134,106,000.00	0.35
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	601,920,000.00	0	4,998,240,000.00	0	0	-25.25
1.3.6	Dana Desa	136,530,337,000.00	173,231,397,400.00	153,248,394,400.00	176,101,238,000.00	177,074,852,000.00	6.73

3.1.1. 2 Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Toba menunjukkan angka yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 total belanja daerah sebesar Rp. 1.010.631.910.908, meningkat menjadi Rp. 1.061.087.958.908,41 pada tahun 2019, namun turun drastis hingga hanya menjadi Rp. 997,957,281,587.50 pada tahun 2020. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Toba tahun 2016 – 2020 terlihat pada tabel belikut:

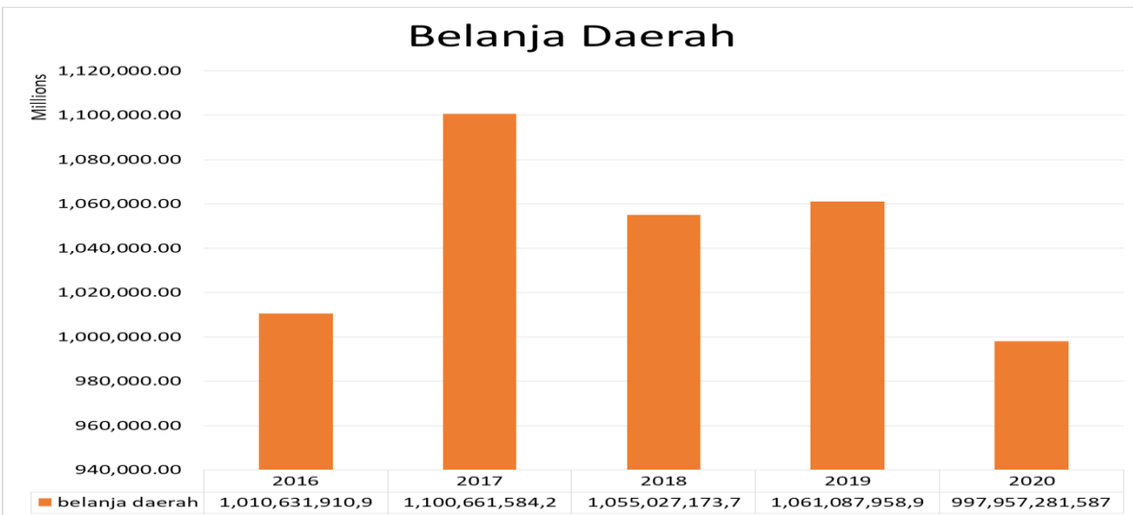

Gambar III-3 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun 2016 – 2020 (Milyar Rupiah)

Proporsi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) terhadap total belanja selama kurun waktu 2016 – 2020, BTL memiliki porsi lebih besar dibandingkan dengan BL. Proporsi BTL . untuk Tahun 2016 BTL sebesar 63,55% dengan dan BL sebesar 36,44%. Proporsi tersebut fluktuatif selama kurun waktu 2016 – 2020 dimana BTL selalu mendominasi besaran proporsi tersebut., dan pada tahun 2020 proporsi BTL dan BL adalah 73.00 % dengan 27.00%. Perkembangan proporsi unsur belanja daerah Kabupaten Toba tercantum pada gambar berikut ini.

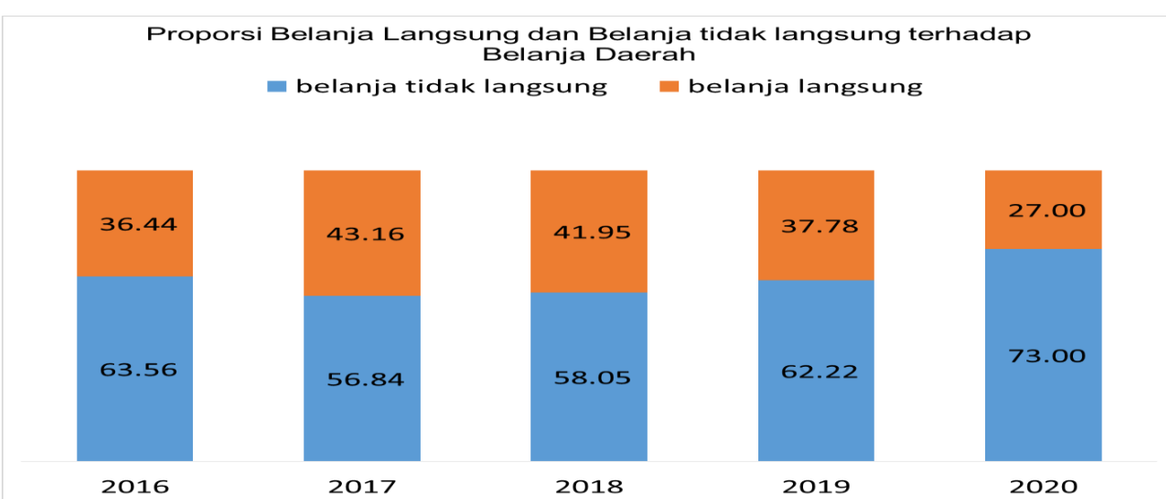

Gambar III-4 Perkembangan dan Proporsi BTL dan BL terhadap Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun 2016 – 2020 (%)

BTL merupakan kelompok belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini meliputi belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa, dan belanja tidak terduga. Sedangkan BL merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok BL terdiri dari; belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Rincian Realisasi Belanja Daerah selama Tahun 2016-2020 disajikan dalam table berikut ini :

Tabel III-2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No.	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
2.	**Belanja Daerah**	**1,010,631,910,908.00**	**1,100,661,584,284.60**	**1,055,027,173,780.20**	**1,061,087,958,908.41**	**997,957,281,587.50**	**2.20**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**642,330,234,944.00**	**625,595,241,625.00**	**612,403,937,693.00**	**660,212,530,071.00**	**728,480,355,070.50**	**-0.61**
2.1.1	Belanja Pegawai	441,456,240,244.00	385,678,542,322.00	389,443,823,666.00	412,148,613,955.00	408,032,551,697.00	-3.14
2.1.3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0.00
2.1.4	Belanja Hibah	6,515,671,400.00	6,891,219,503.00	7,679,456,225.00	8,422,716,000.00	57,860,834,385.00	2.96
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	300,000,000.00	355,000,000.00	393,800,000.00	569,495,000.00	528,328,000.00	4.70
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintah Desa	0	0	3,763,131,292.00	2,938,666,243.00	2,500,000,000.00	-0.09
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerinta Daerah Dan Pemerintah Desa	194,058,323,300.00	232,670,479,800.00	210,343,704,800.00	236,133,038,873.00	252,202,533,741.00	5.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0	0	780,021,710.00	0	7,356,107,247.50	-0.25
2.2.	**Belanja Langsung**	**368,301,675,964.00**	**475,066,342,659.60**	**442,623,236,087.20**	**400,875,428,837.41**	**269,476,926,517.00**	**7.12**
2.2.1	Belanja Pegawai	23,193,104,403.00	35,065,840,123.00	36,157,658,349.20	32,623,964,984.00	34,097,032,100.00	12.79
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	163,895,606,325.00	240,770,471,376.35	253,495,360,772.00	232,903,113,019.41	168,796,695,200.00	11.65
2.2.3	Belanja Modal	181,212,965,236.00	199,230,031,160.25	152,970,216,966.00	135,339,350,834.00	66,583,199,217.00	2.27
	Surplus / (Defisit)	**-31,017,574,178.78**	**42,724,054,029.13**	**-60,201,064,376.00**	**14,105,041,370.65**	**8,341,933,032.78**	**-60.45**

3.1.1. 3 Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Toba berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir. Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Toba menunjukkan penurunan dari sebesar Rp. 107.759.705.274,62 pada tahun 2016 menjadi Rp. 53.379.531.887,62 pada tahun 2020. Perkembangan penerimaan pembiayaan terlihat pada gambar berikut:

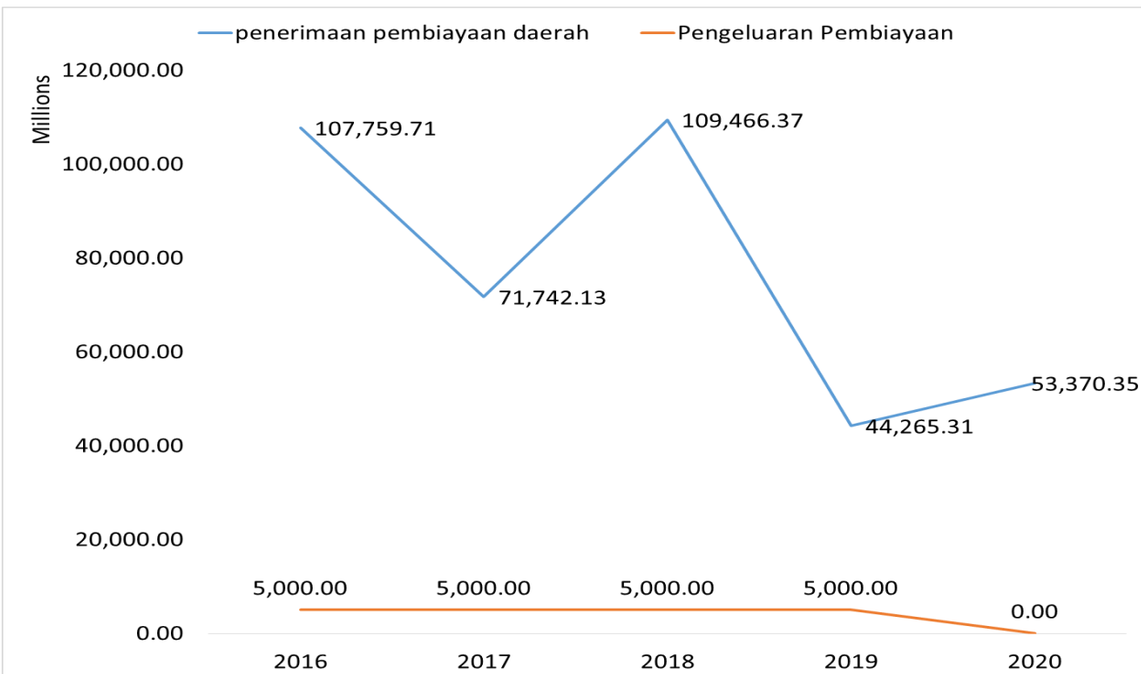

Tabel III-3 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2016 – 2020 (Milyar Rupiah)

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Toba berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000 dan selalu konstan sampai dengan tahun 2019. Untuk tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Toba tidak anggarkan untuk Penyertaan Modal di refocusing sebagai imbas dari penanganan Pandemi Covid-19 yang membutuhkan dana cukup besar.

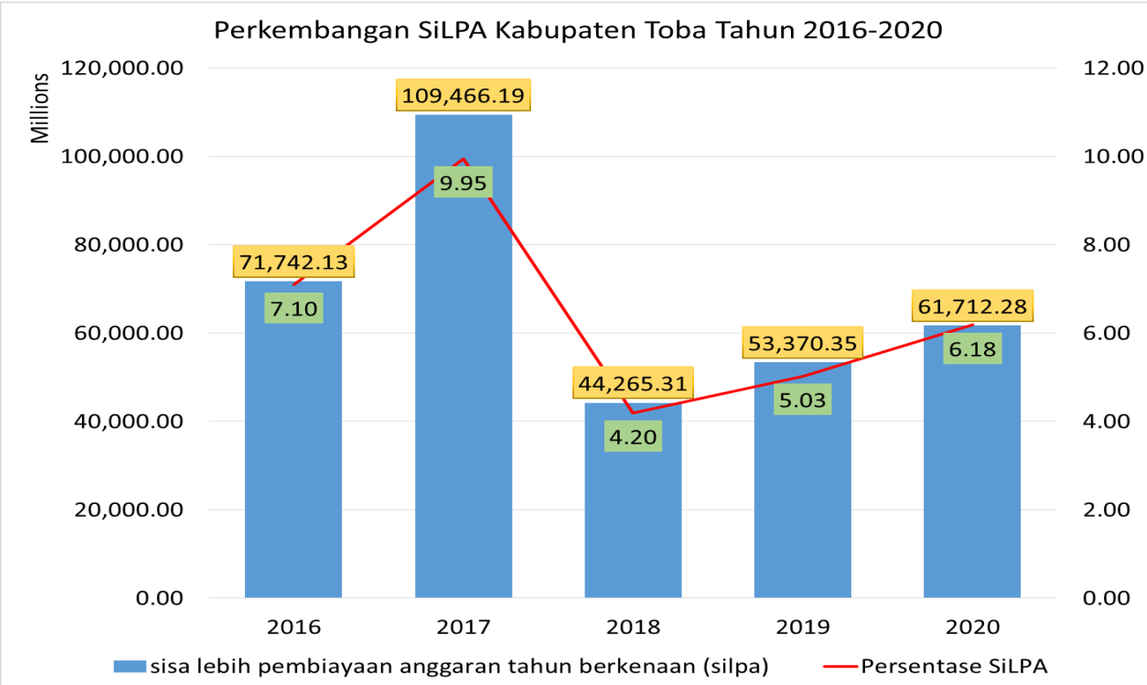

Gambar III-5 Perkembangan SiLpa Kabupaten Toba 2016-2020

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SilPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Perkembangan SiLPA di Kabupaten Toba pada tahun 2016 – 2020 menunjukkan fluktuatif dari Rp. 71.742.131.095,84 pada tahun 2016 menjadi Rp. 53.370.346.887,62 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan kondisi yang kurang baik sehingga perlu menjadi perhatian. Perkembangan SiLPA dapat dilihat pada gambar berikut:

Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan rata-rata pertumbuhannya tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel III-4 Rata rata pertumbuhan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2016 – 2020

No.	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**pendapatan daerah**	**979.614.336.729,22**	**1.143.385.638.313,73**	**994.826.109.404,20**	**1.075.193.000.279,06**	**1.006.299.214.620,28**	**4,15**
1.1	pendapatan asli daerah	54.391.304.393,22	54.840.823.646,03	52.298.960.803,40	68.046.526.605,06	57.403.162.933,28	0,23
1.1.1	pajak daerah	18.892.595.117,21	22.399.659.062,28	21.277.615.761,26	24.560.512.536,23	22.095.458.949,54	4,64
1.1.2	retribusi daerah	18.738.720.915,09	7.092.289.593,15	5.710.908.428,77	13.897.170.705,84	12.427.241.098,22	-15,25
1.1.3	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.762.790.131,00	4.817.211.743,00	7.670.863.808,00	7.619.329.178,00	6.050.089.714,00	0,38
1.1.4	lain-lain pendapatan daerah yang sah	11.997.198.229,92	20.531.663.247,60	17.639.572.805,37	21.969.514.184,99	16.830.373.171,52	17,75
1.2	**dana perimbangan**	**733.019.250.936,00**	**753.482.194.833,00**	**705.931.665.689,00**	**735.587.572.963,00**	**659.358.632.653,00**	**0,67**
1.2.1	dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	23.524.850.436,00	17.149.585.982,00	18.857.853.436,00	14.464.688.399,00	17.569.435.717,00	-6,75
1.2.2	dana alokasi umum	537.940.690.000,00	528.490.802.000,00	528.490.802.000,00	548.690.496.000,00	519.088.428.000,00	-0,44
1.2.3	dana alokasi khusus	171.553.710.500,00	207.841.806.851,00	158.583.010.253,00	172.432.388.564,00	122.700.768.936,00	5,18
1.3	**lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**192.203.781.400,00**	**335.062.619.834,70**	**236.595.482.911,80**	**271.558.900.711,00**	**289.537.419.034,00**	**18,56**
1.3.1	pendapatan hibah	0	15.000.000.000,00	30.327.415.690,80	36.999.122.398,00	39588830000	0,33
1.3.2	dana darurat	0	0	0	0	0	0,00
1.3.3	dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	55.071.524.400,00	71.146.366.412,00	31.021.432.821,00	48.065.422.313,00	35.739.631.034,00	7,23
1.3.4	dana penyesuaian dan otonomi khusus	0	75.684.856.022,70	17.000.000.000,00	10.393.118.000,00	37.134.106.000,00	0,35
1.3.5	bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	601.920.000,00	0	4.998.240.000,00	0	0	-25,25
1.3.6	dana desa	136.530.337.000,00	173.231.397.400,00	153.248.394.400,00	176.101.238.000,00	177.074.852.000,00	6,73
2.	**belanja daerah**	**1.010.631.910.908,00**	**1.100.661.584.284,60**	**1.055.027.173.780,20**	**1.061.087.958.908,41**	**997.957.281.587,50**	**2,20**
2.1	**belanja tidak langsung**	**642.330.234.944,00**	**625.595.241.625,00**	**612.403.937.693,00**	**660.212.530.071,00**	**728.480.355.070,50**	**-0,61**
2.1.1	belanja pegawai	441.456.240.244,00	385.678.542.322,00	389.443.823.666,00	412.148.613.955,00	408.032.551.697,00	-3,14
2.1.3	belanja subsidi	0	0	0	0	0	0,00
2.1.4	belanja hibah	6.515.671.400,00	6.891.219.503,00	7.679.456.225,00	8.422.716.000,00	57.860.834.385,00	2,96
2.1.5	belanja bantuan sosial	300.000.000,00	355.000.000,00	393.800.000,00	569.495.000,00	528.328.000,00	4,70

No.	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.6	belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintah desa	0	0	3.763.131.292,00	2.938.666.243,00	2.500.000.000,00	-0,09
2.1.7	belanja bantuan keuangan kepada pemerinta daerah dan pemerintah desa	194.058.323.300,00	232.670.479.800,00	210.343.704.800,00	236.133.038.873,00	252.202.533.741,00	5,00
2.1.8	belanja tidak terduga	0	0	780.021.710,00	0	7.356.107.247,50	-0,25
2.2.	**belanja langsung**	**368.301.675.964,00**	**475.066.342.659,60**	**442.623.236.087,20**	**400.875.428.837,41**	**269.476.926.517,00**	**7,12**
2.2.1	belanja pegawai	23.193.104.403,00	35.065.840.123,00	36.157.658.349,20	32.623.964.984,00	34.097.032.100,00	12,79
2.2.2	belanja barang dan jasa	163.895.606.325,00	240.770.471.376,35	253.495.360.772,00	232.903.113.019,41	168.796.695.200,00	11,65
2.2.3	belanja modal	181.212.965.236,00	199.230.031.160,25	152.970.216.966,00	135.339.350.834,00	66.583.199.217,00	2,27
	surplus / (defisit)	**-31.017.574.178,78**	**42.724.054.029,13**	**-60.201.064.376,00**	**14.105.041.370,65**	**8.341.933.032,78**	**-60,45**
3	**pembiayaan daerah**						
3.1	**penerimaan pembiayaan daerah**	**107.759.705.274,62**	**71.742.131.095,84**	**109.466.369.892,97**	**44.265.305.516,97**	**53.370.346.887,62**	**-8,32**
3.1.1	sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	107.759.705.274,62	71.742.131.095,84	109.466.369.892,97	44.265.305.516,97	53.370.346.887,62	-8,32
3.1.5	penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0	0	0,00
3.2	**pengeluaran pembiayaan daerah**	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	-0,25
3.2.2	penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	-0,25
3.2.4	pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0	0	0,00
3.2.5	pengeluaran pembiayaan daerah yang lain yang diperlukan	0	0	0	0	0	0,00
3.3	sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (silpa)	71.742.131.095,84	109.466.185.124,97	44.265.305.516,97	53.370.346.887,62	61.712.279.920,40	13,09

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah adalah laporan keuangan yang menyajikan kondisi aset, kewajiban dan ekuitas suatu daerah pada waktu tertentu. Posisi neraca daerah akan menggambarkan infiormasi mengenai kondisi keuangan suatu daerah, sehingga menjadi salah satu faktor penentuan asumsi-asumsi dalam perumusan kebijakan daerah. Perkembangan neraca daerah Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-5 Rata Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
	ASET						
	ASET LANCAR	143.771.657.633,44	146.972.078.891,60	97.073.294.244,63	99.858.063.650,03	111.285.080.591,12	-9,62
	Kas	73.104.070.923,84	109.921.411.518,97	44.310.796.016,97	53.376.470.887,62	62.445.804.157,40	3,71
	Investasi Jangka Pendek	0	0	0	0	-	0
	Piutang	55.285.078.383,10	14.554.949.840,62	25.534.345.935,30	21.548.784.430,80	24.933.708.994,80	-4,62
	Piutang Lain-lain	1.495.547.034,44	4.798.275.880,27	10.022.746.453,27	11.381.567.465,78	10.908.895.331,21	114,43
	Persediaan	21.110.305.664,47	22.258.519.561,02	21.270.386.067,86	17.772.282.357,43	18.107.294.861,67	-5,15
	Belanja dibayar dimuka	0	0	0	0		0
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-7.223.344.372,41	-4.561.077.909,28	-4.064.980.228,77	-4.221.041.491,60	-2.753,96	-14,63
	INVESTASI JANGKA PANJANG	**15.716.234.634,93**	**20.716.234.634,93**	**25.716.234.634,93**	**30.716.234.634,93**	**30.716.234.634,93**	**25,13**
	Investasi Non Permanen	0	0	0	0	-	0
	Investasi Permanen	15.716.234.634,93	20.716.234.634,93	25.716.234.634,93	30.716.234.634,93	30.716.234.634,93	25,13
	ASET TETAP	**1.364.122.644.388,55**	**1.439.905.369.980,66**	**1.375.060.656.433,43**	**1.550.579.828.626,05**	**1.592.010.188.810,01**	**4,16**
	Tanah	439.029.514.254,10	396.869.197.314,10	424.431.634.234,10	424.135.216.984,10	497.608.768.375,10	-0,91
	Peralatan dan Mesin	212.659.811.757,86	234.208.868.284,13	254.580.740.207,81	286.768.520.797,52	314.551.163.753,48	10,49
	Gedung dan Bangunan	454.716.559.697,70	428.677.312.827,40	471.518.314.092,40	481.496.597.129,40	499.521.339.107,40	2,13
	Jalan, jaringan dan Instalasi	762.414.303.457,05	884.223.713.173,98	1.001.366.587.336,98	1.092.281.061.341,98	1.112.028.822.355,08	12,77
	Aset tetap lainnya	8.743.343.394,84	11.081.639.570,05	12.338.472.685.,05	12.546.299.789,05	14.035.093.087,05	13,26

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Konstruksi dalam Pengerjaan	53.448.485.296,00	73.197.019.497,00	56.109.646.756,00	53.836.971.046,00	55.004.859.032,90	3,18
	Akumulasi Penyusutan	-566.889.373.469,00	-588.352.380.686,00	-845.284.738.878,91	-800.484.838.462,00	- 900.739.856.901,00	14,05
	DANA CADANGAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**
	Dana Cadangan	0	0	0	0	-	0
	ASET LAINNYA	**131.777.656.933,40**	**145.313.184.053,11**	**145.303.771.287,68**	**146.477.123.144,65**	**151.646.115.599,18**	**3,69**
	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0	0	0	0		0
	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0	0	0		0
	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0		0
	Aset Tidak Berwujud	34.800.000,00	95.292.667,00	2.525.025.917,00	2.518.601.917,00	2.012.897.819,00	907,78
	Aset Lain-lain	131.742.856.933,40	145.217.891.386,11	142.778.745.370,68	143.958.521.227,65	149.633.217.780,18	3,12
	Tagihan Piutang SKPD	0	0	0	0		0
	Penyisihan Piutang SKPD Tak Tertagih	0	0	0	0		0
	Amortisasi	0	0	0	0		0
	JUMLAH ASET	**1.655.388.193.590,32**	**1.752.906.867.560,30**			**1.885.657.619.635,24**	
	KEWAJIBAN						
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**16.864.784.487,88**	**18.273.346.191,42**	**10.111.421.342,13**	**52.011.541.891,80**	**7.151.467.543,78**	**126,02**
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	402.118.698,00	567.388.846,00	390.424.873,00	390.424.873,00	409.945.810,00	3,3
	Utang Bunga	0	0	0	0		0
	Utang Pajak	0	0	0	0		0
	Utang Beban	471.026.987,00	893.804.860,00	1.613.068.977,00	1.245.211.532,00	6.390.183.401,78	49,14
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0	0		0

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pendapatan Diterima Dimuka	91.390.191,88	144.039.730,42	165.910.367,13	528.491.821,80	155.124.456,00	97,11
	Utang Jangka Pendek Lainnya	15.900.248.611,00	16.668.112.755,00	7.942.017.125,00	49.847.413.665,00	196.213.876,00	160,04
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**
	Utang Dalam Negeri	0	0	0	0	-	0
	Utang Luar Negeri	0	0	0	0	-	0
	JUMLAH KEWAJIBAN	**16.864.784.487,88**	**18.273.346.191,42**	**10.111.421.342,13**	**52.011.541.891,80**	**7.151.467.543,78**	**126,02**
	EKUITAS						
	EKUITAS	**1.638.523.409.102,44**	**1.734.633.521.368,88**	**1.633.042.535.258,54**	**1.775.619.708.163,86**	1.878.506.152.091,46	**2,91**
	Ekuitas	**1.638.523.409.102,44**	**1.734.633.521.368,88**	**1.633.042.535.258,54**	**1.775.619.708.163,86**	1.878.506.152.091,46	**2,91**
	JUMLAH EKUITAS	**1.638.523.409.102,44**	**1.734.633.521.368,88**	**1.633.042.535.258,54**	**1.775.619.708.163,86**	1.878.506.152.091,46	**2,91**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**1.655.388.193.590,32**	**1.752.906.867.560,30**	**1.643.153.956.600,67**	**1.827.631.250.055,66**	**1.885.657.619.635,24**	**3,62**

Sumber: BPKKAD Kab. Toba 2020

Dari perkembangan neraca keuangan di atas selanjutnya dilakukan analisis neraca daerah dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Toba melakui perhitungan likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Kabupaten Toba dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sedangkan rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Kabupaten Toba dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Selanjutnya rasio aktivitas bermanfaat untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Kabupaten Toba. Analisis ketiga rasio ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III-6 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Toba Tahun 2016 – 2020

RASIO		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Lukuiditas	Rasio Lancar	8,52	8,04	9,60	1,92	1,92
	Rasio Quick	7,27	6,82	7,50	1,58	1,58
Rasio Solvabilitas	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03
	Rasio Hutang terhadap Modal	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03
Rasio Aktivitas	Rata-Rata Umur Piutang	5	5	5	5	5
	Rata-rata Umur Persediaan	3	3	3	3	3

Sumber: BPKKAD Kab. Toba 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat rasio likuiditas masih dalam posisi yang sehat dimana bahwa setiap hutang lancar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Toba masih dapat dijamin dengan baik oleh aset lancar. Sedangkan untuk rasio solvabilitas menunjukkan trend positif, dimana pengadaan aset yang dibiayai oleh hutang relatif stabil setiap tahun disamping itu rasio hutang terhadap modal setiap tahun mengalami peningkatan, yang berarti setiap tahun ada peningkatan kemampuan dari ekuitas atau modal sendiri dari Pemerintah Kabupaten Toba untuk membayar kewajiban atau hutang. Rasio aktivitas menunjukkan bahwa rata-rata umur piutang pada tahun 2016 – 2019 selalu konstan di angka 5 (lima), ini berarti bahwa piutang berputar selama 5 (lima) hari. Angka ini cukup tinggi dan akan menjadi focus perhatian di tahun mendatang. Demikian pula tingkat efektifitas manajemen dalam pengelolaan pengelolaan persediaan relatif stabil, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata umur persediaan mulai tahun 2016 – 2019 stabil menunjukkan angka 3 (tiga), dimana angka ini cukup kecil yang berarti semakin kecil umur persediaan maka semakin besar tingkat penggunaan persediaan, sehingga semakin besar aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Toba.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

APBD merupakan instrument yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam pengembilan keputusan baik terkait pendapatan maupun belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran dengan menggunakan basis atau penekatan kinerja, dimana setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan pencapaian tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan pembiayaan dari APBD harus memiliki tujuan, sasaran yang jelas, mampu memberikan manfaat yang besar dan dampak yang terukur pada kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dalam implementasinya, APBD Kabupaten Toba mulai anggaran Tahun 2016 – 2020, penyusunannya telah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Secara berkesinambungan, sistem evaluasi dan pelaporan juga telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Pasa 71 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus APBD yang pelaksanaannya dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada anggaran kinerja (*performance budget*), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik.

Gambaran proporsi realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Toba selama kurun waktu 2016 – 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III-7 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Tahun 2016 – 2020

Belanja daerah	Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah					Proporsi rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020*	
1	2	3	4	5	6	7
Belanja tidak langsung	**58,15**	**51,63**	**54,18**	**57,68**	**28,62**	**50,05**
Belanja pegawai	39,97	31,83	34,45	36,01	14,28	31,31
Belanja bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Belanja daerah	Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah					Proporsi rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020*	
1	2	3	4	5	6	7
Belanja hibah	0,59	0,57	0,68	0,74	1,64	0,84
Belanja bantuan sosial	0,03	0,03	0,3	0,05	0,01	0,03
Belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintah desa	0,00	0,00	0,33	0,26	0,00	0,12
Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintah desa	17,57	19,20	18,61	20,63	12,64	17,73
Belanja tidak terduga	0,00	0,00	0,07	0,00	0,06	0,03
Belanja langsung	**33,34**	**39,21**	**39,16**	**35,02**	**4,31**	**30,21**
Belanja pegawai	2,10	2,89	3,20	2,85	0,77	2,36
Belanja barang dan jasa	14,84	19,87	22,43	20,35	2,97	16,09
Belanja modal	16,41	16,44	13,53	11,82	0,58	11,76

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2016 –2020 proporsi rata-rata penggunaan anggaran belanja tidak langsung terhadap jumlah anggaran belanja sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dengan proporsi rata-rata 31,31% kemudian diikuti dengan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dengan proporsi 17,73%, sedangkan belanja langsung tersebar pada 3 (tiga) kompenen yakni Belanja Barang dan Jasa 16,09%, Belanja Modal 11,76% dan Belanja Pegawai 2,36%. Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Toba tahun 2016-2020 dengan rata rata persentase 42.95, lebih jelas dirinci dalam table berikut :

Tabel III-8 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Toba Tahun 2016-2020

No	**Uraian**	**Total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)**	**Total pengeluaran (belanja + pengeluaran) (Rp)**	**%**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Ta. 2016	452,217,579,461.84	1,015,631,910,908.00	44.53
2.	Ta. 2017	453,162,579,461.84	1,105,661,584,284.60	40.99
3.	Ta. 2018	450,980,319,697.72	1,060,027,173,780.20	42.54
4.	Ta. 2019	454,485,579,462.00	1,066,087,958,908.41	42.63
5.	Ta. 2020	442,129,583,797.00	1,002,957,281,587.50	44.08

Berdasarkan tabel di atas, digambarkan bahwa APBD Kabupaten Toba relatif sehat dari sisi belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk belanja aparatur tidak mendominasi terhadap pengeluaran dalam APBD rata rata 42.95%.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman, obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Pada tahun 2016 dan 2018 terjadi defisit anggaran, sehingga diperlukan anggaran penutup defisit. Untuk menutup defisit ini menggunakan SiLPA tahun sebelumnya, sehingga penerimaan pembiayaan pada tahun 2017 dan 2019 berkurang sebesar defisit pada tahun 2016 dan 2018.

Gambaran pembiayaan riil daerah Kabupaten Toba dari Tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel III-9 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Toba Tahun 2016 -2020

No.	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	979,614,336,729.22	1,143,385,638,313.73	994,826,109,404.20	1,075,193,000,279.06	1,006,299,214,620.28
2.	Belanja Daerah	1,010,631,910,908.00	1,100,661,584,284.60	1,055,027,173,780.20	1,061,087,958,908.41	997,957,281,587.50
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
	Defisit Riil	-36,017,574,178.78	37,724,054,029.13	-65,201,064,376.00	9,105,041,370.65	,341,933,032.78

Tabel III-10 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

No.	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	71,742,131,095.84	109,466,185,124.97	44,265,305,516.97	53,370,346,887.62	61,712,279,920.40
2.	Pencairan dana cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0.00	1,066,722,256.00	271,144,390.00	1,090,738,226.00	0.00
4	Penerimaan Pinjaman daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Defisit Riil	-36,017,574,178.78	37,724,054,029.13	-65,201,064,376.00	9,105,041,370.65	8,341,933,032.78

3.3 Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Toba dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan untuk membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal, dirumuskan dengan mempertimbangkan data realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun sebelumnya, serta data-data yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, antara lain:

a. Proyeksi Indikator ekonomi makro, meliputi:
   - Proyeksi Rata-rata inflasi Kabupaten Toba tahun , dengan laju inflasi Kota Sibolga sebagai parameter, sebesar 2.2 %;
   - Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toba tahun 2021-2026 sebesar 3.8 - 4,88%.

b. Kebijakan di bidang keuangan negara yang berimplikasi pada APBD

   Persoalan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang berimplikasi pada penerimaan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah pusat.

c. Adanya pandemi Covid-19 sehingga beberapa komponen pendapatan asli daerah mengalami perlambatan pertumbuhan.

3.3.2 Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026

dirumuskan dengan mendasarkan pada evaluasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2016 – 2020, serta mempertimbangkan komponen pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi dan Pusat. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Toba tahun 2016 sampai dengan 2019 sebesar 2,35% dengan rincian rata-rata pertumbuhan pos pendapatan sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5,75%
- Dana Perimbangan 0,08%
- Lain-lain pendapatan daerah yang s ah 9,02%

Untuk mencapai target pendapatan tahun 2021-2026 akan dilakukan upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang ditempuh melalui upaya sebagai berikut :

1) Inventarisasi dan peningkatan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan baru yang memungkinkan untuk dioptimalkan.
2) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan pemanfaatan aset daerah.
3) Peningkatan sumber-sumber pendanaan pembangunan dari sumber non APBD kabupaten dengan menjalin kerjasama/kemitraan baik dengan pemerintah pusat, provinsi, swasta dan dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi maupun lembaga/badan.
4) Optimalisasi pemungutan retribusi serta peningkatan pengawasan pemungutan dan penyetorannya.
5) Pengembangan sistem pemungutan dan administrasi pajak serta retribusi berbasis online.
6) Pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan.

3.3.3 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026.

Proyeksi belanja dirumuskan berdasarkan trend pertumbuhan realisasi belanja tahun 2016-2020 dan penetapan 2021, program unggulan bupati, prioritas pembangunan serta proporsi masin-masing belanja. Belanja merupakan salah satu instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga harus bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di saat instrumen lain tidak mampu memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi karena dampak pandemi Covid-19 (konsumsi masyarakat, investasi, neraca perdagangan). Sehingga proyeksi pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah diupayakan di atas nilai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan (3,3-4%). Belanja modal menjadi prioritas utama pembangunan berkenaan dengan adanya program unggulan bupati untuk fokus pada belanja infrastruktur (jalan mantap)

Adapun kebijakan belanja daerah diarahkan berdasarkan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif dengan upaya sebagai berikut :

1) Pemerataan pembangunan dengan prioritas pada peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur (khususnya daerah sumber sumber pertumbuhan ekonomi)
2) Pemenuhan alokasi persentase belanja untuk urusan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengawasan sesuai peraturan.
3) Prioritas belanja yang berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4) Prioritas program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.
5) Pengalokasian belanja pada program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam forum koordinasi di bidang perencanaan.

3.3.4 Proyeksi Pembiayaan Daerah.

Dari sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan daerah pada RPJMD 2021-2026 diproyeksikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Sedangan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk serta penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan .

Selanjutnya terkait dengan analisis proyeksi belanja daerah perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi belanja daerah Kabupaten Toba dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan guna membiayai belanja langsung dan tidak langsung program-program RPJMD. Proyeksi belanja ini dirumuskan berdasarkan trend pertumbuhan historis realisasi belanja tahun 2016 – 2020 dan prioritas pembangunan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel III-11 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba
Tahun 2021 – 2026

No.	Uraian	PROYEKSI				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	**2**	3				
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**59.784.323.225,31**	**65.164.912.315,58**	**71.029.754.423,97**	**77.422.432.322,13**	**84.390.451.231,14**
4.1.1	Pajak Daerah	23.934.765.000,00	26.088.893.850,00	28.436.894.296,50	30.996.214.783,18	33.785.874.113,67
4.1.2	Retribusi Daerah	9.860.516.050,00	10.747.962.494,50	11.715.279.119,00	12.769.654.239,71	13.918.923.121,29
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.361.240.670,00	9.113.752.330,30	9.933.990.040,02	10.828.049.143,62	11.802.573.566,56
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	17.627.801.505,31	19.214.303.640,78	20.943.590.968,45	22.828.514.155,62	24.883.080.429,63
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.051.126.544.212,32**	**1.062.546.742.111,77**	**1.075.507.099.248,75**	**1.087.433.886.360,83**	**1.183.788.762.633,30**
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.019.626.544.212,32	1.029.471.742.111,77	1.039.455.349.248,75	1.049.579.548.860,83	1.144.041.708.258,30
4.2.2	Transfer Antar Daerah	31.500.000.000,00	33.075.000.000,00	36.051.750.000,00	37.854.337.500,00	39.747.054.375,00
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**31.927.140.000,00**	**33.523.497.000,00**	**35.199.671.850,00**	**36.959.655.442,50**	**38.807.638.214,63**
4.3.1	Pendapatan Hibah	31.927.140.000,00	33.523.497.000,00	35.199.671.850,00	36.959.655.442,50	38.807.638.214,63
4.3.2	Dana Darurat					
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
	Jumlah Pendapatan Daerah	**1.142.838.007.437,63**	**1.161.235.151.427,35**	**1.181.736.525.522,72**	**1.201.815.974.125,46**	**1.306.986.852.079,07**
5	**BELANJA DAERAH**	**1.147.838.007.437,62**	**1.166.235.151.427,35**	**1.186.736.525.522,72**	**1.206.815.974.125,46**	**1.311.986.852.079,07**
5.1	**Belanja Operasi**	**754.634.996.537,43**	**765.585.785.426,50**	**782.449.219.867,57**	**801.307.808.620,49**	**847.730.339.237,22**
5.1.1	Belanja Pegawai	460.329.956.755,23	475.710.957.185,15	482.882.494.187,97	491.060.399.215,69	506.802.246.107,22
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	255.394.039.782,20	250.963.828.241,35	260.655.725.679,60	271.336.409.404,80	302.017.093.130,00
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0	0	-
5.1.5	Belanja Hibah	38.581.000.000,00	38.581.000.000,00	38.581.000.000,00	38.581.000.000,00	38.581.000.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	330.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00
5.2	**Belanja Modal**	**149.986.148.995,20**	**157.128.346.566,40**	**160.434.754.513,60**	**161.294.244.802,68**	**219.648.699.318,36**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.165.462.800,00	1.165.462.800,00	1.165.462.800,00	1.165.462.800,00	1.165.462.800,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.678.100.000,00	25.678.100.000,00	26.678.100.000,00	27.678.100.000,00	28.678.100.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.360.864.954,00	33.360.864.954,00	33.525.075.330,00	30.242.368.047,88	28.360.864.954,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	92.469.109.139,00	94.469.109.139,00	95.469.109.139,00	98.469.109.139,00	156.562.869.177,36
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.312.612.102,20	2.454.809.673,40	3.597.007.244,60	3.739.204.815,80	4.881.402.387,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-
	Belanja Tidak Terduga	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**

No.	Uraian	PROYEKSI				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	**2**	3				
	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Belanja Transfer	**233.216.861.905,00**	**233.521.019.434,45**	**233.852.551.141,55**	**234.213.920.702,29**	**234.607.813.523,50**
	Belanja Bagi Hasil	229.837.333.800,00	229.837.333.800,00	229.837.333.800,00	229.837.333.800,00	229.837.333.800,00
	Belanja Bantuan Keuangan	3.379.528.105,00	3.683.685.634,45	4.015.217.341,55	4.376.586.902,29	4.770.479.723,50
	SURPLUS/(DEFISIT)	**-5.000.000.000,00**	**-5.000.000.000,00**	**-5.000.000.000,00**	**-5.000.000.000,00**	**-5.000.000.000,00**
6	**PEMBIAYAAN**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	0	0	0	0	0
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	0	0	0	0	-
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0	0	0	0	-
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	0	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	-
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.2	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)**					

3.3.5 Penghitungan Kerangka Pendanaan.

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja dan pembiayaan daerah, yang dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama lima tahun ke depan (2022-2026) dalam RPJMD Kabupaten Toba.

Tabel III-12 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah

No.	Uraian	PROYEKSI				
		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
1	2	4	5	6	7	8
1	Pendapatan	1.158.338.007.437,63	1.174.272.704.982,85	1.192.739.150.643,43	1.211.961.636.625,46	1.316.239.797.704,07
2	Pencairan dana cadangan sesuai perda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sisa lebih rill perhitungan anggaran	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Total Penerimaan	1.168.338.007.437,63	1.184.272.704.982,85	1.202.739.150.643,43	1.221.961.636.625,46	1.326.239.797.704,07
	dikurangi					
4	Belanja pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	452.467.290.555,23	465.474.589.185,10	470.617.015.596,61	478.043.395.515,69	492.892.525.532,22
5	Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan	710.870.716.882,41	713.798.115.797,75	727.122.135.046,83	738.918.241.109,77	828.347.272.171,85

Berdasarkan tabel di atas kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Toba cenderung meningkat dari tahun 2022 sampai dengan 2026. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah direncanakan untuk mendanai program prioritas sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daearah dikelompokkan menjadi 3 sebagai berikut :

1) Priortas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;
2) Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Toba serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
3) Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel III-13 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Toba

No	Uraian	PROYEKSI				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	710.870.716.882,41	713.798.115.797,75	727.122.135.046,83	738.918.241.109,77	828.347.272.171,85
1	Prioritas I (Wajib mengikat)	316.680.978.593,00	316.896.391.478,00	317.222.105.341,62	317.478.037.390,29	317.871.930.211,50
2	Prioritas II (Pencapaian Misi Pembangunan RPJMD)	358.646.202.445,29	361.211.818.529,86	373.543.922.952,86	384.494.291.663,99	469.057.978.351,76
3	Prioritas III (urusan lainnya)	35.543.535.844,12	35.689.905.789,89	36.356.106.752,34	36.945.912.055,49	41.417.363.608,59

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Perencanaan Pembangunan daerah dilakasanakan dalam rangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis strategis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional.

Analisis permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting, sehingga, penyajian analisis ini akan menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 5 (lima) tahun mendatang.

4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Toba

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang telah disajikan pada Bab 2 yang diuraikan menurut permasalahan pokok pembangunan daerah sebagai masalah yang bersifat makro bagi daerah untuk dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran, serta permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan setiap urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat dengan tujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1.1 Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah.

Permasalahan utama Kabupaten Toba adalah **"Belum optimalnya pembangunan untuk meningkatkan kemandirian, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat."** Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Toba tersebut dijabarkan ke dalam beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

a. Belum tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.
b. Kualitas sumber daya manusia belum mampu berdaya saing.
c. Belum optimalnya cakupan ketersediaan infrastruktur dasar dan penyelenggaraan penataan ruang.
d. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)

Gambar IV-1 Permasalahan Utama dan Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Toba

1. **Belum tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.**

   Perekonomian suatu wilayah menjadi salah satu tolok ukur utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat baik secara makro maupun mikro. Hal tersebut merupakan point penting mengingat kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh perekonomian terkait dengan finansial atau kebutuhan. Salah satu problem yang menghambat percepatan kemajuan Kabupaten Toba adalah belum optimalnya daya saing produk unggulan daerah. Selain itu masih

belum optimalnya inovasi juga merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya saing. Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Belum tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing, dapat dilihat dalam gambar berikut:

Tabel IV-1 Analisis Permasalahan Belum tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing

Dampak	Inti permasalahan	Akar permasalahan
Belum tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.	Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata dan pertanian sebagai sektor unggulan terhadap PDRB	1. Belum Optimalnya upaya pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata.
		2. Produksi Pertanian belum Optimal.
	Belum optimalnya peningkatan pendapatan perkapita penduduk	1. Nilai usaha perdagangan belum optimal.
		2. Rendahnya kunjungan wisata.
		3. Produktifitas tenaga kerja yang masih rendah.
		4. Tingginya angka PMKS.
	Belum optimalnya inovasi dalam pengembangan dan penguatan daya saing produk unggulan daerah	1. Peningkatan UMKM belum optimal.
	Masih rendahnya nilai dan jumlah investasi	1. Belum optimalnya peningkatan investasi yang dapat memperluas lapangan kerja.
		2. Belum tersedianya data informasi potensi penanaman modal
		3. Belum tersedianya regulasi sebagai pedoman dalam penyusunan dan

Dampak	Inti permasalahan	Akar permasalahan
		penyelenggaraan penanaman modal
	Masih minimnya upaya penguatan industri hulu, industri hilir dan industri kreatif	1. Nilai tambah komoditas unggulan prioritas daerah di sektor industri masih rendah
		2. Masih belum optimalnya produktivitas dan daya saing produk IKM
		3. Pertumbuhan dan perkembangan IKM masih rendah
		4. Fasilitasi dan pengelolaan IKM belum optimal

2. Kualitas Sumber Daya Manusia belum mampu berdaya saing

   Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam proses pembangunan daerah. Sumber daya manusia dalam pembangunan daerah haruslah memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek aspek pebangunan baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat. Belum optimalnya kualitas SDM Kabupaten Toba berhubungan dengan permasalahan pokok antara lain belum otpimalnya akses dan mutu pendidikan, belum otpimalnya akses dan mutu kesehatan, dan pendapatan perkapita. Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggraraan aktivitasnya.

Tabel IV-2 Analisis Permasalahan Kualitas Sumber Daya Manusia belum mampu berdaya saing

Dampak	Inti permasalahan	Akar permasalahan
Kualitas Sumber Daya Manusia belum mampu berdaya saing	Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat	1. Masih ditemukannya Kematian Ibu per 1000 Kelahiran Hidup dan Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
		2. Penyalahgunaan Narkoba cenderung bertambah setiap tahunnya
		3. Belum optimalnya penanganan dan deteksi dini penyakit menular
		4. Belum optimalnya akses dan layanan kesehatan masyarakat
		5. Belum optimalnya akses, mutu asuhan pelayanan dan keselamatan pasien
	Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan	1. Masih rendahnya Cakupan PAUD
		2. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun
		3. Masih perlunya peningkatan pendidikan pembentukan karakter
	Tingkat pengangguran masih tinggi	1. Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja;
		2. Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja masih minim dan belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja.

Dampak	Inti permasalahan	Akar permasalahan
		3. Masih rendahnya angkatan kerja/tenaga kerja yang belum memiliki ketrampilan vokasi (keahlian)
		4. Fasilitasi dan perlindungan tenaga kerja masih rendah.
	Belum optimalnya kebijakan dan program pengentasan kemiskinan.	1. Meningkatnya jumlah dan jenis penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
		2. Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial terhadap PMKS.
	Masih rendahnya kualitas keluarga	1. Rendahnya pengarustamaan dan pemberdayaan gender
		2. Belum optimalnya pencegahan dan penanganan kekerasan pelecahan seksual terhadap perempuan dan anak.
		3. Masih rendahanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan Keluaraga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
		4. Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan KB

3. **Belum optimalnya cakupan ketersediaan infrastruktur dasar dan penyelenggaraan penataan ruang.**

   Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga merupakan memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya hampir mempengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Infrastruktur yang berkualitas dan mantap serta merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektifitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempecepat laju pertumbuhan ekonomi, sehingga wilayah Kabupaten Toba mampu menjadi wilayah yang mantap dalam memajukan perekonomian. Permasalahan lain dalam hal infrastruktur adalah belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang dalam hal yang menjadi perhatian . Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Belum optimalnya cakupan ketersediaan infrastruktur dasar dan penyelenggaraan penataan ruang digambarkan sebagai berikut :

Tabel IV-3 Analisis Permasalahan Belum optimalnya cakupan ketersediaan infrastruktur dasar dan penyelenggaraan penataan ruang.

Dampak	Inti permasalahan	Akar permasalahan
Belum optimalnya cakupan ketersediaan infrastruktur dasar dan penyelenggaraan penataan ruang.	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air masih belum memenuhi standar pelayanan minimal	1. Sarana dan prasarana SDA Air belum Optimal.
	Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan sarana dan pasarana publik.	1. Sarana dan Prasarana perumahan pemukiman belum optimal.
		2. Sarana dan Prasarana gedung belum optimal.

Dampak	Inti permasalahan	Akar permasalahan
		3. Sarana dan Prasarana jalan belum optimal.
		4. Fasilitas perlengkapan jalan belum memadai.
	Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang.	1. Penerapan RTRW belum maksimal dan regulasi turunan RTRW belum ditetapkan.
		2. Pengendalian dan pemanfaatan ruang belum sesuai.
	Belum optimalnya tata kelola penanganan persampahan dan limbah	1. Perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang.
		2. Belum optimal tata kelola sampah, limbah dan air bersih.

4. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)

Kinerja Pemerintahan yang masih bernilai C.C pada penilaian SAKIP oleh menteri Pendayagunaan Aparatur Negera Reformasi Birokrasi menunjukkan hasil yang tidak baik sehingga perlu perbaikan. Beberapa hal yang menjadi belum efektifnya kinerja pemerintah dapat dilihat dari beberapa kondisi yang masih ada, diantaranya Belum Optimalnya kualitas perencanaan , hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab, diantaranya masih belum terpenuhinya kuantitas maupun kualitas SDM Perencana pada semua OPD. Dalam hal pengelolaan Keuangan daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan terbukti, dari Tahun 2016 – 2019 memperoleh WTP. Hal ini perlu dipertahankan melalui upaya tertib pengelolaan pendapatan, tertib pengelolaan belanja dan tertib pengelolaan asset daerah. Rumusan

permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) belum optimal, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV-4 Analisis Permasalahan Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)

Dampak	Inti permasalahan	Akar permasalahan
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)	Belum Optimalnya penyelenggaran pelayanan public	1. Belum Optimalnya penyusunan dan penerapan SOP, dan SPM.
		2. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai standart.
	Belum optimalnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	1. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
		2. Belum optimalnya pengembangan e-Government.
	Belum optimalnya perencaaanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah	1. Belum optimalnya kualitas pengawasan.
		2. Belum optimalnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
		3. Belum optimalnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
		4. Belum optimalnya kualitas perencanaan.

Dampak	Inti permasalahan	Akar permasalahan
	Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM aparatur	1. Belum terpenuhinya kebutuhan pegawai.
		2. Belum Optimalnya kapabilitas APIP.
		3. Belum optimalnya Sistem Manajamen SDM Aparatur

4.1.2 Permasalahan sesuai bidang urusan

4.1.2.1 Urusan Pemerintah wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

1. **Pendidikan**
   1) Belum optimalnya pelaksanaan SPM bidang pendidikan sebagaimana Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018.
   2) Belum optimalnya akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan;
2. **Kesehatan**
   1) Masih ditemukannya Kematian Ibu per 1000 Kelahiran Hidup dan Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
   2) Penyalahgunaan Narkoba cenderung bertambah setiap tahunnya
   3) Belum optimalnya penanganan dan deteksi dini penyakit menular
   4) Belum optimalnya penanganan dan deteksi dini penyakit tidak menular dan faktor resikonya
   5) Belum optimalnya akses dan layanan kesehatan masyarakat
   6) Belum optimalnya akses, mutu asuhan pelayanan dan keselamatan pasien
3. **Pekerjaan umum dan penataan ruang.**
   1) Masih rendahnya persentase jalan mantap
   2) Belum memadainya saluran irigasi dalam kondisi baik
   3) Belum optimalnya penyelenggaraan dan pengendalian tata ruang
   4) SDM pelaku jasa konstruksi masih belum memadai
4. **Perumahan rakyat dan kawasan permukiman**
   1) Belum terpenuhinya akses air minum layak dan aman
   2) Belum terpenuhinya akses pengolahan air limbah domestic
   3) Belum optimalnya pemenuhan ketersediaan rumah layak huni
   4) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur pelayanan dasar di kawasan permukiman.

5. **Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;**
   1) Belum optimalnya pelayanan dasar sebagaimana yang tertulis pada SPM bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.
   2) Belum optimalnya penegakan PERDA dan PERKADA terhadap pelanggaran ketertiban umum maupun ketentraman.
   3) Belum optimalnya cakupan pelayanan penanganan pemadam kebakaran.
   4) Belum terbentuknya Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di tingkat desa/kelurahan.
   5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan COVID 19.
   6) Desa tangguh bencana belum dibentuk.
   7) Mitigasi bencana belum optimal.
6. **Sosial.**
   1) Meningkatnya jumlah dan jenis penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
   2) Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial terhadap PMKS.
   3) Belum maksimalnya penanganan pasca bencana dan pelayanan rehabilitasi sosial
   4) Belum optimalnya pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

4.1.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja.
   1) Belum optimalnya perluasan kesempatan kerja untuk menyerap angkatan kerja yang ada di Kabupaten Toba.
   2) Tingkat pengangguran masih tinggi.
   3) Masih rendahnya angkatan kerja/tenaga kerja yang belum memiliki ketrampilan vokasi (keahlian)
   4) Fasilitasi dan perlindungan tenaga kerja masih rendah.
2. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
   1) Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dapat dilihat masih ditemukannya kasus kekerasan perempuan dan anak.
   2) Masih belum optimalnya perwujudan Kabupaten Layak anak.
   3) Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga

3. Pangan
   1) Belum optimalnya produktivitas beberapa komoditi bahan pangan strategis.
   2) Masih rendahnya ketersediaan beberapa komoditi bahan pangan dari hasil produksi daerah.
   3) Konsumsi pangan belum beragam dan seimbang
   4) Minimnya jumlah SDM penyuluh pertanian.
4. Pertanahan.
   1) Belum optimalnya pengelolaan asset tanah milik pemerintah yang belum bersertifikat
   2) Belum terpenuhinya kebutuhan lahan untuk kepentingan umum
   3) Tingginya potensi sengketa dan konflik pertanahan
5. Lingkungan hidup.
   1) Belum Optimalnya penangaan pencemaran air.
   2) Belum optimalnya tata kelola penanganan persampahan dan limbah.
   3) Masih banyaknya usaha/kegiatan yang belum memiliki izin.
   4) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan SDA berbasis daya dukung daya tampung lingkungan hidup.
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
   1) Rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
   2) Belum optimalnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
   3) SDM aparatur yang belum memenuhi kualifikasi
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa.
   1) Masih rendahnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan kelembagaan desa
   2) Belum optimalnya pengembangan ekonomi masyarakat desa.
   3) Belum optimalnya pengembangan dan penerapan inovasi desa.
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
   1) Tingginya Total Fertility Rate dalam rangka pengendalian kelahiran
   2) Masih rendahanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan Keluaraga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
   3) Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan KB
9. Perhubungan.
   1) Belum optimalnya aksesibilitas dan kapasitas sarana dan prasarana tansportasi
   2) Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi

3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan informasi di lingkungan transportasi dan ASDP

10. Komunikasi dan informatika.
    1) Belum optimalnya penyebarluasan informasi pemerintah daerah kepada publik.
    2) Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi di tingkat Desa di Kabupaten Toba.
    3) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi.
11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
    1) Minimnya jumlah koperasi yang aktif dan sehat.
    2) Belum optimalnya pengembangan dan fasilitasi UMKM.
    3) Belum optimalnya kualitas dan daya saing sektor UMKM.
12. Bidang Penanaman Modal
    1) Belum optimalnya peningkatan investasi yang dapat memperluas lapangan kerja.
    2) Belum tersedianya data informasi potensi penanaman modal
    3) Belum tersedianya regulasi sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyelenggaraan penanaman modal
13. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
    1) Masih minimnya ketersediaan fasilitas dan event olahraga
    2) Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan
    3) Belum optimalnya prestasi Pemuda dan olah raga.
14. Statistik;
    1) Belum optimalnya pengembangan, pengelolaan da penyediaan data statistik dengan menganut prinsip satu data Indonesia
    2) Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama Pemerintah Kabupaten Toba dengan Badan Pusat Statistik dalam penyelengaraan statistik
15. Persandian.
    1) Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian
    2) Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Toba dengan pusat dan provinsi
16. Kebudayaan
    1) Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan sejarah.
    2) Belum optimalnya pengembangan seni dan budaya.

17. Perpustakaan
    1) Masih rendahnya minat baca masyarakat.
    2) Belum optimalnya sarana prasarana perpustakaan
    3) Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM kepustakaan
18. Kearsipan
    1) Belum terselenggaranya penataan kearsipan dalam tatanan pemerintah kabupaten Toba
    2) Belum optimalnya sarana prasarana kearsipan
    3) Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM kearsipan.

4.1.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan
    1) Belum optimalnya produktivitas perikanan tangkap dan budidaya.
    2) Balai Benih Ikan belum mampu menghasilkan benih ikan unggul
    3) Sarana dan Prasarana perikanan kurang mendukung budidaya perikanan.
2. Pariwisata
    1) Belum optimalnya peningkatan jumlah kunjungan wisata
    2) Belum optimalnya tata kelola pariwisata
    3) Pembangunan dan pengembangan pariwisata belum secara terpadu dan terintegrasi.
3. Pertanian
    1) Produktivitas dan produksi komoditas padi, jagung dan ubi kayu cenderung menurun serta komoditi lainnya belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan lokal
    2) Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan peternakan
    3) Rendahnya tingkat inovasi teknlologi pertanian, perkebunan dan peternakan.
4. Perdagangan
    1) Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana perdagangan.
    2) Belum optimalnya manajemen pengelolaan pasar.
    3) Pengawasan barang bersubsidi dan bahan makanan serta makananan olahan belum maksimal
5. Perindustrian
    1) Nilai tambah komoditas unggulan prioritas daerah di sektor industri masih rendah
    2) Masih belum optimalnya produktivitas dan daya saing produk IKM
    3) Pertumbuhan dan perkembangan IKM masih rendah
    4) Fasilitasi dan pengelolaan IKM belum optimal

4.1.2.4 Urusan Penunjang Pemerintah

1. Perencanaan
   1) Penyusunan dokumen perencanaan belum memenuhi pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial
   2) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanan program pembangunan.
2. Penelitian dan Pengembangan
   1) Minimnya kegiatan penelitian dan pengembangan
   2) Belum optimalnya hasil-hasil penelitian dan pengkajian yang belum ditindaklanjuti dengan kebijakan
   3) Belum tersedianya sumber daya manusia khususnya fungsional peneliti
   4) Kelembagaan litbang belum memadai
3. Kepegawaian dan pelatihan
   1) Kurang optimalnya manajemen kepegawaian, pola pengembangan karier
   2) Belum memadainya kompetensi ASN yang bersertifikasi.
   3) Belum terpenuhinya jumlah ASN sesuai analisa kebutuhan
   4) Kurang optimalnya penyediaan data dan informasi kepegawaian
4. Keuangan
   1) Belum optimalnya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
   2) Keterlambatan Penyerapan dan pengelolaan dana transfer Pemerintah ke Desa dan OPD
   3) Kurangnya pemahanan dan penguasaan pemanfaatan sistem informasi berbasis online dalam penganggaran
5. Pengawasan
   1) Belum optimalnya implementasi maturitas SPIP pada perangkat daerah
   2) Belum terpenuhinya kapabilitas APIP
   3) Belum optimalnya penyelesaian tindaklanjut hasil temuan pengawasan dan penyelesaian kerugian negara/daerah.
   4) Belum optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
   5) Belum efektifnya pelaksanaan reformasi birokrasi
6. Kewilayahan
   1) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan, ketrentaman dan ketertiban umum dan pelayanan publik di Kecamatan
   2) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
   3) Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan kelurahan

7. Sekretariat daerah
   1) Masih rendahnya koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
   2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal dan capaian kinerja belum memenuhi target
   3) Belum optimalnya fungsi kelembagaan agama dan adat dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan sosial
   4) Masih rendahnya kualitas produk hukum daerah
   5) Belum optimalnya penanganan permasalahan ekonomi
   6) Kualitas pelayanan publik masih rendah
   7) Penataan ketatalaksanaan organisasi pemerintah daerah belum optimal
8. Sekretariat dewan
   1) Belum optimalnya pelayanan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi (DPRD)
9. Kesbangpolinmas
   1) Berkurangnya pemahaman indologi kebangsaan, wawasan kebangsaan dan menurunnya penghormatan pada simbol negara
   2) Belum optimalnya pendidikan politik bagi masyarakat
   3) Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam politik dan demokrasi
   4) Belum optimalnya pemberdayaan dan penertiban organisasi kemasyarakatan
   5) Masih terjadinya tindak kejahatan dan kekerasan dalam masyarakat

4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

4.2.1 Penelaahan RPJMN Tahun 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengangkat visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi:yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; serta
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Selain Nawacita Kedua, ada arahan presiden yang harus dijadikan sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi; serta
5. Transformasi Ekonomi

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam Tema pembangunan Nasional yaitu "Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan" yang diimplementasikan kedalam 7 agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020 – 2024 yaitu :

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Tabel IV-5 Agenda Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan RPJMD Tahun 2020-2024

Agenda Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan RPJMD Tahun 2020-2024
2) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Isu Strategis : a) Menipisnya cadangan energi fosil, baik minyak, gas dan juga batubara b) Degradasi dan deplesi SDA terbarukan c) Masih belum terintegrasinya tata ruang laut dan darat. d) Di sisi pengelolaan dan pemanfaatan energi, kondisinya saat ini dirasakan masih kurang efisien. e) Kecukupan pasokan energi terutama gas; dan listrik untuk memenuhi kebutuhan sektor riil; f) Inefisiensi dalam penyediaan infrastruktur energi karena perbedaan antara lokasi produksi dan pemanfaatan energi; g) Kualitas dan kehandalan penyaluran energi terutama di luar Jawa; h) Pemanfaatan energi belum memberi dampak pengembangan ekonomi secara luas; i) Konsumsi energi yang belum efisien j) Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang k) mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat dianggap kurang. 3) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan Isu Strategis : a) Kesenjangan antara wilayah b) Penguatan pertumbuhan pusat-pusat wilayah yang masih rendah c) Pengelolaan urbanisasi yang belum optimal d) Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dan sinkron dengan rencana tata ruang e) Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah f) Rendahnya kepastian hukum hak atas tanah dan ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah g) Fungsi ibukota sebagai pusat pemerintahan mulai menurun dan tidak efisien

Agenda Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan RPJMD Tahun 2020-2024
4) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Isu Strategis : a) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan b) Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk c) Pemenuhan Layanan Dasar d) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda e) Pengentasan Kemiskinan f) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing 5) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa Isu Strategis : a) Melemahnya Ketahanan Budaya Bangsa b) Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia c) Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti d) Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama e) Belum kukuhnya kerukunan umat beragama f) Rendahnya budaya literasi g) Belum optimalnya peran keluarga 6) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Isu Strategis : a) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau b) Pembangunan Keselamatan dan Keamanan Transportasi c) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur d) Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi e) Penguatan Konektivitas f) Infrastruktur Perkotaan g) Energi dan Ketenagalistrikan h) Transformasi Digital 7) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Isu Strategis : a) Deplesi Sumber Daya Alam dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup

Agenda Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan RPJMD Tahun 2020-2024
b) Meningkatnya Tindak Pelanggaran Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup c) Tingginya Risiko Bencana di Indonesia d) Risiko Bencana terkait Karakteristik Geologi e) Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Hidrometereologi akibat Perubahan Iklim f) Masih Lemahnya Tata Kelola Penanggulangan Bencana di Daerah g) Transisi dari Penurunan Emisi Menuju Pembangunan Rendah Karbon h) Dukungan Terhadap Pembangunan Rendah Karbon 8) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Isu Strategis : a) Konsolidasi Demokrasi b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri c) Sistem Hukum Nasional yang Mantap d) Reformasi Kelembagaan Birokrasi e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

4.2.2 Penelaahan RPJMD Perubahaan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

Isu-isu strategis pada dokumen Perubahaan RPJMD Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

   Pemenuhan sumber daya manusia yang berdaya saing dan dapat memenuhi tantangan perkembangan zaman masih dihadapkan kepada belum optimalnya kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. Peningkatan sumber daya manusia pada sektor Pendidikan memiliki tantangan antara lain; belum maksimalnya aksesibilitas dan sarana prasarana sekolah, keterbatasan kemampuan biaya pendidikan dan informasi bantuan pendidikan, belum selarasnya penerapan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, serta rendahnya minat baca yang berakibat kepada belum maksimalnya capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Utara termasuk di dalamnya perlunya peningkatan kualitas kesetaraan gender.

2. Kesehatan

Peningkatan Usia Harapan Hidup, pengurangan angka kematian ibu dan anak, angka kesakitan, serta peningkatan status gizi di Provinsi Sumatera Utara memerlukan upaya peningkatan layanan Rumah Sakit, ketersediaan obat, penanganan dampak narkoba, jaminan kesehatan pada masyarakat miskin, penurunan prevalensi stunting serta percepatan penanganan Covid-19 juga menjadi hal yang penting, selain itu diperlukan upaya membangun paradigma hidup sehat melalui Gerakan masyarakat Sehat (Germas).

3. Ketenagakerjaan

   Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara pada Februari Tahun 2021 pada masa pandemi tercatat sebesar 6,01% dengan jumlah penganggur sebanyak 449.000 jiwa, Kondisi ini membaik jika dibandingkan dengan Agustus 2020 yang melonjak sebesar 6,91%. Angka ini juga masih lebih baik daripada capaian nasional yang mencatat persentase pengangguran sebesar 6,26%. Namun tetap diperlukan penanganan yang lebih serius khususnya pada penduduk usia kerja yang mengalami peningkatan sebesar 171 ribu orang dari 10,53 juta orang pada Agustus 2019 menjadi 10,70 juta orang pada Agustus 2020. Semakin terbatasnya lapangan kerja formal dan rendahnya kualitas tenaga kerja di Sumatera Utara tentunya memerlukan solusi dalam bentuk Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja yang terintegrasi dengan pasar kerja melalui Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, Penumbuhan sektor UMKM dan IKM dan fasilitasi standarisasi UMKM dan IKM menuju digitalisasi pemasaran serta pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan bursa kerja online. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi yang merupakan langkah strategis dalam upaya penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan

4. Agraris

   Terbatasnya sarana dan prasarana usaha pertanian dan peternakan yang dibutuhkan untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pangan/peternakan dan belum optimalnya pemanfaatan hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi tentunya memerlukan perhatian khusus untuk mencapai keberhasilan peningkatan produksi ternak sapi dan domba, mempertahankan swasembada komoditas pangan beras dan jagung, peningkatan produksi cabe merah, bawang merah dan bawang putih serta peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebagai upaya peningkatan daya saing sektor agraris yang lebih baik.

5. Pariwisata

Pandemi Covid-19 tentunya menjadi tantangan yang luar biasa dalam upaya peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata. Untuk itu perlu dilakukan penerapan prinsip CHSE (Cleanliness, Healthty, Safety, and Environmental Sustainability) atau 4 K (Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Keberlanjutan Lingkungan di destinasi wisata. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata melalui pengembangan kawasan pariwisata, desa wisata tematik, penataan cagar budaya, pelestarian budaya daerah serta dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba, dan digitalisasi promosi pariwisata merupakan langkah strategis untuk menyiasati upaya pencapaian kontribusi PDRB pada sektor pariwisata pada masa pandemi dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat.

6. Reformasi birokasi

   Peningkatan kualitas reformasi birokrasi diwujudkan melalui Tata Kelola pemerintahan yang baik melalui prioritas – prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, dengan mempertahankan opini laporan keuangan pemerintah daerah serta memberi dukungan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian, peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan pencapaian kualitas pelayanan publik serta penataan kelembagaan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

7. Sosial Kemasyarakatan dan Olah Raga

   Peningkatan kondisi sosial dan kemasyarakatan diwujudkan melalui peningkatan wawasan kebangsaan dalam mendorong iklim demokrasi serta kebebasan berkumpul, berpendapat dan berkeyakinan serta bebas diskriminasi. Peningkatan kondisi panti sosial dan pemenuhan SPM sosial serta peningkatan keamanan dan ketertiban perlu terus didorong. Provinsi Sumatera Utara juga akan menjadi tuan rumah PON XXI Tahun 2024 untuk itu prestasi atlet, penguatan sektor olahraga dan sarana prasarana terus ditingkatkan.

8. Infrastruktur yang berwawasan lingkungan

   Penanganan permasalahan infrastruktur di Sumatera Utara pada masa pandemi tentunya memerlukan upaya-upaya yang lebih fokus pada kebutuhan masyarakat mengingat pada 2 tahun anggaran, pembangunan Sumatera Utara difokuskan pada penanganan covid-19. Untuk itu, pada tahun – tahun berikutnya diperlukan akselerasi pembangunan infrastruktur.

Penanganan jalan strategis Provinsi yang meliputi jalan strategis kawasan pariwisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal menjadi prioritas yang harus dikerjakan dalam upaya mencapai tingkat kemantapan jalan provinsi sepanjang ± 3.000 km yang lebih baik. Selanjutnya penanganan penyelesaian pertanahan dan tata ruang juga menjadi konsentrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk diselesaikan. Selain itu, optimalisasi jaringan irigasi dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor Agraris, pembangunan dan pengelolaan TPA Regional dan Sistem Penyediaan Air Minum, serta Pengurangan Luas Kawasan Kumuh, penurunan emisi gas rumah kaca serta penyediaan energy listrik dala rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin dan pertanian terintegrasi menjadi upaya pemenuhan pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.

4.2.3 Perumusan Issu strategis KLHS Kabupaten Toba.

Rumusan isu strategis merupakan capaian TPB dalam kelompok yang telah mencapai target (SS), memiliki data tetapi belum menjadi target (SB) dan yang belum memiliki data (NA). Selain ketiga kelompok hasil capaian TPB, isu strategis juga dikaitkan dengan kondisi dan perubahan 6 muatan lingkungan hidup dalam PP. 46 Tahun 2016 tentang KLHS yang meliputi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, risiko lingkungan hidup, sumber daya alam, kerentanan dan adaptasiperubahan iklim, dan kemampuan penyediaan lingkungan hidup.

Berdasarkan analisis terhadap masing-masing capaian TPB dan kondisi lingkungan hidup Kabupaten Toba, berikut adalah rumusan isu strategis berdasarkan capaian TPB yang dibagi dalam empat pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola kelembagaan.

4.2.3.1 Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan pilar sosial.

Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu 1 mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun; Tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; Tujuan 4 menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat; dan Tujuan 5 mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Dari berbagai indikator yang telah, terdapat indikator yang masih belum terpenuhi maupun belum menjadi indikator dalam RPJMD. Berikut adalah rumusan isu strategis TPB pilar sosial di Kabupaten Toba.

Tabel IV-6 Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis dari TPB yang belum tercapai
TPB 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	• Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. • Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan • OPD teknis belum mampu untuk menyerap anggaran yang ditetapkan • Target pengeluaran untuk layanan pokok perlindungan sosial belum ada di RPJMD tahun 2021
TPB 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	• Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. • Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. • Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif
TPB 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	• Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan baru mencapai 70% • Angka Kematian bayi dan balita per 1000 kelahiran hidup belum menurun • Angka Total Fertility Rate (TFR) masih di atas target nasional, banyak dipengaruhi pandangan masyarakat tentang banyak anak banyak rezeki dan anak laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan karena laki-laki penerus marga • Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas belum meningkat
TPB 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar	• Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat • Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat • Penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun asli Kabupaten Toba masih bersekolah di luar dari

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis dari TPB yang belum tercapai
Sepanjang Hayat untuk Semua	daerah yang menyebabkan angka partisipasi kasar sering fluktuatif dan sekolah yang terjangkau di daerah sudah terpenuhi namun fasilitasnya belum optimal
TPB 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	• Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). • Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern

Sumber : Hasil Analisis, 2020

4.2.3.2 Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan pilar ekonomi

Pilar ekonomi mencakup tiga tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 8 meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; Tujuan 9 membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi ; Tujuan 17 menguatkan sarana pelaksanaan dam merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya mengenai isu pembangunan berkelanjutan Pilar Ekonomi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV-7 Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi

TPB Pilar Ekonomi	Isu Strategis dari TPB yang belum tercapai
TPB 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	• Persentase tenaga kerja formal • Persentase usia muda (15 – 24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan • Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan • Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit • Wisatawan mancanegara (Jumlah kunjungan wisata)
TPB 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	• Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. • Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur
TPB 17. menguatkan sarana pelaksanaan dam merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	• Rasio penerimaan pajak terhadap PDB • Rasio penerimaan pajak terhadap PDB

Sumber : Hasil Analisis, 2020

4.2.3.3 Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan pilar lingkungan

Pilar lingkungan mencakup dua tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6 menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; Tujuan 11 menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan. Berikut rumusan isu strategis TPB pilar lingkungan di Kabupaten Toba.

Tabel IV-8 Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan

TPB Pilar Lingkungan	Isu Strategis dari TPB yang belum tercapai
TPB 6. Menjamin Ketersediaan serta	• Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, aman dan berkelanjutan.

Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	• Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan • Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal
TPB 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	• Persentase sampah perkotaan yang tertangani.

Sumber : Hasil Analisis, 2020

4.2.3.4 Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan pilar hukum dan tata kelola

Pilar hukum dan tata kelola kelembagaan ini hanya mencakup satu tujuan yaitu tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh. Rumusan isu strategis TPB pilar hukum dan tata kelola di Kabupaten Toba adalah sebagai berikut.

Tabel IV-9 Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola

TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola	**Isu Strategis dari TPB yang belum tercapai**
TPB 16.	• Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan • Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. • Indeks Perilaku Antikorupsi • Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). • Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. • Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).

	• Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). • Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). • Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Toba disarikan dari indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang belum mencapai target dan yang belum memiliki data dikaitkan dengan kondisi lingkungan hidup Kabupaten Toba.

4.2.4 Perumusan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Toba.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah, isu strategis pembangunan nasional dalam RPJMN Nasional Tahun 2019-2024, isu strategis pembangunan provinsi dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023, arah kebijakan RPJPD dan RTRW Kabupaten Toba, isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, isu strategis KLHS RPJMD maka dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan SDG's.
2. Pemulihan Ekonomi Pasca Covid 19.
3. Industri 4.0
4. Pencapaian KSPN Danau Toba
5. Inovasi dan daya saing.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Visi Pembangunan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah, berdasarkan defenisi tersebut maka Visi Pembangunan tersebut menggambarkan keadaan yang diharapkan pada akhir periode pembangunan daerah. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 tidak dapat disusun terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke 4 yang sesungguhnya menjadi landasan dari penjabaran Visi, Misi, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan, dan program Pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026 ini. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan tantangan yang dihadapi maka visi Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 dapat dirumuskan, yaitu:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR"

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (value) atau pokok pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Toba tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 0-1 **Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan Kabupaten Toba Tahun 2021-2026**

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN
TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR	UNGGUL	Kondisi dimana Kabupaten Toba menjadi daerah yang maju dan terdepan di provinsi Sumatera Utara dengan memiliki daya saing melalui peningkatan ekonomi yang didukung infrastruktur bagus dan merata, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, Pengembangan Pariwisata yang bertaraf Internasional dan Pertanian yang modern dan kreatif.
	BERSINAR	Dengan keunggulan dan prestasi yang dicapai Kabupaten akan menjadi panutan bagi daerah lain dan mampu memberi kontribusi besar terhadap pencapaian pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

5.2. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Toba, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Toba tahun 2021-2026 sebagaimana terdapat dalam uraian dibawah ini:

1. **Infrastruktur yang Bagus dan Merata**

   Kebijakan pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas dan cakupan Infrastruktur yang merata disemua wilayah Kabupaten Toba hingga ke desa dan dusun, meliputi infrastruktur jalan, irigasi, jembatan, permukiman, jaringan listrik dan jaringan internet. Infrastuktur yang bagus dan merata memiliki daya ungkit terhadap pengembangan ekonomi, pelayanan dasar masyarakat dan potensi pengembangan wilayah dengan memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan serta kerentananan wilayah terhadap bencana alam.

2. **Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal**

   Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berfokus pada peningkatan daya saing melalui peningkatan kompetensi, ketrampilan (skill), kapasitas dan penguatan karakter dilandasi nilai filosofi " Batak Na Raja" sebagai cerminan kepribadian SDM yang unggul dan andal. Batak Na Raja mengandung nilai atau norma : Batak Na Marugamo (beragama), Batak Na Maradat (berlandaskan nilai adat dan budaya), Batak Na Maruhum (taat hukum) dan Batak Na Marparbinotoan (berpendidikan) . Dengan SDM yang unggul dan andal serta memiliki karakter diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah.

3. **Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera**

   Pertanian dan Peternakan adalah sektor yang menopang perekonomian Kabupaten Toba karena sekitar 60% penduduk bergantung pada sektor pertanian dan peternakan. Pembangunan sektor pertanian dan perkebunan dan peternakan diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan petani serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah dengan mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas komoditi pertanian melalui berbagai terobosan dan inovasi.

4. **Kesehatan yang Prima dan Terjangkau**

   Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) juga diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan. Kesehatan yang prima akan memperkuat kapasitas sosial masyarakat untuk

berinteraksi dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Peningkatan kualitas kesehatan ditempuh dengan meningkatkan cakupan dan kualitas fasilitas kesehatan, kualitas tenaga kesehatan dan layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

5. **Pariwisata Berkat dan Meriah**

   Pembangunan pariwisata diharapakan dapat memberikan daya ungkit terhadap perekonomian daerah yang inklusif dimana dapat menodorong pertumbuhan pendapatan perkapita masyarakat, membuka kesempatan kerja dan peluang tumbuhnya investasi dan sektor-sektor usaha ekonomi baru.

6. **Membangun Iman yang terpelihara**

   Pemerintah harus mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar terhindar dari perilaku yang bertentangan dengan ajaran nilai agama, pranata sosial dan aturan hukum yang berlaku. Untuk itu pemerintah akan mendorong peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memperkuat atau memperkokoh keimanan masyarakat melalu berbagai pendekatan. Upaya tersebut dilandasi oleh salah satu nilai filosofi Batak Na Raja yaitu "Batak Namarugamo" yaitu sebagai beragama (*Batak Na Marugamo*) masyarakat Toba diharapkan mampu menampilkan sikap yang sesuai dengan nilai ajaran agama, terhindar dari penyakit social.

7. **Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban**

   Stabilitas keamanan dan ketertiban yang terjaga akan mencipatkan situasi yang kondusif dalam tatatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemanan dan ketertiban erat kaitannya dengan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap aturan dan yang berlaku. Pemerintah kabupaten Toba akan mengoptimalkan perannya dalam menjaga stabilitas kemamanan dan ketertiban melalui pencegahan dan penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban umum untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat maupun bagi investor.

Rumusan Visi dan Misi RPJMD 2021-2026, diharapkan dapat menjawab permasalahan dan isu strategis yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk itu lebih lanjut diuraikan hubungan antara permasalahan dan MISI pembangunan ditunjukkan dalam tabel dibawah berikut :

Tabel 0-2 Hubungan Permasalahan Pembangunan dengan Misi Pembangunan

Dampak	Inti Permasalahan	MISI
Belum tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.	Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata dan pertanian sebagai sektor unggulan terhadap PDRB	(3) Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera (5) Pariwisata Berkat dan Meriah

Dampak	Inti Permasalahan	MISI
	Belum optimalnya peningkatan pendapatan perkapita penduduk	(3) Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera
	Belum optimalnya inovasi dalam pengembangan dan penguatan daya saing produk unggulan daerah	(3) Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera (5) Pariwisata Berkat dan Meriah
	Masih rendahnya nilai dan jumlah investasi	(5) Pariwisata Berkat dan Meriah (7) Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
	Masih minimnya upaya penguatan industri hulu, industri hilir dan industri kreatif	(5) Pariwisata Berkat dan Meriah
Kualitas Sumber Daya Manusia belum mampu berdaya saing	Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat	(4) Kesehatan yang Prima dan Terjangkau
	Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan	(2) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal
	Tingkat pengangguran masih tinggi	(5) Pariwisata Berkat dan Meriah
	Belum optimalnya kebijakan dan program pengentasan kemiskinan.	(5) Pariwisata Berkat dan Meriah
	Masih rendahnya kualitas keluarga	(2) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal (6) Membangun Iman yang terpelihara
Belum optimalnya cakupan ketersediaan infrastruktur dasar dan penyelenggaraan penataan ruang.	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air masih belum memenuhi standar pelayanan minimal	(1) Mewujudkan Infrastruktur yang Bagus dan Merata
	Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan sarana dan pasarana publiK.	(1) Mewujudkan Infrastruktur yang Bagus dan Merata
	Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang.	(1) Mewujudkan Infrastruktur yang Bagus dan Merata
	Belum optimalnya tata kelola penanganan persampahan dan limbah	(1) Mewujudkan Infrastruktur yang Bagus dan Merata
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)	Belum Optimalnya penyelenggaran pelayanan publik	(2) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal
	Belum optimalnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	(2) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal

Dampak	Inti Permasalahan	MISI
	Belum optimalnya perencaaanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah	(2) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal
	Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM aparatur	(2) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Toba tahun 2021-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan (goal) adalah sekumpulan pernyataan yang merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Dalam rangka pencapaian visi dan Misi Kabupaten Toba, maka diperlu dirumuskan pernyataan tujuan pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sedangkan sasaran *(objective)* adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka penjabaran tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 0-3 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN		SASARAN	
1	Mewujudkan Infrastruktur yang Bagus dan Merata.	Tujuan 1.1	Terwujudnya Infrastruktur yang merata dan berkualitas.	Sasaran 1.1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar
				Sasaran 1.1.2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak.
				Sasaran 1.1.3	Meningkatnya kualitas konektivitas.
2	Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul Dan andal.	Tujua 2.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas.	Sasaran 2.1.1	Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan.
				Sasaran 2.1.2	Meningkatnya ketahanan keluarga.

NO	MISI	TUJUAN		SASARAN	
		Tujuan 2.2	Terwujudnya Pemerintahan baik, inovatif, kreatif, Produktif dan non koruptif.	Sasaran 2.2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
				Sasaran 2.2.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
				Sasaran 2.2.3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif.
3	Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera.	Tujuan 3.1	Meningkatkan kualitas produksi pertanian.	Sasaran 3.1.1	Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan.
				Sasaran 3.1.2	Meningkatnya ketersediaan Pangan
4	Kesehatan Yang Prima Dan Terjangkau.	Tujuan 4.1	Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat.	Sasaran 4.1.1	Meningkatnya harapan hidup.
5	Pariwisata Berkat Dan Meriah.	Tujuan 5.1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif.	Sasaran 5.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja.
				Sasaran 5.1.2	Meningkatnya Kunjungan Wisata.
				Sasaran 5.1.3	Menurunkan angka kemiskinan.
6	Membangun Iman Yang Terpelihara.	Tujuan 6.1	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat.	Sasaran 6.1.1	Menurunnya penyakit sosial.
7	Menciptakan Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban.	Tujuan 7.1	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban.	Sasaran 7.1.1	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat.

Jaminan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional harus didukung dengan keselarasan dan integrasi antara perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah. Adapun arahan dan 7 agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yang harus diselaraskan oleh daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

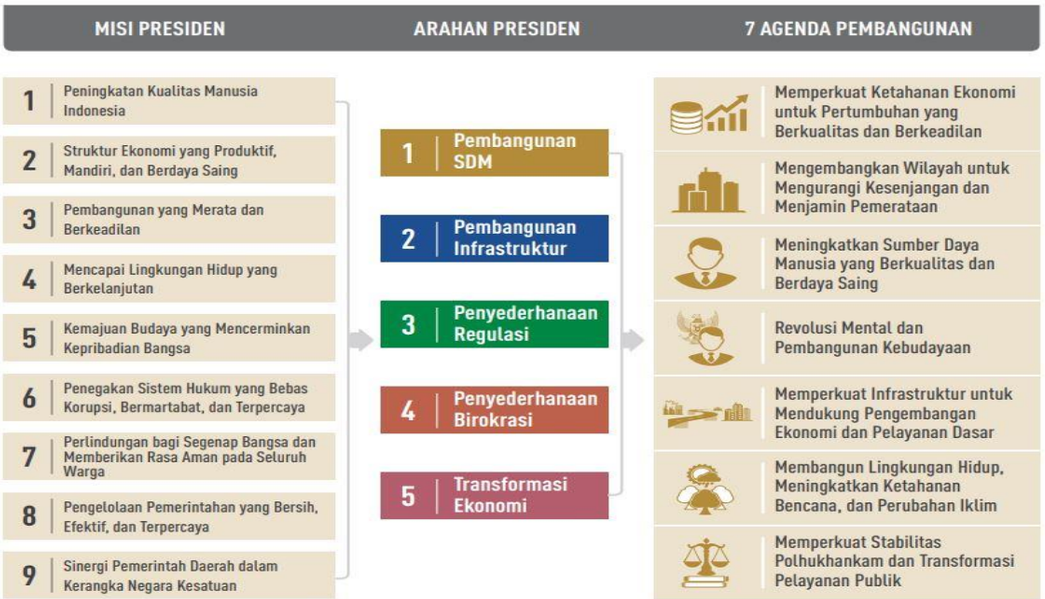

Gambar 0-1 Tujuh agenda pembangunan nasional RPJMN 2020-2024

Keselarasan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 dengan RPJMN 2019-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 0-4 Keselarasan Tujuan-Sasaran RPJMD Kabupaten Toba dengan RPJMN 2019-2024

TUJUAN		SASARAN		AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024
Tujuan 1.1	Terwujudnya Infrastruktur yang merata dan berkualitas.	Sasaran 1.1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan perubahan iklim
		Sasaran 1.1.2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	
		Sasaran 1.1.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	
Tujuan 2.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Sasaran 2.1.1	Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan	Meningkatkan Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.
		Sasaran 2.1.4	Meningkatnya ketahanan keluarga	
Tujuan 2.2	Terwujudnya Pemerintahan baik, inovatif,	Sasaran 2.2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan

TUJUAN		SASARAN		AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024
	kreatif, Produktif dan non koruptif	Sasaran 2.2.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	transformasi pelayanan publik
		Sasaran 2.2.3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	
Tujuan 3.1	Meningkatkan kualitas produksi pertanian	Sasaran 3.1.1	Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
		Sasaran 3.1.2	Meningkatnya ketersediaan Pangan	
Tujuan 4.1	Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat	Sasaran 4.1.1	Meningkatnya Harapan Hidup Masyarakat	Meningkatkan Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.
Tujuan 5.1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Sasaran 5.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
		Sasaran 5.1.2	Meningkatnya kunjungan wisata	
		Sasaran 5.1.3	Menurunkan angka kemiskinan	
Tujuan 6.1	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	Sasaran 6.1.1	Menurunya penyakit sosial masyarakat	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
Tujuan 7.1	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban	Sasaran 7.1.1	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

5.4. Indikator dan Target Tujuan dan Sasaran

Keberhasilan dari setiap misi ditunjukkan oleh indikator-indikator kinerja tujuan dan sasaran dengan target-target yang terukur, kinerja dan target disusun setiap tahun. Indikator iknerja dan target daripada tujuan dan sasaran dapat dilihat pada dibawah berikut :

Tabel 0-5 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Toba

NO.	MISI/ Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal						Kondisi Akhir
				Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1. Infrastruktur yang Bagus dan Merata										
Tujuan 1.1	**Terwujudnya infrastruktur yang merata dan berkualitas.**	Indeks Infrastruktur	Indeks	0,5893	0,6550	0,6760	0,7098	0,7135	0,7346	0,7346
Sasaran 1.1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	Indeks sarana prasarana	Indeks	0,3379	0,3618	0,3771	0,4053	0,4033	0,4188	0,4188
Sasaran 1.1.2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Indeks perumahan pemukiman	Indeks	0,0966	0,1383	0,1440	0,1497	0,1554	0,1610	0,1610
Sasaran 1.1.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Indeks konektivitas	Indeks	0,1548	0,1548	0,1548	0,1548	0,1548	0,1548	0,1548
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal										
Tujuan 2.1	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas**	IPM	%	75,73	76,58	77,01	77.43	77.86	77,90	77,90
Sasaran 2.1.1	Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan	indeks pendidikan	Indeks	0,7240	0,7380	0,7440	0,7500	0,7560	0,7630	0,7630
Sasaran 2.1.4	Meningkatnya ketahanan keluarga	indeks ketahanan keluarga	Indeks	0,999	1,030	1,070	1,100	1,130	1,140	1,140
Tujuan 2.3	**Terwujudnya Pemerintahan baik, inovatif, kreatif, Produktif dan non koruptif**	Indeks Reformasi Birokrasi	nilai	C/40,11	CC/50,20	B/60,10	B/60,30	BB/70,20	BB/70,40	BB/70,40
Sasaran 2.2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	nilai	80	88	90	92	95	100	100
Sasaran 2.2.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran 2.2.3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Nilai SAKIP	Nilai	CC	B/60	B/60,40	B/60,80	BB/70,20	BB/70,40	BB/70,40

NO.	MISI/ Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal						Kondisi Akhir
				Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
3. Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera										
Tujuan 3.1	Meningkatkan kualitas produksi Pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	NILAI	31,28	33,88	35,18	36,48	37.78	39.08	39.08
Sasaran 3.1.1	meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan	Indeks Produksi Pertanian (IPP)	indeks	1,12	1,26	1,36	1,40	1,45	1,47	1,47
Sasaran 3.1.2	Meningkatnya ketersediaan Pangan	Ketersediaan pangan utama	persen	318,33	321,38	327,72	333,75	340,38	346,69	346,69
4. Kesehatan yang Prima dan Terjangkau										
Tujuan 4.1	**Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat**	Indeks Kesehatan	indeks	0,439	0,450	0,470	0,500	0,550	0,600	0,600
Sasaran 4.1.1	Meningkatnya harapan hidup	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,08	70,24	70,38	70,53	70,67	70,72	70,82
5. Pariwisata Berkat dan Meriah										
Tujuan	terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Pertumbuhan PDRB	%	-0,27	3,80	4,00	4,50	4,60	4,80	4,80
Sasaran 5.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja	TPT	%	2,5	2,28	2,17	2,06	1,95	1,84	1,84
Sasaran 5.1.2	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan wisata	orang	217.462	531.810	688.984	846.158	1.003.332	1.160.506	1.160.506
Sasaran 5.1.4	menurunkan angka kemiskinan	persentase Penduduk Miskin	%	8,71	8,57	8,50	8,43	8,36	8,29	8,29
6. Membangun Iman yang terpelihara										
Tujuan 6.1	**Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat**	Penanganan PMKS	Persen	69,67	80,59	86,05	91,51	100,00	100,00	100,00
Sasaran 6.1.2	Menurunya penyakit sosial	Laju penurunan Persentase PMKS	Angka	43,6	50	55	60	65	70	70,00
7. Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban										
Tujuan 7.1	**Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban**	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	0,997	0,998	0,998	0,998	0,999	0,999	0,999
Sasaran 7.1.1	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	persen	98	100	100	100	100	100	100

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Toba mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan efektif dan efisien. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Toba yang berkelanjutan.

6.1.STRATEGI PEMBANGUNAN

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan.

Analsis untuk menentukan strategi pembangunan menggunakan metoda SOAR (Strength, Opportunities, Aspiration dan Result). Metoda SOAR dilakukan dengan melakukan analisis multi faktor secara simultan. Faktor-faktor yang akan dinalisis adalah: Pencapaian-pencapian dan potensi yang dimiliki oleh kabupaten yang menjadi komponen **Strength**. Panca Program Bupati dan Wakil Bupati serta hal-hal yang ingin dicapai menjadi komponen **Aspirations,** komponen aspirasi muncul karena hal-hal yang merupakan kekurangan daerah yang perlu dibangun atau hal-hal yang masih perlu dioptimalkan. **Opportunities** adalah kondisi eksternal yang merupakan peluang untuk mencapai sasaran. Indikator-indikator sasaran menjadi komponen **Result**. Keempat komponen diatas secara simultan dianalisis terhadap sasaran yang ingin dicapai, ilustrasi metoda SOAR tersebut dapat dilihat pada tabel beri kut:

Tabel 0-1 Kerangka Dasar SOAR

Timeframe	Present	**Strength** *Pencapaian-pencapaian dan potensi yang dimiliki*	**Opportunities** *Kondisi eksternal yan menjadi peluang*
	Tujuan		
	GOAL *Sasaran*		
	Permasalahaan:		
	Pilihan Strategi	**SO** *Strenght – Opportunity*	
		AO *Aspiration – Opportunity*	
		SR *Strenght -Result*	
		AR *Aspiration - Result*	

	STRATEGI		
	Future	**Aspirations** • *Hal-hal yang ingin dicapai pada akhir periode.* • *Kekurangan dan kelemahaan (**weakness**) yang ingin dikurangi atau dihilangkan.* • *Hal-hal yang ingin dioptimalkan.*	**Result** *Indikator-indikator sasaran*
		Internal	External
		Scope	

Misi 1: Mewujudkan Infrastruktur yang bagus dan merata memiliki dua sasaran yaitu: Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar, Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan Meningkatnya kualitas konektivitas. Kekuatan, aspirasi, peluang dan hasil yang diharapkan untuk kedua sasaran tersebut dapat dilihat pada berikut:

Tabel 0-2 Analisis Misi I: Infrastruktur yang Bagus dan Merata

Timeframe	Present	**Strength** 1) Pertumbuhan jumlah jembatan yang naik 8,25 jembatan sejak 2015 sampai 2019. 2) Jaringan irigasi saluran primer dalam kondisi baik naik rata-rata 8,21 m tiap tahun mulai 2015 sampai dengan 2019. 3) Jaringan irigasi saluran sekunder dalam kondisi baik naik rata-rata 4,60 m tiap tahun mulai 2015 sampai dengan 2019. 4) Akses rumah tangga ke sanitasi yang layak naik rata-rata sebesar 2,27% per tahun sejak 2015 sampai 2019. 5) Kondisi rumah layak huni naik rata-rata per tahun 2,65% pertahun mulai tahun 2015 sampai 2019. 6) Persentase rumah kumuh turun rata-rata sebesar 0,42% per tahun mulai tahun 2016 sampai 2019. 7) Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Telepon/HP naik rata-rata sebesar 9,35% per tahun mulai tahun 2015 sampai 2019. 8) Proporsi Rumah tangga dengan akses internet naik rata-rata sebesar 4,28% pertahun mulai tahun 2015 sampai 2019.	**Opportunities** 1) Infrastruktur menjadi isu strategis nasional dan propinsi. 2) Infrastruktur menjadi tujuan ke-9 dari SDGs. 3) Pembangunan lingkungan menjadi salah satu pilar SDGs. 4) Pembangunan jalan tol trans sumatera
	(Tujuan 1.1) **Terwujudnya Infrastruktur yang merata dan berkualitas.**		
	GOAL (Sasaran 1.1.1) **Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar** (Sasaran 1.1.2) **Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak** (Sasaran 1.1.3) **Meningkatnya kualitas konektivitas**		

	Permasalahaan: - Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air masih belum memenuhi standar pelayanan minimal. - Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan sarana dan pasarana publik. - Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang. - Belum optimalnya tata kelola penanganan persampahan dan limbah.		
	Pilihan Strategi	**SO** Meningkatkan kualitas dan cakupan infrastruktur dasar	
		AO Pembangunan jalan, jembatan, listrik, telematika dan lingkungan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang lestari.	
		SR Menerapkan manajemen mutu dan pengawasan untuk memastikan tercapainya target pembangunan infrastruktur dan lingkungan.	
		AR Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, listrik, telematika dan lingkungan.	
	STRATEGI Meningkatkan kondisi jalan mantap dan konektivitas jalan Meningkatkan pengembangan perumahan kawasan permukiman Meningkatkan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Meningkatkan sarana dan prasarana dan pengelolaan transportasi		
	Future	**Aspirations** 1) Membangun infrastruktur jalan hingga ke seluruh desa 2) Membangun jembatan secara khusus untuk membuka akses bagi desa/dusun yang terisolir. 3) Seluruh masyarakat dapat mengakses air bersih dan sanitasi , listrik dan jaringan internet.	**Result** 1) Menaikan indeks infrastruktur pada tahun 2026 menjadi 0,6. 2) Menaikan indeks lingkungan hidup menjadi 73 pada tahun 2026.
		Internal	External
		Scope	

Berdasarkan kekuatan yang dimiliki (**Strength**)terkait dengan infrastruktur seperti baiknya pertumbuhaan infrastrukur jembatan, irigasi, akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang baik menunjukan adanya potensi kemampuan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur. Pencapaian sasaran juga didukung oleh faktor luar (**Opportunities**) yaitu dijadikannya pembangunan infrastruktur menjadi isu strategies Nasional dan Provinsi, sehingga diharapkan akan ada dukungan dari provinsi dan nasional untuk mencapai sasaran pada bidang infrastruktur. Berdasarkan aspirasi yang terdapat pada panca program Bupati dan Wakil Bupati untuk membangun infrastrukur jalan dan jembatan yang baik (**Aspirations**). Indikator-indikator sasaran yang ingin dicapai adalah menaikan indeks infrastruktur dan Indeks perumahan pemukiman dan Indeks konektivitas(**Result**). Analisis simultan terhadap keempat komponen tersebut terhadap dua sasaran menghasilkan strategi yang mungkin dilakukan untuk mencapai sasaran berdasarkan aspirasi yang ingin dicapai, potensi yang dimiliki, peluang yang ada dan indikator capaian yang

terukur. Strategi yang tepat untuk diterapkan adalah Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, listrik, telematika dan lingkungan dengan menerapkan manajemen mutu dan pengawasan dengan pelaksana yang profesional untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Tabel 0-3 Analisis Misi II: Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal

<table>
<tr><td rowspan="6">Timeframe</td><td rowspan="1">Present</td><td>Strength
1) IPM sudah tergolong tinggi
2) Harapan Lama Sekolah naik 0,012 pertahun mulai 2015-2020.
3) Rata-rata Lama Sekolah naik sebesar 0,12 mulai tahun 2015-2020.
4) Menurunya Tingkat Penganguran Terbuka mulai 2015-2020 rata-rata 0,24%.
5) Nilai IKM sudah baik.
6) Opini BPK sudah WTP.</td><td>Opportunities
1) SDGs.
2) Pendidikan adalah isu strategis nasional dan provinsi.
3) Refomasi birokrasi menjadi Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2026 pemerintah pusat.
4) Transformasi era 4.0
5) MEA (persaingan global)</td></tr>
<tr><td colspan="3">(Tujuan 2.1) Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas
(Tujuan 2.1) Terwujudnya Pemerintahan baik, inovatif, kreatif, Produktif dan non koruptif</td></tr>
<tr><td colspan="3">GOAL
(Sasaran 2.1.1) Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan
(Sasaran 2.1.2) Meningkatnya ketahanan keluarga
(Sasaran 2.1.3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik
(Sasaran 2.1.4) Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(Sasaran 2.1.5) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif</td></tr>
<tr><td colspan="3">Permasalahaan:
- Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat.
- Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan.
- Tingkat pengangguran masih tinggi.
- Belum optimalnya kebijakan dan program pengentasan kemiskinan.
- Masih rendahnya kualitas keluarga.
- Belum Optimalnya penyelenggaran pelayanan publik.
- Belum optimalnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik
- Belum optimalnya perencaaanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
- Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM aparatur</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Pilihan Strategi</td><td colspan="2">SO
- Meningkatkan kualitas guru, tenaga kependidikan, sarana-prasarana pendidikan.
- Meningkatkan kualitas lembaga pelatihan kerja.
- Meningkatkan kualitas lembaga pemberdayaan perempuan.
- Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan.</td></tr>
<tr><td colspan="2">AO
- Meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter unggul
- Refomasi tatakelola pemerintahan</td></tr>
<tr><td colspan="2">SR
- Meningkatkan manajemen dantata kelola pendidikan.
- Mengoptimalkan kualitas layanan publik</td></tr>
</table>

		AR - Peningkatan akses dan kuaitas pendidikan - Pendidikan karakter menjadi bagian kurikulum pendidikan. - Pemanfaatan teknologi pendidikan. - Pemberian beasiswa kepada masyarakat Toba yang berprestasi ke perguruan tinggi luar negeri. - Meningkatkan layanan dan fasilitas perpustakaan untuk menarik minat baca masyarakat - Membangun kerjasama dan jejaring untuk meningkatkan mutu pendidikan - Meningkatkan Ketahanan keluarga.	
	Strategi - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan - Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan manajemen pendidikan - Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga pelatihan kerja, layanan dan program ketenagakerjaan. - Penguatan lembaga pemberdayaan perempuan dan layanan dan program pemberdayaan perempuan. - Peningkatan edukasi ketahanan keluarga. - Peningkatan kualitas tatakelola pemeritahan daerah melalui reformasi birokrasi.		
	Future	**Aspirations** 1) Mewujudkan SDM Unggul yang berkarakter dan berkepribadian Batak Naja Raja 2) Meningkatkan minat baca dengan menyediakan Perpustakaan keliling. 3) Memanfaatkan teknologi informasi dalam seluruh sektor 4) Meningkatkan daya saing angkatan kerja	**Result** 1) Mencapai Harapan Lama Sekolah pada tahun 2026 pada angka 14,12 Tahun. 2) Mencapai Rata-rata lama Sekolah pada tahun 2026 pada angka 11,02. 3) Indeks TPT menurun sampai 1,2 pada tahun 2026. 4) Indeks IPG mencapai 98,56 pada tahun 2026. 5) Indeks Ketahanan Keluarga mencapai 0,68 pada tahun 2026. 6) Mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahu 2026: 100. 7) Mempertahankan opini BPK sebesar 100 pada tahun 2026. 8) Nilai SAKIP BB pada 2026 tercapai. 9) Tercapainnya Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada tahun 2026 sebesar 3,39.
		Internal	External
		Scope	

Komponen-komponen SOAR untuk misi ke-2 dapat dilihat pada diatas. Kekuatan yang dimiliki untuk mendukung aspek ini adalah meningkatnya indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya dan menurunnya persentasi indikator Tingkat Penganguran terbuka, hal ini menjadi indikasi aspek-aspek pendukung pendidikan berjalan dengan baik. Aspek luar yang menjadi kesempatan adalah membangun pendidikan yang baik menjadi prioritas nasional dan propinsi serta menjadi tujuan SDGs. Membangun sumber daya yang unggul menjadi harapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih seperti pendidikan yang menekankan aspek pendidikan karakter, menggunakan

metoda SPICES, mendorong lulusan siswa SMA dapat diterima diperguruan tinggi yang baik, mendorong minat baca, penggunaan teknologi untuk pendidikan. Empat sasaran yang dimiliki diukur menggunakan indikator: Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Tingkat Penganguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Gender. Strategi untuk mencapai sasaran: Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan adalah Meningkatkan kualitas sistem pendidikan, kualitas dan kuantitas pengajar, kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan. Strategi untuk mencapai sasaran: Meningkatnya kesempatan kerja adalah dengan Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. Sasaran: Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dicapai dengan menggunakan strategi: Meningkatkan perlindungan jaminan sosial dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak. Meningkatkan pelayanan, advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) keluarga berencana merupakan strategi untuk mencapai sasaran: Meningkatnya ketahanan keluarga.

Misi ke-3 terkait dengan mensejahterakan masyarakat dengan membangun pertanian dan peternakan yang baik, misi ke-3 memiliki satu sasaran. Kekuatan yang mendukung tercapainnya sasaran tersebut adalah meningkatnya PDRB ADHB dan menurunya angka kemiskinan, hal ini menunjukan potensi yang dimilki oleh masyarakat dan pemerintah daerah mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ketahanan pangan yang menjadi program strategis nasional menjadi peluang untuk mencapai sasaran, diharapkan akan ada dukungan nasional untuk mencapai sasaran-saran yang terkait dengan pertanian dan peternakan. Misi ke-3 berusaha untuk muwujudkan aspirasi pada bidang pertanian antara lain: Meningkatkan kualitas petani, Meningkatkan kualitas bibit, Pemanfaatan teknologi pertanian, Pengendalian harga, Pengebangan Agribisnis dan Agro Wisata. Ketercapaian sasaran-sasaran diukur dengan Nilai Tukar Petani, Angka Kemiskinan, Pendapatan per kapita (ADHK). Sasaran pada misi ke-3: Meningkatkan kualitas produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan dicapai dengan strategi Meningkatkan kualitas sistem produksi pertanian dan peternakan.

Tabel 0-4 MISI III: Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera

Timeframe	Present	**Strength** 1) Meningkatnya PDRB ADHB rata-rata 445 Milyar pertahun. 2) Menurunya persentase kemiskinan sebesar 0,3 persen pertahun mulai dari tahun 2015-2020.	**Opportunities** 1) Ketahanan pangan menjadi program strategis nasional. 2) Tanpa Kelaparan adalah tujuan ke-2 SDGs.

	(Tujuan 3.1) **Meningkatkan Kualitas Produksi Pertanian**		
	GOAL (Sasaran 3.1.1) **Meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan** (Sasaran 3.1.2) **Meningkatnya Ketersediaan Pangan**		
	Permasalahaan: - Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata dan pertanian sebagai sektor unggulan terhadap PDRB - Belum optimalnya peningkatan pendapatan perkapita penduduk - Belum optimalnya inovasi dalam pengembangan dan penguatan daya saing produk unggulan daerah. - Masih rendahnya nilai dan jumlah investasi. - Masih minimnya upaya penguatan industri hulu, industri hilir dan industri kreatif.		
	Pilihan Strategi	**SO** - Meningkatkan kualitas petani. - Meningkatkan kualitas penyuluh. - Penguatan lembaga-lembaga pertanian.	
		AO - Pertanian yang modern, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.	
		SR Pengawasan distribusi bantuan untuk petani dan pendampingan petani.	
		AR - Meningkatkan kualitas penyuluhaan. - Menyiapkan tatakelola penyediaan dan distribusi bibit unggul bekerjasama dengan perguruan tinggi dan departemen pertanian. - Pemanfaatan teknologi dan peralatan pertanian modern (Mekanisasi Pertanian). - Meningkatkan kualitas tatakelola penjualan hasil pertanian. - Edukasi petani untuk pemberdayaan petani pada bidang agrobisnis dan agrowisata.	
	Strategi Intensifikasi pertanian, penyediaan sarana produksi pertanian moderen, mengembangkan agrobisnis dan peningkatan kapasitas petani, pengembangan big data pertanian		
	Future	**Aspirations** 1) Meningkatkan kapasitasitas petani 2) Meningkatkan produktivitas padi dan swasembada pangan 3) Menjaga stabilitas harga komoditi pertanian	**Result** 1) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Menurunkan angka kemiskinan sampai 3,98 % pada tahun 2026. 2) Pendapatan per kapita (ADHK) pada tahun 2026 mencapai Rp. 29.864.550. 3) Nilai tukar petani (NTP) pada nilai 100 pada tahun 2026.
		Internal	External
		Scope	

Misi ke-4 terkait dengan kesehatan yang dapat akses oleh semua masyarakat dengan sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. Umur Harapan Hidup masyarakat naik, rasio jumlah puskesmas terhadap jumlah kecamatan baik, rasio jumlah puskesmas terhadap jumlah penduduk baik, rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk baik merupakan kekuatan

yang dimiliki pemerintah. Faktor luar yang menjadi peluang adalah pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas pembangunan nasional dan rencana pemerintah propinsi untuk menaikan akreditasi RSUD Porsea, faktor-faktor tersebut menjadi peluang untuk mencapai sasaran. Aspirasi pemerintah daerah adalah memastikan semua fasilitas kesehatan memberikan layanan kesehatan yang bermutu, menaikan akreditasi rumah sakit, memastikan semua masyarakat memiliki asuransi kesehatan, menjangkau pelayanan di desa terpencil dengan puskesmas keliling, memfasilitasi berdirinya rumah sakit international. Aspirasi-aspirasi tersebut diukur dengan Naiknya Angka Harapan Hidup masyarakat. Berdasarkan analisis simultan terhadap keempat komponen tersebut , maka untuk mencapai sasaran maka strategi yang dilakukan adalah: Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative kesehatan masyarakat serta meningkatkan cakupan asuransi kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan.

Tabel 0-5 Misi IV: Kesehatan Yang Prima Dan Terjangkau

<table>
<tr><td rowspan="8">Timeframe</td><td rowspan="2">Present</td><td>Strength
1) Umur Harapan Hidup (UHH) Masyarakat Kabupaten Toba setiap tahun naik rata-rata 0,15 tahun, pada tahun 2010 68,59 tahun dan pada tahun 2020 70,08 tahun.
2) Tersedianya fasilitas kesehatan di kecamatan dan desa
3) RSUD Porsea sebagai fasilitas kesehatan rujukan</td><td>Opportunities
1) Pendidikan dan Kesehatan menjadi prioritas pembangunan nasional.
2) Rencana Pemerintah Sumatera Utara menaikan akreditasi RSUD Porsea dari C menjadi B.
3) Kehidupan sehat dan sejahtera menjadi tujuan ke-3 SDGs.
4) Universal Health Coverage (UHC)</td></tr>
<tr><td colspan="2">(Tujuan 4.1) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat</td></tr>
<tr><td colspan="2">GOAL
(Sasaran 4.1.1) Meningkatnya harapan hidup</td></tr>
<tr><td colspan="2">Permasalahaan:
- Masih ditemukannya Kematian Ibu per 1000 Kelahiran Hidup dan Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
- Belum optimalnya akses dan layanan kesehatan masyarakat
- Belum optimalnya akses, mutu asuhan pelayanan dan keselamatan pasien
- Belum optimalnya penanganan dan deteksi dini penyakit menular</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Pilihan Strategi</td><td>SO
- Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan.
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.</td></tr>
<tr><td>AO
- Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat yang menyeluruh dan berkelanjutan.
- Meningkatkan akreditasi rumah sakit RSUD Porsea.</td></tr>
<tr><td>SR
- Peningkatkan pengawasan mutu layanan kesehatan.</td></tr>
</table>

		AR - Peningkatan mutu layanan Rumah Sakit dan Puskesmas. - Menggiatkan penyuluhan kesehatan yang baik. - Peningkatan mutu tatakelola rumah sakit RSUD Porsea. - Membangun koordinasi dengan HKBP untuk meningkatkan kualitas rumah sakit HKBP Balige. - Meningkatkan persentasi kepersertaan asurasi kesehatan masyarakat. - Menyiapkan faktor-faktor pendukung investasi rumah sakit bertaraf internasional.	
	Strategi Peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan dan cakupan jaminan kesehatan		
	Future	**Aspirations** KESEHATAN PRIMA TERJANGKAU 1) Memastikan semua Rumah Sakit dan Puskesmas hingga pos kesehatan desa memberikan Pelayanan kesehatan yang terjamin. 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan RSUD Porsea 3) Memastikan seluruh masyarakat sudah tercover JKN-KIS. 4) Memfasilitasi Pembangunan Rumah sakit bertaraf Internasional unuk memenuhi wisatawan Dalam dan Luar Negeri serta masyarakat sekitar Danau Toba.	**Result** 1) Menaikan Angka Harapan Hidup menjadi 70,82 pada tahun 2026.
		Internal	External
		Scope	

Misi ke-5 pembangunan daerah terkait dengan pengembangan pariwista untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi alam dan budaya yang dimiliki dapat menjadi kekuatan untuk mendukung pembangunan pariwisata. Keinginan pemerintah adalah membangun industri pariwisata bertaraf internasional dengan melibatkan semua pemangku kepentingan berbasis kearifan masyarakat Batak. Indikator sebagai ukuran pencapaian aspirasi pemerintah diukur dengan: Pendapat Asli Daerah sektor pariwista, jumlah wisatawan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Kempat faktor yang menjadi dasar analisa untuk membuat strategi dapat dilihat pada tabel dibawah, Ketiga sasaran pada misi ke-5 dicapai dengan strategi: Meningkatkan daya tarik destinasi wisata serta

pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dengan memberdayakan masyarakat.

Tabel 0-6 Misi V: Pariwisata Berkat Dan Meriah

<table>
<tr><td rowspan="10">Timeframe</td><td rowspan="2">Present</td><td>Strength
1) Potensi alam dan budaya untuk mendukung pariwisata.
2) Terdapat beberapa daerah tujuan wisata
3) Tumbuhnya jasa akomodasi</td><td>Opportunities
1) Penetapan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).</td></tr>
<tr><td colspan="2">(Tujuan 5.1) Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif</td></tr>
<tr><td colspan="3">GOAL
(Sasaran 5.1.1) Meningkatnya kesempatan kerja
(Sasaran 5.1.2) Meningkatnya kunjungan wisata
(Sasaran 5.1.3) Menurunkan angka kemiskinan</td></tr>
<tr><td colspan="3">Permasalahaan:
- Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata dan pertanian sebagai sektor unggulan terhadap PDRB
- Belum optimalnya peningkatan pendapatan perkapita penduduk
- Belum optimalnya inovasi dalam pengembangan dan penguatan daya saing produk unggulan daerah.
- Masih rendahnya nilai dan jumlah investasi.
- Masih minimnya upaya penguatan industri hulu, industri hilir dan industri kreatif.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Pilihan Strategi</td><td colspan="2">SO
- Eksplorasi potensi budaya dan objek wisata.
- Penataan dan pengembangan destinasi wisata
- Meningkatkan kemudahan akses ke daerah tujuan wisata</td></tr>
<tr><td colspan="2">AO
- Pengembangan fasilitas pendukung dan daya tarik wisata</td></tr>
<tr><td colspan="2">SR
- Pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan ekonomi rakyat.
- Mendorong tumbuhnya peluang usaha baru (investasi)</td></tr>
<tr><td colspan="2">AR
- Pelibatan pengusaha dalam mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata.
- Meningkatkan tatakelola kepariwisataan
- Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung pariwisata.
- Pendampingan kepada masyarakat untuk mengembangkan Homestay.
- Menggiatkan promosi wisata dalam dan luar negeri. Meningkatkan event seni, budaya dan olah raga dalam skala intenasional.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Strategi
Meningkatkan aksesibilitas, amenitas dan atraksi, Meningkatkan manajemen pengelolaan pariwisata dan fasilitasi pengembangan UMKM dan industri pariwisata</td></tr>
</table>

	Future	**Aspirations** 1) Mengajak semua pihak: Pemerintah, Masyarakat, Pengusaha, dan Cendikiawan untuk bekerjasama membangun Pariwisata hingga bertaraf Internasional. 2) Menyediakan informasi tentang objek wisata dengan lengkap dan akurat. 3) Membudayakan sapta pesona: Aman dan Nyaman , Tertib, Bersih, Indah, Sejuk, Ramah-tamah, penuh Kenangan dengan memberi Pendidikan, pelatihan, percontohan dan pencitraan lewat medsos (dokumentasikan sebelum dan sesudah) 4) Bekerja sama dengan masyarakat membangun homestay 5) Promosi dalam dan luar negeri. 6) Melakukan pendidikan/edukasi tentang konsep pengembangan pariwisata terhadap masyarakat khususnya kawasan daerah Wisata. 7) Mencegah dan Menyelesaikan Masalah-masalah Sosial. 8) Melestarikan dan Menjadikan Budaya dan Kearifan Lokal Batak Unggul. 9) Mengadakan events seni, olah raga, dan budaya yang meriah dan skala Internasional.	**Result** 1) Meningkatnya PAD sektor pariwista menjadi Rp. 49.040.000 pada tahun 2026. 2) Tercapainya jumlah wisatawan pada tahun 2026 sebanyak 1.666.329 wisatawan/tahun. 3) Meningkatnya TPAK pada tahun 2026 menjadi 84,30%.
		Internal	External
		Scope	

Kabupaten Toba memiliki tujuh misi dan pada setiap misi terdapat tujuan-tujuan dan tujuan memiliki sasaran-sasaran. Metoda SOAR digunakan untuk mendapat strategi yang tepat untuk mencapai sasaran. Empat komponen yang terdapat pada SOAR yaitu Strength, Opportunity, Aspiration dan Result dianalisa secara simultan untuk memperoleh strategi, secara lengkat strategi yang dihasilkan melalui proses ini dapat dilihat di pada tabel dibawah.

Tabel 0-7 Hubungan Strategi Pembangunan Terhadap Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Toba 2021-2026

Visi: TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR				
TUJUAN		**SASARAN**		**Strategi**
MISI I Infrastruktur yang Bagus dan Merata				
Tujuan 1.1	Terwujudnya infrastruktur yang merata dan berkualitas	Sasaran 1.1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	Meningkatkan kondisi jalan mantap dan konektivitas jalan
		Sasaran 1.1.2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Meningkatkan pengembangan perumahan kawasan permukiman
				Meningkatkan Pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
		Sasaran. 1.1.3	Meningkatnya kualitas konektivitas	Meningkatkan sarana dan prasarana dan pengelolaan transportasi
MISI II Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal.				
Tujuan 2.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Sasaran 2.1.1	Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan sistem pendidikan yang berkarakter unggul
				Meningkatkan minat baca masyarakat dan prestasi olahraga
		Sasaran 2.1.2	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Peningkatan kualitas lembaga pelatihan kerja, layanan dan program ketenagakerjaan.

Visi: TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR				
TUJUAN		SASARAN		Strategi
				Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak
Tujuan 2.2	Terwujudnya Pemerintahan baik, inovatif, kreatif, Produktif dan non koruptif	Sasaran 2.2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
		Sasaran 2.2.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan kualitas tatakelola keuangan dan pemeritahaan daerah melalui reformasi birokrasi.
		Sasaran 2.2.3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	
MISI III Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera				
Tujuan 3.1	Meningkatkan kualitas produksi Pertanian	Sasaran 3.1.1	Meningkatnya Produktivitas pertanian dan peternakan	Intensifikasi pertanian
				Mengembangkan agrobisnis dan agrowisata
				Meningkatan kapasitas petani
				Penyediaan sarana produksi pertanian moderen
				Pengembangan big data pertanian
		Sasaran 3.1.1	Meningkatnya ketersediaan Pangan	
MISI IV KESEHATAN YANG PRIMA DAN TERJANGKAU				
Tujuan 4.1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Sasaran 4.1.1	Meningkatnya Harapan Hidup	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan dan cakupan jaminan kesehatan

Visi: TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR				
TUJUAN		SASARAN		Strategi
MISI V PARIWISATA BERKAT DAN MERIAH				
Tujuan 5.1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Sasaran 5.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja	Meningkatkan aksesibilitas, amenitas dan atraksi
		Sasaran 5.1.2	Meningkatnya kunjungan wisata	Meningkatkan manajemen pengelolaan pariwisata
		Sasaran 5.1.3	Menurunkan angka kemiskinan	Fasilitasi pengembangan UMKM dan industri pariwisata
MISI VI MEMBANGUN IMAN YANG TERPELIHARA				
Tujuan 6.1	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	Sasaran 6.1.1	Menurunnya penyakit sosial	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyakit sosial, meningkatkan nilai persatuan dalam kehidupan masyarakat
MISI VII MENCIPTAKAN STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN				
Tujuan 7.1	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban	Sasaran 7.1.4	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan ketrentaman umum dengan melibatkan seluruh stakeholder

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Toba senantiasa akan memberdayakan segala potensi yang dimiliki diantaranya dengan mengangkat nilai kearifan lokal sebagai filosofi yang melandasi pelaksanaan pembangunan daerah (rule model) khususnya dalam mewujudkan misi ke 2 : "Membangun ***sumber daya manusia yang unggul dan andal"*** yaitu melalui konsep "Batak Na raja" yang menggambarkan bangunan konsep kepribadian masyarakat yang unggul sesuai dengan nilai adat batak sebagai berikut :

1. Batak Na Marugamo

   yang mengandung arti sebagai umat yang beragama masyarakat Toba diharapkan mampu menampilkan sikap saling mengasihi (holong), berkerjasama dan bergotong royong dalam kehidupan bermsayarakat dan dalam pembangunan.

2. Batak Na Namaradat

   Yang mengandung arti sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai budaya dan adat istiadat, masyarakat Toba diharapkan dapat menerapkan filosofi

Dalihan Natolu dalam sendi-sendi kehidupan yaitu sikap saling menghormati (Somba) sikap menghargai, berhati-hati dalam bertindak dan berkata-kata (Manat) dan sikap mengalah, mengajak, mengambil hati (Elek),

3. Batak Namaruhum

   Yang mengandung arti sebagai warga negara yang baik, masyarakat batak dapat menunjukkan sikap yang patuh dan mengedepankan hukum dalam kehidupan social masyarakat. **(*Dang pajolo gogo papudi uhum*).** Dalam proses pengambilan keputusan mengedepankan kearifan lokal melalui ***"Martonggo Raja"*** (urun rembug)

4. Batak Namarparbinotoan

   yang mengandung arti sebagai masyarakat Toba yang berpendidikan (Malo, pistar, bisuk), diharapkan dapat mengembangkan diri untuk menambah dan menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk berpartisipasi dalam pembangunanan demi kepentingan banyak orang (masyarakat) seperti prinsip orang batak ***"Anakhon ki do hamoraon di au jala ikkon do marsikkola satimbotimbo na"***.

   Terbentuknya karakter masyarakat yang sesuai dengan nilai Batak Na Raja akan menghasilkan SDM yang berkepribadian unggul dan akan mendukung terhadap pelaksanaan program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Toba.

   Disamping pembangunan karakter untuk menghasil kepribadian Batak Na Raja, Pemerintah Kabupaten Toba juga mengusung gerakan massal bernuansa kearifan lokal **" TARHILALA".** Suatu gerakan membangun kesadaran bagi ASN dan masyarakat agar dapat memanfaatkan segala sesuatu untuk menambah nilai manfaat, memiliki nilai ekonomis, kebaikan bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat banyak melalui pemanfaatan ruang, waktu dan barang.

6.2.ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu.

Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan akan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritas kebijakan tersebut bukan berarti program/kegiatan pembangunan operasional OPD diluar yang diprioritaskan tidak berjalan, namun tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis

yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan, artinya program-program operasional pada semua OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Selain itu semua kebijakan pembangunan daerah diharapkan akan mengarah pada pengelolaan keuangan yang semakin berkualitas. Arah kebijakan pembangunan lima tahun Kabupaten Toba 2021-2026 digambarkan sebagai berikut :

Tabel 0-8 Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Toba
Tahun 2021 – 2026

Tahun -1 2022	**Tahun-2 2023**	**Tahun-3 2024**	**Tahun-4 2025**	**Tahun-5 2026**
Peningkatan kualitas infrastruktur dan inovasi daerah untuk meningkatkan ekonomi yang berdaya saing.	Percepatan Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.	Mendorong produktivitas masyarakat pada sektor pertanian dan pariwisata sebagai sektor unggulan dan ekstensifikasi ekonomi.	Perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan UMKM, mendorong peluang dan iklim investasi yang kondusif	Optimalisasi pembangunan untuk meningkatkan kemandirian, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat

Kebijakan-kebijakan yang ada di RPJMD dibuat untuk mengarahkan strategi yang telah dibuat sehingga tujuan dan sasaran lebih terarah. Kebijakan-kebijakan RPJMD yang telah dibuat berhubungan dan terkait ke visi-misi RPJMD.

Tabel 0-9 Hubungan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Toba
dengan Visi-Misi RPJMD Kabupaten Toba

Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026	Misi RPJMD 2021-2026
Peningkatan kualitas infrastruktur dan inovasi daerah untuk meningkatkan ekonomi yang berdaya saing.	Misi I Infrastruktur yang Bagus dan Merata
Percepatan peningkatan kualitas infrastruktur dasar, sarana dan prasarana Pendidikan yang dan kesehatan, perlindungan social dan pemberdayaan social, peningkatan daya saing angkatan kerja	Misi I Infrastruktur yang Bagus dan Merata
	Misi II Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Andal
	Misi IV Kesehatan yang Prima dan Terjangkau

Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026	Misi RPJMD 2021-2026
Mendorong produktivitas masyarakat pada sektor petanian dan pariwisata sebagai sektor unggulan dan ekstensifikasi ekonomi	Misi III Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera
	Misi V Pariwisata Berkat dan Meriah
Perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan UMKM, mendorong peluang dan iklim investasi	Misi V Pariwisata Berkat dan Meriah
	Misi VI Membangun Iman Yang Terpelihara
	Misi VII Menciptakan Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban
Pengembangan inovasi dalam meningkatkan daya saing produk ungulan daerah dan peningkatan kualitas layanan publik	Misi II Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Andal

6.3.Program Prioritas

Prioritas pembangunan daerah adalah serangkaian program/kegiatan yang diarahkan pada urgensi yang paling penting untuk sasaran tertentu di daerah. Prioritas pembangunan meliputi program prioritas atau program unggulan kepala daerah terpilih selama masa kampaye. Adapun prioritas pembangunan kabupaten Toba tahun 2021-2026 terdiri dari 5 yang penentuannya didasarkan pada misi kabupaten dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan dampaknya sebagai berikut :

1. Infrastruktur yang bagus dan merata
2. Sumber Daya Manusia yang unggul dan Andal
3. Kesehatan prima dan terjangkau
4. Pariwisata berkat dan meriah
5. Pertanian yang makmur dan sejahtera

Selanjutnya 5 prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba tersebut diterjemahkan kedalam 5 cluster program unggulan strategis yang disebut dengan ***Panca Program Prioritas Pembangunan*** yang secara rinci dapat disampaikan sebagi berikut :

Tabel 0-10 Panca Program Prioritas Pembangunan

5 Prioritas Pembangunan	Panca Program Prioritas Pembangunan Daerah
Prioritas I Infrastruktur Bagus Dan Merata	1) Program penyelenggaraan jalan 2) Program pengembangan perumahan 3) Progran kawasan permukiman 4) Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

5 Prioritas Pembangunan	Panca Program Prioritas Pembangunan Daerah
	5) Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase 6) Program pengelolaan persampahan 7) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
Prioritas II Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Andal	1) Program Pengelolaan Pendidikan 2) Program pengembangan kurikulum 3) Program pendidik dan tenaga kependidikan 4) Program pembinaan perpustakaan 5) Program perlindungan dan jaminan sosial 6) Program perlindungan perempuan 7) Program Perlindungan Khusus Anak 8) Program Pembinaan Keluarga Berencana (kb) 9) Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (ks) 10) Program pengelolaan aplikasi informatika 11) Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik 12) Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat 13) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan 14) Program pelayanan penanaman modal 15) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 16) Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
Prioritas III Kesehatan Prima Terjangkau	1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 2) Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Prioritas IV Pariwisata Berkat Dan Meriah	1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2) Program pemasaran pariwisata

5 Prioritas Pembangunan	Panca Program Prioritas Pembangunan Daerah
	3) Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif 4) Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya 5) Program pengembangan umkm 6) Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)
Prioritas V Menciptakan Pertanian Yang Makmur Dan Sejahtera	1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 3) Program Penyuluhan Pertanian

Di dalam melaksanakan pembangunan prioritas daerah RPJMN 2021-2026 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJMD lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyekyang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Pada RPJMD 2021-2026 direncanakan beberapa Major Project yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, Major Project melibatkan swasta, BUMN/BUMD dan Kementerian.

Adapun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan isu strategis dan permasalahan daerah meliputi :

1. Peningkatan kualitas jalan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di Kabupaten Toba dan Kawasan Cepat Tumbuh Habinsaran-Borbor-Nasau
2. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
3. Infrastruktur TIK mendukung pengembangan SMART CITY
4. Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Porsea menjadi Tipe B
5. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah
6. Penataan Kawasan Perkotaan Balige
7. Pemulihan ekonomi melalui pengembangan UMKM, padat karya
8. Penataan dan pengembangan kawasan wisata
9. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

6.4.Pengembangan Kewilayahan (Kawasan Strategis)

Bahwa Untuk Mengarahkan Pembangunan Di Kabupaten Toba Samosir Dengan Memanfaatkan Ruang Wilayah Secara Berdaya Guna, Berhasil Guna, Serasi, Selaras, Seimbang, Dan Berkelanjutan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Dan Pertahanan Keamanan Berdasarkan Pancasila Dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka disusun Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017 – 2037**

1) **Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Toba Samosir**

   Tujuan penataan ruang Kabupaten Toba Samosir adalah*: "Mewujudkan pengembangan wilayah Kabupaten Toba Samosir secara merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan mengandalkan sektor unggulan pertanian, industri dan pariwisata menuju masyarakat mandiri dan sejahtera"*

2) **Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Toba Samosir**

   Kebijakan penataan ruang Kabupaten Toba Samosir adalah :

   1. Pemantapan fungsi dan optimalisasi pengembangan Kabupaten Toba Samosir sebagai bagian dari Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi serta Kawasan Andalan dan optimalisasi pengembangan kawasan strategis Kabupaten;
   2. Pengembangan sektor unggulan Kabupaten Toba Samosir;
   3. Pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan;
   4. Pemantapan infrastruktur wilayah dan pemerataan pelayanan sosial, ekonomi dan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang terintegrasi satu sama lain;
   5. Pengembangan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
   6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3) **Strategi Penataan Ruang Kabupaten Toba Samosir**

   4.1. Strategi Pemantapan fungsi dan optimalisasi pengembangan Kabupaten Toba Samosir sebagai bagian dari Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi serta Kawasan Andalan dan optimalisasi pengembangan kawasan strategis Kabupaten, antara lain:

   a. mengembangkan fungsi dan peran kota Balige sebagai pusat kegiatan wilayah;

b. mendukung upaya pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem dan hayati kawasan nasional Danau Toba;
c. mengoptimalkan peran kabupaten dalam mendukung terwujudnya Kawasan Strategis Provinsi Agropolitan Dataran Tinggi di Lumban Julu;
d. mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan strategis kabupaten untuk mendukung keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan baik dari sudut kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan pendayagunaan sumber daya alam dan sosial budaya;
e. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis Kabupaten; dan
f. meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana wilayah penunjang kegiatan kawasan strategis kabupaten.

4.2. Strategi pengembangan sektor unggulan Kabupaten Toba Samosir;

a. Mengembangkan Kawasan Agropolitan Lumban Julu, kawasan perdesaan dan peruntukan kegiatan pertanian sebagai kawasan penghasil komoditas sektor ekonomi sebagai aset utama kegiatan agribisnis;
b. Mengembangkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
c. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian, perikanan dan peternakan;
d. Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian, peternakan dan perikanan yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing;
e. Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian, peternakan dan perikanan sebagai bahan baku industri serta sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian, peternakan dan perikanan;
f. Meningkatkan dan memantapkan swasembada pangan yang berkelanjutan;
g. Meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan pengolahan hasil pertanian;
h. Mengembangkan sektor industri berwawasan lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat;
i. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan industri;
j. Menyediakan infrastruktur pendukung kawasan industri;
k. Mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri dan mengendalikan perkembangan kegiatan industri;
l. Memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan kegiatan industri dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

m. Mengembangkan kawasan wisata potensial kabupaten ;
n. Mengembangkan dan melestarikan serta mempromosikan berbagai potensi alam, budaya dan sejarah yang merupakan aset dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata; dan
o. Membangun dan meningkatkan infrastruktur pendukung pariwisata kabupaten.

4.3. Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan;

a. Memantapkan fungsi kawasan lindung berupa hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya;
b. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya alam dan sumber daya buatan;
c. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan ekosistem Danau Toba;
d. Mengarahkan kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung;
e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;
f. Meningkatkan konservasi lahan dan hutan;
g. Mengendalikan pemanfaatan ruang daerah aliran sungai yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
h. Mengembangkan hutan rakyat pada daerah aliran sungai dan menata kembali pemanfaatan ruang sekitar daerah aliran sungai;
i. Memelihara budaya dan peninggalan sejarah sebagai objek penelitian dan pariwisata;
j. Mengendalikan pertumbuhan kegiatan budidaya di sempadan Danau Toba; dan
k. Mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat;

4.4. Strategi pemantapan infrastruktur wilayah dan pemerataan pelayanan sosial, ekonomi dan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang terintegrasi satu sama lain;

a. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur jaringan jalan dan fasilitas perhubungan dengan mengembangkan jalan penghubung antar

perkotaan, antar perdesaan, dan aksesibilitas antara pusat produksi dengan pusat pemasaran;

b. Mengembangkan pembangunan infrastruktur dan perekonomian perdesaan tertinggal dan terisolir;
c. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pasar, telekomunikasi, energi listrik, pemerintahan, dan lain sebagainya) secara merata ke seluruh wilayah pengembangan;
d. Meningkatkan kualitas pelayanan dan prasarana untuk mendukung akses layanan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan perdesaan serta antara kawasan perkotaan dengan pusat pengembangan agribisnis;
e. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian di kawasan perdesaan;
f. Membangun dan mengembangkan potensi pembangkit energi dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia serta memperluas jaringan energy untuk kebutuhan pembangunan wilayah; dan
g. Pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan.

4.5. Strategi pengembangan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, antara lain :

a. Mengembangkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis dalam mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang;
b. Mengembangkan pola kerjasama dengan masyarakat dalam mengelola hutan rakyat;
c. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya hutan produksi untuk mewujudkan nilai tambah daerah;
d. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan dan mendukung pengembangan agribisnis;
e. Menetapkan dan memantapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk pelestarian kawasan pertanian;
f. Meningkatkan budidaya perikanan, budidaya peternakan dalam sentra-sentra produksi peternakan, untuk mewujudkan nilai tambah daerah dan mendukung kegiatan agribisnis;
g. Mengembangkan kegiatan pertambangan pada lokasi potensi layak tambang dengan memperhatikan lingkungan hidup dan mengendalikan kegiatan penambangan pada kawasan yang membahayakan lingkungan;

h. Mengembangkan wisata alam, budaya dan buatan untuk meningkatkan perekonomian daerah;
i. Mengembangkan kegiatan industri kecil dan menengah untuk meningkatkan nilai tambah dan perekonomian daerah dengan pengembangan kegiatan industri yang berwawasan lingkungan;
j. Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; dan
k. Mengembangkan sarana prasarana permukiman dan upaya mitigasi bencanauntuk memperkecil dampak bencana alam.

4.6. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi :

a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertanahan dan keamanan
b. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
d. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

Prioritas dan tahapan pembangunan merupakan program-program pemanfaatan ruang yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Toba Samosir melalui perwujudan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Toba Samosir.

Pada dasarnya seluruh kawasan di wilayah Kabupaten Toba Samosir sangat membutuhkan pembangunan untuk mengoptimalkan potensinya. Namun mengingat keterbatasan sumber daya dana, maka perlu disusun kawasan yang diprioritaskan pembangunannya. Kawasan prioritas pembangunan merupakan kawasan yang dianggap perlu untuk diprioritaskan pengembangan dan penanganannya serta memerlukan dukungan rencana rinci (teknis) dan program sebagai upaya mewujudkan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Toba Samosir. Sesuai dengan strategi pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang telah disusun, maka kawasan prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Toba Samosir, meliputi :

1. Kawasan yang memiliki nilai strategis terhadap pertumbuhan kabupaten adalah Kawasan perkotaan di Kabupaten Toba Samosir, Kawasan Danau Toba sebagai bagian dari kawasan pariwisata nasional,, Kawasan Pertanian/Perkebunan dan kawasan strategis Kabupaten;

2. Kawasan wilayah tertinggal dan sulit dijangkau, yang perlu segera didorong pertumbuhannya terutama di wilayah Timur Kabupaten Toba Samosir seperti di Kecamatan Habinsaran, Nassau, Silaen dan Borbor
3. Kawasan lindung yang berubah fungsi atau mengalami penurunan Fungsi.

Prioritas Pembangunan Kewilayahan di Kabupaten Toba mengacu pada arahan RTRW Kabupaten Toba 2017-2037 difokuskan pada Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) merupakan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi kabupaten terdiri dari :

a. kawasan perkotaan Balige;
b. kawasan Sibisa – Ajibata; dan
c. kawasan cepat tumbuh Habinsaran – Borbor – Nassau.

Strategi pengembangan wilayah Kabupaten sebagai bagian dari sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi serta Kawasan Andalan, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba dan Sekitarnya, dan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten, terdiri dari :

a. mengembangkan fungsi dan peran Kota Balige sebagai Pusat Kegiatan Wilayah;
b. mendukung upaya pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem dan hayati Kawasan Strategis Nasional Danau Toba;
c. mengoptimalkan peran kabupaten dalam mendukung terwujudnya Kawasan Strategis Provinsi Agropolitan Dataran Tinggi di Lumban Julu;
d. mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan strategis kabupaten untuk mendukung keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan baik dari sudut kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, pendayagunaan sumber daya alam dan sosial budaya;
e. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Kabupaten; dan
f. meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana wilayah penunjang kegiatan Kawasan Strategis kabupaten.

Agar tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang di Kabupaten tercapai maka dilakukan penyelarasan sasaran RTRW dengan sasaran RPJMD yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 0-11 Keselarasan Sasaran RPJMD Kabupaten Toba 2021-2026 dengan Sasaran RTRW Kabupaten Toba 2017-2037

NO	SASARAN RTRW	SASARAN RPJMD
1	Pemantapan fungsi dan optimalisasi pengembangan Kabupaten Toba Samosir sebagai bagian dari Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi serta Kawasan Andalan dan optimalisasi pengembangan kawasan strategis Kabupaten;	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar • Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak • Meningkatnya kualitas konektivitas • Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan • Meningkatnya kesempatan kerja • Meningkatnya kunjungan wisata
2	Pengembangan sektor unggulan Kabupaten Toba Samosir;	• meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan • Meningkatnya kesempatan kerja • Meningkatnya kunjungan wisata
3	Pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan;	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar
4	Pemantapan infrastruktur wilayah dan pemerataan pelayanan sosial, ekonomi dan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang terintegrasi satu sama lain;	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar • Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan
5	Pengembangan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan daya	• Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar

NO	SASARAN RTRW	SASARAN RPJMD
	dukung dan daya tampung lingkungan hidup;	• Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan.
6	Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.	

Untuk setiap rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026 tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai tolok ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Toba. Pencapaian indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang didukung oleh Indikator Kinerja perangkat daerah. Dengan demikian, apa yang mau dicapai atau diubah dalam pembangunan lima tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Penjabaran tujuan, sasaran, dan indikator kinerjanya pembangunan jangka menengah Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026 untuk setiap misi disajikan pada tabel berikut :

TABEL VI.12.
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Toba Tahun 2022-2026

kode	MISI/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal											Kondisi Akhir	Perangkat daerah
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026	
				Tahun 2020	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Infrastruktur yang Bagus dan Merata																
Tujuan 1.1	**Terwujudnya infrastruktur yang merata dan berkualitas.**	Indeks Infrastruktur	Indeks	0,5893	0,6550	102.900.772.000,00	0,6760	105.399.288.882,09	0,7098	106.688.676.292,72	0,7135	108.355.273.337,49	0,7346	117.993.981.106,14	0,7346	
Sasaran 1.1.1	**Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar**	Indeks sarana prasarana	Indeks	**0,5103**	**0,4777**	**82.205.772.000,00**	**0,5252**	**82.745.257.611,40**	**0,5726**	**84.206.108.838,65**	**0,6201**	**85.636.894.680,09**	**0,6675**	**93.130.976.663,90**	**0,6675**	
Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	42,37	50,36	59.540.772.000,00	53,58	60.499.245.714,40	56,79	61.567.347.982,58	60,01	62.613.467.925,68	63,23	68.092.770.551,96	63,23	DINAS PU DAN TATA RUANG
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	20	20,09	2.065.000.000,00	20,13	1.314.397.814,00	20,17	1.337.603.248,63	20,21	1.360.331.098,40	20,25	1.479.373.630,39	20,25	DINAS PU DAN TATA RUANG
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	93,36	95,56	20.600.000.000,00	96,67	20.931.614.083,00	97,78	21.301.157.607,44	98,89	21.663.095.656,01	100	23.558.832.481,55	100	DINAS PU DAN TATA RUANG
Sasaran 1.1.2	**Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak**	**Indeks perumahan pemukiman**	**Indeks**	**0,0966**	**0,1383**	**12.075.000.000,00**	**0,1440**	**13.976.066.167,69**	**0,1497**	**13.812.567.454,07**	**0,1554**	**13.893.335.194,40**	**0,1610**	**15.963.004.442,24**	**0,1610**	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persentase rumah yang terfasilitasi PSU	Persen	60	60,21	1.600.000.000,00	60,42	1.400.000.000,00	60,63	1.450.000.000,00	60,84	1.450.000.000,00	61,05	1.450.000.000,00	61,05	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	5,42	4,99	7.720.000.000,00	4,99	7.850.000.000,00	4,99	7.650.000.000,00	4,99	7.520.000.000,00	4,99	9.150.000.000,00	36,35	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Persen	74	75	2.535.000.000,00	76	2.195.000.000,00	77	2.133.000.000,00	78	2.145.000.000,00	79	2.373.000.000,00	79	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	80,00	80,43		80,79	2.294.066.167,69	81,17	2.334.567.454,07	81,55	2.374.235.194,40	81,96	2.582.004.442,24	81,96	DINAS PU DAN TATA RUANG
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Koefisien kualitas air dan udara	nilai	64,05	64,14	220.000.000,00	64,24	237.000.000,00	64,33	245.000.000,00	64,33	404.100.000,00	64,33	408.000.000,00	64,33	Dinas Lingkungan Hidup
Sasaran 1.1.3	**Meningkatnya kualitas konektivitas**	**Indeks konektivitas daerah**	**Indeks**	**0,1548**	**0,1548**	**8.620.000.000,00**	**0,1548**	**8.677.965.103,00**	**0,1548**	**8.670.000.000,00**	**0,1548**	**8.825.043.463,00**	**0,1548**	**8.900.000.000,00**	**0,1548**	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Konektivitas Jalan Kabupaten / kota	indeks	20/25	20/25	8.620.000.000,00	20/25	8.677.965.103,00	20/25	8.670.000.000,00	20/25	8.825.043.463,00	20/25	8.900.000.000,00	20/25	Dinas Perhubungan
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal																
Tujuan 2.1	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas**	IPM	%	75,73	76,58		77,01		77.43		77.86		77,90		77,90	
Sasaran 2.1.1	**Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan**	**indeks pendidikan**	**Indeks**	**0,724**	**0,738**	**24.927.601.488,00**	**0,744**	**24.574.540.997,00**	**0,750**	**25.417.830.129,00**	**0,756**	**26.958.827.325,00**	**0,763**	**44.677.959.541,00**	**0,763**	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni	Persen	96,18	100	22.797.601.488,00	100	21.924.540.997,00	100	22.312.830.129,00	100	22.965.327.325,00	100	37.175.959.541,00	100	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	52	100	200.000.000,00	100	270.000.000,00	100	214.000.000,00	100	600.000.000,00	100	1.540.000.000,00	100	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	76	79	1.000.000.000,00	80	1.500.000.000,00	82	2.000.000.000,00	85	2.500.000.000,00	87	5.000.000.000,00	87	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Persen	2,81	4,13	930.000.000,00	4,58	880.000.000,00	4,84	891.000.000,00	5,41	893.500.000,00	5,71	962.000.000,00	5,71	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sasaran 2.1.4	**Meningkatnya ketahanan keluarga**	**indeks ketahanan keluarga**	**Indeks**	**1,00**	**1,03**	**4.986.404.598,00**	**1,07**	**4.557.780.008,00**	**1,1**	**4.508.180.008,00**	**1,13**	**4.841.597.490,00**	**1,14**	**5.258.465.245,00**	**1,14**	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	persen PMKS yang tertangani	Persen	12,6	14,5	980.000.000,00	23,48	1.012.780.008,00	31,23	1.047.780.008,00	45,56	1.054.780.008,00	84,68	1.140.000.000,00	84,68	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persen	80	100	375.000.000,00	100	325.000.000,00	100	305.000.000,00	100	295.000.000,00	100	275.000.000,00	100	Dinas PMDP dan PA

	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100	100.000.000,00	100	105.000.000,00	100	110.000.000,00	100	115.000.000,00	100	120.000.000,00	100	Dinas PMDP dan PA
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmeet need)	Persen	12,3	12,1	2.681.404.598,00	11,9	2.335.000.000,00	11,8	2.388.900.000,00	11,7	2.682.730.000,00	11,7	3.008.710.245,00	11,7	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	29,67	29,1	850.000.000,00	29,05	780.000.000,00	29	656.500.000,00	28,95	694.087.482,00	28,9	714.755.000,00	28,9	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
Tujuan 2.2	**Terwujudnya Pemerintahan baik, inovatif, kreatif, Produktif dan non koruptif**	Indeks Reformasi Birokrasi	nilai	C/40,11	CC/50,20		B/60,10		B/60,30		BB/70,20		BB/70,40		BB/70,40	
Sasaran 2.2.1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**nilai**	**80**	**88**	**34.137.848.882,00**	**90**	**33.504.480.265,16**	**92**	**33.620.725.295,70**	**95**	**33.720.495.699,92**	**100**	**33.997.094.475,92**	**100**	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	60	94	10.010.000.000,00	100	9.455.000.000,00	100	8.935.000.000,00	100	7.797.337.500,00	100	8.202.784.375,00	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persen Masyarakat yang menjadi sasaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten	persen	67,6	70,11	1.205.000.000,00	70,16	800.000.000,00	70,20	720.000.000,00	70,25	1.608.365.928,00	70,30	900.000.000,00	70,30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesra	Persen	81,75	100	5.110.807.776,00	100	5.216.855.413,76	100	5.280.771.072,30	100	5.333.578.783,02	100	5.333.578.783,02	100	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	100	100	490.000.000,00	100	292.500.000,00	100	309.000.000,00	100	315.500.000,00	100	332.100.000,00	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP	persen	90	100	89.522.750,00	100	89.997.750,00	100	94.497.638,00	100	99.222.520,00	100	104.183.646,00	100	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persen	100	100	2.542.908.386,00	100	2.628.017.131,40	100	2.750.456.585,40	100	2.743.490.968,90	100	2.900.447.671,90	100	seluruh kecamatan
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persen	80	100	14.689.609.970,00	100	15.022.109.970,00	100	15.531.000.000,00	100	15.823.000.000,00	100	16.224.000.000,00	100	Sekretariat DPRD
Sasaran 2.2.2	**Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**	**Opini BPK**	**opini**	**WTP**	**WTP**	**281.163.661.279,00**	**WTP**	**286.232.347.834,00**	**WTP**	**288.281.299.979,00**	**WTP**	**290.252.865.887,00**	**WTP**	**289.619.602.182,00**	**WTP**	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Deviasi Realisasi Belanja terhadap total dalam APBD	persen	95,12665228	100	270.770.700.000,00	100	273.880.800.000,00	100	275.890.900.000,00	100	276.070.000.000,00	100	278.170.000.000,00	100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	persen	108,48	110,58	3.261.394.215,00	112,68	3.380.000.000,00	114,78	3.500.000.000,00	116,88	3.600.000.000,00	118,98	3.640.000.000,00	118,98	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Sasaran 2.2.3	**Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif**	**Nilai SAKIP**	**Nilai**	**CC**	**B/60**	**2.625.356.782,00**	**B/60,40**	**3.530.300.339,00**	**B/60,80**	**3.472.527.887,00**	**BB/70,20**	**4.300.280.071,00**	**BB/70,40**	**2.824.444.460,00**	**BB/70,40**	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	persen Dokumen atau Laporan	Persen	100	100	624.000.000,00	100	673.000.000,00	100	1.355.000.000,00	100	2.311.100.000,00	100	845.410.000,00	100	Bappeda
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks profesionalitas ASN	indeks	46,39	50,99	2.001.356.782,00	53,99	2.857.300.339,00	55,99	2.117.527.887,00	59,99	1.989.180.071,00	62,99	1.979.034.460,00	62,99	BKPSDM
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan	persen	48,85	60	1.880.853.500,00	65	1.910.947.156,00	70	1.945.344.205,00	72	1.982.305.745,00	75	2.160.713.262,00	75	INSPEKTORAT
3. Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera																
Tujuan 3.1	Meningkatkan kualitas produksi Pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	NILAI	31,28	33,88	29.410.333.480,00	35,18	32.469.029.993,00	36,48	33.909.709.997,00	37.78	32.729.911.000,70	39.08	34.205.148.099,82	39.08	
Sasaran 3.1.1	**meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan**	**Indeks Produksi Pertanian (IPP)**	**indeks**	**1,119**	**1,258**	**27.440.333.480,00**	**1,357**	**30.688.029.993,00**	**1,400**	**31.359.709.997,00**	**1,450**	**31.197.911.000,70**	**1,470**	**32.538.148.099,82**	**1,470**	

	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Pertanian dan Peternakan	Ton	190.844,11	229.305,78	14.813.389.800,00	236.092,46	19.738.029.993,00	241.185,46	20.859.709.997,00	245.534,31	19.002.870.118,70	253.724,91	18.763.854.190,82	253.724,91	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Pertanian dan Peternakan	Ton	190.844,11	229.305,78	11.626.943.680,00	236.092,46	9.750.000.000,00	241.185,46	9.300.000.000,00	245.534,31	10.845.040.882,00	253.724,91	12.374.293.909,00	253.724,91	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persen	34,92	45,77	1.000.000.000,00	56,62	1.200.000.000,00	60,04	1.200.000.000,00	67,46	1.350.000.000,00	72,89	1.400.000.000,00	72,89	DINAS PERTANIAN
Sasaran 3.1.2	**Meningkatnya ketersediaan Pangan**	**Ketersediaan pangan utama**	**persen**	**318,33**	**321,38**	**1.970.000.000,00**	**327,72**	**1.781.000.000,00**	**333,75**	**2.550.000.000,00**	**340,38**	**1.532.000.000,00**	**346,69**	**1.667.000.000,00**	**346,69**	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penguatan Cadangan Pangan	Persen	0	5	1.330.000.000,00	10	1.281.000.000,00	15	1.430.000.000,00	20	932.000.000,00	25	967.000.000,00	25	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	persen Desa Rawan Pangan yang tertangani	Persen	23,1	38,46	640.000.000,00	53,84	500.000.000,00	69,23	1.120.000.000,00	84,61	600.000.000,00	100	700.000.000,00	100	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
4. Kesehatan yang Prima dan Terjangkau																
Tujuan 4.1	**Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat**	**Indeks Kesehatan**	**indeks**	**0,44**	**0,45**	39.933.342.795,00	**0,47**	32.314.830.964,00	**0,5**	26.070.482.918,00	**0,55**	25.714.669.186,00	**0,6**	27.702.215.287,00	0,6	
Sasaran 4.1.1	**Meningkatnya harapan hidup**	**Angka Harapan Hidup**	**Tahun**	**70,08**	**70,24**	**39.933.342.795,00**	**70,38**	**32.314.830.964,00**	**70,53**	**26.070.482.918,00**	**70,67**	**25.714.669.186,00**	**70,72**	**27.702.215.287,00**	**70,72**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan Kesehatan	Persen	100,00	100,00	39.650.872.795,00	100,00	31.161.830.964,00	100,00	25.632.482.918,00	100,00	25.298.669.186,00	100,00	26.892.215.287,00	100,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	persen SDM Kesehatan yang berkompetensi sesuai dengan standart.	Persen	77,90	78,10	70.000.000,00	78,49	380.000.000,00	79,58	120.000.000,00	78,87	70.000.000,00	79,76	380.000.000,00	79,76	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	persen data izin sarana pelayanan kefarmasian serta produk IRTP yang memenuhi syarat sesuai dengan standar	Persen	41,38	54,40	167.470.000,00	60,00	268.000.000,00	65,19	118.000.000,00	70,00	166.000.000,00	75,86	240.000.000,00	75,86	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK	Persen	8,00	8,20	45.000.000,00	8,20	505.000.000,00	8,20	200.000.000,00	8,20	180.000.000,00	8,20	190.000.000,00	8,20	DINAS KESEHATAN
5. Pariwisata Berkat dan Meriah																
Tujuan	terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Pertumbuhan PDRB	%	-0,27	3,8	16.783.380.800,00	4	17.166.061.678,00	4,5	17.636.020.300,00	4,6	18.092.190.300,00	4,8	19.701.127.300,00	4,8	
Sasaran 5.1.1	**Meningkatnya kesempatan kerja**	**TPT**	**%**	**2,50**	**2,28**	**1.407.720.300,00**	**2,17**	**1.555.220.300,00**	**2,06**	**1.480.220.300,00**	**1,95**	**1.606.220.300,00**	**1,84**	**1.711.220.300,00**	**1,84**	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi.	Persen	0,345363495	1,38	790.220.300,00	2,42	975.220.300,00	3,45	980.220.300,00	4,49	1.106.220.300,00	5,53	1.111.220.300,00	5,53	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persen	5,10	5,87	617.500.000,00	6,12	580.000.000,00	6,38	500.000.000,00	6,63	500.000.000,00	6,63	600.000.000,00	6,63	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
Sasaran 5.1.2	**Meningkatnya Kunjungan Wisata**	**Jumlah Kunjungan wisata**	**orang**	**217.462**	**531.810**	**11.813.890.388,00**	**688.984**	**11.723.483.378,00**	**846.158**	**12.805.800.000,00**	**1.003.332**	**13.115.370.000,00**	**1.160.506**	**14.389.907.000,00**	**1.160.506**	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kunjungan Wisata	persen	25,33178792	50	3.500.000.000,00	70	3.663.000.000,00	70	7.719.800.000,00	70	8.495.370.000,00	70	9.344.907.000,00	70	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	tingkat hunian akomodasi	persen	16	12	4.061.390.388,00	15	3.877.483.378,00	17	2.616.000.000,00	20	1.980.000.000,00	22	2.085.000.000,00	22	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Peserta pembekalan sektor pariwisata	persen	0	100	4.002.500.000,00	100	3.408.000.000,00	100	1.870.000.000,00	100	1.990.000.000,00	100	2.110.000.000,00	100	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarikannya cagar budaya	Persen	75	30	250.000.000,00	35	775.000.000,00	40	600.000.000,00	45	650.000.000,00	50	850.000.000,00	37,5	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sasaran 5.1.4	**menurunkan angka kemiskinan**	**persentase Penduduk Miskin**	**%**	**8,71**	**8,57**	**3.561.770.112,00**	**8,5**	**3.887.358.000,00**	**8,43**	**3.350.000.000,00**	**8,36**	**3.370.600.000,00**	**8,29**	**3.600.000.000,00**	**8,29**	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	6,98	1,80	441.000.000,00	1,80	618.050.000,00	1,80	706.209.000,00	1,80	781.900.000,00	1,80	731.900.000,00	15,97	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri	Persen	6,61	6,71	3.561.770.112,00	6,85	3.887.358.000,00	7,06	3.350.000.000,00	7,19	3.370.600.000,00	7,27	3.600.000.000,00	7,27	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	persen PMKS yang tertangani	Persen	12,6	14,5	980.000.000,00	23,48	1.012.780.008,00	31,23	1.047.780.008,00	45,56	1.054.780.008,00	84,68	1.140.000.000,00	84,68	DINAS SOSIAL
6. Membangun Iman yang terpelihara																
Tujuan 6.1	**Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat**	Penanganan PMKS	Persen	69,67	80,59	4.835.058.367,00	86,05	4.622.407.047,00	91,51	4.459.710.888,00	100,00	4.447.201.868,00	100,00	4.899.755.822,00	100,00	
Sasaran 6.1.2	**Menurunnya penyakit sosial**	**Laju penurunan Persentase PMKS**	**Angka**	**43,6**	**50,00**	**4.835.058.367,00**	**55,00**	**4.622.407.047,00**	**60,00**	**4.459.710.888,00**	**65,00**	**4.447.201.868,00**	**70,00**	**4.899.755.822,00**	**70,00**	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persen	100	100	797.457.640,00	100	799.457.640,00	100	812.457.640,00	100	828.722.090,00	100	861.722.090,00	100	DINAS SOSIAL
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase panyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	Persen	19,85	19,85	1.045.000.000,00	24,76	1.046.000.000,00	32,92	1.047.509.619,00	49,07	1.061.509.619,00	96,34	1.181.000.000,00	96,34	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penurunan jumlah kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika	Persen	5	5	210.000.000,00	5	210.000.000,00	5	230.000.000,00	5	270.000.000,00	5	270.000.000,00	5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	29,67	29,1	850.000.000,00	29,05	780.000.000,00	29	656.500.000,00	28,95	694.087.482,00	28,9	714.755.000,00	28,9	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan MHA	Persen	85,16	2,97	1.932.600.727,00	2,97	1.786.949.407,00	2,97	1.713.243.629,00	2,97	1.592.882.677,00	2,97	1.872.278.732,00	2,97	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7. Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban																
Tujuan 7.1	**Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban**	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	0,997	0,998	5761398620,000	0,998	5563879460,000	0,998	4892791978,550	0,999	5119577422,478	0,999	5594778202,601	0,999	
Sasaran 7.1.1	**Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat**	**persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan**	**persen**	**98**	**100**	**5.761.398.620,00**	**100**	**5.563.879.460,00**	**100**	**4.892.791.978,55**	**100**	**5.119.577.422,48**	**100**	**5.594.778.202,60**	**100**	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Persen	85	86	865.000.000,00	88	1.622.750.000,00	90	1.507.387.500,00	93	1.549.006.875,00	95	2.048.119.765,00	95	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanggulangan bencana.	Persen	70	100	2.590.000.000,00	100	2.907.410.909,00	100	2.300.000.000,00	100	2.430.895.845,00	100	2.350.000.000,00	100	BPBD
	PROGRAM PENCEGAHAN, ENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan penyelematan dan evakuasi korban kebakaran.	Persen	100	100	2.306.398.620,00	100	1.033.718.551,00	100	1.085.404.478,55	100	1.139.674.702,48	100	1.196.658.437,60	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan adalah skema pembiayaan pembangunan berdasarkan kemampuan riil keuangan daerah untuk mendanai program pembangunan selama periode RPJMD. Kerangka pendanaan diperoleh setelah dilakukan proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dapat yang menjadi acuan dalam pendanaan indikasi rencanan program prioritas yang berisi program-program untuk mencapai visi dan misi jangka menengah dan pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menjalankan Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang Lainnya yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkan kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Toba mengingat masih rendahnya kapasitas fiskal daerah, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi Sumatera Utara dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2021-2026 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar,18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 5 (lima), unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang, fungsi penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum dan Non Urusan.

5.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar.

a. Urusan Pendidikan.

1. Program Pengelolaan Pendidikan.

   Program ini diarahkan pada perluasan ketersediaan dan keterjangkuan layanan pendidikan yang inklusif dan merata untuk meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup dan peningkatan tata kelola pendidikan untuk pemerataan mutu pendidikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Angka partisipasi kasar (APK) SD/ MI/ Paket

A, Angka partisipasi kasar (APK) SMP/ MTs/ Paket B, Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A, Angka partisipasi murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B, Persentase sekolah ramah anak, Angka putus sekolah SD/MI, angka putus sekolah SMP/MTs, angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs, sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik, sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik, rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar, % PAUD formal yang terakreditasi, persentase SD berakreditasi A, Persentase SMP Berakreditasi A, Persentase pendidik SD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik, Persentase pendidik SMP dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik, Persentase pendidik PAUD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4, Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, Persentase Warga negara Usia 7-12 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI, Persentase Warga negara Usia 13-15 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SMP/MTs, Persentase Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

2. Program Pengembangan Kurikulum

   Program ini diarahkan pada penguatan kurikulum yang inovatif dan adaptif untuk menghasilkan SDM berkarakter, mandiri dan berdaya saing. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase sekolah yang menyelenggarakan kurikulum muatan lokal dan persentase sekolah yang melaksanakan pembelajaran berbasis TIK.

3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

   Program ini diarahkan meningkatkan kualitas tenaga pendidik untuk peningkatan mutu pendidikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.

4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.

   Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola pendidikan untuk pemerataan mutu pendidikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi.

5. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra.

   Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola pendidikan untuk pemerataan mutu pendidikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi.

b. Urusan Kesehatan.

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

   Program ini diarahkan pada peningkatan mutu dan keterjangkauan layanan kesehatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase elemen penilaian akreditasi RS yang memenuhi standar akreditasi, Presentase indikator standar pelayanan minimal (SPM) yang mencapai target , Bed Occupancy Rate (BOR), Average Length of Stay (ALOS), Net Death Rate (NDR), Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM), Persentase cakupan jumlah kelengkapan prasarana dan sarana pendukung pelayanan kesehatan di RSUD Porsea, Persentase Cakupan Jumlah Kelengkapan Alat-, alat Kesehatan di RSUD Porsea, Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Neonatus, Bayi, Balita, Angka Kematian Ibu, Angka Morbiditas, dan pencapaian 12 indicator SPM : Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan kesehatan pada usia produktif, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis, Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

   Program ini diarahkan pada peningkatan mutu dan keterjangkauan layanan kesehatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas, Persentase penggunaan obat rasional dipuskesmas, Persentase pelayanan kefarmasian sesuai standar, Persentase apotek. Took obat. dan toko alat kesehatan yang memiliki izin, Persentase makanan di kantin sekolah dan industri rumah tangga yang memenuhi syarat, Persentase industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat

produksi pangan (SPP-IRT), Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan, Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar, Persentase puskesmas yang memiliki pengolahan limbah standar, Persentase berakses sanitasi layak, Persentase sarana air minum yang sesuai standar.

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.

   Program ini diarahkan pada kegiatan penilaian akreditasi Puskesmas, peningkatan kualitas pengelolaan dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat, pengembangan sistem informasi kesehatan, fasilitasi perijinan tenaga kesehatan melalui pelatihan dan uji kompetensi tenaga kesehatan, fasilitasi penerbitan ijin fasilitasi pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan, Rasio dokter per satuan penduduk (per 10.000 penduduk).

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

   Program ini diarahkan pada peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat secara berkelanjutan, peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta kedaruratan kesehatan dan optimalisasi peran aktif dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu cakupan desa siaga aktif strata mandiri, rasio posyandu per satuan balita.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Program Penyelenggaraan Jalan

   Program ini diarahkan pada peningkatan kinerja pelayanan jalan kabupaten (kemantapan jalan) dengan memperhatikan zona rawan bencana, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah kawasan strategis (simpul produksi pertanian, destinasi prioritas pariwisata, kawasan pinggiran/perbatasan) dan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah afirmasi (desa prioritas kemiskinan tinggi dan desa tertinggal). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (40 km/jam).

2. Program pengelolaan sumber daya air (SDA).

   Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan sumber daya air. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik.

3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

   Program ini diarahkan pada peningkatan akses air minum layak dan aman. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten, persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah

   Program ini diarahkan pada peningkatan akses layanan air limbah layak dan aman. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten.

5. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase

   Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola sistem drainase ramah lingkungan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat, Persentase titik limpasan banjir yang tertangani.

6. Program penataan bangunan dan lingkungannya

   Program ini diarahkan pada peningkatan tata bangunan gedung yang inklusif, sesuai standar keandalan bangunan gedung dan ramah lingkungan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu jumlah bangunan yang bersertifikat laik fungsi, Kepatuhan IMB

7. Program penataan bangunan gedung

   Program ini diarahkan pada pengembangan pusat pertumbuhan wilayah strategis yang membentuk koridor pertumbuhan ekonomi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu jumlah aset lahan strategis yang ditata sesuai rencana teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan, Persentase

jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m).

8. Program pengembangan jasa konstruksi

   Program ini diarahkan pada penguatan profesionalisme jasa konstruksi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Rasio tenaga operator/teknisi/analisis bidang konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi.

9. Program penyelenggaraan penataan ruang

   Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Penetapan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang, Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang.

d. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Program pengembangan perumahan

   Program ini diarahkan pada fasilitasi Penyediaan hunian layak dan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator kinerja Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani, Persentase rumah korban bencana yang ditangani, Persentase rumah yang terkena relokasi program pemerintah yang ditangani, Persentase warga terdampak program (WTP) yang tertangani karena program pemerintah di bidang kawasan permukiman.

2. Program kawasan permukiman.

   Program ini diarahkan pada Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase luas kawasan permukiman kumuh di kabupaten yang ditangani.

3. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh.

   Program ini diarahkan pada pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani.

4. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

   Program ini diarahkan pada Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian di Perumahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu

persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum).

e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

1. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.

   Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya dan partisipasi masyarakat dalam penegakan ketertiban dan keamanan lingkungan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, persentase pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, persentase Penegakan Perda.

2. Program penanggulangan bencana

   Program ini diarahkan pada penguatan kesiapsiagaan dan peningkatan efektivitas mitigasi bencana, peningkatan penyelenggaraan manajemen tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta peringatan dini yang dilakukan secara cepat dan akurat dan Pengembangan sistem pemulihan bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal, persentase desa tangguh bencana.

3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

   Program ini diarahkan pada percepatan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang tangguh. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator kinerja response time kebakaran.

f. Urusan Sosial

1. Program pemberdayaan social

   Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan social Program rehabilitasi sosial

2. Program perlindungan dan jaminan social.

   Program ini diarahkan pada peningkatan peran lembaga dan masyarakat dalam kemandirian PPKS dan penguatan tata kelola sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk ketepatan sasaran dan intervensi program. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase panyandang disabilitas terlantar,

anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM).

3. Program penanganan bencana

   Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat, Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

4. Program pengelolaan taman makam pahlawan

   Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase kelengkapan TMP dalam kondisi baik.

5.2. Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar

a. Urusan Pilihan Ketenagakerjaan

1. Program Penempatan Tenaga Kerja.

   Prorgram ini diarahkan pada pengembangan start up wirausaha baru bagi masyarakat miskin secara berkelanjutan, perluasan dan penempatan lapangan kerja dan penumbuhan peluang kewirausahaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu pertumbuhan jumlah kerjasama penempatan tenaga kerja dengan perusahaan, persentase warga miskin yang mendapatkan pelatihan kerja dan ditempatkan, pertumbuhan jumlah penyediaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan jumlah lembaga penempatan kerja swasta (LPTKS) berizin, persentase kenaikan wirausaha baru, persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha.

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

   Program ini diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja. Progam ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi, persentase instruktur bersertifikat kompetensi, persentase LPKS bersertifikat.

3. Program Hubungan Industrial.

   Program ini diarahkan pada perlindungan tenaga kerja. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase perselisihan kerja yang terselesaikan,

4. Program Perencanaan tenaga kerja

   Program ini diarahkan pada perencanaan tenaga kerja. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase dokumen ketenagakerjaan.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

   Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, persentase anggaran responsive gender, persentase APBDes responsif gender dan PUHA.

2. Program perlindungan perempuan.

   Program ini diarahkan pada peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani, persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif.

3. Program peningkatan kualitas keluarga.

   Program ini diarahkan pada peningkatan Kualias keluarga. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase Keluarga sejahtera.

4. Program pengelolaan sistem data gender dan anak

   Program ini diarahkan pada peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak yang aktif.

5. Program pemenuhan hak anak (PHA)

   Program ini diarahkan pada peningkatan layanan dan fasilitas publik yang ramah anak dan inklusif dan peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase desa ramah anak, Angka melek huruf perempuan usia 15 th ke atas , Persentase Lembaga penyedia layanan PP dan PA.

6. Program perlindungan khusus anak

   Program ini diarahkan pada peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai

indikator kinerja yaitu Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani, persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif.

c. Urusan Pangan.

1. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.

   Program ini diarahkan pada peningkatan ketersediaan, distribusi akses pangan, mutu dan keamanan pangan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu rasio desa berlumbung pangan, persentase desa mandiri pangan.

2. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.

   Program ini diarahkan pada peningkatan ketersediaan, distribusi akses pangan, mutu dan keamanan pangan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu skor PPH, konsumsi pangan per kapita, ketersediaan pangan utama, ketersediaan energi per kapita, ketersediaan protein per kapita.

3. Program penanganan kerawanan pangan.

   Program ini diarahkan pada peningkatan ketersediaan, distribusi akses pangan, mutu dan keamanan pangan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase desa berstatus rawan pangan.

4. Program pengawasan keamanan pangan

   Program ini diarahkan pada peningkatan ketersediaan, distribusi akses pangan, mutu dan keamanan pangan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

d. Urusan pertanahan.

1. Program pengelolaan izin lokasi

   Program ini diarahkan pada penatagunaan aset tanah milik pemerintah daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan.

2. Program penyelesaian sengketa tanah garapan.

   Program ini diarahkan pada penatagunaan aset tanah milik pemerintah daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase penanganan sengketa tanag garapan yang dilakukan melalui mediasi.

3. Program penyelesaian ganti dan santunan tanah untuk pembangunan.
   Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentese masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan.
4. Program redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
5. Program penetapan tanah ulayat.
   Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase tanah ulayat yang ditetapkan.
6. Program pengelolaan tanah kosong.
   Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase tanah ulayat yang ditetapkan.
7. Program pengelolaan izin membuka tanah
   Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentasi usulan membuka tanah yang izinnya diterbitkan
8. Program penatagunaan tanah.
   Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Jumlah lokasi tanah yang administrasinya telah ditata

e. urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup

1. Program perencanaan lingkungan hidup.
   Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase penyelesaian dokumen RPPLH sampai dengan dinyatakan sah atau legal, Persentase ketersediaan dokumen KLHS.
2. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
   Program ini diarahkan pada pengendalian pencemaran air dan udara, optimalisasi perlindungan daerah tangkapan air, pengendalian kerusakan lahan diluar kawasan hutan, pengembangan Geopark Dieng dan pencegahan dan pemulihan kerusakan lahan akibat pertambangan, adaptasi, mitigasi perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara.
3. Program pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota.
   Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase luas ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan.

4. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3).

   Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan limbah B3. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kegiatan usaha yang memenuhi persayaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3.
5. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolan lingkungan hidup (PPLH).

   Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase usaha dan atau kegiatan yang berdampak besar dan penting yang diawasi.
6. Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH.
7. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
8. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup.

   Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase penanganan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan lingkungan
9. Program pengelolaan persampahan.

   Program ini diarahkan pada peningkatan peran masyarakat dalam pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali dan pendaurulangan sampah dan optimalisasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dan limbah B3 yang ramah lingkungan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase pengelolaan sampah.

f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Program pendaftaran penduduk.

   Program ini diarahkan pada pengembangan inovasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Kepemilikan KTP Elektronik.
2. Program pencatatan sipil.

   Program ini diarahkan pada pengembangan inovasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase anak yang memiliki akte kelahiran, Rasio kepemilikan akta kematian, Akte Perkawinan.

3. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

   Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan jumlah lembaga/ perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan, persentase cakupan updating data kependudukan, persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perncanaan makro dan sektoral yang dapat diakses.

4. Program pengelolaan profil kependudukan.

   Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan public. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase OPD dalam penyusunan profil dan agregat.

g. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

1. Program penataan desa

   Program ini diarahkan peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur skala perdesaan dan distribusi pusat pertumbuhan ke wilayah belum berkembang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu, persentase fasilitas umum skala desa dalam kondisi baik.

2. Program peningkatan kerjasama desa.

   Program ini diarahkan pada pengembangan kawasan perdesaan dan perbatasan prioritas. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang terbentuk.

3. Program administrasi pemerintahan desa.

   Program ini diarahkan pada penguatan tata kelola administrasi pembangunan desa. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase rata-rata PADes terhadap total pendapatan desa, persentase BUMDes aktif, persentase BUMDes maju,

4. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

   Program ini diarahkan pada optimalisasi pengelolaan bumdes dan potensi ekonomi desa, penguatan tata kelola pembangunan desa dan peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan pemerintahan dan masyarakat desa. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase PKK aktif, persentase Posyandu aktif,

persentase serapan tenaga kerja lokal dalam kegiatan usaha produktif desa, Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa.

h. urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

1. Program pengendalian penduduk

   Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas akses serta keterjangkauan layanan KB yang merata dan berkeadilan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan reproduksi remaja. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15- 49 Tahun.

2. Program pembinaan keluarga berencana (KB).

   Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas akses serta keterjangkauan layanan KB yang merata dan berkeadilan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator kinerja yaitu angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49, cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need), persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

3. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS).

   Program ini diarahkan pada peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan peningkatan kualitas layanan kesehatan reproduksi remaja. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB, cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB, Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB, rata-rata usia kawin pertama wanita, Rata-rata usia melahirkan pertama perempuan, % Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun %, Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/ mahasiswa, Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri, Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19.

i. Urusan Perhubungan.

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

   Program ini diarahkan pada peningkatan dukungan fasilitas kelengkapan jalan, peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan jalan dan pengujian sertapenyediaan prasarana dan sarana utilitas yang terpadu dan berkelanjutan. Program inidilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Indeks Konektivitas Jalan Kabupaten / kota meliputi indicator Persentase Fasilitas perlengkapan jalan .

2. Program Pengelolaan Pelayaran.

   Program ini diarahkan pada peningkatan konektivitas wilayah di sekitar kawasan perairan aduk. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu IndeksKonektivitas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

j. urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

1. Program pengelolaan informasi dan komunikasi public.

   Program ini diarahkan pada peningkatan layanan dan pemanfaatan komunikasi informasi publik. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten.

2. Program pengelolaan aplikasi informatika.

   Program ini diarahkan pada peningkatan layanan dan pemanfaatan komunikasi informasi publik, implementasi e-goverment untuk mendukung smart city dan pengelolaan data statistik dan keamanan sistem informasi pemerintah daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Indeks Smart City, nilai SPBE.

k. Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

1. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi

   Program ini diarahkan pada penguatan kelembagaan Koperasi/ IKM/ UMKM dan perluasan kemitraan usaha. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator kinerja yaitu Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten.

2. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi.

   Program ini diarahkan pada penguatan kelembagaan koperasi/IKM/UMKM dan perluasan kemitraan usaha dan peningkatan kapasitas usaha dan kualitas produk. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

3. Program pendidikan dan latihan perkoperasian

   Program ini diarahkan pada penguatan kelembagaan koperasi/IKM/UMKM dan perluasan kemitraan usaha dan peningkatan kapasitas usaha dan kualitas produk. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase

koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten.

4. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi

   Program ini diarahkan pada penguatan kelembagaan Koperasi/IKM/UMKM dan perluasan kemitraan usaha. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator kinerja yaitu Persentase Koperasi Yang Berkualitas

5. Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM).

   Program ini diarahkan pada penguatan kelembagaan koperasi/industri kecil menengah /industri mikro kecil menengah dan perluasan kemitraan usaha, peningkatan kapasitas usaha dan kualitas produk, peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk dan peningkatan akses permodalan, pengelolaan usaha, pemasaran bagi masyarakat miskin. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persen Usaha Mikro dan Kecil.

6. Program pengembangan UMKM

   Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha dan kualitas produk. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha.

l. urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

   Program ini diarahkan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu nilai realisasi investasi PMDN dan PMA, pertumbuhan nilai investasi di bidang pertanian, pertumbuhan nilai investasi di bidang pariwisata.

2. Program Promosi Penanaman Modal

   Program ini diarahkan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu pertumbuhan jumlah kemitraan/ kerjasama investasi, pertumbuhan jumlah kemitraan investasi di bidang pertanian dan pariwisata.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

   Program ini diarahkan pada percepatan layanan perizinan satu pintu. Progam ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pelayanan komitmen perizinan di satu pintu.

4. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

   Program ini diarahkan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase usaha yang berizin sesuai peruntukannya.

5. Program pengelolaan data dan istem informasi penanaman modal

   Program ini diarahkan pada percepatan layanan perizinan satu pintu. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pengelolaan data/informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi.

m. urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga

1. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.

   Program ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan mencapai kapasitas pemuda serta kemitraan. Program ini dilaksanakan untuk indikator kinerja yaitu persentase organisasi pemuda yang aktif.

2. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan

   Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan sistem pembinaan olahraga prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase Cakupan pelatih yang bersertifikasi, persentase cakupan pembinaan atlet oleh organisasi olahraga, atlit berprestasi tingkat provinsi ,nasional dan internasional

3. Program pengembangan kapasitas kepramukaan

   Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan sistem pembinaan kepramukaan . Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase Persentase organisasi pramuka yang aktif.

n. urusan pemerintahan bidang statistic

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

   Program ini diarahkan pada pengelolaan data statistik dan keamanan sistem informasi pemerintah daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

o. urusan pemerintahan bidang persandian

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

   Program ini diarahkan pada pengelolaan data statistik dan keamanan sistem informasi pemerintah daerah. Program ini dilaksanakan untuk

mencapai indikator kinerja yaitu Persentase persandian yang dilakukan terhadap organisasi perangkat daerah.

p. urusan pemerintahan bidang kebudayaan

1. Program pengembangan kebudayaan.

   Program ini diarahkan pada optimalisasi pengelolaan, pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan. Pogram ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan penyelenggaraan festival seni dan budaya

2. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

   Program ini diarahkan pada optimalisasi pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya berbasis kearifan lokal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

q. urusan pemerintahan bidang kearsipan

1. Program pengelolaan arsip

   Program ini diarahkan pada peningkatan akses dan layanan arsip, dan peningkatan upaya pelestarian pengembangan dan pemanfaatan arsip. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase pengelolaan arsip secara baku, persentase perangkat daerah dengan pengelolaan arsip kategori baik, persentase desa dengan pengelolaan arsip kategori baik, persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan.

2. Program perlindungan dan Penyelamatan arsip

   Program ini diarahkan pada peningkatan upaya pelestarian pengembangan dan pemanfaatan arsip. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase arsip yang terlindungi.

5.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan

1. Program pengelolaan perikanan tangkap

   Program ini diarahkan pada peningkatan produksi perikanan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu cakupan Bina Kelompok Nelayan

2. Pogram pengelolaan perikanan Budidaya

   Program ini diarahkan pada peningkatan SDM dan teknologi perikanan dan peningkatan sarpras, budidaya dan produksi perikanan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator yaitu Pertumbuhan jumlah produksi benih ikan, Pertumbuhan produksi perikanan budidaya, Pertumbuhan jumlah kelompok tani ikan yang aktif, Pertumbuhan luas lahan perikanan, Persentase UPR (Unit Pembenihan Rakyat) aktif.

b. urusan pemerintahan bidang pariwisata

1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata

   Program ini diarahkan pada peningkatan daya tarik, sarpras dan promosi pariwisata dan pengembangan desa wisata berbasis agroindustri lokal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Lama Kunjungan Wisata.

2. Program pemasaran pariwisata

   Program ini diarahkan pada peningkatan daya tarik, sarpras dan promosi pariwisata. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan, pertumbuhan jumlah kemitraan pariwisata, Pertumbuhan event wisata tingkat nasional.

3. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

   Program ini diarahkan pada pengembangan ekonomi kreatif. Progam ini dilakasanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Jumlah Produk Ekonomi Kreatif.

4. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

   Program ini diarahkan pada peningkatan kelembagaan dan kapasitas pelaku pariwisata/ ekonomi kreatif melalui standarisasi dan sertifikasi. Program ini dilakasanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang

tersertifikasi, persentase industry pariwisata dan lembaga ekonomi kreatif yang tersertifikasi.

c. urusan pemerintahan bidang pertanian

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

   Program ini diarahkan pada peningkatan akses saprodi melalui pengembangan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Produksi Pertanian dan Peternakan

2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

   Program ini diarahkan pada peningkatan akses saprodi melalui pengembangan prasarana pertanian. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Produksi Pertanian dan Peternakan

3. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

   Program ini diarahkan pada Peningkatan pengendalian kesehatan hewan melalui penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan darah wabah penyakit hewan menular. Program ini untuk mencapai indicator kinerja yaitu : Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

4. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

   Program ini diarahkan pada peningkatan akses saprodi melalui pengembangan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Jumlah kejadian/kasus dari organisme pengganggu tanaman.

5. Program penyuluhan pertanian

   Program ini diarahkan pada peningkatan kelembagaan dan kapasitas petani, peningkatan keterampilan petani ruta miskin/buruh tani dan peningkatan partisipasi petani ruta miskin/buruh tani dalam kelembagaan petani. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase Gapoktan aktif, Persentase kelompok tani aktif.

d. urusan pemerintahan bidang perdagangan

1. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan

   Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan konsumen. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu

persentase persen pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan(IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

2. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan

   Program ini diarahkan pada penataan sistem dan sarana distribusi perdagangan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persen Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat

3. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

   Program ini diarahkan pada penataan sistem dan sarana distribusi perdagangan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persen Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok

4. Program standardisasi dan perlindungan konsumen.

   Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan konsumen. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitupersen Alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku.

5. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

   Program ini diarahkan pada promosi dan proteksi produk lokal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat Regional danTingkat Nasional.

e. urusan pemerintahan bidang perindustrian

1. Program perencanaan dan pembangunan industry

   Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha dan kualitas produk. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Pertumbuhan Industri.

2. Program pengendalian izin usaha industry.

   Program ini diarahkan pada peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persen Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

3. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional.

   Program ini diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk melalui integrasi usaha dari hulu sampai hilir berbasis kawasan, potensi lokal dan agroindustri. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini.

5.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

1. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

Program ini diarahkan pada peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum untuk kepastian hukum, peningkatan fungsi koordinasi dan komunikasi antar lembaga, dan peningkatan tata kelola penyelenggaraan 6 (enam) urusan dasar wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase rumusan kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesra.

2. Program perekonomian dan pembangunan

Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan pengadaan barang jasa yang mendukung efisiensi, efektivitas dan transparansi, peningkatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, dan pengembangan inovasi kebijakan dalam skema pembiayaan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase rumusan kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan.

b. Sekretariat DPRD.

Program ini diarahkan pada peningkatan koordinasi dan layanan DPRD bagi mitra kerja/pemangku kepentingan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator kinerja Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

5.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

   Program ini diarahkan pada penguatan proses perencanaan yang holistik, integratif, tematik dan spasial. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu, persentase tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu, persentase kesesuaian program RKPD dan RPJMD, persentase keterisian data capaian indikator RPJMD

2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

   Program ini diarahkan pada penguatan proses perencanaan yang holistik, integratif, tematik dan spasial, dan penguatan sinergi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase kesesuaian program RPJMD dengan RKPD bidang perekonomian dan SDA, persentase kesesuaian program RPJMD dengan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, persentase kesesuaian program RPJMD dengan RKPD bidang Infrastruktur dan kewilayahan.

b. Keuangan

1. Program pengelolaan keuangan daerah.

   Program ini diarahkan pada peningkatan efektivitas pengelolaan Keuangan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Deviasi Realisasi Belanja terhadap total dalam APBD.

2. Program pengelolaan barang milik daerah.

   Program ini diarahkan pada pendayagunaan aset daerah untuk peningkatan pendapatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Assets Management (Persentase OPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu, Persentase penurunan aset bermasalah, Persentase penatausahaan aset tetap pada OPD, Persentase penyelesaian dokumen kepemilikan aset tetap, Persentase penggunaan aset tetap sesuai tupoksi.

3. Program pengelolaan pendapatan daerah.

   Program ini diarahkan pada digitalisasi pengelolaan administrasi pendapatan daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD.

c. Kepegawaian

1. Program kepegawaian daerah.

   Program ini diarahkan pada integrasi sistem layanan kepegawaian dan implementasi manajemen ASN. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Indeks profesionalitas ASN meliputi persentase layanan kepegawaian yang berbasis digital, persentase layanan kepegawaian less paper, persentase penurunan kasus pelanggaran disiplin ASN, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, persentase dokumen perencanaan kepegawaian.

d. Pendidikan dan pelatihan

1. Program pengembangan sumber daya manusia.

   Program ini diarahkan pada integrasi Peningkatan Kompetensi ASN. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase asn yang mengikuti pengembangan kompetensi.

e. Penelitian dan pengembangan

1. Program penelitian dan pengembangan daerah

   Program ini diarahkan pada peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, persentase hasil kreativitas dan inovasi yang terkomersialisasi.

5.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Inspektorat Daerah

1. Program penyelenggaraan pengawasan.

   Program ini diarahkan pada peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan.

2. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

   Program ini diarahkan pada peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase APIP yang memiliki sertifikat profesi, persen PD yang mendapat pendampingan bidang pengawasan.

5.7. Unsur Kewilayahan.

a. Kecamatan

   a. Program penyelenggaraan pemerintah dan Pelayanan publik

      Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan.

   b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

      Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.

   c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.

      Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persen penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan.

   d. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

      Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum.

   e. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

      Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan desa.

5.8. **Unsur Pemerintahan Umum**

a. Kesatuan bangsa dan politik.

   1. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.

      Program ini diarahkan pada peningkatan peran organisasi masyarakat sipil. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persen Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan

2. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.

   Program ini diarahkan pada penguatan pendidikan politik yang berkeadilan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Rasio masyarakat yang mendapat pendidikan politik per 10.000 penduduk.

3. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

   Program ini diarahkan pada penguatan sinergi dalam memelihara keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persen Pertambahan Ormas.

   yaitu

4. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya

   Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persen Penurunan jumlah kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika

5. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social

   Program ini diarahkan pada peningkatan peran organisasi masyarakat sipil untuk penguatan karakter, dan peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini keamanan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Penyelesaian Konflik Sosial.

5.9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Non Urusan)

Program ini dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah untuk mencapai indicator kinerja yaitu indeks kepuasan masyarakat, Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik, Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja, Persentase perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan (Renja PD) tepat waktu, Persentase perangkat daerah menyusun dokumen evaluasi tepat waktu.

Berikut dapat disajikan kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Toba tahun 2021-2026 atas dasar proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan indikasi rencana program prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Tabel VII-1 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah

No.	Uraian	PROYEKSI					
		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan	660.959.195.509,00	710.870.716.882,41	713.798.115.797,75	727.122.135.046,83	738.918.241.109,77	828.347.272.171,85
2	**BELANJA DAERAH**	**660.959.195.509,00**	**710.870.716.882,40**	**713.798.115.797,75**	**727.122.135.046,82**	**738.918.241.109,77**	**828.347.272.171,86**
	Belanja Operasi	**252.524.674.504,00**	**294.305.039.782,20**	**289.874.828.241,35**	**299.566.725.679,60**	**310.247.409.404,80**	**340.928.093.130,00**
	Belanja Barang dan Jasa	213.613.674.504,00	255.394.039.782,20	250.963.828.241,35	260.655.725.679,60	271.336.409.404,80	302.017.093.130,00
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	38.581.000.000,00	38.581.000.000,00	38.581.000.000,00	38.581.000.000,00	38.581.000.000,00	38.581.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	330.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00
	Belanja Modal	**142.843.951.424,00**	**149.986.148.995,20**	**157.128.346.566,40**	**160.434.754.513,60**	**161.294.244.802,68**	**219.648.699.318,36**
	Belanja Modal Tanah	1.165.462.800,00	1.165.462.800,00	1.165.462.800,00	1.165.462.800,00	1.165.462.800,00	1.165.462.800,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.374.992.121,00	24.678.100.000,00	25.678.100.000,00	26.678.100.000,00	27.678.100.000,00	28.678.100.000,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.360.864.954,00	30.360.864.954,00	33.360.864.954,00	33.525.075.330,00	30.242.368.047,88	28.360.864.954,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	90.469.109.139,00	92.469.109.139,00	94.469.109.139,00	95.469.109.139,00	98.469.109.139,00	156.562.869.177,36
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	473.522.410,00	1.312.612.102,20	2.454.809.673,40	3.597.007.244,60	3.739.204.815,80	4.881.402.387,00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Tidak Terduga	**8.300.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**
	Belanja Tidak Terduga	8.300.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Belanja Transfer	**257.290.569.581,00**	**256.579.528.105,00**	**256.794.940.990,00**	**257.120.654.853,62**	**257.376.586.902,29**	**257.770.479.723,50**
	Belanja Bagi Hasil	254.190.069.581,00	253.000.000.000,00	253.000.000.000,00	253.000.000.000,00	253.000.000.000,00	253.000.000.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan	3.100.500.000,00	3.579.528.105,00	3.794.940.990,00	4.120.654.853,62	4.376.586.902,29	4.770.479.723,50

Tabel VII.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Toba

Kode	Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN TARGET PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
A	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**182.256.090.389**		**170.854.998.984**		**166.542.540.898**		**170.072.376.033**		**201.011.198.872**		
1	**urusan pemerintahan bidang pendidikan**					**24.197.601.488**		**23.989.540.997**		**24.826.830.129**		**26.415.327.325**		**44.536.959.541**		
1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni	Persen	96,18	100	22.797.601.488	100	21.924.540.997	100	22.312.830.129	100	22.965.327.325	100	37.175.959.541	100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
1.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	52,00	100	200.000.000	100	270.000.000	100	214.000.000	100	600.000.000	100	1.540.000.000	100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
1.3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	76,00	79	1.000.000.000	80	1.500.000.000	82	2.000.000.000	85	2.500.000.000	87	5.000.000.000	87,00	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
1.4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki AKREDITASI	Persen	67,87	70	100.000.000	72,12	100.000.000	76,38	100.000.000	82,76	100.000.000	91,21	121.000.000	91,21	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
1.5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase sekolah yang menerapkan bahasa dan sastra daerah	Persen	100,00	100	100.000.000	100	195.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	700.000.000	100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
2	**urusan pemerintahan bidang kesehatan**					**39.933.342.795**		**32.314.830.964**		**26.070.482.918**		**25.714.669.186**		**27.702.215.287**		
2.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan Kesehatan	Persen	100,00	100	39.650.872.795	100	31.161.830.964	100	25.632.482.918	100	25.298.669.186	100	26.892.215.287	100,00	DINAS KESEHATAN
					100	33.006.379.000	100	27.998.756.800	100	22.769.625.000	100	23.126.833.750	100	24.190.142.000	100,00	DINKES
						6.644.493.795		1.724.879.376		2.798.917.851		3.451.840.586		3.321.929.037		RSUD
2.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	persen SDM Kesehatan yang berkompetensi sesuai dengan standart.	Persen	77,90	78,10	70.000.000	78,49	380.000.000	79,58	120.000.000	78,87	70.000.000	79,76	380.000.000	79,76	DINAS KESEHATAN
2.3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	persen data izin sarana pelayanan kefarmasian serta produk IRTP yang memenuhi syarat sesuai dengan standar	Persen	41,38	54,40	167.470.000	60	268.000.000	65,18518519	118.000.000	70	166.000.000	75,86206897	240.000.000	75,86	DINAS KESEHATAN
2.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK	Persen	8	8,20	45.000.000	8,20	505.000.000	8,20	200.000.000	8,20	180.000.000	8,20	190.000.000	8,20	DINAS KESEHATAN
3	**urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang**					**94.591.289.846**		**91.033.509.915**		**92.640.688.605**		**94.214.790.383**		**102.459.523.752**		
3.1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	93,36	95,56	20.600.000.000	96,67	20.931.614.083	97,78	21.301.157.607	98,89	21.663.095.656	100	23.558.832.482	100,00	DINAS PU DAN TATA RUANG
3.2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Persen	73,68	75,76	5.805.000.000	76,59	3.238.080.919	77,43	3.295.248.600	78,29	3.351.239.729	79,22	3.644.506.613	79,22	DINAS PU DAN TATA RUANG
3.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	80,00	80,43	2.365.000.000	80,79	2.294.066.168	81,17	2.334.567.454	81,55	2.374.235.194	81,96	2.582.004.442	81,96	DINAS PU DAN TATA RUANG
3.4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	20,00	20,09	2.065.000.000	20,13	1.314.397.814	20,17	1.337.603.249	20,21	1.360.331.098	20,25	1.479.373.630	20,25	DINAS PU DAN TATA RUANG

Kode	Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN TARGET PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentasi bangunan gedung pemerintah yang telah dibangun	Persen	50,00	52,00	1.805.000.000	54,00	1.186.593.356	56,00	1.207.542.428	58,00	1.228.060.353	60,00	1.335.527.876	60,00	DINAS PU DAN TATA RUANG
3.6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	rasio Kepatuhan IMB	Persen	100	100	445.517.846	100	385.757.958	100	392.568.439	100	399.238.755	100	434.176.126	100	DINAS PU DAN TATA RUANG
3.7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	42,37	50,36	59.540.772.000	53,58	60.499.245.714	56,79	61.567.347.983	60,01	62.613.467.926	63,23	68.092.770.552	63,23	DINAS PU DAN TATA RUANG
3.8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga/operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikasi	Persen	-	20,00	415.000.000	40,00	421.680.574	60,00	429.125.262	80,00	436.416.733	100	474.607.548	100	DINAS PU DAN TATA RUANG
3.9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	100,00	100,00	1.550.000.000	100,00	762.073.328	100,00	775.527.583	100,00	788.704.939	100,00	857.724.484	100,00	DINAS PU DAN TATA RUANG
4	**urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman**		Persen			**13.970.000.000**		**14.100.000.000**		**14.150.000.000**		**14.570.000.000**		**16.200.000.000**		
4.1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana	Persen	NA	100	850.000.000	100	850.000.000	100	1.050.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	5,42	4,99	7.720.000.000	4,99	7.850.000.000	4,99	7.650.000.000	4,99	7.520.000.000	4,99	9.150.000.000	36,35	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	persentase Rumah Tidak layak huni	Persen	24,94	25,25	3.800.000.000	25,56	4.000.000.000	25,94	4.000.000.000	26,36	4.750.000.000	26,70	4.750.000.000	26,70	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persentase rumah yang terfasilitasi PSU	Persen	60,00	60,21	1.600.000.000	60,42	1.400.000.000	60,63	1.450.000.000	60,84	1.450.000.000	61,05	1.450.000.000	61,05	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	**urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat**					**5.761.398.620**		**5.563.879.460**		**4.892.791.979**		**5.119.577.422**		**5.594.778.203**		
5.1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Persen	85,00	86	865.000.000	88	1.622.750.000	90	1.507.387.500	93	1.549.006.875	95	2.048.119.765	95,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
5.2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanggulangan bencana.	Persen	70,00	100	2.590.000.000	100	2.907.410.909	100	2.300.000.000	100	2.430.895.845	100	2.350.000.000	100	BPBD
5.3	PROGRAM PENCEGAHAN, ENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan penyelematan dan evakuasi korban kebakaran.	Persen	100	100	2.306.398.620	100	1.033.718.551	100	1.085.404.479	100	1.139.674.702	100	1.196.658.438	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6	**urusan pemerintahan bidang sosial**					**3.802.457.640**		**3.853.237.648**		**3.961.747.267**		**4.038.011.717**		**4.517.722.090**		
6.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persen	100	100	797.457.640	100	799.457.640	100	812.457.640	100	828.722.090	100	861.722.090	100	DINAS SOSIAL
6.2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase panyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	Persen	19,85	19,85	1.045.000.000	24,76	1.046.000.000	32,92	1.047.509.619	49,07	1.061.509.619	96,34	1.181.000.000	96,34	DINAS SOSIAL
6.3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	persen PMKS yang tertangani	Persen	12,60	14,5	980.000.000	23,48	1.012.780.008	31,23	1.047.780.008	45,56	1.054.780.008	84,68	1.140.000.000	84,68	DINAS SOSIAL

Kode		Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN TARGET PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	6.4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah.	Persen	76,80	100	865.000.000	100	875.000.000	100	929.000.000	100	963.000.000	100	1.190.000.000	100,00	DINAS SOSIAL
	6.5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	persen taman makam pahlawan yang terpelihara	Persen	100	100	115.000.000	100	120.000.000	100	125.000.000	100	130.000.000	100	145.000.000	100	DINAS SOSIAL
	B	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**51.510.445.366**		**51.871.617.823**		**50.068.776.935**		**49.516.100.730**		**54.630.460.528**		
	1	**urusan pemerintahan bidang tenaga kerja**					**962.425.910**		**1.182.671.300**		**1.307.171.300**		**1.459.746.300**		**1.546.400.050**		
	1.1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persen	75,00		-		-	75	75.000.000	75	60.000.000	75	100.000.000	75,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	1.2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi.	Persen	0,35	1,38	790.220.300	2,42	975.220.300	3,45	980.220.300	4,49	1.106.220.300	5,53	1.111.220.300	5,53	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	1.3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	Persen	50,00	70	50.000.000	80	51.000.000	90	95.500.000	100	137.075.000	100	178.728.750	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	1.4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	Persen	18,00	24	122.205.610	30	156.451.000	35	156.451.000	41	156.451.000	47	156.451.000	47,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	**urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**					**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		
	2.1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	60	70	175.000.000	80	175.000.000	85	175.000.000	90	175.000.000	95	175.000.000	95	Dinas PMDP dan PA
	2.2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persen	80,00	100	375.000.000	100	325.000.000	100	305.000.000	100	295.000.000	100	275.000.000	100	Dinas PMDP dan PA
	2.4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	persen ketersediaan data gender dan anak	Persen	5	15,91	70.000.000	27,27	70.000.000	38,64	70.000.000	52,27	70.000.000	100	70.000.000	100	Dinas PMDP dan PA
	2.5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelurahan / Desa layak anak	Persen	4,10	19,67	280.000.000	20,49	325.000.000	21,31	340.000.000	22,54	345.000.000	23,77	360.000.000	23,77	Dinas PMDP dan PA
	2.6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.000.000	100	115.000.000	100	120.000.000	100	Dinas PMDP dan PA
	3	**urusan pemerintahan bidang pangan**					**2.200.000.000**		**2.124.000.000**		**3.070.000.000**		**1.782.000.000**		**1.917.000.000**		

Kode	Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN TARGET PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	persen sarpras Lumbung Pangan dalam kondisi baik	Persen	36,17	39,6	180.000.000	44,68	273.000.000	48,93	450.000.000	53,19	180.000.000	57,44	180.000.000	57,44	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penguatan Cadangan Pangan	Persen	0,00	5	1.330.000.000	10	1.281.000.000	15	1.430.000.000	20	932.000.000	25	967.000.000	25,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	persen Desa Rawan Pangan yang tertangani	Persen	23,10	38,46	640.000.000	53,84	500.000.000	69,23	1.120.000.000	84,61	600.000.000	100	700.000.000	100	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	0,00	55,7	50.000.000	60	70.000.000	65,7	70.000.000	75,7	70.000.000	85,7	70.000.000	85,70	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
4	**urusan pemerintahan bidang pertanahan**					**1.895.000.000**		**1.925.505.276**		**1.959.499.693**		**1.992.794.479**		**2.294.211.802**		
4.1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	NA	1,17	115.000.000	1,17	50.863.422	1,17	51.797.287	1,17	52.724.230	1,17	57.338.126	100	DINAS PU DAN TATA RUANG
4.2	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	persen luas tanah yang diganti rugi	Persen	NA	10	1.090.000.000	10	1.151.078.432	10	1.150.511.118	10	1.149.264.018	10	1.249.836.076	100	DINAS PU DAN TATA RUANG
4.3	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya tanah Objek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimun dan tanah absente	Persen	NA	4	275.000.000	4	297.563.422	4	320.191.287	4	342.806.230	4	499.833.133	4,00	DINAS PU DAN TATA RUANG
4.4	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.	Persen	NA	2	90.000.000	2	94.000.000	2	98.000.000	2	102.000.000	2	110.926.017	2,00	DINAS PU DAN TATA RUANG
4.5	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	NA	100	325.000.000	100	332.000.000	100	339.000.000	100	346.000.000	100	376.278.449	100	DINAS PU DAN TATA RUANG
5	**urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup**					**3.955.000.000**		**3.908.750.000**		**4.011.762.500**		**4.185.862.000**		**4.603.550.000**		
5.1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup	dokumen	1	1	140.000.000		-	2	487.687.500	2	215.000.000	3	335.000.000	9	Dinas Lingkungan Hidup
5.2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Koefisien kualitas air dan udara	nilai	64,05	64,14	220.000.000	64,24	237.000.000	64,33	245.000.000	64,33	404.100.000	64,33	408.000.000	64,33	Dinas Lingkungan Hidup
5.3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KAB/KOTA	Indeks kualitas tutupan lahan	Nilai	61.10	62.42	240.000.000	63.75	550.000.000	65.08	220.000.000	65.08	407.000.000	65.08	360.000.000	65.08	Dinas Lingkungan Hidup
5.4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian limbah B3	Persen	0	0	-	100	31.500.000	100	33.075.000	100	36.000.000	100	38.000.000	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
5.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persen	70	100	240.000.000	100	383.250.000	100	383.000.000	100	408.762.000	100	409.550.000	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
5.6	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Penetapan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di kabupaten/kota	MHA	0	2	330.000.000	2	285.000.000	2	305.000.000	2	312.000.000	2	340.000.000	10	Dinas Lingkungan Hidup

Kode		Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN TARGET PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	5.7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah SDM lingkungan hidup	orang	180	200	200.000.000	50	70.000.000	70	150.000.000	100	100.000.000	100	160.000.000	520	Dinas Lingkungan Hidup
	5.8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Tersedianya pemberian penghargaan lingkungan hidup	orang/lembaga				3	100.000.000			3	100.000.000	2	120.000.000	8	Dinas Lingkungan Hidup
	5.9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persen	60	100	50.000.000	100	57.000.000	100	55.000.000	100	58.000.000	100	60.000.000	100	Dinas Lingkungan Hidup
	5.10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Persen	74	75	2.535.000.000	76	2.195.000.000	77	2.133.000.000	78	2.145.000.000	79	2.373.000.000	79	Dinas Lingkungan Hidup
	6	**urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil**					**1.818.000.000**		**1.809.000.000**		**2.095.775.200**		**2.083.458.069**		**2.417.906.715**		
	6.1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	98,00	100	798.000.000	100	927.500.000	100	1.190.775.200	100	1.207.710.502	100	1.386.750.000	100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	6.2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan akte kelahiran	Persen	100,00	100	420.000.000	100	438.000.000	100	444.000.000	100	449.000.000	100	545.056.715	100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	6.3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	100,00	100	490.000.000	100	292.500.000	100	309.000.000	100	315.500.000	100	332.100.000	100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	6.4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	ketersediaan database Kepedudukan	Persen	100,00	100	110.000.000	100	151.000.000	100	152.000.000	100	111.247.567	100	154.000.000	100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	7	**urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa**					**6.252.696.950**		**6.067.045.628**		**5.865.339.850**		**5.619.978.898**		**6.139.374.953**		
	7.1	PROGRAM PENATAAN DESA	persen Desa Berkembang	Persen	7,36	14,72	133.000.000	22,08	83.000.000	29,44	80.000.000	36,80	80.000.000	44,16	80.000.000	44,16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	7.2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase peningkatan Kerjasama Desa	Persen	5,63	6,49	50.000.000	7,36	50.000.000	8,23	45.000.000	9,09	40.000.000	9,96	40.000.000	9,96	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	7.3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	persen desa tertib administrasi	Persen	100	100	4.137.096.223	100	4.147.096.221	100	4.027.096.221	100	3.907.096.221	100	4.147.096.221	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN TARGET PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
7.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan MHA	Persen	85,16	2,97	1.932.600.727	2,97	1.786.949.407	2,97	1.713.243.629	2,97	1.592.882.677	2,97	1.872.278.732	2,97	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8	**urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana**					**3.901.404.598**		**3.346.000.000**		**3.287.950.000**		**3.631.494.982**		**3.990.876.620**		
8.1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15- 49 Tahun.	Rata-rata Anak per Wanita	3,61	3,59	370.000.000	3,58	231.000.000	3,57	242.550.000	3,56	254.677.500	3,55	267.411.375	3,55	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**
8.2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmeet need)	Persen	12,30	12,1	2.681.404.598	11,9	2.335.000.000	11,8	2.388.900.000	11,7	2.682.730.000	11,7	3.008.710.245	11,70	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**
8.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	29,67	29,1	850.000.000	29,05	780.000.000	29	656.500.000	28,95	694.087.482	28,9	714.755.000	28,90	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**
9	**urusan pemerintahan bidang perhubungan**					**8.800.000.000**		**8.867.965.103**		**8.860.000.000**		**9.025.043.463**		**9.100.000.000**		
9.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Konektivitas Jalan Kabupaten / kota	indeks	20/25	20/25	8.620.000.000	20/25	8.677.965.103	20/25	8.670.000.000	20/25	8.825.043.463	20/25	8.900.000.000	20/25	Dinas Perhubungan
9.2	Program Pengelolaan Pelayaran	Indeks Konektivitas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	indeks	11/16	11/16	180.000.000	11/16	190.000.000	11/16	190.000.000	11/16	200.000.000	11/16	200.000.000	11/16	Dinas Perhubungan
10	**urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika**					**11.215.000.000**		**10.255.000.000**		**9.655.000.000**		**9.405.703.428**		**9.102.784.375**		
10.1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persen Masyarakat yang menjadi sasaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten	persen	67,60	70,11	1.205.000.000	70,16	800.000.000	70,20	720.000.000	70,25	1.608.365.928	70,30	900.000.000	70,30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10.2	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	60,00	94	10.010.000.000	100	9.455.000.000	100	8.935.000.000	100	7.797.337.500	100	8.202.784.375	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11	**urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah**					**1.608.500.000**		**1.723.050.000**		**1.806.209.000**		**2.131.900.000**		**2.279.400.000**		
11.1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	Persen	12,56	12,56	180.000.000	12,56	105.000.000	12,56	200.000.000	12,56	100.000.000	12,56	100.000.000	12,56	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
11.2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persen	100	100	70.000.000							100	70.000.000	100	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
11.3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	Persen	6,73	8,97	200.000.000	8,97	315.000.000	11,21	200.000.000	13,45	200.000.000	13,45	200.000.000	13,45	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
11.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase Koperasi Yang Berkualitas	Persen	4,48	5,61	100.000.000	5,61	105.000.000	6,73	200.000.000	6,73	550.000.000	6,73	577.500.000	35,87	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN TARGET PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
11.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	6,98	1,80	441.000.000	1,80	618.050.000	1,80	706.209.000	1,80	781.900.000	1,80	731.900.000	15,97	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
11.6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	Persen	5,10	5,87	617.500.000	6,12	580.000.000	6,38	500.000.000	6,63	500.000.000	6,63	600.000.000	6,63	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
12	**urusan pemerintahan bidang penanaman modal**					**604.417.908**		**495.630.516**		**457.069.392**		**473.619.111**		**490.996.317**		
12.1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	persentase peningkatan investasi	persen	0,00	1	259.993.000	1	292.493.000	1	86.625.000	1	88.200.000	1	89.853.750	5	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
12.2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	282,00	1	70.950.000			2	70.950.000	2	70.950.000	2	70.950.000	289	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
12.3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP	persen	90,00	100	89.522.750	100	89.997.750	100	94.497.638	100	99.222.520	100	104.183.646	100	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
12.4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Badan Usaha yg dikendalikan	Badan Usaha	0,00	16	107.752.158	20	113.139.766	25	138.796.754	30	145.736.591	35	153.023.421	35	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
12.5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	aplikasi	0,00	1	76.200.000	0	-	1	66.200.000	1	69.510.000	1	72.985.500	6	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
13	**urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga**					**273.000.000**		**2.829.000.000**		**1.087.000.000**		**1.071.000.000**		**3.061.000.000**		
13.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	10,75	12,75	130.000.000	14,75	210.000.000	16,75	442.000.000	18,75	348.000.000	20,75	421.000.000	20,75	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
13.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda	persen	46,70	56,60	133.000.000	70,75	2.344.000.000	80,19	406.000.000	84,91	654.000.000	94,34	2.381.000.000	94,34	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
13.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	persentase organisasi pramuka yang aktif	persen	80,00	100	10.000.000	100	275.000.000	100	239.000.000	100	69.000.000	100	259.000.000	100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

Kode	Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN TARGET PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
14	**urusan pemerintahan bidang statistik**					**250.000.000**		**485.000.000**		**540.000.000**		**630.000.000**		**1.000.000.000**		
14.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	0,00	100	250.000.000	100	485.000.000	100	540.000.000	100	630.000.000	100	1.000.000.000	100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15	**urusan pemerintahan bidang persandian**					**250.000.000**		**530.000.000**		**600.000.000**		**605.000.000**		**850.000.000**		
15.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan informasi pemerintahan	Persen	60,00	60	250.000.000	70	530.000.000	80	600.000.000	90	605.000.000	100	850.000.000	100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
16	**urusan pemerintahan bidang kebudayaan**					**4.880.000.000**		**3.668.000.000**		**2.800.000.000**		**2.750.000.000**		**3.050.000.000**		
16.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Persen	19,00	40	4.630.000.000	45	2.893.000.000	50	2.200.000.000	55	2.100.000.000	60	2.200.000.000	47,50	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
16.2	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarikannya cagar budaya	Persen	75,00	30	250.000.000	35	775.000.000	40	600.000.000	45	650.000.000	50	850.000.000	37,50	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
17	**urusan pemerintahan bidang perpustakaan**					**930.000.000**		**880.000.000**		**891.000.000**		**893.500.000**		**962.000.000**		
17.1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Persen	2,81	4,13	930.000.000	4,58	880.000.000	4,84	891.000.000	5,41	893.500.000	5,71	962.000.000	5,71	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	**urusan pemerintahan bidang kearsipan**					**715.000.000**		**775.000.000**		**775.000.000**		**775.000.000**		**824.959.696**		
18.1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggujawaban nasional	Persen	72,00	72,5	605.000.000	73,65	605.000.000	73,84	605.000.000	74,21	605.000.000	74,95	624.959.696	74,95	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.	Persen	0,00	36,67	110.000.000	38,83	170.000.000	40	170.000.000	41,67	170.000.000	43,33	200.000.000	43,33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
C	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**53.637.684.314**		**57.944.693.292**		**60.672.555.657**		**59.332.303.879**		**62.437.529.090**		
1	**urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan**					**5.018.000.000**		**4.798.000.000**		**5.880.000.000**		**4.701.000.000**		**4.338.000.000**		
1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produksi perikanan Tangkap	ton	591.244,00	603.069	2.070.000.000	615.130	2.025.000.000	627.433	2.660.000.000	639.982	1.875.000.000	652.782	1.675.000.000	652.782	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi perikanan Budidaya	ton	1.506,29	1.598,02	2.948.000.000	1.645,96	2.773.000.000	1.695,34	3.220.000.000	1.746,20	2.826.000.000	1.798,58	2.663.000.000	1.798,58	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	**urusan pemerintahan bidang pariwisata**					**11.563.890.388**		**11.848.483.378**		**12.905.800.000**		**13.265.370.000**		**14.519.907.000**		
2.1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kunjungan Wisata	persen	25,33	50	3.500.000.000	70	3.663.000.000	70	7.719.800.000	70	8.495.370.000	70	9.344.907.000	70,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	tingkat hunian akomodasi	persen	15,62	12	4.061.390.388	15	3.877.483.378	17	2.616.000.000	20	1.980.000.000	22	2.085.000.000	22,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode	Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN TARGET PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif	Produk	0,00	0	-	10	900.000.000	10	700.000.000	10	800.000.000	10	980.000.000	10,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Peserta pembekalan sektor pariwisata	persen	0,00	100	4.002.500.000	100	3.408.000.000	100	1.870.000.000	100	1.990.000.000	100	2.110.000.000	100,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	**urusan pemerintahan bidang pertanian**					**27.960.473.814**		**32.018.587.181**		**32.582.964.306**		**32.308.583.879**		**33.548.272.090**		
3.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Pertanian dan Peternakan	Ton	190.844,11	229.305,78	14.813.389.800	236.092,46	19.738.029.993	241.185,46	20.859.709.997	245.534,31	19.002.870.119	253.724,91	18.763.854.191	253.724,91	DINAS PERTANIAN
3.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Pertanian dan Peternakan	Ton	190.844,11	229.305,78	11.626.943.680	236.092,46	9.750.000.000	241.185,46	9.300.000.000	245.534,31	10.845.040.882	253.724,91	12.374.293.909	253.724,91	DINAS PERTANIAN
3.3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	persen Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	12,80	2,56	256.400.000	3,15	392.040.000	3,52	376.588.840	4,21	346.673.956	4,99	320.524.960	4,99	DINAS PERTANIAN
3.4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Serangan OPT	ha	470	760	263.740.334	1.010	938.517.188	1210	846.665.469	1410	763.998.922	1660	689.599.030	1660	DINAS PERTANIAN
3.5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persen	34,92	45,77	1.000.000.000	56,62	1.200.000.000	60,04	1.200.000.000	67,46	1.350.000.000	72,89	1.400.000.000	72,89	DINAS PERTANIAN
4	**urusan pemerintahan bidang perdagangan**					**4.227.050.000**		**4.259.216.382**		**4.790.231.000**		**4.405.500.000**		**5.140.100.000**		
4.1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	persen pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	31,43	31,99	105.000.000	32,68	80.516.382	33,38	84.542.000	34,08	120.000.000	34,77	120.000.000	34,77	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
4.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	persen Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	Persen	12,50	12,5	1.210.000.000	12,5	1.498.750.000	12,5	1.952.500.000	25	1.700.000.000	25	2.450.000.000	100	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
4.3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	persen Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persen	98,41	98,41	892.500.000	96,78	916.625.000	96,77	756.246.000	96,77	1.007.500.000	96,77	1.014.500.000	96,77	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
4.4	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	persen Alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	Persen	1,49	8,74	1.294.550.000	17,49	1.102.075.000	29,15	1.218.131.000	29,15	868.000.000	43,72	835.100.000	43,72	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
4.5	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat Regional danTingkat Nasional	Jenis	6	6	725.000.000	6	661.250.000	7	778.812.000	7	710.000.000	7	720.500.000	7	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
5	**urusan pemerintahan bidang perindustrian**					**4.868.270.112**		**5.020.406.351**		**4.513.560.351**		**4.651.850.000**		**4.891.250.000**		
5.1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri	Persen	6,61	6,71	3.561.770.112	6,85	3.887.358.000	7,06	3.350.000.000	7,19	3.370.600.000	7,27	3.600.000.000	7,27	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN

Kode		Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN TARGET PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	5.2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	persen Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	27,27	50	806.500.000	56	633.048.351	66,67	638.560.351	71,43	730.000.000	100	740.000.000	100	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	5.3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dokumen	2	2	500.000.000	2	500.000.000	2	525.000.000	2	551.250.000	2	551.250.000	12	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	D	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**21.342.869.655**		**21.845.175.269**		**22.434.043.056**		**22.795.073.487**		**23.196.073.487**		
	1	**SEKRETARIAT DAERAH**					**6.653.259.685**		**6.823.065.299**		**6.903.043.056**		**6.972.073.487**		**6.972.073.487**		
	1.1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesra	Persen	81,75	100	5.110.807.776	100	5.216.855.414	100	5.280.771.072	100	5.333.578.783	100	5.333.578.783	100,00	Sekretariat Daerah
	1.2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persen	0,73	100	1.542.451.909	100	1.606.209.885	100	1.622.271.984	100	1.638.494.704	100	1.638.494.704	100,00	Sekretariat Daerah
	2	**SEKRETARIAT DPRD**					**14.689.609.970**		**15.022.109.970**		**15.531.000.000**		**15.823.000.000**		**16.224.000.000**		
	2.1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persen	80,00	100	14.689.609.970	100	15.022.109.970	100	15.531.000.000	100	15.823.000.000	100	16.224.000.000	100,00	Sekretariat DPRD
	E	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					**279.603.450.997**		**283.906.100.339**		**285.433.227.887**		**285.943.807.887**		**288.147.588.071**		
	1	**PERENCANAAN**					**1.950.000.000**		**2.078.000.000**		**2.214.800.000**		**2.351.280.000**		**2.538.408.000**		
	1.1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	persen Dokumen atau Laporan	Persen	100,00	100	624.000.000	100	673.000.000	100	1.355.000.000	100	2.311.100.000	100	845.410.000	100	Bappeda
	1.2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100,00	100	1.430.000.000	100	1.498.000.000	100	1.603.800.000	100	1.718.180.000	100	1.841.998.000	100	Bappeda
	2	**KEUANGAN**					**274.902.094.215**		**278.170.800.000**		**280.300.900.000**		**280.625.000.000**		**282.770.000.000**		
	2.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Deviasi Realisasi Belanja terhadap total dalam APBD	persen	95,13	100	270.770.700.000	100	273.880.800.000	100	275.890.900.000	100	276.070.000.000	100	278.170.000.000	100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	2.2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Assets Management	persen	100,00	100	870.000.000	100	910.000.000	100	910.000.000	100	955.000.000	100	960.000.000	100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	2.3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	persen	108,48	110,58	3.261.394.215	112,68	3.380.000.000	114,78	3.500.000.000	116,88	3.600.000.000	118,98	3.640.000.000	118,98	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	3	**KEPEGAWAIAN**					**2.001.356.782**		**2.857.300.339**		**2.117.527.887**		**2.117.527.887**		**1.989.180.071**		
	3.1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks profesionalitas ASN	indeks	46,39	50,99	2.001.356.782	53,99	2.857.300.339	55,99	2.117.527.887	59,99	1.989.180.071	62,99	1.979.034.460	62,99	BKPSDM
	4	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		
	4.1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	persentase asn yang mengikuti pengembangan kompetensi	Persen	NA	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100,00	BKPSDM
	5	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					**650.000.000**		**700.000.000**		**700.000.000**		**750.000.000**		**750.000.000**		
	5.1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	NA	100	650.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100,00	BAPPEDA LITBANG
	F	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**					**2.555.026.233**		**2.297.262.089**		**2.338.612.806**		**2.383.046.450**		**2.597.520.630**		
	1	**INSPEKTORAT DAERAH**					**2.555.026.233**		**2.297.262.089**		**2.338.612.806**		**2.383.046.450**		**2.597.520.630**		
	1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan	persen	48,85	60	1.880.853.500	65	1.910.947.156	70	1.945.344.205	72	1.982.305.745	75	2.160.713.262	75,00	INSPEKTORAT

Kode			Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN TARGET PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		1.2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	rata rata hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah.	persen	CC	CC	674.172.733	B	684.959.497	B	697.288.768	B	710.537.254	B	774.485.607	B	INSPEKTORAT
		G	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**14.741.265.047**		**14.893.848.835**		**15.344.422.464**		**15.543.383.617**		**16.195.618.293**		
		1.	**KECAMATAN**					**14.741.265.047**		**14.893.848.835**		**15.344.422.464**		**15.543.383.617**		**16.195.618.293**		
		1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan**	Persen	100,00	100	2.542.908.386	100	2.628.017.131	100	2.750.456.585	100	2.743.490.969	100	2.900.447.672	100,00	seluruh kecamatan
		1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Persen	100,00	100	10.914.765.778	100	10.962.258.582	100	11.234.828.293	100	11.397.946.237	100	11.714.345.986	100,00	seluruh kecamatan
		1.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persen penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00	100	137.100.000	100	137.100.000	100	137.100.000	100	114.600.000	100	136.500.000	100,00	seluruh kecamatan
		1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	Persen	100,00	100	727.308.013	100	740.397.551	100	785.118.971	100	826.334.868	100	885.137.449	100,00	seluruh kecamatan
		1.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa	Persen	100,00	100	419.182.870	100	426.075.570	100	436.918.615	100	461.011.543	100	559.187.186	100,00	seluruh kecamatan
		H	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**					**2.987.184.340**		**3.087.184.340**		**3.260.184.340**		**3.307.684.340**		**3.667.184.340**		
8	01	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					2.987.184.340		3.087.184.340		3.260.184.340		3.307.684.340		3.667.184.340		
8	01	1.1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	5,82	24,25	917.184.340	36,37	807.184.340	48,50	817.184.340	60,62	997.184.340	72,75	1.057.184.340	72,75	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK/SOSIAL
								600.000.000		480.000.000		480.000.000		650.000.000		700.000.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
								275.000.000		300.000.000		320.000.000		330.000.000		410.000.000		DINSOS
8	01	1.2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rasio masyarakat yang mendapat pendidikan politik per 10.000 penduduk.	Persen	7,27	12,12	975.000.000	12,12	1.175.000.000	24,25	1.273.000.000	24,25	1.020.500.000	36,37	1.260.000.000	36,37	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pertambahan Ormas	Persen	20	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	320.000.000	20	320.000.000	20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	1.4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penurunan jumlah kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika	Persen	5	5	210.000.000	5	210.000.000	5	230.000.000	5	270.000.000	5	270.000.000	5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	1.5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	Persen	100	100	585.000.000	100	595.000.000	100	640.000.000	100	700.000.000	100	760.000.000	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		I	NON URUSAN					548.403.330.351		574.971.434.130		579.853.813.810		590.431.075.485		613.158.289.252		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100	548.403.330.351	100	574.971.434.130	100	579.853.813.810	100	590.431.075.485	100	613.158.289.252	100	SELURUH OPD
			TOTAL PAGU PROGRAM					1.157.037.346.692		1.181.672.315.100		1.185.948.177.853		1.199.324.851.908		1.265.041.462.562		

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penyusunan perencanaan pembangunan yang menjabarkan visi dan misi, kedalam tujuan dan sasaran harus disertai dengan indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yangditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcomes program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C).

8.1 Indikator Kinerja Utama

Keberhasilan penyelenggaran di pemerintahaan daerah secara luas dilihat dari pencapaian kinerja makro. Ukuran untuk menilai kinerja makro digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari:

1) Indeks Pembangunan Manusia.
2) Indeks Infrastrukur.
3) Indeks Reformasi Birokrasi
4) Kontribusi pertanian terhadap PDRB.
5) Indeks Kesehatan.
6) Pertumbuhan PDRB
7) Penanganan PMKS.
8) Indek Ketentraman dan Ketertiban Umum.

IKU ditetapkan berdasarkan kinerja pemerintah daerah pada masa lalu dengan mempertimbangkan dampak pademi Covid 19 terhadap perekonomian dan kondisi sosial daerah dimasa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkanlah Target Indikator Kinerja Utama di Kabupaten Toba dapat dilihat pada berikut.

Tabel 0-1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Toba

No	INDIKATOR	Satuan Indikator	TARGET TAHUN KE-				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Infrastruktur	indeks	0,6550	0,6760	0,7098	0,7135	0,7346
2	IPM	indeks	76,58	77,01	77.43	77.86	77,90
3	Indeks Reformasi Birokrasi	nilai	CC	B	B	BB	BB
4	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	persen	33,88	35,18	36,48	37.78	39.08
5	Indeks Kesehatan	indeks	0,45	0,47	0,5	0,55	0,6
6	Pertumbuhan PDRB	indeks	3,8	4,0	4,5	4,6	4,8
7	Penanganan PMKS	%	80,59	86,05	91,51	100,00	100,00
8	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	indeks	1,0	0,998	0,9983	0,9985	0,999

8.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Toba pada tiap bidang urusan merupakan gambaran kinerja pemerintah daerah. Pada tabel berikut adalah target dari setiap indikator kinerja daerah pada periode 2021-2026 yang ditetapkan berdasarkan kinerja masa lalu dan kondisi masa sekarang.

Tabel 0-2 Indikator Kinerja Makro

No	INDIKATOR	Satuan Indikator	TARGET TAHUN KE-				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	IPM	indeks	76,58	77,01	77.43	77.86	77,9
2	Angka Kemiskinan	%	8,57	8,50	8,43	8,36	8,29
3	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,4	2,35	2,3	2,25	2,25
4	Pertumbuhan PDRB	%	3,8	4	4,5	4,6	4,8
5	PDRB Perkapita	Rp. Juta	32132,40	33322,93	34513,45	35703,97	36894,50
6	Gini Ratio	Rasio	0,27	0,25	0,24	0,23	0,22

Tabel XIII.3
Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Toba

NO	Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada Akhir	
				Target	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Indeks Pembangunan Manusia	%	75,16	76,58	77,01	77.43	77.86	77,90	77,90	BPS
2	persentase Penduduk Miskin	%	8,71	8,57	8,50	8,43	8,36	8,29	8,29	BPS
3	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	1,84	**BPS**
4	Pertumbuhan PDRB	%	-0,27	3,80	4,00	4,50	4,60	4,80	4,80	BPS
5	PDRB Perkapita	Rp. Juta	29751,36	32132,40	33322,93	34513,45	35703,97	36894,50	36894,50	BPS
6	Indeks Gini	Rasio	0,29	0,27	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22	BPS
7	indeks pendidikan	Indeks	0,72	0,74	0,74	0,75	0,76	0,76	0,76	DINAS PENDIDIKAN
8	indeks ketahanan keluarga	Indeks	0,999	1,030	1,070	1,100	1,130	1,140	1,140	DATA DIOLAH
9	Indeks Reformasi Birokrasi	nilai	C/40,11	CC/50,20	B/60,10	B/60,30	BB/70,20	BB/70,40	BB/70,40	INSPEKTORAT
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	80	88	90	92	95	100	100	SETDAKAB
11	Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPAKD
12	Nilai SAKIP	Nilai	CC	B/60	B/60,40	B/60,80	BB/70,20	BB/70,40	BB/70,40	INSPEKTORAT
13	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	NILAI	31,28	33,88	35,18	36,48	37.78	39.08	39.08	BPS
14	Indeks Produksi Pertanian (IPP)	indeks	1,12	1,26	1,36	1,40	1,45	1,47	1,47	DATA DIOLAH
15	Ketersediaan pangan utama	persen	318,33	321,38	327,72	333,75	340,38	346,69	346,69	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
16	Indeks Kesehatan	indeks	0,44	0,45	0,47	0,50	0,55	0,60	0,60	DATA DIOLAH
17	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,08	70,24	70,38	70,53	70,67	70,72	70,82	DATA DIOLAH
19	Jumlah Kunjungan wisata	orang	217462,00	531810,00	688984,00	846158,00	1003332,00	1160506,00	1160506,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
20	Penanganan PMKS	Persen	69,67	80,59	86,05	91,51	100,00	100,00	100,00	DINAS SOSIAL
21	Laju penurunan Persentase PMKS	Angka	43,60	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	DINAS SOSIAL
II	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								**0,00**	
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp. / Bulan	1.235.958,00	1.355.434,00	1.415.172,00	1.474.910,00	1.534.648,00	1.235.958,00	1.235.958,00	BPS
2	Indeks Infrastruktur	Indeks	0,5893	0,6550	0,6760	0,7098	0,7135	0,7346	0,7346	DATA DIOLAH
3	Indeks sarana prasarana	Indeks	0,3379	0,3618	0,3771	0,4053	0,4033	0,4188	0,4188	DATA DIOLAH
4	Indeks perumahan pemukiman	Indeks	0,0966	0,1383	0,1440	0,1497	0,1554	0,1610	0,1610	DATA DIOLAH
5	Indeks konektivitas daerah	Indeks	0,1548	0,1548	0,1548	0,1548	0,1548	0,1548	0,1548	DATA DIOLAH
6	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	0,9974	0,9980	0,9980	0,9983	0,9985	0,9990	0,9990	DATA DIOLAH
7	persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	persen	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	SATPOL PP
III	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	urusan pemerintahan bidang pendidikan									

NO	Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada Akhir	
				Target	Target	Target	Target	Target		
1.1	Angka Partisipasi Murni	Persen	96,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
1.2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	52,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
1.3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	76,00	79,00	80,00	82,00	85,00	87,00	87,00	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
1.4	Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki AKREDITASI	Persen	67,87	70,00	72,12	76,38	82,76	91,21	91,21	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
1.5	Persentase sekolah yang menerapkan bahasa dan sastra daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
2	urusan pemerintahan bidang kesehatan									
2.2	Persentase Pelayanan Kesehatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KESEHATAN
2.3	persen SDM Kesehatan yang berkompetensi sesuai dengan standart.	Persen	77,90	78,10	78,49	79,58	78,87	79,76	79,76	DINAS KESEHATAN
2.4	persen data izin sarana pelayanan kefarmasian serta produk IRTP yang memenuhi syarat sesuai dengan standar	Persen	41,38	54,40	60,00	65,19	70,00	75,86	75,86	DINAS KESEHATAN
2.5	persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK	Persen	8,00	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	48,98	DINAS KESEHATAN
3	urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang									
3.1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	93,36	95,56	96,67	97,78	98,89	100,00	100,00	DINAS PU DAN TATA RUANG
3.2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Persen	73,68	75,76	76,59	77,43	78,29	79,22	79,22	DINAS PU DAN TATA RUANG
3.3	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	80,00	80,43	80,79	81,17	81,55	81,96	81,96	DINAS PU DAN TATA RUANG
3.4	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	20,00	20,09	20,13	20,17	20,21	20,25	20,25	DINAS PU DAN TATA RUANG
3.5	persentasi bangunan gedung pemerintah yang telah dibangun	Persen	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	60,00	DINAS PU DAN TATA RUANG
3.6	rasio Kepatuhan IMB	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PU DAN TATA RUANG
3.7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	42,37	50,36	53,58	56,79	60,01	63,23	63,23	DINAS PU DAN TATA RUANG
3.8	Rasio tenaga/operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikasi	Persen	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	DINAS PU DAN TATA RUANG
3.9	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PU DAN TATA RUANG
4	urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman									

NO	Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada Akhir	
				Target	Target	Target	Target	Target		
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana	Persen	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.2	persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	5,42	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.3	persentase Rumah Tidak layak huni	Persen	24,94	25,25	25,56	25,94	26,36	26,70	26,70	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.4	persentase rumah yang terfasilitasi PSU	Persen	60,00	60,21	60,42	60,63	60,84	61,05	61,05	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat									
5.1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Persen	85	86	88	90	93	95	95,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
5.2	Persentase penanggulangan bencana.	Persen	70	100	100	100	100	100	100,00	BPBD
5.3	Persentase Pelayanan penyelematan dan evakuasi korban kebakaran.	Persen	100	100	100	100	100	100	100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	urusan pemerintahan bidang sosial									
1.1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS SOSIAL
1.2	Persentase panyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	Persen	19,85	19,85	24,76	32,92	49,07	96,34	96,34	DINAS SOSIAL
1.3	persen PMKS yang tertangani	Persen	12,60	14,50	23,48	31,23	45,56	84,68	84,68	DINAS SOSIAL
1.4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah.	Persen	76,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS SOSIAL
1.5	persen taman makam pahlawan yang terpelihara	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS SOSIAL
2	urusan pemerintahan bidang tenaga kerja									
2.1	persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persen	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
2.2	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi.	Persen	0,35	1,38	2,42	3,45	4,49	5,53	5,53	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

NO	Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada Akhir	
				Target	Target	Target	Target	Target		
2.3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	Persen	50,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
2.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	Persen	18,00	24,00	30,00	35,00	41,00	47,00	47,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
3	urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak									
3.1	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	60,00	70,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00	Dinas PMDP dan PA
3.2	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas PMDP dan PA
3.4	persen ketersediaan data gender dan anak	Persen	4,55	15,91	27,27	38,64	52,27	100,00	100,00	Dinas PMDP dan PA
3.5	Persentase Kelurahan / Desa layak anak	Persen	4,10	19,67	20,49	21,31	22,54	23,77	23,77	Dinas PMDP dan PA
3.6	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas PMDP dan PA
4	urusan pemerintahan bidang pangan									
4.1	persen sarpras Lumbung Pangan dalam kondisi baik	Persen	36,17	39,60	44,68	48,93	53,19	57,44	57,44	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
4.2	Penguatan Cadangan Pangan	Persen	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
4.3	persen Desa Rawan Pangan yang tertangani	Persen	23,10	38,46	53,84	69,23	84,61	100,00	100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
4.4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	0,00	55,7	60	65,7	75,7	85,7	85,70	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
5	urusan pemerintahan bidang pertanahan									
5.1	Penanganan sengketa garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	NA	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	DINAS PU DAN TATA RUANG
5.2	persen luas tanah yang diganti rugi	Persen	NA	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	DINAS PU DAN TATA RUANG
5.3	Tersedianya tanah Objek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimun dan tanah absente	Persen	NA	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	DINAS PU DAN TATA RUANG
5.4	persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.	Persen	NA	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	DINAS PU DAN TATA RUANG
5.5	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PU DAN TATA RUANG
6	urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup									

NO	Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada Akhir	
				Target	Target	Target	Target	Target		
6.1	Tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup	dokumen	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	3,00	9,00	Dinas Lingkungan Hidup
6.2	Koefisien kualitas air dan udara	nilai	64,05	64,14	64,24	64,33	64,33	64,33	64,33	Dinas Lingkungan Hidup
6.3	Indeks kualitas tutupan lahan	Nilai	61.10	62.42	63.75	65.08	65.08	65.08	65.08	Dinas Lingkungan Hidup
6.4	Persentase pengendalian limbah B3	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
6.5	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persen	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
6.6	Penetapan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di kabupaten/kota	MHA	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	Dinas Lingkungan Hidup
6.7	Jumlah SDM lingkungan hidup	orang	180,00	200,00	50,00	70,00	100,00	100,00	520,00	Dinas Lingkungan Hidup
6.8	Tersedianya pemberian penghargaan lingkungan hidup	orang/lembaga	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	2,00	8,00	Dinas Lingkungan Hidup
6.9	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persen	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
6.10	Terlaksananya penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Persen	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	79,00	Dinas Lingkungan Hidup
7	urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil									
7.1	Persentase kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7.2	Kepemilikan akte kelahiran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7.3	Perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7.4	ketersediaan database Kepedudukan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8	urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa									
8.1	persen Desa Berkembang	Persen	7,36	14,72	22,08	29,44	36,80	44,16	44,16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada Akhir	
				Target	Target	Target	Target	Target		
8.2	Persentase peningkatan Kerjasama Desa	Persen	5,63	6,49	7,36	8,23	9,09	9,96	9,96	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8.3	persen desa tertib administrasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8.4	Persentase pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan MHA	Persen	85,16	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
9	urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana									
9.2	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15- 49 Tahun.	Rata-rata Anak per Wanita	3,61	3,59	3,58	3,57	3,56	3,55	3,55	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**
9.3	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmeet need)	Persen	12,30	12,10	11,90	11,80	11,70	11,70	11,70	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**
9.4	Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	29,67	29,10	29,05	29,00	28,95	28,90	28,90	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**
10	urusan pemerintahan bidang perhubungan									
10.1	Indeks Konektivitas Jalan Kabupaten / kota	indeks	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	Dinas Perhubungan
10.2	Indeks Konektivitas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	indeks	11/16	11/16	11/16	11/16	11/16	11/16	11/16	Dinas Perhubungan
11	urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika									
11.1	persen Masyarakat yang menjadi sasaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten	persen	67,60	70,11	70,16	70,20	70,25	70,30	70,30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11.2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	60,00	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
12	urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah									

NO	Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada Akhir	
				Target	Target	Target	Target	Target		
12.1	persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	Persen	12,56	12,56	12,56	12,56	12,56	12,56	12,56	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
12.2	persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
12.3	persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	Persen	6,73	8,97	8,97	11,21	13,45	13,45	35,87	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
12.4	persentase Koperasi Yang Berkualitas	Persen	4,48	5,61	5,61	6,73	6,73	6,73	15,97	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
12.5	persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	6,98	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	15,97	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
12.6	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	Persen	5,10	5,87	6,12	6,38	6,63	6,63	6,63	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
13	urusan pemerintahan bidang penanaman modal									
13.1	persentase peningkatan investasi	persen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
13.2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	282,00	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

NO	Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada Akhir	
				Target	Target	Target	Target	Target		
13.3	persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP	persen	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
13.4	Jumlah Badan Usaha yg dikendalikan	Badan Usaha	0,00	16,00	20,00	25,00	30,00	35,00	35,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
13.5	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	aplikasi	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
14	urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga									
14.1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	10,75	12,75	14,75	16,75	18,75	20,75	20,75	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
14.2	Cakupan pembinaan atlet muda	persen	46,70	56,60	70,75	80,19	84,91	94,34	94,34	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
14.3	persentase organisasi pramuka yang aktif	persen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
15	urusan pemerintahan bidang statistik									
15.1	persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
16	urusan pemerintahan bidang persandian									
16.1	Tingkat Keamanan informasi pemerintahan	Persen	60,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17	urusan pemerintahan bidang kebudayaan									
17.1	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Persen	19,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
17.2	Terlestarikannya cagar budaya	Persen	75,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
18	urusan pemerintahan bidang perpustakaan									
18.1	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Persen	2,81	4,13	4,58	4,84	5,41	5,71	5,71	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19	urusan pemerintahan bidang kearsipan									

NO	Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada Akhir	
				Target	Target	Target	Target	Target		
19.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggujawaban nasional	Persen	72,00	72,50	73,65	73,84	74,21	74,95	74,95	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19.2	Tingkat keberadaan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.	Persen	0,00	36,67	38,83	40,00	41,67	43,33	43,33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
1	urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan									
1.1	Jumlah Total Produksi perikanan Tangkap	ton	591244,00	603069,00	615130,00	627433,00	639982,00	652782,00	652782,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
1.2	Jumlah Total Produksi perikanan Budidaya	ton	1506,29	1598,02	1645,96	1695,34	1746,20	1798,58	1798,58	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	urusan pemerintahan bidang pariwisata									
2.1	Kunjungan Wisata	persen	25,33	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.2	tingkat hunian akomodasi	persen	15,62	12,00	15,00	17,00	20,00	22,00	22,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.3	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif	Produk	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.4	Persentase SDM Peserta pembekalan sektor pariwisata	persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	urusan pemerintahan bidang pertanian									
3.1	Produksi Pertanian dan Peternakan	Ton	190844,11	229305,78	236092,46	241185,46	245534,31	253724,91	253724,91	DINAS PERTANIAN
3.2	Produksi Pertanian dan Peternakan	Ton	190844,11	229305,78	236092,46	241185,46	245534,31	253724,91	253724,91	DINAS PERTANIAN
3.3	persen Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	12,80	2,56	3,15	3,52	4,21	4,99	4,99	DINAS PERTANIAN
3.4	Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Serangan OPT	ha	470,00	760,00	1010,00	1210,00	1410,00	1660,00	1660,00	DINAS PERTANIAN
3.5	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persen	34,92	45,77	56,62	60,04	67,46	72,89	72,89	DINAS PERTANIAN
4	urusan pemerintahan bidang perdagangan									
4.1	persen pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	31,43	31,99	32,68	33,38	34,08	34,77	34,77	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
4.2	persen Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	Persen	12,50	12,50	12,50	12,50	25,00	25,00	100,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN

NO	Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada Akhir	
				Target	Target	Target	Target	Target		
4.3	persen Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persen	98,41	98,41	96,78	96,77	96,77	96,77	96,77	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
4.4	persen Alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	Persen	1,49	8,74	17,49	29,15	29,15	43,72	43,72	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
4.5	Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat Regional danTingkat Nasional	Jenis	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
5	urusan pemerintahan bidang perindustrian									
5.1	Pertumbuhan Industri	Persen	**6,61**	**6,71**	**6,85**	**7,06**	**7,19**	**7,27**	**7,27**	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
5.2	persen Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	**27,27**	**50,00**	**56,00**	**66,67**	**71,43**	**100,00**	**100,00**	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
5.3	tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dokumen	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**12,00**	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
D	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
1	SEKRETARIAT DAERAH									
1.1	Persentase rumusan kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesra	Persen	81,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
1.2	Persentase rumusan kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persen	0,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
2	SEKRETARIAT DPRD									
2.1	Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	%	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat DPRD
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
1	PERENCANAAN									
1.1	persen Dokumen atau Laporan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda
1.2	persen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda
2	KEUANGAN									

NO	Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada Akhir	
				Target	Target	Target	Target	Target		
2.1	Deviasi Realisasi Belanja terhadap total dalam APBD	persen	95,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.1	Assets Management	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.3	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	persen	108,48	110,58	112,68	114,78	116,88	118,98	118,98	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
3	KEPEGAWAIAN									
3.1	Indeks profesionalitas ASN	indeks	46,39	50,99	53,99	55,99	59,99	62,99	62,99	BKPSDM
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
4.1	persentase asn yang mengikuti pengembangan kompetensi	Persen	NA	100	100	100	100	100	100,00	BKPSDM
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
1	INSPEKTORAT DAERAH									
1.1	Persentase tindak lanjut temuan	persen	48,85	60,00	65,00	70,00	72,00	75,00	75,00	INSPEKTORAT
1.2	rata rata hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah.	persen	CC	CC	B	B	B	B	B	INSPEKTORAT
G	UNSUR KEWILAYAHAN									
1	KECAMATAN									
1.1	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	seluruh kecamatan
1.2	Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	seluruh kecamatan
1.3	persen penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	seluruh kecamatan
1.4	persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	seluruh kecamatan
1.5	persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	seluruh kecamatan
H	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1.1	Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	5,82	24,25	36,37	48,50	60,62	72,75	72,75	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK/SOSIAL
1.2	Rasio masyarakat yang mendapat pendidikan politik per 10.000 penduduk.	Persen	7,27	12,12	12,12	24,25	24,25	36,37	36,37	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.3	Persentase Pertambahan Ormas	Persen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.4	Persentase Penurunan jumlah kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika	Persen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada Akhir	
				Target	Target	Target	Target	Target		
1.5	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
I	**NON URUSAN**									
1.1	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	SELURUH OPD

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen yang menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dicapai selama Tahun 2021-2026. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Toba.

9.1 Pedoman Transisi

Sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD ini berakhir, maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum, serta prioritas program APBD masa transisi, yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.
2. RPJMD sebagai pedoman, sebagaimana dimaksud pada butir (1) antara lain bertujuan: menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD, dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
3. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

9.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan bermakna sebagai aturan atau pedoman dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Toba.

2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Toba dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kabupaten Toba;
3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Perangkat Daerah, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Derah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
5. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toba Tahun 2022-2026;
6. Penyusunan RKPD Kabupaten Toba harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD, dan Musrenbang Kabupaten;
7. RKPD Kabupaten Toba harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja PD (Renja-PD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
8. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Toba merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
9. Renja-PD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA-PD);
10. Dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, setiap Perangkat Daerah perlu mengupayakan pengaturan peran stakeholders dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba, instansi terkait maupun masyarakat luas;
11. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD;
b. Kepala Bappeda Kabupaten Toba menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan PD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
c. Kepala PD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan PD periode sebelumnya;
d. Kepala Bappeda Kabupaten Toba menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

(1) Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMD, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya;

(2) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Toba dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Toba untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi, misi dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 ini menjadi tanggungjawab bersama diantara Pemerintah, Stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Toba.

BUPATI TOBA

Dto

POLTAK SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN TOBA,

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
PEMBINA
19750804 200502 1 002